



UNIVERSITAS INDONESIA

**REFLEKSIVITAS IMPLIKATUR PERCAKAPAN
DALAM TAYANG BINCANG POLITIK
DI TELEVISI INDONESIA
PADA MASA SEPULUH BULAN
MENJELANG KAMPANYE RESMI PEMILU 2009**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Humaniora

**NATAL P. SITANGGANG
NPM. 0606013090**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU LINGUISTIK
DEPOK
JULI 2009**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Natal P. Sitanggang
NPM. : 0606013090
Tanda Tangan :



Tanggal : 21 Juli 2009

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh

Nama : Natal P. Sitanggang
NPM : 0606013090
Program Studi : Ilmu Linguistik
Judul Tesis : REFLEKSIVITAS IMPLIKATUR PERCAKAPAN
DALAM TAYANG BINCANG POLITIK DI
TELEVISI INDONESIA PADA MASA SEPULUH
BULAN MENJELANG KAMPANYE RESMI
PEMILU 2009

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. F.X. Rahyono



Penguji : Prof. Dr. Muhajir



Penguji : Dr. Untung Yuwono



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2009

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia




Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 131882265

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat dan kemuliaan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. DIA yang telah menganugerahkan kasih-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat pencapaian gelar Magister Humaniora Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Saya sungguh menyadari bahwa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu saya dalam perkuliahan dan hingga penyelesaian tesis ini. Sehubungan dengan itu, saya dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak itu, dan secara khusus kepada pihak-pihak berikut.

- (1) Dosen pembimbing, Dr. F.X. Rahyono; yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan, baik teoretis maupun teknis dalam tesis ini.
- (2) Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Dr. Dendy Sugono; dan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Yon Adlis, M.Pd.; yang telah mengizinkan dan memberi dukungan material selama perkuliahan.
- (3) Kedua orang tua saya, Biher Sitanggang dan Tiomada Boru Sinaga, serta saudara-saudaraku tercinta; yang telah memberi motivasi dan dukungan, baik secara moral, maupun material.
- (4) Para sahabat dan kerabat yang turut mendukung dan memotivasi saya dalam perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
- (5) Pihak stasiun televisi yang sejumlah acara tayang bincangnya direkam untuk dijadikan data dalam penelitian ini.

Kiranya, kasih karunia dari Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, dan kerabat atas segala peran sertanya sehingga studi saya dapat saya selesaikan. Semoga pula tesis ini memberi manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Depok, 21 Juli 2009

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natal P. Sitanggang
NPM : 0606013090
Program Studi : Ilmu Linguistik
Departemen :
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**REFLEKSIVITAS IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM TAYANG
BINCANG POLITIK DI TELEVISI INDONESIA PADA MASA SEPULUH
BULAN MENJELANG KAMPANYE RESMI PEMILU 2009**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 21 Juli 2009
Yang menyatakan



(Natal P. Sitanggang)

ABSTRAK

Nama : Natal P. Sitanggang
Program Studi : Linguistik
Judul : Refleksivitas Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik di Televisi Indonesia pada Masa Sepuluh Bulan Menjelang Kampanye Resmi Pemilu 2009

Tesis ini berfokus pada analisis aspek makna refleksif secara pragmatik dalam implikatur percakapan. Sumber data dan sekaligus penanda ranah bahasa untuk penelitiannya adalah percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia. Dengan memanfaatkan ancangan penelitian kualitatif, ditemukan sejumlah perangkat (*reflektor*) beserta bentuk performatif pengiring yang menjadi petunjuk utama keberadaan refleksivitas implikatur dalam percakapan itu. Dengan memanfaatkan teknik interpretasi, teridentifikasi bahwa penutur mengomunikasikan maksud dan tujuan politiknya dengan strategi melanggar dan juga mematuhi sejumlah maksim Prinsip Kerja sama. Sebagai bentuk tindak, reflektor pada dasarnya mengimplikasikan sejumlah fungsi dan nilai. Dari temuan-temuan itu, terlihat adanya suatu konstruksi makna yang refleksif. Secara kontekstual, pengubahan bagian-bagian tertentu pada konstruksi itu akan memperlihatkan ketidakkohherenan konstruksi tersebut. Pendukung konteks dan kekohherenan konstruksi itulah yang menandakan bahwa penutur membuat ujarannya benar-benar untuk tujuan refleksivitas komunikasi politiknya. Hasil penelitian ini dapat menjadi data kebahasaan sinkronis, dalam keperluan perbandingan untuk penelitian topik terkait berikutnya.

Kata Kunci: *refleksif, reflektor, refleksivitas, implikatur, fungsi, nilai, konstruksi, koheren, inferensi*

ABSTRACT

Name : Natal P. Sitanggang
Study Program : Ilmu Linguistik
Title : Reflexivity of Conversational Implicature in Political Talk Show at Indonesian Television for Ten Months towards the Legal Campaign of General Election in 2009

The thesis focuses on analyzing reflexive meaning in conversational implicature from pragmatic perspective. Data source and the linguistic register are the conversation in the political talk show in Indonesian televisions. Applying qualitative approach this research shows that some reflectors and some accompanying performative form are the marker of implicature reflexivity. Employing interpretation technique, it is identified that the speaker communicates his political message and goal by violating and obeying strategy to some maxims of co-operative principle. Reflector basically implicates some functions and values. These findings show that there is a reflective meaning construction. Contextually, the change on some parts of the construction leads to an incoherent condition. Context and coherence in the construction imply that the speaker make his utterance for the intension of his political communication reflexivity. The finding of this research serves as the synchronic linguistic data for further research on the topic.

Key words : *reflexive, reflector, reflexivity, implicature, function, value, construction, coherence, inference*



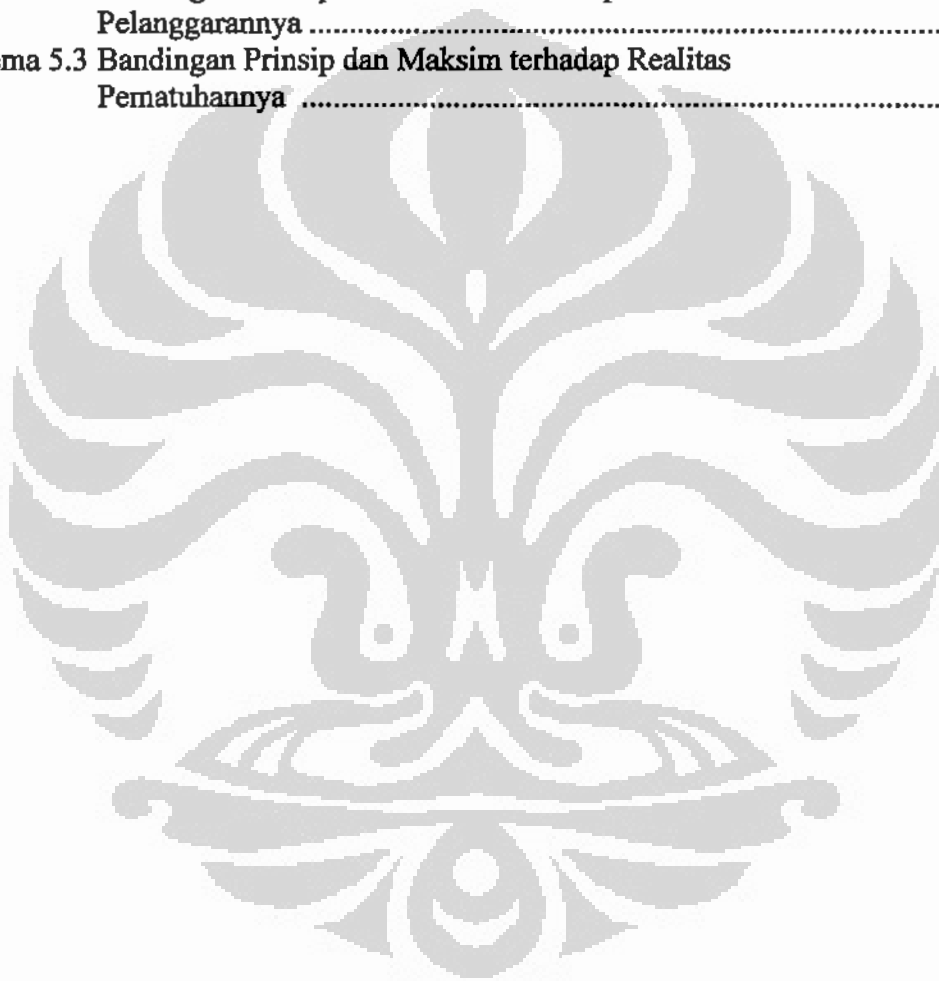
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SKEMA	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Topik Penelitian dan Rumusan Masalah	6
1.3 Cakupan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Kemaknawian Studi	12
1.7 Glosarium	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.1.1 Nosi Implikatur dan Konsep Refleksivitas	15
2.1.2 Sanggahan dan Lahirnya Teori Bandingan terhadap Teori Grice	18
2.1.3 Teori Tindak Tutur	25
2.1.4 Kesimpulan	31
2.2 Landasan Teoretis	32
2.2.1 Prinsip Kerja Sama (PKS)	32
2.2.2 Teori Relevansi (TR)	35
2.2.3 Titik Pertemuan Teori Grice dan Sperber dan Wilson	37
2.2.4 Teori Retorik Interpersonal	38
2.2.5 Praanggapan dan Perikutan	40
2.2.6 Dikotomi Eksplikatur dengan Implikatur	41
2.2.7 Fungsi dan Nilai Implikatur sebagai Tindak Tutur	42
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Ancangan Penelitian	44
3.2 Sumber Data	45
3.3 Penjaringan dan Pengidentifikasian Data	46
3.4 Analisis Data	48

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN	
4.0	Pengantar 51
4.1	Postulasi Konteks 52
4.1.1	Praanggapan sebagai Konteks Wacana 54
4.1.2	Konteks Pengarah 56
4.2	Konstruksi Refleksivitas Implikatur Percakapan dan Penguatannya 61
4.2.1	Reflektor dan Performatif Pengiring 62
4.2.1.1	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mendesak' 63
4.2.1.2	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Menilai' 81
4.2.1.3	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mempermasalahkan' 94
4.2.1.4	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mempertanyakan' 103
4.2.1.5	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mengargumentasikan' 110
4.2.1.6	Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mengatasnamakan' 117
4.3	Fungsi dan Nilai Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik 122
4.3.1	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mendesak' 123
4.3.2	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Menilai' 129
4.3.3	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mempermasalahkan' 136
4.3.4	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mempertanyakan' 140
4.3.5	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mengargumentasikan' 144
4.3.6	Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mengatasnamakan' 148
BAB 5 SIMPULAN 152	
DAFTAR REFERENSI	

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Kerangka Konseptual	12
Skema 2.1 Titik Pertemuan Pemikiran Grice, Sperber dan Wilson, dan Teori Kebudayaan	37
Skema 3.1 Kode Data	47
Skema 3.2 Penyuntingan Data	47
Skema 3.3 Format Data yang Disajikan dalam Analisis.....	48
Skema 5.1 Konstruksi Refleksivitas Implikatur Percakapan	153
Skema 5.2 Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pelanggarannya	154
Skema 5.3 Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pematuhannya	155



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Fungsi Ujaran Menurut Klasifikasi Austin (1962).....	26
Tabel 2.2	Persamaan Grice dengan Sperber dan Wilson	37
Tabel 2.3	Nilai Implikatur dalam PSS	39
Tabel 4.1	Kategori Pemungkinan Implikatur atas Respons Penutur	57
Tabel 4.2	Skala Keinformatifan Makna dalam Satuan Gramatikal respons penutur	58
Tabel 4.3	Konstruksi Perbandingan Pengujaran Asli dengan Pengujaran Andaian	59
Tabel 4.4	Reflektor dan Performatif Pengiring	62
Tabel 4.5	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mendesakkan Perubahan.....	128
Tabel 4.6	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Menilai Keadaan- Sekarang (Negatif)	136
Tabel 4.7	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Menilai Keadaan- Sekarang (Positif)	136
Tabel 4.8	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mempermasalahkan Keterlibatan Pihak Asing	140
Tabel 4.9	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mempertanyakan Keutuhan Negara dan Bangsa	143
Tabel 4.10	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mengargumentasikan Ide Pendiri Bangsa	147
Tabel 4.11	Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mengatasnamakan MAP	150
Tabel 5.1	Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pelanggarannya	155
Tabel 5.2	Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pematuhannya	155

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 JADWAL PENELITIAN
LAMPIRAN 2 REKAPITULASI DATA TAYANG BINCANG POLITIK
YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI
LAMPIRAN 3-A KA071101
LAMPIRAN 3-B TDD080101
LAMPIRAN 3-C TDD080102
LAMPIRAN 3-D JBB080111/BBM080904
LAMPIRAN 3-E KA080208
LAMPIRAN 3-F KA080215
LAMPIRAN 3-G AKIM080611
LAMPIRAN 3-H TDD080701
LAMPIRAN 3-I TDD080708
LAMPIRAN 3-J AKIM080814



DAFTAR NOTASI

n	:	variabel nilai
p	:	variabel partai yang tidak perlu disebutkan namanya
p	:	proposisi ujaran penutur
n	:	variabel nomor data sampai batas takterhingga
q	:	inferensi internal
r	:	inferensi eksternal
x, y, z	:	variabel benda (abstrak atau konkret), tempat, daerah, jabatan, tujuan dan sebagainya yang tidak perlu disebutkan nama atau kedetailannya
A	:	pengarah percakapan (pembawa acara sekaligus menjadi petutur langsung)
B	:	penutur pertama secara politik
C	:	penutur kedua secara politik
M	:	petutur taklangsung (khalayak atau masyarakat)
U	:	ujaran
X, Y	:	variabel nama orang yang tidak perlu disebutkan namanya.
(i)	:	inferensi
3	:	pihak ketiga (kompetitor lain terhadap B)
\sim	:	negasi dalam notasi logika
$+>$:	implikatur, mengimplikasikan
$?$:	lemah secara pragmatik
$??$:	sangat lemah dan kurang berterima secara pragmatik
$*$:	anomali
\uparrow	:	maksimal
\downarrow	:	minimal
$[...]$:	bagian tuturan yang dilesapkan, (tetapi tidak mengubah makna kontekstual yang asli)
\dots	:	rumpang yang disengaja penutur. Namun, dalam bagian tertentu merupakan pelesapan bagian lain yang dianggap tidak perlu.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percakapan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia. Dalam interaksi itu bahasa digunakan sebagai media utamanya. Seseorang (yang selanjutnya disebut sebagai penutur) dalam interaksinya kerap menyampaikan sesuatu maksud atau pesannya dengan cara yang tidak langsung atau tersirat (implisit). Walaupun demikian, pendengar atau lawan tuturnya (selanjutnya disebut sebagai petutur) cenderung dapat menerima dan memahami maksud atau pesan penutur. Dalam studi bahasa, terutama pragmatik, sesuatu yang menjadi maksud atau pesan yang tersirat itu, diistilahkan dengan *implikatur*. Davis (2005) mendefinisikan implikatur sebagai sesuatu maksud yang tersirat, tetapi maksud yang tersirat itu tidak sama dengan apa yang diujarkan dalam unit-unit gramatikal.

Sehubungan dengan hal di atas, implikatur menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan oleh petutur dalam memahami suatu ujaran. Pentingnya perhatian terhadap hal tersebut adalah karena implikatur merupakan pokok pesan penutur atas sesuatu yang telah diujarkan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa implikatur menjadi makna yang absolut, wajib, atau tunggal atas bentuk-bentuk yang diujarkan dalam unit-unit gramatikal. Lebih daripada itu, implikatur dapat mengarah pada berbagai kemungkinan pengertian; bergantung pada situasi dan kondisi saat pengujaran. Situasi dan kondisi itu disebut *konteks*¹ (lihat Levinson 1983: 23; band. Cruse 1991: 1—2). Perihal pemaknaan yang demikian, Levinson (*ibid*: 104) menegaskan, “...*implicatures are not semantic inferences, but rather inferences based on both content of what has been said and some specific assumptions about co-operative nature of ordinary verbal interaction,*” (implikatur bukanlah penginferensian secara semantik, melainkan penginferensian yang didasarkan atas pesan dari sesuatu yang diujarkan dan didukung oleh asumsi-asumsi tertentu terkait dengan hal yang sudah dipahami bersama dalam kebiasaan berinteraksi secara verbal).

¹ secara lebih detail akan dijelaskan pada 4.1

Lebih jauh, sebuah ujaran dimungkinkan untuk ditafsirkan menjadi sejumlah implikatur. Implikatur-implikatur itu dapat diklasifikasikan ke dalam kategori aspek. Apabila sebuah implikatur, misalnya, ditafsirkan sebagai sebuah maksud yang bertujuan untuk mengakomodasi atau menguntungkan penutur, implikatur itu dapat dikategorikan dalam aspek refleksif (lihat Leech 1983: 35—40; Levinson 2000: 12—13). Berbeda dari itu, apabila implikatur itu ditafsirkan sebagai suatu maksud yang mengakomodasi atau menguntungkan orang lain, implikatur itu dapat dikategorikan sebagai aspek benefaktif². Akan tetapi, aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah aspek refleksif. Potensi implikatur untuk menunjukkan adanya aspek refleksif itu selanjutnya disebut sebagai **refleksivitas implikatur**.

Ranah bahasa yang menjadi objek penelitian ini adalah ranah politik. Refleksivitas menjadi salah satu aspek penting dalam pengujaran penutur (penutur politik) untuk mencapai tujuannya, misalnya, memperkenalkan diri, menawarkan sesuatu kebijakan, atau menilai kebijakan politik pihak lain. Dalam pada itu, penutur berharap agar khalayak atau masyarakat sebagai petutur taklangsung (selanjutnya dalam penelitian ini dilambangkan dengan M) mendapat kesan bahwa penutur adalah seseorang yang memiliki kecakapan, kepantasan, kepedulian terhadap kepentingan M, dan lain-lain. Dengan kesan itu, penutur mengharapkan M untuk mempertimbangkan pesan politik yang dikomunikasikan ke arah yang diinginkan penutur.

Terkait dengan kebutuhan politik, implikatur dalam percakapan dapat dilihat dari dua sisi kepentingan: (i) dari sisi penutur (politikus) dan (ii) dari sisi petutur (M). Bagi penutur, implikatur menjadi salah satu bentuk strategi penyampaian maksud. Kearn (2000: 255) menyebutkan bahwa implikatur merupakan taktik komunikasi yang disengaja penutur. Penutur dianggap sengaja memilih strategi atau taktik yang tidak langsung ini agar petutur memperoleh kesan tertentu terutama dengan kesan yang dimisalkan di atas. Terlepas dari pesan dan kesan politis tersebut, secara umum strategi atau taktik komunikasi melalui implikatur

² Pengkategorian *benefaktif* diacu dari pengertian dalam KBBI dan pengoposisiannya dengan konsep *reflektif* yang dikemukakan oleh Grice (diacu Levinson 2000) dan Leech (1983) untuk kepentingan kajian pragmatik. Namun, istilah itu dapat juga dianalogikan dengan konsep *beneficiary* dalam kajian semantik (lihat Saeed 2003:150). Oleh karena itu, aspek *benefaktif* dalam implikatur tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian tersendiri.

adakalanya dipandang lebih efektif daripada pengujaran sesuatu yang dimaksudkan itu secara langsung. Bukti keefektifannya ialah bahwa maksud dan pesan itu cenderung dapat ditangkap, dipahami, bahkan direspons penutur. Sebagai contoh dapat dicermati dalam bentuk cuplikan percakapan (1)³ di bawah ini.

- (1) A : *Cold in here, isn't it?* 'Di sini dingin, ya?'
 B : (tidak mengujarkan sesuatu, tetapi bergegas menyalakan alat pemanas)

Dalam contoh (1) di atas B merespons ujaran A bukan dengan ujaran, melainkan dengan tindakan (menyalakan alat pemanas). Secara gramatikal, ujaran A dan tindakan B tidak menunjukkan keterkaitan atau hubungan yang logis. Hal ini menandakan bahwa terdapat rumpang informasi antara sesuatu yang diujarkan dan sesuatu yang direspons. Berdasarkan kesesuaian ujaran antarpartisipannya, B seyogianya menjawab pertanyaan A "Ya." atau "Tidak" atau A membuat permintaan dengan ujaran, "Tolong nyalakan pemanas itu!" Akan tetapi, tidak demikian halnya.

Ada sejumlah faktor yang membuat ujaran A dan tindakan B menjadi berterima. Pertama, penutur dan petutur sudah dilatari oleh pengetahuan bersama atas suatu keadaan yang memotivasi B untuk mengujarkan ujarannya. Hal itulah yang membuat petutur dengan mudah dapat menginferensi maksud lain penutur di alam pikiran petutur. Dari pemrosesan itu B kemudian menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pertanyaan itu sesungguhnya adalah permintaan. Jenis kesimpulan inilah yang disebut sebagai **implikatur**.

Kedua adalah konteks. Dalam hal itu, A mungkin sudah terlihat oleh B dalam kedinginan, atau mungkin pula dalam kehidupan sehari-hari mereka terbiasa menggunakan alat pemanas, atau secara konvensional ujaran seperti itu lazim diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk tindak 'meminta'. Namun, tidak tertutup pula kemungkinan, bahwa A dapat mempunyai maksud yang lain di luar dari penyalakan pemanas, misalnya, meminta B untuk membuat minuman penghangat; atau 'memancing' B untuk berbicara. Ketiga, A tidak mempersalahkan B atas responsnya dengan menyalakan alat pemanas itu.

Terlepas dari akurat atau tidaknya respons B, tindak tutur yang dilakukan A telah mengandung suatu maksud agar petuturnya melakukan sesuatu yang

³ diadopsi dari contoh Leech (1983: 39)

refleksif. Cara pencapaian penutur di atas seturut dengan teori tindak tutur Austin dalam *How To Do Things With Words* (1962) yang menyebutkan bahwa ketika seseorang mengujarkan sesuatu, ia sekaligus melakukan sesuatu tindakan (dalam Levinson 1983: 228). Pada contoh (1) di atas A bertanya sekaligus meminta. Ujaran seperti itu disebut sebagai ujaran **performatif**.

Berdasarkan sisi kepentingan penutur, implikatur merupakan suatu fungsi yang menandakan sikap penutur terhadap suatu keadaan. Fungsi itu dapat dicermati pula dalam contoh (1) di atas. Dalam hal itu, ujaran A tampak sebagai sebuah pertanyaan. Akan tetapi, pertanyaan A tersebut sebenarnya merupakan sebuah fungsi permintaan kepada B untuk menyalakan alat pemanas.

Contoh lain adalah dalam ranah politik. Ketika seorang penutur politik mengujarkan sesuatu yang terkait, misalnya, dengan tema perubahan, pengujaran itu dapat ditandai sebagai fungsi untuk ‘mendesak’, ‘menawarkan’, ‘menilai’, dan lain-lain. Secara umum, fungsi-fungsi seperti itu termasuk dalam fungsi ilokusi yang dikemukakan oleh Austin (lihat Levinson 1983: 236), dan lima makrofungsi yang dicetuskan oleh Searle (1979 [1975a] dikutip Leech 1983: 105—6), serta delapan taksonomi tindak ilokusi yang dipaparkan oleh Fraser (dalam Cole and Morgan 1975: 189—93). Selain sebagai fungsi, ujaran itu juga mengandung nilai. Terminologi “nilai” di sini dapat diartikan sebagai ‘kesan positif’ atau ‘kesan negatif’ yang diterima penutur, baik menyangkut diri penutur, maupun pihak lain (misalnya, nilai “keuntungan” bagi penutur, atau nilai “kecaman” bagi pihak lain). Persoalan bahwa sikap dan “nilai” itu disadari atau tidak disadari oleh penutur tentu bukan bagian dari penelitian ini.

Selain sebagai rumpang informasi antara “hal yang diujarkan” dan “respons penutur”, implikatur dapat juga dalam bentuk rumpang informasi antara “hal yang diujarkan” dengan ‘keinginan dan tujuan’ penutur. Di sini percakapan melibatkan penutur taklangsung (M). Sebagai contoh, penutur (penutur politik) mengomunikasikan suatu pesan politiknya kepada M (khalayak) melalui implikatur. Harapan penutur melalui implikatur adalah agar M mempertimbangkan pesan politik penutur sesuai dengan keinginan penutur. Namun, respons M (dalam arti realitas pertimbangan M) secara umum sulit untuk diidentifikasi. Sulitnya pengidentifikasian itu disebabkan oleh berbagai faktor, di

antaranya, ketidaklangsungan M untuk terlibat dalam pertuturan; jumlah M yang tidak sedikit, beragam, menyebar; pertimbangan yang diharapkan penutur itu sangat abstrak karena terdapat dalam kognisi M, dan realitas pertimbangan itu akan diwujudkan di masa mendatang (bersifat futuristik) ketika suatu peristiwa politik dilakukan. Oleh karena itu, pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian tersendiri. Adapun respons yang bisa muncul pada saat pengujaran ialah respons dari petutur langsung (*host* atau pemandu acara tayang bincang). Walaupun tanpa respons dari M, reflektivitas implikatur tetap dapat diidentifikasi sebagai salah satu realitas kebahasaan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pengimplisitan reflektivitas (reflektivitas implikatur) ujaran penutur politik merupakan sesuatu yang jamak, tetapi menjadi aspek penting karena reflektivitas itulah salah satu yang menjadi fokus pengomunikasian maksud penutur. Keimplisitan *reflektivitas* tersebut sejalan dengan temuan Renkema (2004: 255) yang menyebutkan bahwa dalam wacana politik, hal yang terkait dengan keimplisitan (seperti strategi pemagaran [*hedge*], eufemisme, dan strategi ketaksaan) ternyata merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu dibentuk dengan berbagai model yakni, dengan strategi pemagaran diri, strategi eufemisme, dan strategi ketaksaan. Kebutuhan ini disebut **kebutuhan modifikasi**. Kebutuhan modifikasi tersebut menjadi sebuah fenomena linguistik (pragmatik) dalam proses pencapaian tujuan penutur.

Secara khusus, ciri reflektivitas implikatur dalam politik juga didukung oleh salah satu bentuk konsep yang terkandung dalam kata *politik* itu. Dalam *Collins English Dictionary* (2004: 1257), misalnya, salah satu pengertian *politik* dikonsepsikan sebagai “*any activity concerned with the acquisition of power, gaining one’s own ends, etc.*” Di sini, bentuk *gaining one’s own ends* dapat diasosiasikan sebagai reflektivitas maksud dan tujuan seseorang. Dalam bentuk implikatur, reflektivitas yang demikian dapat diamati dalam percakapan politik.

Untuk pendiagnosian implikatur, Grice mengancang sebuah teori berupa parameter yang dikenal dengan *Co-operative Principle* (Prinsip Kerja Sama [disingkat PKS]). Teori ini selanjutnya dikenal sebagai Teori Grice. Inti dari teori ini ialah bahwa seseorang dalam berujar seyogianya dengan sajian atau kontribusi informasi yang memadai, jelas, benar, terkait dengan pembicaraan, dan dengan

cara yang mudah dipahami (lihat Levinson 1983: 101). Prinsip ini kemudian dipostulasikan pada empat pasal atau maksim (*maxim*⁴) ditambah dengan beberapa submaksim (lihat 2.2.1).

Gagasan Grice ini telah menginspirasi sejumlah ahli, khususnya ahli dalam bidang komunikasi dan linguistik. Teori itu bahkan telah dikaitkan dengan kajian perilaku sosial dalam prinsip kesantunan (Leech 1983). Namun, teori ini juga mendapat kritik dari Sperber dan Wilson (1995) dengan diusulkannya Teori Relevansi sebagai teori bandingan. Walaupun demikian, patut dicatat bahwa PKS, relevansi, dan prinsip kesantunan itu menjadi nuansa yang justru mewarnai dan saling melengkapi satu dengan yang lain perihal kajian implikatur percakapan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, implikatur percakapan (dalam ranah politik) dapat diidentifikasi berdasarkan kebernuansaan teori-teori itu. Melalui teori-teori tersebut, termasuk teori tindak tutur, sesuatu yang menjadi perangkat yang digunakan penutur untuk mengomunikasikan pesannya melalui implikatur akan dapat dijelaskan (secara teknis perangkat-perangkat tema itu diistilahkan dengan *reflektor*). Selain itu, dengan teori-teori itu juga dapat dijelaskan perihal keberfungsian implikatur, kandungan nilai yang tersirat di dalamnya, dan perihal kemandirian sesuatu yang disimpulkan dari implikaturnya. Tampak bahwa perangkat, fungsi, dan nilai merupakan sejumlah hal yang melekat secara inheren dalam implikatur terutama dalam ranah politik. Keinherenan itulah yang menjadikan implikatur sebagai kajian dalam penelitian ini lebih khas daripada kasus implikatur lainnya, dan menarik untuk dikaji.

1.2 Topik Penelitian dan Rumusan Masalah

Topik dalam penelitian ini adalah implikatur dalam percakapan politik pada acara tayang bincang televisi Indonesia. Berdasarkan pengamatan sekilas (terhadap percakapan dalam tayang bincang politik), terdapat sejumlah kesepolaan motif penutur dalam pengomunikasian maksud politiknya. Motif yang dimaksud terkait dengan cara penutur untuk mengarahkan petutur ke sesuatu arah yang diinginkan penutur. Cara itu dilakukan penutur tidak secara langsung, tetapi

⁴ Gunarwan (2003) mengindonesiakan *maxim* dengan *bidal*

dengan cara yang tersirat dalam bentuk implikatur. Implikatur inilah yang selanjutnya disebut sebagai strategi. Dalam strategi inilah terkandung aspek makna reflektivitas.

Reflektivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik tampaknya juga mengandung sejumlah titik yang perlu dicermati. Titik pencermatan itu meliputi sesuatu yang menjadi perangkat penanda reflektivitas, keberfungsian, nilainya, serta kemandirannya sebagai reflektivitas. Dalam teori Retorik Interpersonal (Leech 1983), strategi penggunaan perangkat reflektivitas itu merupakan sisi pencermatan dari sudut pandang penutur. Sementara itu, hal yang terkait dengan fungsi dan nilai implikatur merupakan sisi pencermatan dari sudut pandang petutur.

Dalam penganalisisan, sisi pencermatan yang pertama (dari penutur) menggunakan teori Grice (PKS) kemudian mengombinasikannya dengan Teori Relevansi (TR) dan Teori Tindak Tutur (T-3). Sisi pencermatan yang kedua (dari petutur) melibatkan teori kesantunan (PSS) dan juga mengombinasikannya dengan TR dan T-3. Pengombinasian TR dan T-3 tersebut disebabkan adanya penjelasan fungsi tindak tutur, serta perlunya perelevansian fungsi dan nilai tersebut kepada konstruksi yang akan ditemukan dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi reflektivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia. Masalah ini akan diselesaikan dengan pengidentifikasian reflektor dan bentuk performatif pengiringnya, pengidentifikasian fungsi dan nilai beserta implikasi-implikasi turunannya (atau dapat diistilahkan dengan *fungsi-nilai derivatif*). Dengan demikian, submasalah penelitian ini dapat diperikan sebagai berikut.

- (1) Apa unsur reflektor yang terdapat dalam ujaran penutur politik untuk mengomunikasikan pesan politiknya dalam implikatur; dan bagaimana reflektor itu difungsikan (diperformatifkan) dalam pengomunikasiannya sehingga implikatur itu dapat disebut mengandung reflektivitas?
- (2) Fungsi-fungsi apa yang terimplikasi dari ujaran penutur sekaligus kategori nilai apa yang terimplikasi dari fungsi-fungsi tersebut.
- (3) Bagaimana relevansi suatu nilai mengimplikasikan nilai-nilai yang lain?

1.3 Cakupan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada deskripsi reflektivitas maksud penutur dalam implikatur percakapan pada acara tayang bincang politik di televisi Indonesia dalam masa sepuluh bulan menjelang kampanye resmi pemilihan umum (pemilu) 2009 di Indonesia. Acara tayang bincang politik itu dibatasi pada kriteria keberadaan maksud, keinginan, atau upaya penutur, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi (partai) dalam mencapai tujuannya untuk menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Yule (1996:50) menandai keinginan seperti itu dengan istilah *future event*. Kepentingan politik tersebut juga dibatasi pada kepentingan politik tingkat nasional. Oleh karena itu, pembicaraan politik dalam kepentingan tingkat daerah, tidak akan dimasukkan sebagai data dalam penelitian ini. Selain itu, tayang bincang politik yang tidak terkait dengan reflektivitas untuk kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang (misalnya tayang bincang politik mengenai kekisruhan suatu parpol, penanganan banjir, atau kecelakaan transportasi) tidak akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Reflektivitas implikatur dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai karakteristik upaya komunikasi (retorika) penutur politik untuk melakukan suatu tindakan politis tertentu melalui ujaran-ujarannya. Upaya itu, antara lain, untuk memperkenalkan diri, menawarkan suatu kebijakan, menarik simpati M, dan pada akhirnya mengharapkan pertimbangan positif dari M (mengharapkan M untuk memilih penutur atau partai penutur dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, harapan atau keinginan itu adalah agar diri penutur dipilih dalam kaitannya dengan politik tertentu di masa yang akan datang. Namun, realisasi dari harapan itu yakni dipilih atau tidak dipilihnya penutur di masa yang akan datang (sebagai *future event*), bukan menjadi bagian dari penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini hanya dibatasi pada dua kategori masalah, yaitu (i) segala hal yang terkait dengan upaya pembentukan reflektivitas dalam implikatur; dan (ii) fungsi dan nilai ujaran-ujaran penutur dilihat dari parameter kesantunan. Hal pertama terkait dengan ciri implikatur yang ditelusuri melalui parameter pematuhan atau pengabaian prinsip dan maksim kerja sama Grice dan prinsip relevansi Sperber dan Wilson terkait dengan tipe implikatur dalam rentangan asumsi. Kategori ini akan ditelusuri melalui korelevanannya terhadap

konteks. Hal kedua terkait dengan fungsi dalam teori tindak tutur dan nilai yang muncul atas fungsi sebagai kajian retorika interpersonal.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan reflektor-reflektor yang terdapat dalam ujaran-ujaran penutur politik. Dalam hal itu, reflektor-reflektor yang ditemukan dapat dipandang sebagai alat penutur untuk mengomunikasikan pesan-pesan politiknya. Selanjutnya, reflektor-reflektor itu akan dideskripsikan berdasarkan (bagaimana) cara atau strategi penutur untuk mengemas pesan politiknya dalam melalui implikatur. Deskripsi itu juga akan diperkaya oleh pengidentifikasian bentuk performatif yang mengiringi reflektor, rumusan pokok pesan, dan relevansinya dengan konteks. Di samping itu, hasil penelitian ini juga akan memostulatkan sejumlah konstruksi dan bagaimana pendukung konteks terhadap konstruksi-konstruksi itu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi dan nilai beserta implikasi lain yang diderivasikan dari fungsi dan nilai yang ditemukan itu.

Penelusuran masalah yang pertama dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *pertama*, menemukan reflektor; *kedua*, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan reflektor berdasarkan kesamaan ide atau tema. Dari pengklasifikasian inilah ditarik kesimpulan bahwa penutur secara umum melakukan suatu tindak performatif dalam bentuk implikatur. *Ketiga*, mengidentifikasikan implikatur baik karena pematuhan maupun karena pengabaian terhadap prinsip dan maksim PKS. Pada tahap inilah pokok-pokok pesan yang bersumber dari implikatur yang ditemukan itu dapat dirumuskan; *keempat*, mendeskripsikan reflektor dan pokok-pokok pesan berdasarkan relevansinya terhadap konteks. Deskripsi itu akan menunjukkan bahwa reflektor dan implikatur-implikatur yang dihasilkan menjadi sah sebagai realitas reflektivitas maksud penutur terutama. *Kelima*, menguji kerelevanan pokok-pokok pesan itu melalui konstruksi-konstruksi tertentu dengan melakukan manipulasi data terhadap bagian-bagian tertentu dalam konstruksi itu. Pemanipulasian itu akan memperlihatkan koheren atau tidak koherennya bagian-bagian itu terhadap konstruksi utamanya.

Penelusuran masalah yang kedua dilakukan dengan langkah-langkah berikut. *Pertama*, mencermati bentuk ilokusi yang dimunculkan oleh penggunaan

perangkat tema yang ada dengan mengacu pada sintesis fungsi-fungsi yang diusulkan dalam teori tindak tutur, baik oleh Austin, Searle, Fraser, maupun Leech. *Kedua*, mengidentifikasi nilai yang diimplikasikan oleh fungsi ilokusi ujaran. *Ketiga*, mengidentifikasi proses (biaya) pengimplikasian atas sejumlah nilai. *Keempat*, mencermati pola urutan dan hubungan antarnilai serta menguji kerelevanannya melalui bentuk konstruksi seperti pada pengujian masalah yang pertama.

1.5 Kerangka Konseptual

Makna merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap kajian bahasa (Ogden dan Richards 1952: 48). Bahkan, makna dapat dikatakan sebagai muara dari penggunaan tanda bahasa. Setakat ini, makna bahasa dibahas dalam dua bidang linguistik, yaitu bidang semantik dan bidang pragmatik. Semantik mengkaji makna yang berasal dari dalam bahasa, terutama dengan proses gramatikal, antara lain, makna kata (leksikal), frasa, klausa, atau kalimat. Pragmatik mengkaji makna bahasa dalam kaitannya dengan unsur luar makna semantiknya dalam situasi tertentu (lihat Portner 2006: 138; band. Levinson 1983).

Kajian makna dalam penelitian ini cenderung sebagai bagian dari analisis pragmatik dengan implikatur percakapan dan aspek refleksif sebagai penitikberatannya. Penitikberatan itulah yang menjadikan tema penelitian ini dikonsepsikan dengan refleksivitas implikatur percakapan.

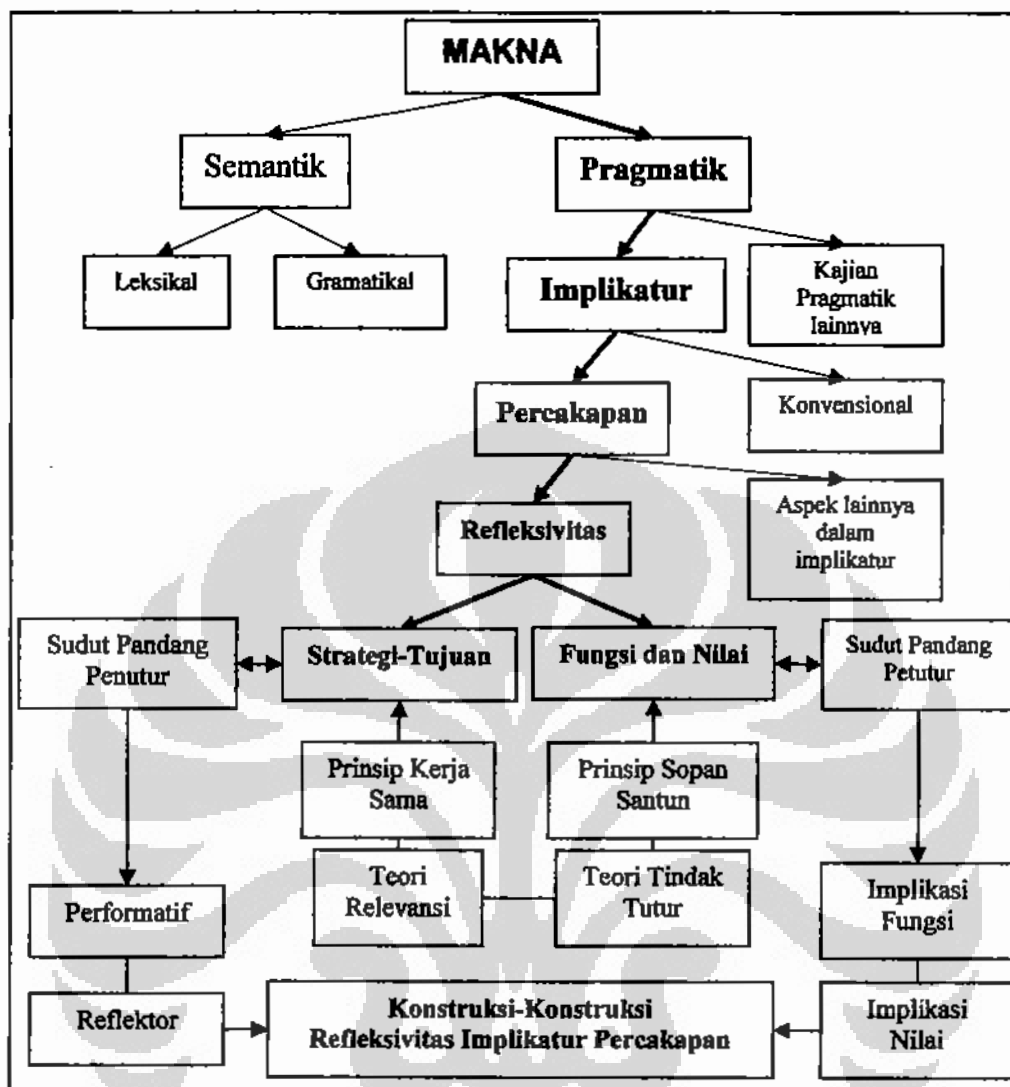
Aspek refleksivitas dapat dicermati dalam dua subpokok bahasan. Subpokok pertama adalah bahasan yang terkait dengan “bagaimana” refleksivitas itu dikomunikasikan. Subpokok bahasan ini akan menunjukkan cara, perangkat atau reflektor, dan rumusan pokok pesan penutur. Subpokok bahasan ini selanjutnya ditandai sebagai bahasan **strategi-tujuan**. Subpokok bahasan kedua adalah “dengan fungsi apa” refleksivitas itu dijalankan, serta “nilai apa” yang terimplikasi dari pemanfaatan fungsi-fungsi itu. Subpokok bahasan ini selanjutnya ditandai sebagai **fungsi dan nilai**. Leech (1983) menjelaskan bahwa hal yang terkait dengan strategi-tujuan merupakan kajian yang didasarkan pada sudut pandang penutur, sedangkan fungsi dan nilai didasarkan pada sudut pandang petutur.

Penjelasan strategi-tujuan melibatkan PKS Grice. Dalam hal itu, reflektivitas implikatur dapat diproduksi dengan cara melanggar ataupun dengan mematuhi prinsip dan maksim-maksim PKS. Akan tetapi, dalam penginterpretasiannya, penjelasan ini harus melibatkan eksplikatur dan bentuk performatif sebagai dasar perumusan pokok-pokok pesan. Hal ini mengartikan bahwa selain melibatkan PKS, penelitian ini juga harus melibatkan TR dan Teori Tindak Tutar. Pencermatan yang pertama ini akan merumuskan (i) terminologi perangkat-perangkat yang menjadi reflektor dan (ii) bentuk performatif yang mengiringi reflektor. Bertolak dari rumusan inilah akan dibentuk sejumlah konstruksi reflektivitas. Penguatannya dihubungkan dengan konteks, sedangkan pengujian konstruksinya dilakukan dengan memanipulasi bagian-bagian tertentu dalam konstruksi itu. Dari pengujian itu, akan terlihat koheren atau tidak koherennya bagian-bagian itu di dalam konstruksi.

Sementara itu, penjelasan fungsi dan nilai dilakukan dengan melibatkan dua teori dasar. Fungsi ditelusuri dengan latar belakang kajian fungsi tindak tutur dalam T-3 beserta taksonomi-taksonominya. Nilai dikaitkan dengan kriteria sopan santun dalam maksim PSS (untung, rugi, puji, kecam, setuju, taksetuju, simpati, dan antipati). Penelusuran ini, selanjutnya, akan menemukan implikasi fungsi-nilai derivatif. Seperti halnya dalam penjelasan strategi-tujuan, dari penelusuran fungsi dan nilai ini juga akan dibentuk sejumlah konstruksi yang menunjukkan fungsi dan nilai reflektivitas implikatur percakapan. Demikian juga pengujiannya dilakukan dengan memanipulasi bagian-bagian tertentu dalam konstruksi itu. Dari pengujian itu, juga akan memperlihatkan koheren atau tidak koherennya konstruksi itu secara pragmatik.

Sebagai tambahan, dalam penelitian ini, unsur yang terkait dengan makna semantis juga turut berperan dalam penjelasan reflektivitas implikatur. Pengaitan ini sejalan dengan laporan Portner (*ibid*) yang menyebutkan bahwa pada kenyataannya banyak ahli yang bergelut dalam pengkajian makna mengombinasikan dua bidang itu (band. Levinson 1983: 162).

Alur kerangka dan alur teoretis untuk penelitian ini, seperti halnya yang dijelaskan di atas, dapat digambarkan seperti pada Skema 1.1 berikut.



Skema 1.1 Kerangka Konseptual

1.6 Kemaknawian Studi

Penjelasan tentang implikatur—termasuk teori usulan Grice perihal *meaning_{nn}* ‘makna non-natural’—telah dijadikan sebagai teori komunikasi (Levinson 1983: 101). Penjelasan implikatur telah diterima pula sebagai bagian dari penjelasan proses keberhasilan komunikasi. Selanjutnya, keberadaan suatu maksud dan/atau kesan tertentu yang dikomunikasikan penutur secara tidak langsung (implisit) juga telah diakui. Dalam hal itu, implikatur selalu diperlakukan sebagai makna yang khusus.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan (1) sebagai bahan pengkajian lanjutan atas penelitian komunikasi yang menyangkut teori

penggunaan bahasa, seperti, analisis makna percakapan, khususnya implikatur percakapan dalam ranah politik (band. Jaszczolt 2002:207); (2) sebagai bahan pertimbangan berupa petunjuk praktis bagi para politikus dalam menawarkan programnya melalui konstruksi pragmatis tuturan, dan para peneliti politik untuk kajian politik secara khusus. Dalam hal ini, dengan mencermati pola reflektivitas beserta unsur yang termaktub di dalam reflektivitas itu, politikus dapat membuat suatu perbandingan terkait dengan masalah efektif-tidaknya strategi penyampaian yang sudah dilakukan penutur politik, khususnya atas percakapan politik yang telah dijadikan sebagai data dalam penelitian ini; dan (3) sebagai bahan pedoman keterampilan pemaknaan ujaran secara pragmatik dalam analisis percakapan.

1.7 Glosarium

Cara	: maksim yang mensyaratkan upaya penutur untuk membuat ujarannya dengan jelas
eksplikatur	: Kombinasi atau elaborasi bentuk makna harfiah (<i>encode linguistic</i>) dengan bentuk penyimpulan yang dilakukan secara konseptual berdasarkan hubungannya dengan konteks (Sperber dan Wilson 1995: 182; Kearn 2000: 279)
fungsi	: Sikap penutur yang terindikasi dari ujaran dan implikturnya.
implikatur	: suatu maksud yang disampaikan penutur secara tersirat (implisit) dalam ujarannya, tetapi hal yang dimaksudkan itu berbeda dari makna semantik satuan-satuan yang diujarkan
inferensi	: proses penarikan kesimpulan atas suatu pernyataan atau ujaran (premis)
konstruksi	: bangun makna pragmatik yang disusun secara sintaktis dengan menggunakan unsur-unsur tertentu (melibatkan reflektor, bentuk performatif, konteks, dan tujuan penutur) yang dianggap lebih natural dan umum.
Kualitas	: maksim yang mensyaratkan keyakinan penutur terhadap sesuatu yang diujarkannya
Kuantitas	: maksim yang mensyaratkan keinformatifan ujaran penutur

maksim	: Postulasi yang mensyaratkan keefisienan dan keefektifan ujaran. Postulasi itu sekaligus menjadi tolok ukur adanya penyimpangan atau pematuhan.
nilai	: kesan mental yang ditangkap oleh penutur (juga oleh peneliti) yang dikategorikan dalam kesan positif dan kesan negatif
pematuhan	: kesesuaian tindak pengujaran dengan postulasi yang disyaratkan dalam sebuah prinsip dan maksim-maksimnya.
prinsip	: postulasi dasar atau dalil umum yang diperlakukan sebagai parameter untuk mengukur patuh dan tidak patuh, relevan dan tidak relevan, atau santun dan tidak santunnya seseorang penutur dalam membuat ujarannya
refleksif	: aspek makna (pragmatik) yang dikomunikasikan penutur melalui implikatur percakapan dengan tujuan agar penutur (M) dapat melakukan sesuatu yang positif bagi kepentingan penutur
refleksivitas	: realitas dan kemampuan ujaran penutur untuk membentuk aspek makna refleksif maksud penutur (dalam hal ini melalui implikatur)
reflektor	: kata/frasa yang menjadi terminologi perangkat tema yang dipandang berperan menunjukkan refleksivitas implikatur
Relevansi	: 1) maksim PKS yang mensyaratkan kesesuaian topik yang diujarkan penutur dengan pertanyaan atau pernyataan atau topik yang sedang dipertuturkan secara eksplisit; 2) pengasumsian menurut TR bahwa ujaran selalu terkait dengan topik pembicaraan karena masih dapat dikaitkan dengan konteks walaupun keterkaitan itu tidak secara eksplisit.
sekarang	: cakupan waktu yang disebutkan penutur saat percakapan berlangsung
yang akan datang	: acuan waktu tertentu setelah percakapan (waktu pemilu)
derivatif	: suatu bentuk (fungsi dan/atau nilai) yang terimplikasi dari fungsi dan/atau nilai sebelumnya (misalnya, fungsi x_1 dengan nilai y_1 terimplikasi dari fungsi x dengan nilai y)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Nosi Implikatur dan Konsep Refleksivitas

Nosi implikatur hingga setakat ini dicermati melalui dua pendekatan teoretis. **Pertama**, implikatur dicermati melalui teori komunikasi yang digagas oleh Grice (1957), yaitu teori makna non-natural (makna_{nn}). Grice mengancang sebuah perangkat yang dianggap sebagai panduan untuk melakukan percakapan. Perangkat itu didasarkan pada pertimbangan yang cukup rasional sebagai indikator keefektifan dan keefisienan dalam berujar. Perangkat ini dikenal sebagai Prinsip Kerja Sama (*co-operative*). Prinsip ini dijabarkan lagi ke dalam empat kaidah atau lebih dikenal dengan maksim (*maxim*), yaitu (i) maksim Kualitas (*Quality*), (ii) maksim Kuantitas (*Quantity*), (iii) maksim Relevansi (*Relevance*), dan (iv) maksim Cara (*Manner*). Kearn (2000: 255) memadankan keempat maksim itu, masing-masing sebagai maksim Kebenaran, maksim Keinformatifan, maksim Kerelevanan, dan maksim Kejelasan.

Asumsi yang menjadi dasar pemikiran terhadap prinsip utama Prinsip Kerja Sama (PKS) tersebut adalah pandangan bahwa penutur adakalanya membuat ujarannya (diistilahkan dengan *contribution*) berkurang atau berlebih dari yang diperlukan. Sementara itu, asumsi yang mendasari pengaidahan atas maksim-maksimnya masing-masing adalah pandangan bahwa ujaran seyogianya berisikan hal yang benar dan cukup bukti (maksim Kualitas); informasinya cukup, memadai, dan tidak berlebihan (maksim Kuantitas); berkaitan dan sesuai dengan topik pembicaraan (maksim Relevansi); serta jelas, runtut, tidak taksa, dan tidak bertele-tele, (maksim Cara). Selanjutnya, pelanggaran (*violate*) atau ketidakacuhan (*brushing aside*) penutur terhadap prinsip utama dan maksim-maksim itu dianggap sebagai kesengajaan atau taktik penutur untuk mengimplisitkan maksudnya dalam bentuk implikatur.

Dalam analisis implikatur dijelaskan melalui perangkat linguistik dan didukung oleh kondisi dan konteks-konteks yang ada. Perlu dicatat, selain dengan penyimpangan, implikatur pun sebenarnya dapat terjadi karena pematuhan prinsip

dan maksim-maksim PKS. Sebagai contoh, ketika seorang penutur ingin memberi efek keterancaman-muka¹ pada seseorang, penutur justru dapat melakukannya dengan mengujarkan sesuatu yang diyakininya benar. Dalam hal ini, penutur mematuhi maksim Kualitas (atau maksim Kebenaran).

Pengkajian implikatur secara umum dijelaskan dengan melibatkan perangkat-perangkat linguistik dan dikaitkan dengan konteks yang melingkupi komunikasi itu. Dalam penelitian ini, implikatur bahkan dapat dikaitkan dengan konteks yang berasal luar percakapan yang melingkupinya. Dengan kata lain, penguatannya dapat dilakukan secara intertekualistas.

Implikatur, berdasarkan kondisinya, dibedakan atas implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur percakapan dihubungkan dengan bentuk-bentuk linguistik secara tidak konvensional, tetapi bergantung pada konteks saat percakapan terjadi (*truth condition*). Sementara itu, implikatur konvensional dihubungkan dengan bentuk-bentuk linguistik tertentu dan diterima secara konvensional (Levinson 1983: 131). Dalam hal ini, implikatur dimaknai tidak berdasarkan kebenaran kondisi, tetapi justru dengan kondisi yang tidak sebenarnya (*non-truth conditional*). Penerimaan konsep atas kondisi yang tidak sebenarnya itu telah menjadi sebuah manifestasi budaya dalam masyarakat tertentu dan seolah-olah menjadi sesuatu yang benar.

Berdasarkan konteksnya implikatur dibedakan atas implikatur umum (*generalized*) dan implikatur partikular (*particularized*). Implikatur umum ialah implikatur yang diperoleh dengan kesimpulan yang sudah umum, tanpa melibatkan konteks atau skenario tertentu. Sementara itu, implikatur partikular diperoleh dengan konteks atau skenario tertentu.

Selain teori di atas, Grice juga menjelaskan pengomunikasian maksud dalam aspek yang refleksif (Levinson 2000: 12). Aspek ini dapat diidentifikasi dalam implikatur percakapan. Dengan perkataan lain, implikatur adakalanya mengandung maksud yang refleksif. Dengan demikian, kandungan implikatur dengan aspek itu disebut sebagai *refleksivitas implikatur*. Secara umum, yang

¹ Konsep *face* 'muka' pertama sekali diidentifikasi oleh Goffman (1956 diacu Renkema 2004: 24—26). Istilah *muka* diartikan sebagai suatu harga (harga diri) yang mesti terjaga, dihormati, dan terbebas dari gangguan orang lain. Apabila keterjagaan muka seseorang terabaikan, tidak dihargai, atau terganggu oleh orang lain, keadaan ini disebut sebagai keterancaman muka.

dimaksud dengan reflektivitas implikatur ialah pengujian yang bertujuan untuk mengomunikasikan sesuatu maksud yang merujuk kembali kepada diri penutur.

Refleksivitas yang dianggap sebagai maksud yang dikhususkan ini juga mendasari penganalisisan makna_{mn} yang dihubungkan dengan daya (*force*) suatu komunikasi. Seorang komunikator S memberi makna_{mn} atas sesuatu melalui *x* jika dan hanya jika S memaksudkan ujaran *x* untuk menghasilkan sejumlah efek kepada petutur melalui makna pengenalan maksud tersebut (1957: 385; dalam Levinson 1983; band. Sperber dan Wilson 1995: 198; Jaszczolt 2002: 208).

Mengacu pada penjelasan di atas, ujaran B pada dua contoh berikut (diambil dari sumber data AKIM080611 dan KA071101) cenderung menyiratkan sesuatu seperti yang dimaknai petutur A. Petutur A dalam percakapan (1) dan (2) ini menginferensikan tuturan B sebagai keinginan dan upaya penutur untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang, yaitu sebagai ‘orasi capres-cawapres’ pada (1) dan ‘visi seorang presiden’ pada (2).

- (1) B: [...] kalau memang karena kerinduan kepada moralitas pemimpin dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.
A: *Wah, ini kayaknya udah orasinya capres-cawapres ini.*
(AKIM 080611,106—115)
- (2) B: Mustinya pertahanan keamanan itu menghadap ke luar. Ya, ada di Jogja, ada di Merauke, ada di Padang, ada (di) Pulau We, ada di Manado. [...] Saya ditanya, bagaimana pendapat Sultan dengan DCA? Saya nggak setuju saat ini. Karena apa? Karena akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau. Kenapa yang ngontrol tidak Indonesia sendiri?
A: *Ini visi seorang presiden ini.*
(KA071101,113)

Dengan demikian, hal yang dikomunikasikan B melalui ujarannya adalah ‘B bermaksud menjadi presiden (atau wakil presiden pada (1)). Penginferensian A atas ujaran B pada dua contoh di atas, sejalan dengan teori Grice tentang “sesuatu yang dimaksudkan penutur” (1969; 1989 dalam Levinson 2000:13), yang menyatakan:

- S means_{mn} p by “uttering” U to A iff S intends:*
- a. *A to think p*
 - b. *A to recognize that S intends (a)*
 - c. *A’s recognition of S’s intending (a) to be prime reason for A thinking p*

Berdasarkan postulasi itu, penginferensian A atas ujaran B pada (1) dan (2) dapat dikonstruksikan seperti berikut ini.

Penutur bermaksud menjadi *capres/cawapres* melalui ujaran “(1)” atau “(2)” kepada A, karena:

- a. A memikirkan p (p = penutur berniat menjadi *capres/cawapres*)
- b. A (mungkin) mengetahui bahwa penutur juga memaksudkan a . (A memikirkan p)
- c. Pemahaman A atas maksud penutur tentang a menjadi alasan kuat bagi A untuk menginferensikan p (penutur berniat menjadi *capres/cawapres*)

2.1.2 *Sanggahan dan Lahirnya Teori Bandingan terhadap Teori Grice*

Pencermatan yang kedua untuk implikatur ialah dengan melibatkan konsep relevansi. Konsep ini telah menjadi sebuah teori baru atas gagasan Sperber dan Wilson. Teori ini dianggap amendemen terhadap teori Grice. Sperber dan Wilson tidak menyetujui bahwa implikatur dikaitkan dengan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan maksim (1995: 201). Mereka juga tidak sependapat dengan Grice atas pelibatan unsur linguistik terutama tata bahasa dalam penganalisisan implikatur (*ibid*: 177). Menurut mereka implikatur harus didasarkan pada pengasumsian efek kognisi, upaya pemrosesan, dan kandungan-kandungan yang eksplisit. Amendemen ini selanjutnya dikenal sebagai **Teori Relevansi (TR)**.

Dengan keberadaan sejumlah asumsi dalam proses komunikasi, Sperber dan Wilson menemukan perbedaan antara komunikasi yang implisit dan komunikasi yang eksplisit. Sesuatu yang implisit ialah sesuatu yang dimaksudkan, sedangkan sesuatu yang eksplisit ialah sesuatu yang dikomunikasikan. Sesuatu yang dimaksudkan ditandai sebagai implikatur; dan sesuatu yang dikomunikasikan ditandai sebagai eksplikatur.

Alih-alih menyebut kelemahan PKS, Sperber dan Wilson menegaskan bahwa apa pun penjelasan terhadap implikatur, pada dasarnya implikatur ditentukan oleh kandungan aspek yang eksplisit itu. Aspek eksplikatur itu dianggap mempunyai sisi yang lebih kaya, inferensif, dan investigatif daripada

penjelasan Grice dan pengikutnya. Bahkan, gagasan Sperber dan Wilson ini selanjutnya diikuti oleh Carston's (diacu Kearns 2000: 277). Carston mengambil eksplikatur sebagai aspek terpenting dalam pragmatik sebelum menentukan implikatur. Dalam penelitian ini, unsur eksplikatur akan dilibatkan untuk menghadirkan sejumlah bagian ujaran yang mungkin dapat dianggap sebagai bagian dari ujaran penutur secara harfiah.

Salah satu prinsip yang menjadi pertimbangan dalam TR ialah bahwa kerelevanan sebuah ujaran akan optimal apabila ujaran itu tidak membuat petutur pada tindakan atau respons yang dianggap salah dalam mencapai efek kontekstual. Petutur diperkirakan mampu menghasilkan afeksi (pertimbangan) kontekstual. Lebih jauh, petutur mampu untuk memproses nilai implikasi yang terbatas menjadi lebih luas. Dari keluasan nilai implikasi yang diproses itu, dapat dibentuk sebuah rentangan implikasi. Dalam implikasi itu terdapat premis (*implicated premises*) dan kesimpulan (*implicated conclusions*). Di satu sisi, pertimbangan efek kontekstual dan rentangan implikasi dapat diterima. Akan tetapi, di sisi lain sebagian besar afeksi penutur dalam percakapan politik yang melibatkan masyarakat (M), sebenarnya sulit untuk dibuktikan dalam penelitian ini. Seperti telah disebutkan dalam Bab 1, pembuktian itu menjadi penelitian tersendiri.

Sperber dan Wilson (dalam Kearns *ibid*: 267) merelevansi implikatur melalui proses kognitif dengan melibatkan konteks. Berbicara tentang konteks, mereka membedakannya atas konteks internal dan konteks eksternal. Konteks internal ialah pengacuan pada asumsi terdekat oleh petutur saat pertuturan terjadi. Konteks ini melibatkan sesuatu yang dipikirkan petutur, antara lain, pengetahuan, kepercayaan, pengasumsian, dan hipotesisnya terhadap ujaran penutur, serta konvensi sosial budaya penutur dan petutur.

Sementara itu, konteks eksternal ialah sumber pengacuan kepada hal yang jauh dari situasi saat pertuturan terjadi. Sebagai catatan, konteks eksternal ini kurang ditekankan dalam perelevansian implikatur dalam TR. Namun, dalam penelitian ini, peran konteks eksternal justru sangat penting. Hal itu disebabkan oleh adanya konteks yang menunjukkan keinginan politik penutur untuk dipertimbangkan M secara positif di masa yang akan datang. Artinya,

pertimbangan M yang positif itulah yang menjadi tujuan utama penutur. Yule (1996: 59) menyebutkan bahwa untuk memahami ‘sesuatu yang diujarkan’ dalam percakapan, harus melibatkan sejumlah faktor yang mendukung interaksi, termasuk faktor eksternal secara lebih luas. Faktor eksternal itu, antara lain, status sosial, usia, kekuasaan, dan lain-lain. Faktor kekuasaan di sini dapat dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk berkuasa atau terlibat dalam kekuasaan. Keinginan inilah yang menjadi tujuan utama dalam percakapan politik.

Ditinjau dari segi kerelevanan inferensi petutur terhadap maksud penutur, dalam TR dikenal implikatur yang kuat (*strong implicature*) dan implikatur yang lemah (*weak implicature*). Disebut sebagai implikatur yang kuat, apabila inferensi petutur relatif relevan atau sesuai dengan maksud utama penutur pada kondisi saat pengujaran. Dalam hal itu, penutur tidak memaksudkan sesuatu yang lain lagi selain daripada maksud utama itu. Sebagai contoh dapat dicermati pada contoh (3) yang diadopsi dari Sperber dan Wilson (1995: 195--199) berikut ini.

- (3) A : *Would you drive a Mercedes?*
 B : *I wouldn't drive ANY expensive car.*

Berdasarkan respons B, asumsi terdekat adalah (i) ‘B tidak akan mengendarai mobil Mercedes’. Inilah implikatur yang kuat. Namun, tidak dapat dipungkiri jika petutur juga dapat berasumsi (ii) ‘B tidak suka mobil-mahal lainnya, seperti BMW, Ferrari, Roll Royce, dan sebagainya’. Asumsi lain yang dimungkinkan ialah (iii) ‘B tidak suka pamer kekayaan’. Memang, asumsi (ii) dan (iii) sangat dimungkinkan, tetapi asumsi itu tergolong lemah (lihat juga Blakemore 1992: 124—31). Dengan perkataan lain, disebut sebagai implikatur lemah karena inferensi petutur kurang relevan dengan maksud utama penutur ketika ujaran itu terjadi. Penutur tidak memaksudkan keluasan inferensi petutur sampai kepada asumsi (ii) atau (iii). Asumsi yang sangat relevan dengan maksud penutur ialah bahwa dia tidak akan mengendarai jenis mobil yang ditanyakan oleh A, sebagaimana pada asumsi (i).

Dalam penelitian ini, penginferensian terhadap hal yang lebih luas, justru sangat diharapkan penutur. Dengan kata lain, reflektivitas implikatur justru harus dikaitkan dengan hal-hal (konteks) yang lebih luas. Sebagai contoh, ketika seorang penutur menjelaskan hal yang terkait dengan tema perubahan; atau

menilai seseorang secara negatif, penutur tidak semata-mata agar petutur ikut melakukan perubahan atau menaruh rasa antipati terhadap seseorang yang dinilai. Lebih jauh, penutur mengharapkan agar petutur mempertimbangkan penutur secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang

Sperber dan Wilson menyarankan bahwa dalam penganalisisan implikatur, diperlukan adanya seperangkat asumsi terhadap penutur. Dalam hal itu, penutur dianggap sudah dalam upaya membuat tuturannya manifes kepada petuturnya.

Perangkat manifestasi itu mencakupi asumsi berikut:

- (a) Adanya keyakinan bahwa ujaran penutur relevan secara optimal.
- (b) Penutur mengatakan bahwa p
- (c) Penutur percaya bahwa p
- (d) Sesuatu dapat terjadi
- (e) Penutur ingin agar petutur melakukan sesuatu.

Namun, menurut peneliti sebagian besar pertimbangan-pertimbangan Sperber dan Wilson ini sebenarnya masih merupakan bagian dari kerangka teori Grice seperti pada 2.1.1 di atas (lihat juga Kearns 2000: 254). Postulasi Sperber dan Wilson di atas, misalnya, cenderung pada kerangka kerja maksim kualitas Grice.

Jaszczolt (2002: 220) menilai bahwa Teori Relevansi masih mempunyai kelemahan. Kelemahan itu di antaranya ialah sulitnya untuk memberi penilaian yang konkret atas relevansi yang dianggap optimal, khususnya untuk membedakan derajat efek kognitif dan upaya pemrosesan yang disebut sebagai biaya dan keuntungan. Pengukuran upaya dan efek dengan nilai *sangat mudah, sedang, rendah, dan tinggi* (lihat Kearns *ibid*: 267—71) tampaknya masih bersifat relatif dan abstrak.

Akan tetapi, nilai pemrosesan yang digagas oleh Sperber dan Wilson, ternyata sejalan dengan Leech (1983) dalam teorinya mengenai prinsip kesantunan. Dalam penjelasan Leech, nilai pemrosesan itu termaktub dalam salah satu kutub maksim yang menyatakan, “minimalkan kerugian (biaya atau kesukaran penginferensian) bagi pihak lain, dan maksimalkan nilai keuntungan (biaya atau kemudahan penginferensian) bagi pihak lain.” Nilai itu dapat dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencapaian maksud penutur. Hal inilah

yang selanjutnya menjadi salah satu prinsip dari **Teori Kesantunan** yang digagasnya (lihat juga Thomas 1995: 158—66). Walaupun demikian, dia tetap menerima PKS dan maksim yang diformulasikan oleh Grice. Dia menegaskan bahwa dalam sejumlah kasus, peran maksim Kualitas tidak bisa dilepaskan (Leech *ibid*: 190). Pendapat ini tentu tidak jauh berbeda dengan perbandingan (antara postulasi Sperber dan Wilson terhadap maksim Kualitas Grice) di atas. Selain itu, pengombinasian teori-teori itu justru sangat sejalan dengan penganalisisan masalah maksud yang bersifat refleksif. Oleh karena itu, Leech tidak setuju dengan keburukan yang dituduhkan oleh ahli yang tidak sependapat dengan Grice (anti-Gricean).

Memang, pada umumnya, penentang teori itu (lihat, misalnya, Cruse 2004: 370) mempunyai paradigma bahwa prinsip dan maksim itu merupakan nasihat yang absolut yang erat hubungannya dengan unsur moral terutama dengan perilaku yang baik. Akan tetapi, Leech menyatakan bahwa unsur moral tidak dapat dimasukkan dalam penjelasan ilmiah bahasa, demikian pula dalam memandang prinsip kerja sama dan maksim, bukanlah sesuatu yang ditaati sebagai kaidah yang absolut (1983: 9; 209), melainkan sebagai alat ukur saja. Cara pandang Leech ini sejalan dengan Griffiths (2006: 135) yang menegaskan bahwa maksim Grice harus dipandang seolah-olah saja sebagai kaidah, bukan sebagai nasihat. Dengan demikian, PKS dan maksim Grice mestinya diperlakukan sebagai parameter (alat ukur), bukan sebagai peraturan. Cara pandang ini tetap menjadi pegangan dalam penelitian ini.

Leech menambahkan bahwa proses penjelasan makna ujaran adalah usaha untuk merekonstruksi tindakan apa yang menjadi tujuan komunikasi penutur ketika menghasilkan tuturannya (band. Masinambow 2001:39). Hal ini dapat dicermati, baik dari segi penutur maupun petutur. Tentu, pada percakapan politik (dalam penelitian ini) dua segi itu harus dilibatkan.

Dari segi penutur dia memperlakukannya sebagai sebuah tugas. Untuk itu, analisis yang paling tepat ialah mangonstruksikan cara yang dilakukan penutur untuk mencapai hal yang dimaksudkan (tujuannya). Analisis ini disebut analisis cara-tujuan (*means-end*). Salah satu karakteristik tujuan (maksud) itu ialah kerefleksifan. Leech lebih tegas menyebutkan bahwa tujuan yang demikian

merupakan maksud yang *refleksif* (*ibid*: 53—56). Perlakuan yang diusulkan Leech ini hampir senada dengan pendapat seorang ahli politik bernama Henry J. Schmandt (2002: 6). Menurut Schmandt, perilaku politik memiliki implikasi yang etis. Hubungan politik secara teoretis dengan filsuf (peneliti) merupakan hubungan yang melibatkan cara dengan tujuan.

Dari segi petutur, Leech menawarkan sebuah teori yang dikenal sebagai **Prinsip Sopan Santun (PSS)**. Sebagaimana perlakuan terhadap PKS dan maksimnya, Leech juga menekankan bahwa prinsip sopan santun tidak boleh diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan keberadaban. Baginya, teori ini merupakan mata rantai yang dianggap hilang dari PKS, yang dalam hal ini PKS belum menunjukkan kaitan daya dan makna ujaran (hlm. 104). Prinsip itu dikonsepsikan pada empat kutub nosi, yaitu (i) biaya dan keuntungan (*cost and benefit*), (ii) kesetujuan (*agreement*), (iii) pujian (*approbation*), dan (iv) simpati-antipati. Keempat nosi ini masih dijabarkan ke dalam enam maksim, yaitu kearifan (*tact*), kemurahhatian (*generosity*), pujian (*approbation*), kerendahhatian (*modesty*), kesetujuan (*agreement*), dan simpati (*sympathy*) (lihat 2.2.4).

Gazdar (1979), selain mengikuti pandangan Grice, juga membuat klasifikasi implikatur atas implikatur umum dan implikatur khusus (Gunarwan 2004: 15). Dua subkasus yang sangat khas dan penting ialah pengidentifikasian implikatur dengan kasus kuantitas: implikatur kuantitas **skalar** (berskala) dan implikatur kuantitas **klausal** (bersebab-akibat). Implikatur kuantitas skalar ialah implikatur yang diidentifikasi melalui perangkat skala berupa satuan linguistik yang mengandung derajat makna semantik yang diurutkan berdasarkan tingkat keinformatifan atau kuat-lemahnya informasi. Satuan-satuan itu dapat diskalakan berdasarkan kandungan kualitas ataupun kandungan kuantitas di dalamnya (bergantung pada kata yang diskalakan). Penskalaan itu, misalnya, tingkat kekerapan, kebaikan, kepentingan, suhu, jumlah, keharusan, keinterestan, dan lain-lain (lihat Levinson 1983: 134; 2000: 82—91; Kearns 2000: 258--9). Sementara itu, implikatur klausal ialah implikatur yang diperoleh melalui sejumlah pengungkapan. Jika implikatur disimbolkan dengan q dan pengungkapan (ujaran) disimbolkan dengan p , implikatur klausal dipostulasikan q diperoleh dari p . Dalam notasi disimbolkan dengan $p \rightarrow q$. Sebagai catatan, q bukan perikutan

ataupun praanggapan. Akan tetapi, ketika p diinferensikan dengan q tidak tertutup kemungkinan q berkembang menjadi inferensi yang lain. Peneliti berasumsi, bahwa hal-hal lain yang disebut Gazdar itu, termasuk aspek reflektivitas penutur. Jika kemudian aspek ini disimbolkan dengan r , postulasi notasinya menjadi $(p \rightarrow q) \rightarrow r$. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebenaran asumsi yang melibatkan khalayak (petutur potensial), kebenarannya bersifat futuristik (Yule *ibid*: 50). Dalam penelitian ini, asumsi dan afeksi yang dimungkinkan, hanya dengan mengaitkan unsur linguistik (lihat Levinson 1983: 122, 97; Jaszczolt 2002: 223) dan konteks yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini tidak melibatkan pembuktian asumsi itu secara futuristik.

Levinson (1983) pun cenderung mengikuti ancarangn Grice. Dia menyatakan bahwa ancangan Grice sebenarnya masih dapat dipertahankan pada sejumlah tingkat. Senada dengan Leech (lihat juga Griffiths 2006), Levinson menjelaskan bahwa teori Grice bukan permasalahan orang mengikuti prinsip itu sepenuhnya sebagai petunjuk, melainkan sebagai rasionalisasi penguraian atau penjelasan makna pertuturan. Levinson bahkan tidak sependapat atas penolakan Sperber dan Wilson perihal keterlibatan unsur linguistik dalam penjelasan implikatur. Menurut Levinson, implikatur justru harus dijelaskan dengan melibatkan teori linguistik, antara lain, struktur permukaan (*surface structure*), semantik, dan kondisi kebenaran. Dia juga mempertimbangkan dan mengikuti klasifikasi yang digagas Gazdar tentang pembagian implikatur atas skalar dan klausal. Lebih jauh, Levinson (2000) telah mengeksplorasi klasifikasi tersebut dengan lebih luas, dalam bukunya *Presumptive Meaning*.

Tidak jauh berbeda dari Grice dan yang lainnya, Horn (1984 dalam Mey 2001: 83) meletakkan parameter implikatur hanya pada dua prinsip (sebagai pengganti maksim), yaitu prinsip Kuantitas (PK), dan prinsip Relasi (PR). Prinsip ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sejumlah ujaran mestinya mempunyai kejelasan dan ketaktaksaan. Dalam pada itu, dia menggariskan bahwa pola bahasa manusia dapat ditandai sebagai sebuah tegangan antara biaya (*cost*) dan keuntungan (*benefit*) untuk mencapai keseimbangan dan efektivitas. Dalam PK disarankan untuk mengujarkan sebanyak yang kita bisa, dan dalam PR diharuskan

untuk menyatakan yang tidak lebih dari pada yang seharusnya (Jaszczolt 2002:221; Kearns 2000: 262).

Salah satu yang paling menonjol ialah Horn mengidentifikasi adanya derajat kekuatan atau kelemahan dalam sejumlah kata yang dapat direntangkan menjadi sebuah skala keinformatifan. Skala implikatur itu dikenal dengan implikatur skalar (Kearns *ibid*: 258).

Sedikit berbeda dari Horn, bagi Kearns (2000), dari keempat maksim Grice hanya dua maksim yang menempati posisi yang paling esensial. Maksim yang menempati prioritas tertinggi ialah *Truthfulness* atau maksim Kebenaran (Kualitas). Maksim ini bahkan dianggap menjadi perangkat utama dalam retorika. Maksim yang kedua ialah maksim relevansi. Maksim ini dipandang sebagai bagian dari cara yang lazim bahkan menjadi kunci utama dalam menentukan implikatur. Alasannya ialah maksim relevansi mewajibkan pertimbangan yang menyeluruh mulai pembuatan, pemaknaan, sampai pada penelusuran isi '*what is said*' yang paling mendasar. Pendapat ini tampaknya akan cenderung dapat diterima dalam hal wacana politik (band. Schmandt 2002: 267).

2.1.3 Teori Tindak Tutur

Teori lain yang terkait dengan penelitian ini ialah teori tindak tutur (*Speech Act*). Teori ini pertama sekali dicetuskan oleh Austin (1962) dengan bukunya yang berjudul *How to Do Things with Word*. Hal yang paling mendasar dari teori ini ialah kesadaran terhadap adanya tindakan di balik ujaran seseorang. Dengan perkataan lain, ketika seseorang mengujarkan sesuatu, seseorang itu sekaligus melakukan sesuatu.

Dalam pada itu, Austin membedakan ujaran deklaratif atas dua kategori, yakni (i) ujaran deklaratif konstatif, (ii) ujaran deklaratif performatif. Konstatif ialah ujaran yang kebenaran peristiwanya harus dibuktikan berdasarkan kondisinya (*truth condition*), sedangkan ujaran performatif ialah ujaran yang kebenaran peristiwanya ditinjau berdasarkan sah-tidaknya perangkat-perangkat pendukungnya (*felicity condition*). Selain itu, ujaran yang mengandung suatu tindakan, selanjutnya, ditandai sebagai ujaran performatif.

Austin menemukan bahwa dalam tuturan adakalanya terkandung suatu daya dan/atau efek khusus yang disengaja penutur. Daya di sini diartikan sebagai potensi ujaran untuk mempengaruhi sikap petutur, sedangkan efek ialah adanya perubahan status yang cukup berarti bagi seseorang yang diberi tuturan. Berdasarkan ada-tidaknya daya dan efek tersebut, dia juga mengklasifikasikan tuturan dalam tiga fungsi: lokusi, ilokusi, dan perlokusi. *Lokusi* adalah tuturan yang berfungsi hanya untuk menyatakan sesuatu dan tidak mengandung suatu daya atau efek tertentu. Sebagai contoh, ujaran *Saya membuka pintu itu*. Ujaran ini berfungsi sebagai pernyataan saja, tanpa menimbulkan suatu daya atau efek apa pun bagi orang lain. *Ilokusi* adalah ujaran yang mengandung suatu daya untuk mempengaruhi petutur agar melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ujaran *Anda pasti dapat memindahkan buku itu ke meja di sebelah*. Dengan ujaran itu, seseorang yang disebut sebagai *Anda* berpotensi untuk melakukan sesuatu, misalnya, memindahkan buku yang dimaksudkan penutur, membersihkan atau merapikan meja tempat buku itu berada, atau reaksi lainnya. *Perlokusi* adalah ujaran yang selain mempunyai daya, juga memuat efek yang dapat mengakibatkan suatu perubahan bagi sesuatu. Sebagai contoh, seorang direktur perusahaan dalam rapat pengangkatan manajer berkata, "*Saya menunjuk dan mengangkat Anda menjadi manajer di perusahaan ini.*" Daya ujaran ini ialah diakuinya seseorang itu menjadi sesuatu yang disebutkan dalam tuturan tersebut, yakni menjadi manajer. Sementara itu, efeknya ialah adanya perubahan status seseorang dari yang bukan manajer menjadi manajer. Perbedaan tiga fungsi tersebut dapat diringkaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Fungsi Ujaran Menurut Klasifikasi Austin (1962)

Fungsi	Daya	Efek
lokusi	- ²	-
ilokusi	+ ³	-
perlokusi	+	+

Walaupun demikian, terdapat kelemahan Austin dengan teorinya itu. Kelemahan itu adalah bahwa perhatian tentang tindak ujar hanya berfokus pada

² tidak terkandung dalam kategori fungsi

³ terkandung dalam kategori fungsi

modus kalimat deklaratif. Dalam perkembangannya pun, Austin sempat goyah dengan teori-teorinya tersebut, terutama dalam hal ujaran performatif. Ia kemudian malah mengakui bahwa semua tuturan adalah performatif. Bahkan, tanpa kehadiran verba performatif dalam ujaran, sebenarnya terdapat unsur “berbuat” dan unsur “berkata”. Oleh sebab itu, Austin mengubah pendiriannya dengan memandang perlunya suatu teori khusus untuk (teori) **tindak ilokusi**. Sehubungan dengan itu Austin mengklasifikasikan tindak-tindak ilokusi ke dalam lima kategori⁴: (i) *verdictives*, (ii) *exertives*, (iii) *commissives*, (iv) *behabitives*, dan (v) *expositives* (lihat Leech 1983: 176).

Searle (1975) mengkritik dan mengajukan pemikiran lain atas teori-teori Austin. Menurut Searle, bentuk performatif tidak hanya pada modus deklaratif. Lebih jauh bisa terjadi pada modus lain: interogatif (pertanyaan), dan imperatif (perintah), bahkan berpotensi pada setiap ujaran. Peneliti tentu setuju dengan Searle. Hal itu dapat dicermati dalam sejumlah tuturan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ujaran dengan modus interogatif seorang orang tua kepada anak gadisnya, “*Mau ke mana jam segini?*” atau ujaran dengan modus imperatif seorang ibu kepada anaknya sambil bertolak pinggang, “*Ambil, ambil!*” dapat menjadi ujaran yang memuat tindak melarang.

Berdasarkan cara penyampaian maksud, Searle (1975) membedakan tindak tutur atas dua bentuk: (i) tindak tutur langsung, dan (ii) tindak tutur taklangsung. Disebut tindak tutur langsung, apabila sesuatu yang maksudkan penutur dikomunikasikan secara jelas atau eksplisit. Sementara itu, tindak tutur taklangsung apabila sesuatu yang dimaksudkan penutur dikomunikasikan secara tersirat atau implisit dan dimungkinkan dengan memodifikasi modus pengujarannya.

Selain itu, Searle mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam lima kategori atau disebut sebagai makrofungsi, yakni

1. **representatif** (*asertif* dalam Leech *ibid*: 105), yaitu fungsi ujaran yang mengikat penutur dengan kebenaran atau ujarannya (seperti menyatakan sesuatu, menyimpulkan dll.);

⁴ Kategori ini dipandang tidak perlu untuk dijelaskan dan diperinci atas verba-verbanya dalam penelitian ini.

2. **direktif**, yakni fungsi yang menandai usaha yang dilakukan penutur untuk memperoleh suatu tujuan agar penutur melakukan sesuatu (seperti meminta, menyuruh, bertanya, menasihatkan, dll.);
3. **komisif**, yaitu fungsi ujaran yang bersifat mengikat kepada penutur atas sejumlah tindakan yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, (seperti berjanji, mengancam, dll.);
4. **ekspresif**, yaitu fungsi yang menyatakan sebuah pengungkapan yang bersifat psikologis dari penutur (seperti berterima kasih, minta maaf, menyambut, mengucapkan selamat, dll.);
5. **deklarasi**, yaitu fungsi ujaran yang berupa pernyataan yang mengandung suatu pengaruh yang dapat mengubah status seseorang dengan seketika. Ujaran ini biasanya terkait dengan lembaga. Selain itu, tuturan diujarkan cenderung berdasarkan suatu pedoman yang dibuat oleh institusi yang bersangkutan. Pedoman itu, secara linguistik ditandai sebagai ekstralinguistik. Sebagai contoh, tindak mengucilkan, menyatakan perang, membaptis, memecat, dll. (lihat Levinson 1983: 240).

Berbeda dari dua ahli di atas, Fraser (1975) justru mengembangkan pengklasifikasian fungsi tindak ilokusi di atas menjadi delapan kategori atau disebut sebagai taksonomi. Delapan taksonomi itu ialah sebagai berikut.

1. Tindak untuk **menyatakan** (*act of asserting*), yaitu ujaran yang menandai sikap, penilaian dan pendirian penutur terkait dengan kebenaran sebagaimana dalam proposisi yang diujarkan penutur (misalnya, menuduh, membantah, mengakui, mengizinkan, dll.).
2. Tindak untuk **mengevaluasi** (*act of evaluating*), yaitu ujaran yang menandai penilaian penutur atas kebenaran suatu proposisi yang diujarkan dan menjadi dasar untuk mengambil keputusan (misalnya, menganalisis, memvonis, memperhitungkan, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dll.).
3. Tindak untuk mencerminkan sikap penutur (*act of reflecting Speaker Attitude*), yaitu ujaran yang menandai sikap penutur perihal kecocokan suatu akibat yang berasal dari sejumlah tindakan sebelumnya sebagaimana

dinyatakan dalam proposisi ujaran penutur (misalnya, memaafkan, menerima, memperkenalkan, menyayangkan, dll.).

4. Tindak untuk **menetapkan** atau **menentukan** (*act of stipulating*), yaitu ujaran yang menandai keinginan penutur untuk diterima (oleh orang lain) atas suatu konvensi penamaan atau penyebutan sebagaimana dinyatakan dalam proposisi ujaran penutur (misalnya, mengumumkan, mengodekan, menjuluki, mengatur, menetapkan, dll.).
5. Tindak untuk **meminta** (*act of requesting*), yaitu ujaran yang menandai keinginan penutur kepada petutur agar petutur melakukan sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam proposisi ujaran penutur (misalnya, meminta, memerintah, melarang, menanyakan, memesan, memohon, dll.).
6. Tindak untuk **men-sugesti** (*act of suggesting*), yaitu ujaran yang menandai keinginan penutur kepada petutur agar petutur mempertimbangkan sesuatu kebijakan berupa tindakan sebagaimana dinyatakan dalam proposisi ujaran penutur (misalnya, memperingatkan, menganjurkan, menasihatkan, mengimbau, mendesak, dll.).
7. Tindak mengatasnamakan **kewenangan** (*act of authority*), yaitu ujaran yang menandai sikap penutur untuk membuat suatu keadaan yang baru dengan mengatasnamakan kekuasaan atau hak tertentu (misalnya, membatalkan, menugaskan, merestui, menghukum, mengesahkan, memecat, membebaskan, dll.).
8. Tindak **kebersediaan diri** untuk melakukan sesuatu (*act of committing*), yaitu ujaran yang menandai sikap penutur bahwa penutur memosisikan diri sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam ujaran penutur (misalnya, menerima [tugas], bertanggung jawab, berikrar, dll.).

(Fraser dalam Cole dan Morgan 1975: 189—93)

Leech (1983) juga mengkritik Austin dan Searle dengan mengubah sejumlah kategori pada lima makrofungsi. Lima kategori fungsi Austin menurut Leech adalah sesuatu yang keliru. Sementara itu, dalam kategori Searle terdapat sejumlah masalah atau ketidakcocokan pengategorian verba performatif ke dalam

kategori fungsi utama. Sebagai contoh, kategori deklarasi dengan verba performatif (*menghukum, membaptis*, dsb.). Menurut Leech verba *menghukum*, atau *membaptis* bukanlah sebagai tindak ujar, melainkan tindak sosial. Demikian juga beberapa verba pada empat kategori utama lainnya, menurutnya masih dapat dipisahkan menjadi satu kategori fungsi utama. Sebagai contoh, dalam kategori direktif terdapat verba *questioning* ‘mempertanyakan’ (periksa Levinson 1983: 240)—tentu termasuk juga verba *inquire* ‘bertanya’, dan *query* ‘menyangsikan’ (lihat Leech *ibid*: 206). Leech, selanjutnya, mengklasifikasikan bentuk verba-verba itu menjadi kategori terpisah dari kategori direktif, yakni menjadi kategori **rogatif**. Peneliti setuju dengan kategori ini karena bentuk-bentuk seperti itu banyak ditemukan dalam percakapan politik dalam penelitian ini. Atas sejumlah temuannya itu, Leech (*ibid*: 211) mengusulkan pengklasifikasian makrofungsi itu juga dengan lima kategori, dengan mempertahankan empat kategori Searle yakni (i) *asertif*, (ii) *direktif*, (iii) *komisif*, (iv) *ekspresif*, dan mengusulkan kategori baru yaitu (v) *rogatif* (lihat 2.2.6).

Secara umum, pemanfaatan teori ini terkait dengan analisis fungsi implikatur dengan aspek refleksivitasnya sebagai bagian dari retorik interpersonal. Menurut peneliti, kategori atau taksonomi yang dilakukan oleh Searle, Fraser, dan Leech di atas mempunyai kelebihan tersendiri. Dalam hal itu, terlihat Leech mempertahankan sejumlah kategori Searle, walaupun harus membuang kategori deklarasi dan memisahkan sejumlah verba dari empat kategori yang ada karena dianggap masih mempunyai ciri yang sama (antara lain verba *bertanya, mempertanyakan, menyangsikan* dalam direktif) dan mengategorikannya sebagai kategori tersendiri, yaitu kategori *rogatif*. Selain itu, dalam pengklasifikasian Searle dan Fraser tentu masih terdapat ketumpangtindihan sebagaimana juga diungkapkan oleh Leech. Dengan demikian, klasifikasi yang diusulkan oleh Leech, cenderung menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini. Namun, terkait dengan refleksivitas implikatur, peneliti juga memandang perlu untuk menerima kategori sugestif (seperti memperingatkan, menasihatkan, dll.) yang terdapat dalam taksonomi Fraser sebagai kategori tersendiri yang terpisah dari kategori direktif baik dalam Searle maupun Leech.

2.1.4 Kesimpulan

Terlepas dari penerimaan atau penolakan sebagian atau seluruh prinsip dan maksim-maksim Grice, serta adanya kelemahan dan kelebihan setiap argumen yang diajukan ahli lain, juga dengan pembentukan teori tandingan, menurut Levinson (1983: 97) dan juga Jaszczolt (2002: 223) yang terpenting sebenarnya ialah memberi penguraian yang jelas tentang pemaknaan secara memadai atas sesuatu yang diujarkan itu. Jaszczolt (*ibid*: 11) mencatat bahwa Grice sebenarnya tidak mengklaim bahwa semua maksim itu dapat mencakupi semua asumsi percakapan. Dalam pada itu, Grice malah mengakui adanya keterbukaan teori lain untuk pengasumsian itu. Dengan demikian, bagi peneliti (dan akan diterapkan dalam penelitian ini), sejumlah argumen, baik yang menerima, atau menentang teori Grice, sebenarnya dapat saling memperlengkapi; dan tidak mesti berseberangan.

Sementara itu, ketumpangtindihan maksim yang dilontarkan sejumlah ahli yang berkeberatan merupakan analogi dari *juncto*⁵ dalam ranah bahasa hukum. Dalam hal itu, satu maksim dapat ber-*juncto* dengan maksim lain. Analogi seperti ini sejalan pula dengan cara Oswald Ducrot dalam *Dire et ne pas dire* [1972] yang membahas *loi d'exhaustivité* 'hukum keterkosongan' (dalam Jaszczolt *ibid*: 211). Dengan kata lain, teori-teori implikatur Grice dan pengikutnya merupakan landasan teori yang utama untuk mendeskripsikan konstruksi reflektivitas implikatur dalam penelitian ini.

Peneliti setuju dengan pendapat Leech (1983: 133) yang mengatakan bahwa kepatuhan terhadap PKS Grice dan maksim-maksimnya bukanlah kepatuhan absolut atau sebagai keharusan moral. Leech (1983 dalam Oka [ed.] 1993: 13) menyebutkan bahwa unsur moral tidak dapat dimasukkan untuk tujuan-tujuan preskriptif dalam suatu penjelasan ilmiah mengenai bahasa. Dengan demikian, unsur pemerincian PKS dan PSS dengan semua maksimnya, serta teori yang terkait dengan TR (antara lain, pelibatan konteks, eksplikatur, biaya proses penginferensian suatu kesimpulan) akan digunakan untuk mendeskripsikan konstruksi, fungsi, dan nilai reflektivitas implikatur dalam penelitian ini.

⁵ Kata *juncto* diartikan dengan 'berkenaan, berkaitan, atau bertalian dengan yang lain'. Walaupun dengan pengertian seperti itu, menurut hemat penutur tidak berarti hal-hal yang disebut ber-*juncto* menjadi tumpang tindih.

Selanjutnya, analisis fungsi serta nilai yang dikandung oleh reflektivitas implikatur, akan dicermati melalui pemanfaatan fungsi tindak tutur yang telah diperikan oleh Leech (1983).

2.2 Landasan Teoretis

Penelitian ini difokuskan pada kajian reflektivitas implikatur dalam percakapan ranah politik. Penelaahannya dibagi menjadi dua masalah, yaitu (i) konstruksi dan keterkuatan, dan (ii) nilai fungsi. Sehubungan dengan itu, teori yang digunakan untuk menelusuri dua masalah dalam penelitian ini, berturut-turut adalah pertama, teori Prinsip Kerja Sama (PKS) yang kerap digunakan oleh mazhab Gricean dan Teori Relevansi yang digagas oleh Sperber dan Wilson; dan kedua, teori retorik interpersonal yang dijelaskan oleh Leech dalam kaitannya dengan Prinsip Kesantunan.

2.2.1 Prinsip Kerja Sama (PKS)

Konsep implikatur sudah dikembangkan sebagai teori yang esensial dalam teori penggunaan bahasa (*using language*). Dalam hal itu, Grice mengancang sebuah perangkat yang dianggap sebagai panduan untuk melakukan percakapan. Perangkat itu didasarkan pada pertimbangan yang cukup rasional sebagai indikator keefektifan dan keefisienan dalam berujar. Perangkat ini dikenal sebagai Prinsip Kerja Sama (*co-operative*), seperti berikut.

The co-operative principle:

“Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted or direction of the talk exchange in which you are engaged.”

Prinsip ini, lalu dijabarkan ke dalam empat kaidah pengujaran atau diistilahkan dengan *maksim* (*maxim*). Keempat maksim itu adalah seperti di bawah ini.

- 1) *The maxim of quality is concerned with truth-telling, and has two part:*
 - (i) *Do not say what you believe to be false.*
 - (ii) *Do not say that for which you lack adequate evidence.*
- 2) *The maksim of quantity is concerned with the amount of information (taken in its broadest sense) an utterance conveys.*

- (i) *Make your contribution as informative as is required for the current purposes of the exchange in which you are engaged.*
 - (ii) *Do not make your contribution more informative than is required.*
- 3) *The maksim of relevance: Be relevant.*
- 4) *The maksim of manner has four components: Be perspicuous.*
- (i) *Avoid obscurity*
 - (ii) *Avoid ambiguity*
 - (iii) *Avoid unnecessary prolixity.*
 - (iv) *Be orderly.*

(lihat Levinson 1983: 10; Leech 1983: 8; Sperber and Wilson 1986: 33—4; band. Cruse 2004: 367—9; dll.)

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa suatu kontribusi ujaran dalam percakapan seyogianya dibuat dan diujarkan berdasarkan fakta dan keadaan yang benar atau tidak salah, meyakinkan dan dapat dibuktikan. Keseyogiaan ini ditandai sebagai maksim Kualitas atau dikenal pula maksim kebenaran. Berdasarkan parameter Kuantitas, sebuah ujaran seyogianya dikontribusikan dengan muatan informasi yang cukup, memadai, dan tidak berlebihan. Maksim Kuantitas dikenal pula sebagai maksim keinformatifan. Parameter Relevansi menggariskan bahwa kontribusi ujaran harus berkaitan atau sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Sementara maksim Cara menasihatkan bahwa kontribusi ujaran itu harus jelas, tidak taksa, tidak bertele-tele, dan harus runtut. Maksim Cara dikenal sebagai maksim kejelasan.

Kearn (2000: 255) mengusulkan penggalian makna implikatur melalui sejumlah tahapan. Pertama, seseorang yang mengamati harus mencoba untuk menganggap bahwa di antara peserta tutur sudah terjadi kebersamaan prinsip (*co-operative principle*). Dalam hal ini, peserta tutur sudah membangun aspek perilaku non-linguistik pada tataran non-superfisial. Kedua, pengamat mencermati lingkungan, keadaan, atau sesuatu apa pun (konteks) yang mungkin menjadi penghubung pertuturan, hingga menemukan sejumlah keyakinan bahwa peserta tutur terlibat dengan konteks. Ketiga, pengamat membangun inferensi yang menguatkan adanya kebersamaan itu dengan membuat asumsi untuk mereduksi tataran superfisial dengan alasan bahwa inferensi sudah terbentuk sebelumnya. Penginferensian inilah yang diakui sebagai implikatur dalam

percakapan (lihat Levinson 1983: 102—3, 113—4; Sperber dan Wilson dalam Davis 1991: 378). Perlu dicatat, inferensi ini bukan sebagai inferensi logika implikasi, perikutan, dan logika konsekuensi.

Setelah inferensi yang dimaksudkan ditemukan, implikatur dapat diuji kesahihannya dengan empat karakteristik implikatur yang diusulkan Grice. Empat karakteristik ini dianggap sebagai ciri-ciri yang hakiki pada implikatur: (i) *defeasible*, yaitu bahwa implikatur dapat dibantah atau dibatalkan (*cancelable*). Pembatalan dapat dilakukan, misalnya, dengan mengingkarinya melalui perangkat pengandaian (*if clause*), pemberian fakta lain atau kemungkinan yang melebihi dan tidak mengurangi, atau dengan mempertegas bahwa inferensinya bukan sebagai bagian dari maksud komunikasi ujaran; (ii) *non-detachable*, artinya, implikatur tidak dapat dilepaskan dari ujaran yang ada, misalnya dengan mengubah kata-kata yang dipakai melalui sinonim-sinonimya. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya diterima Sadock (dirujuk Levinson 1983: 119). Menurut Sadock, karakteristik ini ada kalanya justru dapat diuji dengan perangkat penggunaan ungkapan bersinonim; (iii) *calculable*, yaitu bahwa implikatur dapat diperhitungkan dengan cara memberi argumen seperti langkah-langkah yang melibatkan PKS di atas; dan (iv) *non-conventional*, yaitu implikatur bukanlah sebagai bagian dari makna harfiah ujaran yang konvensional.

Karakteristik yang lain ialah implikatur pada sejumlah kasus cenderung bersifat *indeterminacy* 'bukan sesuatu yang pasti' (Lihat Levinson 1983; Blakemore 1992: 124; Cruse 2004: 366). Sebuah pengungkapan, walaupun dengan pengertian tunggal, dapat menimbulkan implikatur-implikatur yang berbeda tentu pada saat yang berbeda (Band. Cruse 2004: 366). Menurut Levinson, hubungan implikatur yang berbeda itu, tentu tidak dapat dipastikan secara akurat. Untuk mengatasi ketidakpastian itu, Sadock (dalam Levinson *ibid*) telah menambahkan kriteria pengujian yakni *reinforceable* 'dapat diperkuat'. Menurut peneliti, pemerkuatan ini sebagian dapat terlihat dari pembatalan ketika seorang penutur membuat pembatalan, misalnya, "Oh, saya tidak mengatakan itu." dipastikan petutur telah menginferensikan sebuah implikatur yang merujuk pada kata *itu*. Dengan demikian, hal yang dibatalkan itu sekaligus dapat menjadi penanda dan pemasti (*determinator*) terhadap inferensi yang ada (band. Cruse 2004: 366). Pemerkuat yang lain ialah, pada kasus kuantitas. Implikatur dapat

diperkuat dengan pembubuhan kata *hanya* dalam arti ‘tidak lebih’ (misalnya, *tiga* mengimplikasikan hanya tiga; tidak lebih dari tiga; tidak empat, tidak lima, dst.).

Perihal reflektivitas, Grice (1957) mendasarkannya pada efek komunikasi yang lebih khusus dan kompleks. Dia menjelaskan bahwa seorang komunikator S memberi makna_{mn} terhadap sesuatu melalui *x* jika dan hanya jika S memaksudkan ujaran *x* untuk menghasilkan sejumlah efek kepada audiens melalui makna pengenalan maksud tersebut (1957: 385). Reflektivitas yang mencakupi referensi terhadap dirinya sendiri, ternyata menjadi sesuatu kajian penting dalam penjelesan makna_{mn} dengan cara lain yang lebih eksplisit. Postulasi teori itu digambarkan sebagai berikut.

S memberi makna_{mn} *p* melalui ujaran “U” kepada A jika dan hanya jika S dimaksudkan:

- a. A menginferensikan *p*
- b. A mengetahui bahwa S memaksudkan (a)
- c. Pemahaman A atas maksud S dengan (a) menjadi alasan kuat bagi A untuk menginferensikan *p*.

2.2.2 Teori Relevansi (TR)

Hal yang utama dalam teori ini ialah bahwa setiap reaksi dari petutur dapat dikonstruksikan sebagai sesuatu yang relevan (lihat Renkema 2004: 21). Petutur diyakini akan memilih konteks hanya atas pertimbangan kerelevanan. Oleh karena itu, interpretasi yang benar atas sebuah stimulus yang nyata (*ostensive*) adalah interpretasi yang dapat diakses dari prinsip kerelevanan (Prinsip Relevansi).

Prinsip ini dikembangkan atas pandangan bahwa suatu ujaran adalah sebuah modifikasi yang dapat dipahami atas lingkungan fisiknya. Hal inilah yang membuat asumsi-asumsi yang ada menjadi sesuatu yang tepat (*manifes*). Dengan kata lain, sebuah ujaran menjadi stimulus terhadap sejumlah hal yang dimungkinkan untuk diasumsikan. Pemungkinan asumsi itu didasarkan pada keberadaan seseorang penutur, situasi lokatif penutur, adanya tindak (tutur) yang dilakukan, bahkan adanya tujuan atas tindakan itu.

Prinsip Relevansi menjelaskan dua hal, yaitu pertama, pertimbangan suatu ujaran sebagai tindak komunikasi yang nyata dan yang sebenarnya (*case of ostensive communication*), dan kedua, melihat makna (bukan hanya) sebagai penyampaian pikiran penutur kepada petutur, (tetapi lebih jauh) sebagai lingkup kognisi bersama.

Sehubungan dengan itu, dalam memahami maksud sesuatu ujaran harus dipertimbangkan adanya seperangkat asumsi bahwa penutur yang membuat sebuah manifestasi kepada petutur melalui ujaran itu (B bermaksud membuat manifestasi kepada A melalui "U"). Perangkat manifestasi itu mencakupi asumsi berikut:

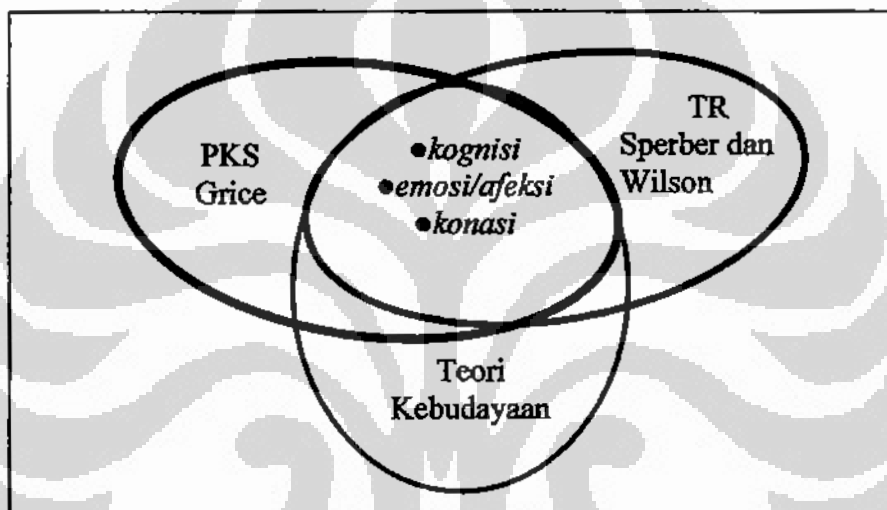
- (a) Adanya keyakinan bahwa ujaran penutur relevan secara optimal.
- (b) Penutur mengatakan bahwa p
- (c) Penutur percaya bahwa p
- (d) Sesuatu dapat terjadi
- (e) Penutur ingin agar petutur melakukan sesuatu.

Dalam hal kemunculan implikatur-implikatur dari satu proposisi tunggal, sebagaimana dijelaskan Levinson (1983: 117—8; 125), dan Gazdar menyebutnya sebagai *indeterminacy* (dalam Levinson *ibid*; dalam Sperber dan Wilson *ibid*: 196; Band. Cruse 2004: 366), Sperber dan Wilson merekonstruksi implikatur-implikatur yang dimungkinkan itu menjadi sebuah rentangan implikasi. Rentangan itu dibedakan atas premis tersirat (*implicated premises*) dan kategori kesimpulan tersirat (*implicated conclusions*). Premis tersirat adalah sesuatu yang disediakan penutur, dan harus dipulihkan oleh petutur (termasuk oleh peneliti), melalui pengembangan skema asumsi dalam memori. Sementara itu, **simpulan tersirat** merupakan deduksi dari eksplikatur dan konteks. Semua implikatur yang diakui oleh pengikut Grice itu, dapat dimasukkan ke dalam salah satu atau lebih dari dua kategori di atas (lihat juga Blakemore 1992: 124).

Lebih jauh, diakui pula bahwa sebuah pernyataan dapat mempunyai sejumlah implikasi kontekstual yang berbeda dan lebih luas serta cukup untuk menghasilkan efek yang kontekstual pula. Memang, penutur tidak terlalu mengharapkan hal yang lebih luas itu, tetapi karena kemunculan itu sangat dimungkinkan bagi petutur, tentu hal ini tidak dapat diabaikan. Namun, pengembangannya kepada implikasi dan konteks yang lebih luas tersebut (yang sebenarnya tidak diharapkan oleh penutur tadi) ditandai sebagai implikatur yang lemah (*weak implicatures*). Sementara itu, implikasi yang menjadi pengharapan penutur disebut sebagai implikatur kuat (*strong implicature*) (lihat Blakemore 1992: 128—31).

2.2.3 Titik Pertemuan Teori Grice dengan Sperber dan Wilson

Berdasarkan sudut pandang teori kebudayaan (periksa Masinambow 1998; Renkema *ibid*: 207), sebenarnya, terdapat titik pertemuan antara teori Grice dengan Sperber dan Wilson. Titik pertemuan itu ialah pada pemahaman ujaran sebagai realitas hasil budaya. Sebagai realitas budaya, pemikiran dua mazhab itu bertumpu pada tiga titik pusat yang disebut sebagai medan-perspektif, yaitu pengetahuan atau kognisi (*cognition*), emosi (*emotion*⁶), dan kemauan (*conation*). Medan-perspektif ini tampak pula sejalan dengan ancangan konstruksi yang diusulkan oleh Grice dalam PKS dan Sperber dan Wilson dalam TR.



Skema 2.1 Titik Pertemuan Pemikiran Grice dengan Sperber dan Wilson dalam Teori Kebudayaan

Dalam persinggungan teoretis itu, baik Grice, maupun Sperber dan Wilson menggunakan keselarasan perangkat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Persamaan Grice dengan Sperber dan Wilson

Grice	Sperber dan Wilson
<ul style="list-style-type: none"> • <i>A memikirkan p.</i> • <i>A mengetahui bahwa penutur juga memaksudkan (a).</i> <p>(lihat Levinson 2000: 13)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada <i>keyakinan</i> bahwa korelevanan ujaran penutur sudah optimal. • Penutur <i>percaya</i> bahwa <i>p</i>. • Penutur <i>ingin</i> agar penutur <i>melakukan</i> sesuatu. <p>(periksa Sperber dan Wilson 1995: 179)</p>

⁶ Renkema (2004) menggunakan istilah *affection* 'afeksi'.

Mengikuti Renkema dan Masinambow di atas, ujaran yang terdapat dalam percakapan politik dapat ditandai sebagai budaya bahasa politik. Selanjutnya, percakapan politik itu dapat dikaji dalam konsep yang idealis. Ujaran dalam percakapan politik merupakan realitas yang memuat tiga medan perspektif tersebut. Dengan kata lain, ujaran dalam percakapan politik pun menjadi manifestasi yang di dalamnya terendap konsep pengetahuan, perasaan (nilai), dan kemauan penutur. Renkema (*ibid*: 208) dalam ancangan psikologi-sosial yang dikonsepkannya, menegaskan bahwa tiga bagian ini berkaitan pula dengan perihal memikirkan, merasakan atau menilai, dan merencanakan tindakan terhadap sesuatu. Dengan demikian, konsep dasar sesuatu ujaran (dalam penelitian ini) dapat konstruksikan sebagai berikut.

B mengujarkan “U”:

B mengetahui dan/atau memberitahukan sesuatu.

B menilai seseorang dan/atau atau merasakan sesuatu.

B menginginkan dan/atau mau melakukan sesuatu

Refleksivitasnya adalah:

B menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang positif bagi B.

Sebagai catatan, dalam konstruksi ini perihal “menilai” atau “merasakan” sesuatu terkait dengan nilai baik atau buruk, sedangkan perihal “melakukan” terkait dengan melakukan sesuatu dengan positif atau negatif. Dalam penelitian ini, perihal “melakukan” tersebut cenderung pada tindak untuk melakukan sesuatu *pertimbangan*. Konsep *pertimbangan* ini dapat meliputi perilaku memikirkan, menilai, memilih atau tidak memilih. Tindak “memilih” berarti seseorang mempertimbangkan penutur secara positif, sedangkan “tidak memilih” berarti mempertimbangkan seseorang secara negatif.

2.2.4 Teori Retorik Interpersonal

Kajian ini merupakan bentuk pemerian yang dilakukan Leech (1983) melalui sintesis teori PKS dengan PSS. Menurut Leech keterlibatan PSS sangat penting karena prinsip ini merupakan penemuan mata rantai yang hilang dan menjadi pelengkap untuk PKS dalam hal pengaktualan hubungan antara daya dan makna ujaran.

Secara garis besar Leech menjabarkan kesantunan pada enam maksim. Enam maksim itu diadaptasi sebagai berikut.

- 1) Maksim kearifan (*tact maxim*): (a) minimalkan kerugian (beban) pada X; (b) maksimalkan keuntungan (kemudahan) bagi X.
- 2) Maksim kedermawanan (*generosity maxim*): (a) minimalkan keuntungan diri sendiri (B); (b) maksimalkan kerugian (beban) pada diri sendiri (B).
- 3) Maksim pujian (*approbation maxim*): (a) minimalkan kecaman pada B; (b) maksimalkan pujian bagi X.
- 4) Maksim kerendahhatian (*modesty maxim*): (a) minimalkan memuji diri; (b) maksimalkan memuji X.
- 5) Maksim kesetujuan (*agreement maxim*): (a) minimalkan ketidaksetujuan dengan X; (b) maksimalkan kesetujuan dengan X.
- 6) Maksim simpati (*sympathy maxim*): (a) minimalkan antipati terhadap X; (b) maksimalkan simpati terhadap X.

Keenam maksim ini, disederhanakan dalam empat skala, yakni (i) skala untung-rugi, (ii) skala pujian-kecaman, (iii) skala setuju-taksetuju, dan (iv) skala simpati-antipati. Selanjutnya, teori ini akan menjadi kategori nilai atas fungsi suatu ujaran yang akan dijelaskan dalam 2.2.6.

Untuk kepentingan penelitian ini, maksim dan skala PSS itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori nilai: positif (baik) dan negatif (buruk), seperti pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 2. 3 Nilai Implikatur dalam PSS

Nilai		Kuantitas
Positif	Negatif	
untung	rugi	MAKSIMAL atau MINIMAL
puji	kecam	
setuju	tidak setuju	
simpati	antipati	

Apabila dikaitkan, misalnya, dengan contoh (1) dan (2) pada bab ini (dikutip kembali berikut ini):

- (1) B: [...] kalau memang karena kerinduan kepada moralitas pemimpin dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.

A: *Wah, ini kayaknya udah orasinya capres cawapres ini.*

(AKIM 080611,106—115)

- (2) B: Mustinya pertahanan keamanan itu menghadap ke luar. Ya, ada di Yoga, ada di Merauke, ada di Padang, ada di Pulau We, ada di Manado. [...] Saya ditanya, bagaimana pendapat Sultan dengan DCA? Saya nggak setuju saat ini. Karena apa? Karena akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau. Kenapa yang ngontrol tidak Indonesia sendiri? (119)

A: *Ini visi seorang presiden ini.*

(KA071101,113)

tampak reflektivitas implikatur ujaran B dikemas dalam bentuk penawaran keuntungan kepada khalayak. Dalam hal itu, penutur secara tidak langsung menawarkan moralitas, penyatuan NKRI (dalam contoh (1)) dan/atau kepedulian terhadap negara (dalam contoh (2)), dan sebagainya. Selain itu, bisa juga menjadi skala pujian yang mengimplikasikan bahwa penutur dinilai positif oleh khalayak (pada contoh (1)) dan *penilaian negatif* terhadap keadaan sekarang ini, terutama kepada pemerintah.

2.2.5 Praanggapan dan Perikutan

Berbicara tentang ketersiratan, **praanggapan** (*presupposition*) dalam pragmatik dan perikutan (*entailment*) dalam semantik juga mengandung ketersiratan. Akan tetapi, implikatur mengandung ketersiratan yang berbeda dari praanggapan dan perikutan. **Praanggapan** adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai sesuatu informasi atau kasus yang mendahului kasus yang diujarkan penutur. Sebagai contoh, ujaran *Anjing Mery itu sangat lucu*; (dalam Yule 1996: 26) menyiratkan sebuah kasus bahwa 'Mery memelihara anjing'. Sementara itu, **perikutan** adalah sesuatu yang secara logis mengikuti kebenaran suatu ujaran. Sebagai contoh, ujaran *Mery mempunyai tiga ekor anjing*; memiliki konsekuensi atau perikutan 'Mery juga mempunyai dua ekor anjing,' dan 'Mery juga mempunyai satu ekor anjing.' Konsekuensi ini tentu tidak menyalahi kebenaran ujaran *Mery mempunyai tiga ekor anjing*. sebagaimana dicontohkan

sebagai ujaran. Sebagai catatan, walaupun praanggapan berbeda dari implikatur, praanggapan akan digunakan sebagai pendukung konteks dalam penelitian ini (lihat 4.1.1).

2.2.6 Dikotomi Eksplikatur dengan Implikatur

Gagasan Sperber dan Wilson perihal eksplikatur, ternyata menjadi sesuatu yang menduduki pertimbangan yang penting bagi ahli pragmatik akhir-akhir ini. Kearns (2000: 271–81) mempertegas kembali dikotomi implikatur dan eksplikatur. Grice diduga memaknai eksplikatur dengan makna harfiah ujaran secara semantik. Namun, antara eksplikatur dan makna harfiah masih terdapat perbedaan. Dengan mengacu pada Carston, eksplikatur dan makna harfiah tidak berdiri sendiri. Eksplikatur merupakan elaborasi dari bentuk makna harfiah. Menurut Griffiths (2006:6), eksplikatur adalah penggunaan informasi kontekstual dan pengetahuan dunia (*world knowledge*) untuk menjelaskan sesuatu yang dimaksudkan guna memahami ungkapan-ungkapan yang taksa. Dalam hal itu, eksplikatur memperikutkan makna harfiah, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Makna harfiah akan memperikutkan eksplikatur hanya jika keduanya identik, misalnya keidentikan kata *kemarin*, *besok*, *lusa*, dan sebagainya, dengan tanggal dan parafrasa waktu. Eksplikatur menjadi salah satu langkah dalam penentuan implikatur sebuah ujaran. Dalam hal ini, untuk menentukan implikatur seseorang harus terlebih dahulu menentukan eksplikatur.

Penentuan eksplikatur dapat dilakukan dengan proses penetapan referensi pada konteks ketaksaan dan inferensi indeksikal. Kearns (2000) menyebut proses ini sebagai **inferensi pragmatik tingkat pertama**. Dalam hal itu, referensi ketaksaan dan inferensi indeksikal merupakan bahan baku dan eksplikatur sebagai bahan jadi. Dengan kata lain, eksplikatur merupakan referen yang berbentuk parafrase dan/atau rujukan lain dari makna harfiah. Sebagai contoh, frasa *tidak cukup* pada ujaran “*Nasi itu tidak cukup*,” bersifat kontekstual-eksplisit untuk jumlah tertentu, misalnya untuk lima orang, tetapi tidak kontekstual-eksplikatur untuk perikutanya. Artinya, frasa *tidak cukup* itu tidak berlaku untuk jumlah yang lebih kecil di bawahnya. Jika dikatakan tidak cukup untuk lima orang, berarti

masih cukup untuk empat, tiga, dua, atau satu orang. Dari penentuan referensi ini, tampak bahwa *untuk lima orang* adalah eksplikatur dari frasa *tidak cukup*. Inferensi pragmatik tingkat kedua ialah memproses eksplikatur sebagai bahan baku dengan menginferensikannya kepada implikatur. Berdasarkan proses ini, Kearn mengidentifikasi lima komponen yang terlibat untuk melakukan suatu interpretasi, yaitu makna harfiah ujaran, inferensi pragmatik tingkat pertama, eksplikatur, inferensi pragmatik tingkat kedua, dan implikatur.

2.2.7 Fungsi dan Nilai Implikatur sebagai Tindak Tutur

Ujaran seorang penutur dapat dipandang sebagai penanda tindakan penutur. Tindakan seperti itu dikenal dengan istilah *tindak tutur*. Pengistilahan ini bermula dari penemuan teori *speech act* 'tindak tutur' dalam kaitannya dengan pragmatik (lihat Levinson 1983: 226;241). Teori ini pertama sekali digagas oleh Austin (1962) dengan bukunya yang berjudul *How to Do Things with Word*. Temuan terpenting dari teori ini ialah kesadaran bahwa dengan mengujarkan sesuatu, seorang penutur tidak sekadar mengujarkan sesuatu itu, tetapi dia juga sekaligus melakukan sesuatu.

Berdasarkan ada-tidaknya daya dan efek dalam tuturan, Austin membedakan tuturan dalam tiga fungsi: lokusi, ilokusi, dan perlokusi (lihat 2.1.3). Namun, fungsi yang mendapat banyak perhatian para ahli (misalnya, Searle, Fraser, Leech, dll.) adalah fungsi ilokusi.

Leech (1983: 211)—dengan dasar ketidaksetujuannya terhadap klasifikasi kategori ilokusi yang dikemukakan Austin dan sebagian kategori Searle—mengusulkan pengklasifikasian tindak ilokusi atas lima kategori. Kategori-kategori itu adalah sebagai berikut.

- 1) **Asertif**, yaitu fungsi ujaran yang mengikat diri penutur dengan kebenaran atau ujarannya (seperti menyatakan sesuatu, mempermasalahkan, berpendapat, berkeluh, dll.)
- 2) **Direktif**, yakni fungsi yang menandai usaha yang dilakukan penutur untuk memperoleh suatu tujuan agar petutur melakukan sesuatu (seperti menuntut, menyuruh, meminta, dll.)

- 3) **Komisif**, yaitu fungsi ujaran yang bersifat mengikat kepada penutur atas sejumlah tindakan yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, (seperti berjanji, mengancam, menawarkan, dll.)
- 4) **Ekspresif**, yaitu fungsi ujaran yang menandai pengungkapan penutur secara psikologis (seperti berterima kasih, bermasygul, meminta maaf, menyambut, mengucapkan selamat, mengecam, memuji, dll.)
- 5) **Rogatif**, yaitu fungsi yang menandai keingintahuan atau keraguan penutur atas sesuatu hal (antara lain, mempertanyakan, bertanya, meragukan, dll.)

Sebagaimana telah disebutkan dalam bahwa terkait dengan reflektivitas implikatur, dalam penelitian ini peneliti memandang perlu untuk memasukkan kategori sugestif (seperti memperingatkan, menasihatkan, dll.) yang terdapat dalam taksonomi Fraser sebagai kategori tersendiri yang berbeda dari kategori direktif baik dalam Searle maupun Leech. Dengan demikian kategori keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 6) **Sugestif**, yaitu ujaran yang menandai keinginan penutur kepada petutur agar petutur mempertimbangkan sesuatu kebijakan berupa tindakan sebagaimana dinyatakan dalam proposisi ujaran penutur (misalnya, memperingatkan, menganjurkan, menasihatkan, mengimbau, mendesak, dll.).

Pelibatan kategori ini didasarkan atas temuan data yang banyak mengimplikasikan adanya desakan, anjuran, atau imbauan penutur kepada berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat (M) yang pada dasarnya dilakukan untuk reflektivitas maksud dan tujuan politis penutur.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ancangan Penelitian

Secara umum, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam hal itu, arah dan hasil penelitian ini tidak berorientasi pada proses perhitungan yang cenderung melibatkan angka, persentasi, atau data statistik, tetapi lebih cenderung pada penggunaan analisis interpretatif. Orientasi penelitian ini cenderung pada pertimbangan proses, bukan pertimbangan matematik (lihat Mackey dan Gass 2005: 2—5; Nunan 1995: 3—10).

Substansi penelitian ini adalah menemukan perangkat-perangkat berupa ujaran yang berisi tema-tema tertentu (reflektor) yang menunjukkan bahwa penutur menggunakan perangkat itu untuk mengomunikasikan maksud dan tujuan politiknya secara refleksif. Tipe data bahasa dalam penelitian ini adalah tipe lisan. Data itu berupa data percakapan yang bersifat *improptu* (tidak dihafalkan) dan tidak dipengaruhi oleh skenario tertentu dari redaktur untuk mengujarkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa yang diujarkan itu masih bersifat natural, murni dari penutur pertama; dan bukan bahasa hasil sebagai dari pengolahan redaksi (band. Hamad 2004).

Pertimbangan yang tidak kalah penting dalam penelitian ini ialah ujaran para penutur dalam percakapan itu dapat dikatakan sebagai ujaran performatif. Keperformatifan itu ditandai oleh kesesuaian antara ujaran penutur yang bersifat politik dan penutur yang berstatus sebagai politisi. Kesesuaian itu sejalan dengan kriteria¹ yang dipersyaratkan dalam temuan Austin (1962) mengenai bisa atau tidaknya (validitas) suatu ujaran dikatakan sebagai ujaran performatif. Dalam syarat itu disebutkan bahwa penutur tuturan performatif haruslah orang yang berkepentingan untuk memikirkan, merasakan, dan memaksudkan sesuatu hal itu (lihat Levinson 1983:229). Demikianlah ujaran-ujaran penutur politik yang dijadikan data dalam penelitian ini dapat dianggap sah sebagai tuturan performatif dalam politik karena penutur merupakan orang yang bergelet dan

¹ Persyaratan itu berbunyi, "*The persons must have the requisite thoughts, feelings and intentions, as specified in the procedure*" (lihat Levinson 1983:229).

berkepentingan dalam politik atau pemerintahan, misalnya, gubernur, mantan gubernur, mantan panglima tertinggi, atau anggota badan legislatif.

Selain daripada syarat ujaran dan penutur di atas, pengujaran penutur (untuk data penelitian ini) juga sudah didukung oleh syarat yang menggariskan bahwa tuturan juga harus sesuai dengan situasi. Situasi yang turut mendukung pengujaran ujaran performatif yang bersifat politik adalah situasi masa (1—10 bulan) menjelang pemilu 2009 di Indonesia. Masa tersebut bukanlah masa kampanye resmi, tetapi penutur sudah dianggap melakukan tindak kampanye dalam bentuk implikatur-implikatur percakapan. Dalam hal itu, tindak kampanye merupakan tindak persuasi penutur yang bersifat refleksif.

Sebagai kajian pragmatik, proses penelusuran pendukung reflektivitas atas reflektor-reflektor dan bentuk performatif pengiringnya, harus melibatkan berbagai aspek, baik unit linguistik, maupun unit nonlinguistik. Dengan demikian, karakteristik penelitian ini digolongkan kepada ancangan analisis interaksi (periksa Nunan *Ibid*: 159–61).

3.2 Sumber Data

Data untuk penelitian ini bersumber dari percakapan politik di televisi Indonesia secara khusus dalam acara tayang bincang politik. Pengambilan data telah dilakukan selama sepuluh bulan: mulai dari tanggal 1 November 2007 sampai 31 Agustus 2008. Dari sejumlah stasiun televisi di Indonesia, ditetapkan empat stasiun televisi dengan lokasi pengambilan di Jakarta. Keempat stasiun tersebut ialah Metro TV (Kick Andy, To Day's Dialogue), TV One (Apa Kabar Indonesia), Trans 7 (Kupas Tuntas), dan Jak TV (Jalan Bincang). Penetapan pada empat stasiun tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan kekerapan stasiun-stasiun tersebut untuk menyajikan acara tayang bincang bertajuk politik dan/atau termasuk dalam percakapan biografi tokoh penting dalam politik skala nasional di Indonesia. Namun, ada satu data percakapan tambahan yang bersumber dari stasiun televisi di luar stasiun televisi, waktu, dan nama acara tayang bincang yang disebutkan di atas, yakni ANTV (Baru Bisa Mimpi, 04 September 2008). Data tersebut digunakan hanya sebagai pendukung data utama yang bersumber dari penetapan waktu dan tayang bincang tersebut. Data itu ditranskripsikan

sebagai bagian dari lampiran 3-D dan percakapan itu tidak seluruhnya ditranskripsikan untuk penelitian ini.

3.3 Penjaringan dan Pengidentifikasian Data

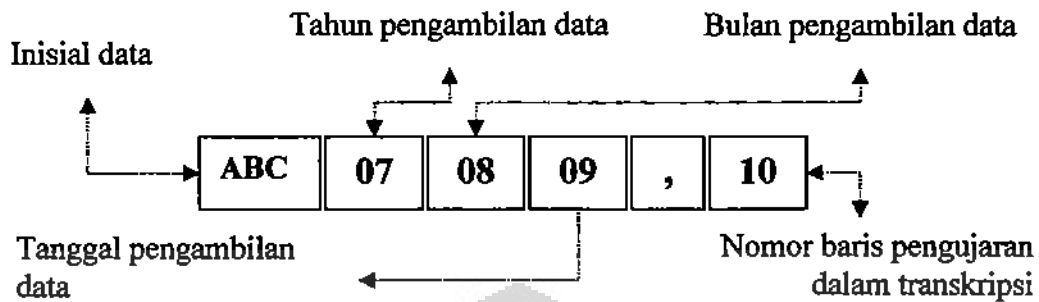
Pengadaan data dalam penelitian ini, pertama-tama dilakukan dengan mengumpulkan data tayang bincang politik dari televisi dengan **teknik perekaman**. Perekaman dilakukan secara audio-visual dengan menggunakan program aplikasi *television turner* (USB TV Box Gadmei UTV330).

Perlu dicatat, porsi atau jumlah data tayang bincang untuk setiap stasiun televisi sebagaimana disebut pada 3.2 tidak sama. Proses penayangannya juga adakalanya secara insidental, bergantung pada situasi perpolitikan saat itu. Dari sejumlah tayang bincang politik yang telah direkam, ditetapkan lima belas data tayang bincang politik sebagai data (lihat lampiran 2). Pemilihan data atas sumber dan jenis tayang bincang tersebut didasarkan atas keberpengaruhan dan reputasi tokoh utama politik tingkat nasional. Alasan ini sesuai dengan kategori yang ditemukan Austin untuk syarat keperformatifan, seperti yang telah jelaskan pada (3.1) di atas. Selain itu, muatan implikatur yang mengandung unsur reflektivitas juga menjadi salah satu pertimbangan atas penetapan data itu.

Selanjutnya, rekaman data tersebut ditranskripsikan menjadi data tulisan dengan pengodean data berdasarkan nama acara, tahun, bulan, tanggal. Dalam pada itu, setiap baris yang memuat ujaran ditandai oleh nomor urut pengujaran. Nomor urut pengujaran tersebut dibuat sebagai penelusuran data pengujaran, baik sebagai data utama maupun sebagai konteks pendukung. Selanjutnya ujaran yang memuat implikatur yang bersifat refleksif, direduksi dengan langkah-langkah berikut.

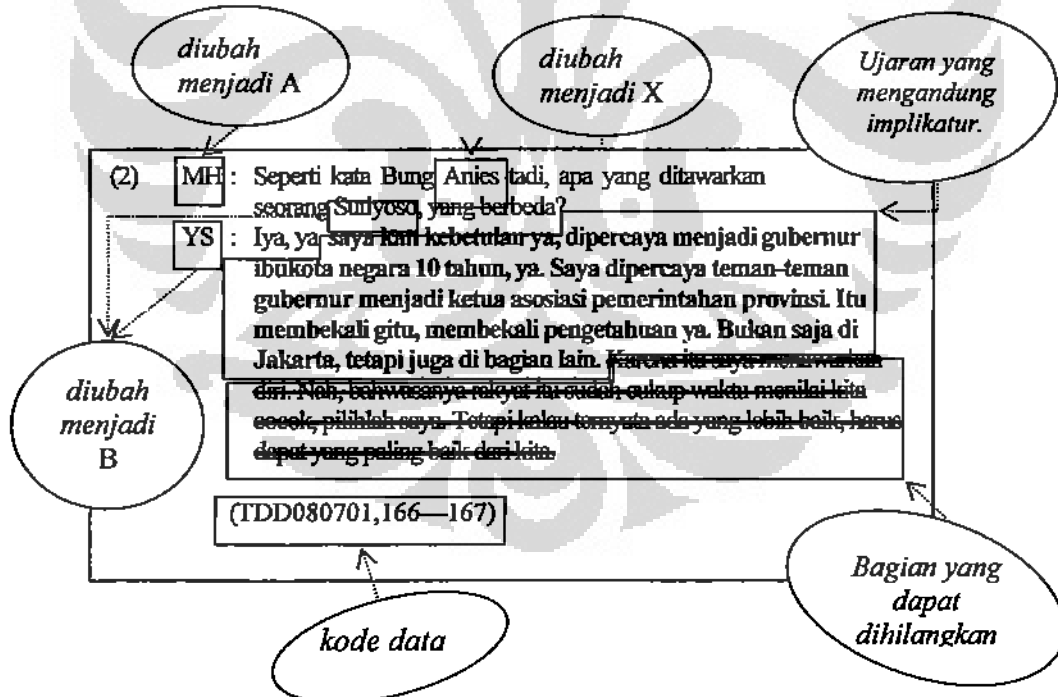
1. Menandai sejumlah ujaran yang saling terkait dan dianggap memuat implikatur, sekaligus memberi tanda atau kode data yang terdiri dari inisial tayang bincang (2—4 huruf awal) dan kode tahun, bulan, dan tanggal penyiaran, serta nomor urutan pembatasan, masing-masing ditandai oleh dua angka. Untuk memudahkan pembacaan, antara tanggal dan nomor urut

identifikasi dibatasi oleh tanda baca tanda koma (,), seperti tampak pada Skema 3.1 berikut.



Skema 3. 1 Kode Data

- Menyunting dan/atau menandai bagian tuturan yang dianggap dapat dihilangkan tanpa mengubah makna kontekstual tuturan, dengan memberi garis dua sejajar (*double strikethrough*) pada bagian yang dianggap dapat dihilangkan itu, seperti pada Skema 3.2 di bawah ini.



Skema 3. 2 Penyuntingan Data

- Merekonstruksi tuturan yang telah disunting (pada langkah kedua) sekaligus mengubah pemandu percakapan (*host* atau petutur langsung) dengan variabel A dan penutur politik dengan variabel B, serta orang lain yang namanya

disebutkan dengan variabel X. Apabila dianggap perlu, peneliti juga akan memunculkan eksplikatur (diapit tanda kurung siku [...] dan dicetak miring), serta menandai ujaran yang mengandung implikatur refleksif dengan cetak tebal. Dengan demikian, data yang akan ditampilkan dalam penelitian ini adalah hasil dari penyuntingan seperti tampak pada Skema 3.3 di bawah ini.

<p>(2a) A : Seperti kata Bung X tadi, apa yang ditawarkan seorang B, yang berbeda? B : Iya, ya saya kan kebetulan ya, dipercaya menjadi gubernur ibukota negara 10 tahun, ya. Saya dipercaya teman-teman gubernur menjadi ketua asosiasi pemerintahan provinsi. Itu membekali gitu, membekali pengetahuan ya. Bukan saja di Jakarta, tetapi juga di bagian lain.</p> <p style="text-align: right;">(TDD080701,166—167)</p>

Skema 3.3 Format Data yang Disajikan dalam Analisis

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua ancangan metode sekaligus. **Pertama**, ancangan pragma-dialektal seperti yang diusulkan oleh Frans van Eemeren dan Rob Grootendorst (1994 diacu Renkema 2004: 205). Pada dasarnya ancangan ini digunakan untuk menelusuri nosi pragmatik dalam tindak tutur. Istilah *dialektal* (akar kata dari *dialektika*) berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti ‘seni berargumentasi’. Dalam hal itu, kebenaran premis yang diargumentasikan cenderung dapat diterima walaupun masih dapat diperbantahkan lagi.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam ancangan pragma-dialektal ini adalah pelibatan PKS. Pengimplisitan suatu informasi yang dilakukan oleh penutur dapat ditelusuri dengan asumsi bahwa penutur telah berada dalam kondisi melibatkan diri dan proaktif dalam kerja sama percakapan serta berupaya untuk mematuhi prinsip dan maksim-maksim PKS. Dalam hal itu, penutur juga telah diasumsikan bahwa dia sudah bermaksud untuk membuat sebuah pernyataan secara kontributif dan informatif.

Ancangan **kedua** ialah ancangan interpretasi (band. Nunan *ibid*: 159—178). Ancangan ini bertujuan untuk memberi interpretasi dan penjelasan terhadap fenomena yang ada—yang dalam penelitian ini adalah fenomena implikatur.

Untuk penelitian ini, peneliti mengadaptasikan ancangan interpretasi yang diajukan oleh Kearn (2000: 274), yakni dengan melakukan penginferensian pada dua tingkat. Tingkat pertama ialah proses penetapan referensi konteks taksa dan inferensi indeksikal. Proses ini selanjutnya menghasilkan eksplikatur. Tingkat kedua ialah memproses eksplikatur sebagai bahan baku dengan cara menginferensikannya kepada implikatur.

Namun, dalam penelitian ini interpretasi itu akan diadaptasikan dengan langkah sebagai berikut. Pada tingkat pertama, menetapkan reflektivitas sebagai referensi yang terkuat dari sejumlah pemaknaan yang dimungkinkan atas suatu bentuk pengujaran. Penetapan itu akan membermarkan adanya rumpang informasi dalam bentuk pokok-pokok pesan yang implisit. Pokok-pokok pesan itu selanjutnya dieksplisitkan alih-alih sebagai eksplikatur. Pokok-pokok pesan tersebutlah yang penjemabatan ujaran penutur terhadap penelusuran reflektivitasnya. Pada tingkat kedua, mengeksplisitkan pokok-pokok pesan itu dan mengonstruksikannya ke dalam suatu rangkaian kalimat dengan pokok pesan, bentuk performatif, alasan konteks, dan alasan reflektivitas sebagai satuan gramatikalnya. Bentuk konstruksi yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut.

- (1) B mengujarkan performatif "U" karena —secara kontekstual B adalah X—B menginginkan x, y, dan/atau z.
- (2) Tindak B dengan reflektor "R" adalah untuk x sehingga y, dan/atau z.

Selanjutnya, implikatur itu akan diidentifikasi juga menurut gejala pematuhan, pelanggaran PKS dan maksim-maksimnya. Terakhir, keberterimaan dan kekoherenan konstruksi reflektivitas itu, baik konstruksi dengan muatan pokok pesan (seperti pada [1]) maupun konstruksi dengan muatan fungsi dan nilai (seperti pada [2]) di atas akan diuji, antara lain, dengan mencoba untuk menyematkan unsur pengingkaran, dan/atau mengubah posisi unsur-unsur tertentu, dan membandingkan perubahannya. Apabila pengujian itu menghasilkan nosi yang dianggap lemah akan diberikan tanda "?"; jika dianggap sangat lemah

akan diberi “??”; dan jika dianggap tidak berterima atau menjadi anomali, akan diberi tanda“*”.

Sebagai contoh, bentuk (1) di atas diuji dengan menyematkan kata *tidak* sebagai bentuk pengingkaran “tujuan/alasan” alasan penutur. Konstruksinya dapat bentuk seperti pada (1a) berikut.

- (1a) B mengujarkan “U” karena—secara kontekstual B adalah X—B:
- (i) menginginkan x.
 - (ii) ?tidak menginginkan x, y, dan/atau z.

Bentuk (i) dalam contoh konstruksi (1a) merupakan bentuk koheren dan dapat berterima secara pragmatik. Sementara itu, bentuk (ii) dianggap lemah sebagai alasan dan tujuan utama penutur. Demikian juga pengujian konstruksi untuk contoh (2). Pengujiannya dilakukan dengan mengubah posisi fungsi dan nilai tertentu. Dengan perubahan itu akan terlihat keberterimaan dan kekoherenan bagian itu kepada keseluruhan bagian dalam konstruksi itu, seperti pada (2a) berikut.

- (2a) Tindak B dengan reflektor “R” adalah:
- (i) untuk x sehingga y, dan/atau z.
 - (ii) ??untuk y sehingga x, dan/atau z.
 - (iii) *untuk z sehingga y, dan/atau x.

Bentuk (i) dalam konstruksi (2a) merupakan bentuk yang koheren dan dapat berterima secara pragmatik. Sementara itu, bentuk (ii) dianggap sangat lemah, dan bentuk (iii) merupakan anomali.

BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN

4.0 Pengantar

Bab ini akan memaparkan analisis dan bahasan reflektivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia dalam dua subbab yang paling substansial, yakni *Konstruksi Reflektivitas Implikatur Percakapan dan Penguatannya* (pada 4.2) dan *Fungsi dan Nilai Implikatur Percakapan* (pada 4.3). Sebagai catatan, data yang akan dijadikan contoh pada subbab 4.3 diambil dari data percakapan yang disajikan pada 4.2 masing-masing sebanyak 2–3 data sebagai perwakilan.

Namun, sebelum kedua subbab tersebut dipaparkan, terlebih dahulu akan dijelaskan rumusan konteks (pada 4.1) sebagai modal awal untuk memahami dua subbab di atas. Rumusan itu berfungsi untuk mengenalkan latar belakang pewacanaan reflektivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik itu. Rumusan konteks tersebut dijabarkan dalam dua bagian: 1) konteks wacana dan 2) konteks pengarah. Konteks wacana diambil dari pernyataan-pernyataan yang menghasilkan praanggapan bahwa penutur-penutur politik tertentu sungguh bermaksud untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Konteks pengarah diambil dari pertanyaan petutur langsung (pemandu acara tayang bincang dan petutur lain yang terlibat langsung dalam acara tayang bincang). Pertanyaan itu pada umumnya berisi informasi seperti yang dipraanggapkan pada konteks wacana. Pertanyaan itu diujarkan secara langsung kepada penutur politik.

Penyajian data, pendukung rumusan pokok pesan, dan pengujian konstruksi akan ditandai dengan model penomoran seperti di bawah ini.

- (a), (b), ... (n) : nomor pokok pesan
- (E-1), (E-2), ... (E-n) : nomor eksplikatur
- (FN-1), (FN-2), ... (FN-n) : nomor konstruksi fungsi dan nilai
- (K-1), (K-2), ... (K-n) : nomor konstruksi pengujaran
- (K'-1), (K'-2), ... (K'-n) : nomor konstruksi pengujian
- (R-1), (R-2), ... (R-n) : nomor konstruksi reflektivitas

- (i), (ii), ... (n) : nomor bagian konstituen (bentuk) yang diubah sebagai fokus pencermatan dalam konstruksi pengujian (K'-n)
- (1a), (1b), ... (1n) : nomor data utama percakapan dalam satu cakupan fungsi
- (1), (2), ... (n¹) : nomor data utama percakapan
- (1.1), (1.2), ... (n.n) : nomor data ujaran pendukung percakapan data utama.
- ► : lambang konstruksi kesimpulan atas reflektor

4.1 Postulasi Konteks

Situasi dan kondisi pada dasarnya turut melatarbelakangi suatu peristiwa tutur atau percakapan. Situasi dan kondisi itu juga berperan dalam pembentukan makna sebuah ujaran. Selain itu, juga masih terdapat unsur-unsur lain (*extra-linguistic*) yang dapat mendukung pemaknaan ujaran, misalnya, pengetahuan dunia penutur, status penutur, atau pengujaran-pengujaran yang dapat diasumsikan (dipraanggapkan) sebagai bagian dari maksud penutur secara intertekstualitas. Bagian itulah yang disebut sebagai konteks (lihat Lyons (1977a) dikutip Levinson 1983: 23). Pada Bab 1 (subbab 1.1) telah disebutkan bahwa praanggapan dapat dijadikan sebagai konteks pendukung keberadaan reflektivitas implikatur khususnya untuk penelitian ini (lihat juga 2.2.5).

Malinowski (1923; dikutip Verschueren 1999: 75) menyebutkan bahwa pada kenyataannya, baik bahasa lisan maupun tertulis, sebuah kata tanpa konteks hanyalah sebuah ilusi (*figment*) dan belum memberi makna yang signifikan terhadap sesuatu apa pun dalam realitas berbahasa. Untaian kata dalam ujaran sebagai realitas berbahasa akan menjadi bermakna secara jelas hanya jika dihubungkan dengan konteks.

Kata *perubahan*, misalnya, belum mempunyai makna yang pasti (*definite*) terhadap sesuatu apa pun jika dikeluarkan dari konteks. Akan tetapi, kalau dimasukkan ke dalam konteks iklim, misalnya, kata *perubahan* itu dapat bermakna 'peralihan musim', 'pancaroba', atau 'keadaan cuaca yang tidak menentu'. Dalam konteks ini, kata *perubahan* tampaknya mengandung nuansa makna yang negatif. Berbeda dari itu, kalau dimasukkan ke dalam konteks politik,

¹ variabel penomoran sampai batas takterhingga

kata *perubahan* justru bernuansa makna yang positif. Dalam konteks ini, kata *perubahan* dapat dimaknai, misalnya, sebagai ‘tawaran sistem ekonomi yang lebih baik’, ‘penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak’, ‘sistem birokrasi yang lebih sederhana’, dan sebagainya.

Lebih jauh, ketika pengidentifikasian data dilakukan dalam penelitian ini, kata *perubahan* merupakan salah reflektor penting. Istilah *perubahan* sering menjadi isu yang ditonjolkan dalam percakapan. Penonjolan itulah yang menjadikan kata *perubahan* ditandai sebagai reflektor dalam percakapan politik. Istilah tersebut menjadi unsur yang turut menunjukkan keberadaan reflektivitas. Selanjutnya unsur tersebut didukung lagi oleh konteks, antara lain, situasi menjelang pemilu anggota legislatif dan/atau pemilihan presiden, status penutur sebagai politikus, posisi kepartaian penutur, baik sebagai oposisi maupun sebagai pendukung pemerintah, pengunggulan penutur sebagai orang yang akan terlibat dalam politik dalam survei tertentu, iklan sejumlah penutur dalam sejumlah media massa yang dianggap sebagai iklan politik, atau diterbitkannya buku tertentu yang juga dianggap bernuansa politik.

Konteks pendukung lainnya ialah pernyataan-pernyataan yang bersifat politik (misalnya, penjelasan yang diberikan penutur mengenai situasi politik, atau penjabaran penutur perihal prestasinya dalam pemerintahan). Pelibatan konteks tersebut bisa secara internal (dalam satu wacana percakapan), tetapi bisa juga secara eksternal (dari luar wacana percakapan saat itu).

Sebagai contoh konteks untuk penelitian ini, perhatikanlah dua cuplikan pernyataan pemandu acara tayang bincang (A) di bawah ini.

- (1) A: Menjelang 2009 sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden. Selain SBY, Megawati, Jusuf Kalla, nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Dari segi popularitas, menurut lembaga demokrasi dan HAM, yang terbaru, urutannya sebagai berikut. SBY: 21 persen, Megawati: 17, 6 persen, *Amien Rais*: 7,5 persen, *Jusuf Kalla*, *Wiranto*: 4,9 persen, *Gus Dur*...[...]: 1,9 persen.

(KA071115,72)

- (2) A: [...] maupun Megawati. Kalaupun ada yang siap menantang Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk pilpres 2009, juga... masih juga nama-nama yang sudah a..., sering kita dengar. Di antaranya ada *Prabowo Subianto*, *Sri Sultan Hamengku Buwono X*, dan juga

Sutiyoso. Haruskah pilpres tahun 2009 diwarnai tokoh-tokoh lama? Tidak adakah tokoh alternatif pemimpin baru yang bisa menjadi calon presiden di tahun 2009? [...]

(TDD080701,01; band KA080208 atau pada (12); KA071101 atau pada (6) atau (9); TDD080701 atau pada (13))

Ujaran A dalam (1) pada bagian “...menjelang 2009 sejumlah nama disebut sebagai calon presiden...” memberi petunjuk bahwa ‘telah ada suatu wacana perihal sejumlah politisi yang akan terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’. Demikian juga dengan pernyataan A pada (2) dengan bagian “Kalaupun ada yang siap menantang...untuk pilpres 2009, di antaranya, x, y, dan z.” Dengan mencermati isinya, penutur A tampaknya sudah mempunyai sumber pengacuan untuk membuat pernyataan seperti itu sebelum percakapan berlangsung. Pernyataan pada (1) menjadi konteks internal terhadap data berkode KA071115, tetapi menjadi konteks eksternal terhadap data berkode lain. Demikian juga pernyataan dalam (2) menjadi konteks internal terhadap data berkode TDD080701, tetapi menjadi konteks eksternal terhadap data di luar kode itu.

4.1.1 Praanggapan sebagai Konteks Wacana

Pada 2.2.5 telah dijelaskan bahwa praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan penutur sebagai informasi atau kasus yang mendahului kasus yang diujarkan penutur. Dengan demikian, ketika terdapat suatu pernyataan, misalnya, seperti pada (1) atau (2) di atas, dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ujaran itu sah sebagai pihak yang berencana untuk melibatkan dirinya dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Postulasi praanggapannya dapat dikonstruksikan dengan konstruksi (K-1;2) berikut.

(K-1;2) Sejumlah penutur politik--yakni mereka yang namanya telah disebut seperti pada (1) dan/atau (2)--berpotensi dan berkeinginan untuk terlibat pada kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Akan tetapi, perlu dicatat, pertanyaan dari mana A mendapatkan sumber data pengujaran itu, bukanlah bagian dari penelitian ini. Hal yang terpenting adalah asumsi yang dapat dipraanggapkan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Data pengujaran lainnya adalah pernyataan seperti pada (3) atau (4) di bawah ini.

- (3) A: Baik. Masih berkaitan dengan dugaan sementara orang bahwa ketidaksediaan X untuk dipilih sebagai gubernur adalah *sebuah strategi untuk menuju kepada pemilihan presiden tahun 2009*. Apakah betul?

(KA071101,310)

- (4) B: Saya nggak ngerti. Mungkin persepsi tadi yang terbentuk dari karakter yang saya mainkan. Nah, tadi saya katakan lagi, kalau memang karena kerinduan kepada **moralitas pemimpin** dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang bagaimana **menyatukan secara utuh NKRI** ini, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.

A: *Wah, ini kayaknya udah orasinya capres-cawapres ini.* [...]

(AKIM 080611, 106—115; lihat juga KA071101, 96—120)

Dengan memperhatikan unsur satuan bahasanya, kata *dugaan* yang dipakai A dalam ujarannya pada (3) dan kata *persepsi* yang dipakai B pada (4) di atas (lihat bagian yang bergaris bawah) merupakan unsur lingual yang menjadi petunjuk awal akan kemungkinan penutur (sebagai penutur politik) akan melibatkan diri dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Konteks pendukung lainnya secara eksternal terhadap data (3) adalah data (2). Dalam hal itu X yang disebutkan A pada (3) ialah salah seorang dari nama yang di sebutkan A pada (2).

Petunjuk lain ialah ujaran A pada (4) dengan yang berbunyi, '*Wah, ini kayaknya udah orasi capres-cawapres ini*'. Ujaran itu merupakan satu kesimpulan A terhadap pernyataan B. Dalam pada itu, A tampaknya sudah mempunyai pengetahuan tertentu (*knowledge world*) sehingga A dapat menyimpulkan bahwa pernyataan B tersebut sebagai bentuk orasi politik. Salah satu yang menjadi petunjuk bagi A untuk membuat kesimpulan seperti itu ialah bagian ujaran B dengan frasa *moralitas pemimpin* dan klausa *menyatukan secara utuh NKRI* (lihat yang bercetak tebal). A tentu telah memiliki pengetahuan dunia bahwa persoalan yang terkait dengan *moralitas pemimpin* atau *keutuhan negara* adalah bagian dari otoritas pemimpin tertinggi dalam suatu negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika penutur politik mengujarkan ujarannya tersebut, ujaran itu dapat diinferensikan sebagai orasi capres-cawapres.

4.1.2 Konteks Pengarah

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu hal yang dapat mengarahkan penyimpulan akan “adanya tujuan penutur politik (B) untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang” adalah sejumlah pernyataan ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada penutur perihal keinginan dan tujuan penutur. Pernyataan dan/atau pertanyaan itulah yang turut mengarahkan proses penelusuran reflektivitas implikatur dalam penelitian ini.

Selain ujaran berupa pernyataan seperti pada (1)—(4) di atas, pertanyaan seperti (5)—(8) di bawah ini (bercetak miring) juga menjadi penanda dan pemerkuat keberadaan reflektivitas tersebut. Pertanyaan ini sekaligus menjadi salah satu titik tolak pengidentifikasian reflektivitas implikatur yang diujarkan penutur politik.

- (5) C: [...] *apakah Pak B masih mempunyai ambisi untuk menjadi presiden?*
 A: *Masih ingin menjadi presiden?*
 B: Tadi saya katakan ya, saya sudah berkecimpung, saya berusaha [untuk melakukan yang baik bagi negara]
 A: Masih muda lho. Ingat, ini masih 55 tahun. Jangan lupa itu!
 B: Saya merasa *kok kurang pande*, ya. Yang naif saya. Jadi, bukan (tertawa). Jadi saya kira banyak lain yang lebih pantas.
 (KA080208,46---53; band. TDD080701,01)
- (6) A: *Kalau rakyat mendukung, dan partai-partai mendukung Anda untuk maju pada tahun 2009, bersediakah Anda?*
 B: Itu ulasannya masyarakat. **Kalau memang memerlukan saya, akan mencari diri saya...**, tapi saya tidak akan mengatakan di tahun 2009 saya akan maju menjadi calon presiden. Itu tidak mungkin akan saya lakukan.
 (KA071101,329—332)
- (7) A: Tapi pertanyaan saya adalah sebetulnya *Bang B, mau atau tidak mau untuk terjun dan akhirnya maju dalam kancah politik?*
 B: Ada dikatakan, kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu.
 A: Tapi pilihlah yang tidak mau.
 (AKIM 080611, 106—115)
- (8) A: Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan buku yang diluncurkan gitu soal lokomotif perubahan. *Bapak itu memang sudah mempersiapkan diri jadi capres, ya Pak, ya?*
 B: A..., kami sebetulnya, mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan, karena negara kita ini sudah betul-betul tertinggal dan

banyak sekali dari bangsa kita yang belum hidup layak. Harus ada perubahan ke arah Indoneisa yang lebih baik.

(AKIM080814,06—07)

Salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan dari pertanyaan-pertanyaan seperti pada (5)—(8) di atas adalah “apa dasar pemikiran yang melatarbelakangi petutur untuk mengajukan pertanyaan itu sedemikian?” Dasar pemikiran itu ialah petutur telah mempunyai pengetahuan dan penganggapan bahwa penutur yang ditanya juga berpotensi untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dengan mencermati pertanyaan A dengan respons B pada (5)—(8) di atas, implikatur yang dimungkinkan dari jawaban B dapat diarahkan pada dua kategori, yaitu ‘ingin, bersedia, mau, dan sebagainya’ (selanjutnya ditandai sebagai kategori implikasi positif) atau ‘tidak ingin, tidak bersedia, tidak mau, dan sebagainya’(selanjutnya ditandai sebagai kategori implikasi negatif). Dua kemungkinan tersebut dapat digambarkan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Kategori Pemungkinan Implikatur Respons Penutur

Ujaran	Positif	Negatif
(5)	ingin	tidak ingin
(6)	bersedia	tidak bersedia
(7)	mau	tidak mau
(8)	mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan dengan cara menjadi presiden	mempersiapkan diri hanya untuk memimpin perubahan, dan tidak untuk menjadi presiden

Sebagai hipotesis pertama, penyimpulan tuturan itu sebagai implikatur dalam kategori negatif (kolom kedua) mempunyai daya yang relatif **lemah**. Alasannya ialah daya ingkar yang termuat dalam jawaban B sebagai bentuk ketidakinginan, ketidakbersediaan, ketidakmauan, dan ketidaksiapan dirinya untuk terlibat pada kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’ **tidak kuat** (lemah). Lemahnya penolakan itu dapat dicermati melalui penggunaan perangkat linguistik (ujaran B yang bergaris bawah) yang dalam hal itu derajat ketegasannya lebih rendah daripada penggunaan perangkat sejenisnya.

Penggunaan bentuk *tidak pandai*, misalnya, lebih tegas daya penolakannya daripada *kurang pande* dalam ujaran B pada (5); bahkan bentuk *tidak mampu* lebih tegas daya penolakannya daripada *kurang pande*; bentuk *saya lebih tidak pantas* lebih tegas daya penolakannya daripada *banyak yang lebih pantas*. Sementara itu, daya penolakan ujaran *saya tidak akan bersedia* lebih tegas daripada bagian ujaran *saya tidak akan mengatakan* dalam ujaran B pada (6); daya penolakan bentuk *saya tidak mau* lebih tegas daripada pengujaran B dengan *kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu* pada (7); dan daya penolakan melalui ujaran *mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan dan tidak ingin menjadi presiden* lebih tegas daripada bentuk *mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan* seperti ujaran B pada (8).

Konsep *ketegasan* daya seperti tersebut di atas, sebenarnya, merupakan bagian dari analisis Gazdar (1979a, diacu Levinson 1983: 132—46; lihat juga Kearns 2000: 258—60) perihal **skala keinformatifan** yang dikaitkan dengan implikatur kuantitas. Dalam hal itu, daya bentuk ujaran dalam satuan gramatikal yang dianggap lebih tegas adalah daya yang lebih kuat atau lebih informatif, sedangkan jika daya itu kurang tegas dikategorikan sebagai daya yang lemah atau kurang informatif. Dengan mengacu pada penjelasan Gazdar tersebut, bandingkanlah bentuk gramatikal tersebut pada dua kolom dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Skala Keinformatifan Makna dalam Satuan Gramatikal Respons Penutur

Lemah	Kuat
kurang pandai	tidak pandai
pandai (menjadi x)	mampu (menjadi x)
kurang pandai (jadi x)	tidak mampu (menjadi x)
banyak yang lebih pantas	saya lebih tidak pantas
kalau ingin jadi x, jangan dipilih	saya ingin jadi x, saya jangan dipilih
memimpin perubahan	hanya menginginkan perubahan, tanpa menginginkan menjadi presiden

Dari tabel di atas tampak bahwa penolakan akan menjadi kuat atau lebih tegas apabila ujaran B menggunakan satuan gramatikan seperti pada kolom kedua

Tabel 4.2. Selain itu, bandingkan pulalah pengujaran B yang asli dengan pengujaran B yang diandaikan seperti pada kolom keempat (pengujaran andaian) pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Konstruksi Pembandingan Pengujaran Asli dengan Pengujaran Andaian

No	Penutur	Pengujaran Asli	Pengujaran Andaian
(5)	B	Saya merasa <i>kok kurang pande</i> , ya. Yang naif saya. Jadi, bukan (tertawa). Jadi saya kira <u>banyak lain yang lebih pantas</u> .	Saya merasa <i>kok tidak bisa</i> , ya. Yang naif saya. Jadi, bukan (tertawa). Jadi saya kira <u>saya lebih tidak pantas</u> .
(6)	B	Itu ulasannya masyarakat. Kalau memang memerlukan saya, akan mencari diri saya..., tapi <u>saya tidak akan mengatakan</u> di tahun 2009 saya akan maju menjadi calon presiden. Itu tidak mungkin akan saya lakukan.	Itu ulasannya masyarakat. Kalau memang memerlukan saya, akan mencari diri saya..., tapi <u>saya tidak akan bersedia</u> di tahun 2009 saya akan maju menjadi calon presiden. Itu tidak mungkin akan saya lakukan.
(7)	B	Ada dikatakan, kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu.	Ada dikatakan, kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu.
	A	Tapi pilihlah yang tidak mau.	Tapi pilihlah yang tidak mau.
	B	—	<u>Sementara saya, mau dan menginginkan jabatan politik itu.</u>
(8)	B	A..., <u>kami sebetulnya, mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan,</u>	A..., kami sebetulnya, mempersiapkan diri <u>hanya untuk memimpin perubahan dan tidak mempersiapkan diri untuk menjadi capres.</u>

Faktanya, B menyatakan ujarannya tidak dengan perangkat pada kolom keempat tersebut (sebagai penolakan yang lebih kuat). Hal ini sejalan dengan pendapat Levinson (1983: 133) yang mengatakan bahwa kurang dapat berterima jika penutur menyatakan dengan perangkat yang lemah atau yang lebih rendah, tetapi penutur itu memaksudkan hal yang daya ketegasannya lebih kuat atau lebih tinggi. Dalam notasi dalil itu dituliskan dengan “U_{yang lemah}”+> “~”U_{yang lebih kuat}”.

Diandaikan B sungguh-sungguh menolak untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu, tentu B cenderung akan mengujarkan bentuk ujaran yang penolakannya lebih kuat seperti kolom andaian dalam Tabel 4.3.

Oleh karena bukan sebagai penolakan, implikatur jawaban B pada (5)—(8) dapat dikatakan sebagai hal yang positif seperti pada Tabel 4.1. Dalam hal itu, (sebagai **hipotesis kedua**) jawaban B pada (5)—(8) di atas B cenderung mengimplikasikan keinginan, kebersediaan, kemauan, dan/atau kesiapan penutur untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang; dan bukan penolakan. Itulah implikatur terkuatnya. Konstruksi implikatur positif tersebut dapat dipostulatkan seperti (K-5)—(K-8) berikut ini.

- (K-5) B mengujarkan, “... *saya kurang pande*”
 +> ‘~ tidak bisa’ atau ‘~ tidak ingin’ (bukan berarti tidak bisa/tidak ingin).
 +> ‘bisa’ dan ‘ingin’.
- (K-6) B mengujarkan, “... *saya tidak akan mengatakan*”
 +> ‘~ tidak bersedia’ (bukan berarti tidak bersedia)
 +> ‘bersedia’.
- (K-7) B mengujarkan, “... *kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu*”
 +> ‘~ tidak mau’ (bukan berarti tidak mau).
 +> ‘mau’.
- (K-8) B mengujarkan, “*kami sebetulnya mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan*”
 +> ‘~ tidak mempersiapkan diri jadi presiden’.
 +> ‘Ya, mempersiapkan diri jadi presiden’.

Berdasarkan konstruksi (K-5)—(K-8) di atas, keberterimaan implikatur ujaran B pada (5)—(8) dapat diuji dengan membandingkan antara bentuk (i) dan (ii) pada (K’-5—8) di bawah ini.

- (K’-5—8) B mengujarkan “(5)—(8)” karena—secara konteks politik B adalah orang yang berkecimpung dalam politik atau yang diunggulkan dalam satu survei politik—B:
- (K’-5) (i) ingin menjadi presiden.
 (ii) ?? tidak ingin menjadi presiden.
- (K’-6) (i) bersedia maju pada tahun 2009.
 (ii) ?? tidak bersedia maju pada tahun 2009.

- (K'7) (i) mau terjun dalam kancah politik
 (ii) ?? tidak mau terjun dalam kancah politik.
 (K'-8) (i) mempersiapkan diri jadi *capres*.
 (ii) ?? tidak mempersiapkan diri jadi *capres*.

Bagian (i) merupakan bentuk yang dapat berterima secara pragmatik (sebagai implikatur yang terkuat), sedangkan bagian (ii) merupakan bentuk yang kurang berterima secara pragmatik dan merupakan implikatur yang lemah. Kuatnya implikatur yang dinyatakan dalam bentuk (i) akan didukung oleh ujaran-ujarannya yang lain dalam reflektor-reflektor yang akan dibahas pada 4.2.1 nanti. Ketika ujaran-ujaran B tersebut sah sebagai respons positif sebagaimana dalam Tabel 4.1, kesahihan itulah yang memberi arah kepada penarikan inferensi bahwa penutur benar-benar mengomunikasikan sesuatu pesan politiknya secara refleksif dalam sebagian besar ujarannya.

Selain sebagai pengarah, tuturan itu juga menjadi penguat terhadap tuturan-tuturan yang ada melalui penggunaan sejumlah reflektor. Demikian sebaliknya, tuturan performatif pada 4.2.1 yang akan dibahas sebagai subbab dari 4.2 berikut ini juga akan berfungsi sebagai pendukung dan penguat terhadap kesimpulan perihal respons positif penutur pada (5)—(8) yang dijadikan sebagai konteks pengarah 4.1.2 dan juga konteks wacana pada 4.1.1 di atas.

4.2 Konstruksi Refleksivitas Implikatur Percakapan dan Penguatannya

Percakapan yang dilakukan oleh seseorang penutur politik dalam acara tayang bincang dapat ditandai sebagai peristiwa tindak performatif. Keperformatifan ujaran dalam percakapan itu sejalan dengan ciri-ciri performatif yang dijelaskan oleh Austin (1962) dalam teorinya teori tindak tutur. Dalam hal ini, ketika seseorang penutur politik mengujarkan sesuatu ujaran, penutur tersebut sekaligus melakukan suatu tindakan, yaitu tindak mempengaruhi khalayak (M) agar mempertimbangkan pesan-pesan politik penutur. Upaya itu dilakukannya untuk mencapai tujuan politiknya, yakni agar dirinya atau pihaknya “dipilih” dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Selain itu, respons penutur terhadap suatu pertanyaan atau pernyataan dengan memberi uraian yang bersifat politik, ada kalanya pernyataan atau

pertanyaan merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan diri sebagai seorang yang layak terhadap M. Lebih jauh, ujaran itu dapat dikatakan sebagai upaya penutur politik untuk menarik simpati M. Tujuan akhirnya adalah agar M mempertimbangkan penutur secara positif dalam kepentingan politik di masa yang akan datang.

Seperti yang telah disebutkan dalam kerangka konseptual pada Bab 1, reflektivitas implikatur dalam penelitian ini akan dicermati dari dua sisi, yaitu sisi penutur dan sisi petutur. Dari sisi penutur, reflektivitas implikatur berkenaan dengan cara atau strategi penutur untuk mengomunikasikan pesan politiknya. Dalam hal itu, ditemukan sejumlah reflektor beserta bentuk performatif pengiringnya (tinjauan dari sisi penutur ini dijelaskan pada 4.2.1 di bawah ini) dalam ujaran-ujaraan penutur. Dari sisi petutur, reflektivitas implikatur berkenaan dengan fungsi dan nilai yang terkandung dalam implikatur percakapan penutur (selanjutnya tinjauan dari sisi petutur ini akan dijelaskan dalam subbab 4.3).

4.2.1 Reflektor dan Performatif Pengiring

Berdasarkan pengidentifikasian implikatur percakapan pada lima belas data percakapan pada tayang bincang politik di televisi Indonesia (lihat lampiran 3), ditemukan enam kategori umum yang menjadi reflektor dan bentuk performatif pengiringnya. Enam reflektor dan performatif itu didaftarkan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Reflektor dan Performatif Pengiring

No	Performatif	Reflektor
1	mendesakkan	perubahan
2	menilai	keadaan sekarang
3	mempermasalahkan	keterlibatan pihak asing
4	mempertanyakan	keutuhan negara dan bangsa
5	mengargumentasikan	ide pendiri bangsa
6	mengatasnamakan	MAP

Sebagai catatan, pengurutan reflektor dan performatif di atas bukanlah sebagai urutan yang sistematis dalam setiap sumber data, melainkan bersifat manasuka.

4.2.1.1 Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mendesak'

Kata *perubahan* (selanjutnya ditandai dengan “perubahan”) adalah salah satu kata atau perangkat yang kerap digunakan penutur sebagai respons atas suatu pernyataan atau jawaban atas suatu pertanyaan. Kecepatan itulah yang menjadikan segala hal yang terkait dengan “perubahan” (misalnya, penutur menggunakan kata *berubah, merubah, ganti, berantas*, dan sebagainya) sebagai salah satu reflektor dalam percakapan politik. Penggunaan reflektor ini dapat mengimplikasikan sejumlah pemaknaan, bergantung pada penutur dan isi pertanyaan/pernyataan lawan tuturnya.

Secara umum, penggunaan tema “perubahan” merupakan bagian tindak performatif yang menyiratkan adanya pendesakan (ilokusi *mendesak*) untuk melakukan suatu “perubahan”. Perhatikan contoh (9) di bawah ini.

- (9) A : Pak B, pernyataan Anda untuk tidak bersedia dipilih kembali sebagai Gubernur x, sebenarnya alasan yang jujur itu apa sih?
 B : Bagi saya, dulu, sebelum republik ini ada, ada yang namanya pemerintahan Kasultanan x yang bersifat kerajaan. Oleh Almarhum orangtua saya, sebagai bentuk dukungan kepada republik. Pemerintahan yang bersifat kerajaan itu, menjadi DI x bagian dari republik. Berarti dari pemerintahan kerajaan menjadi suatu wilayah yang mendukung kedaulatan di tangan rakyat. Jadi, sejarah bagi saya terulang lagi. [Oleh karena itu,] saya *men-declare*, “Saya tidak bersedia [untuk menjadi Gubernur x].” *Saya melihat bahwa tantangan zaman ini sudah berubah. Artinya, kedaulatan di tangan rakyat, harus menjadi kekuatan baru di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan.* Saya ingin masyarakat x tunduk pada sistem dan manajemen pemerintah daerah.

(KA071101,6—22; lihat juga KA071101,81—84; KA071101,123—129; KA071101,335; 342—348 dan KA071101, 329—332 atau data (6) sebagai konteks)

Posisi reflektor pada percakapan di atas adalah pada bagian yang dicetak miring, “*Saya melihat bahwa tantangan zaman ini sudah berubah.*” Konteks

wacana yang melatarbelakangi percakapan di atas adalah konteks ketidakbersediaan B untuk dipilih kembali untuk menduduki satu jabatan tertentu dalam pemerintahan (menjadi gubernur) suatu daerah (lihat lampiran 3-A). Secara internal juga terdapat konteks berupa dugaan sejumlah kalangan yang mendugakan bahwa ketidakbersediaan B disebabkan keinginannya untuk kepentingan politik tertentu. Salah satu unsur yang memperkuat dugaan tersebut ialah respons penutur dengan menggunakan “perubahan” seperti dalam ujarannya di atas.

Dengan memperhatikan bagian yang mengikuti reflektor, yaitu ujaran yang berbunyi, “*Artinya, kedaulatan di tangan rakyat, harus menjadi kekuatan baru di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan.*” (lihat yang bercetak tebal) “perubahan” yang dimaksudkan B dapat dieksplikasikan seperti eksplikatur (E-9) berikut.

(E-9) [Perubahan itu] artinya, [sudah] pada waktunya saya (B) untuk memberikan pada kesempatan pada rakyat x (rakyat biasa) untuk menjadi Gubernur x.

Eksplikatur (E-9) di atas didukung oleh ujaran-ujaran yang lain oleh B secara internal seperti pada (9.1) dan (9.2) di bawah ini.

(9.1) [...] jangan sampai masyarakat x hanya tergantung pada seorang X, untuk masa depan. Itu tidak akan bisa, yah.
(KA071101, 34)

(9.2) Saya tidak mau masyarakat x hanya punya ketergantungan oleh seorang B. Saya tidak mau. Itu rakyat x ini akan dipenjarakan di dalam membangun kreativitas inovasi. Biarkan dia bisa membangun peradaban dengan kemandirian sendiri, punya prinsip sendiri. Tidak tergantung pada orang lain, di dalam membangun kebersamaan. Ya, semua harus bisa punya kontribusi.
(KA071101, 47)

Penegasan yang terkandung pada (9.1) dipertegas lagi dalam ujaran (9.2). Akan tetapi, pokok pesan yang terkandung dalam ujaran-ujaran tersebut tidak terbatas pada M (rakyat) di luar diri penutur. Apabila dihubungkan dengan ujarannya yang lain, misalnya, dengan (9.3) dan (9.4) berikut, reflektor “perubahan” pada (9) mempunyai pokok pesan yang lain lagi.

(9.3) Saya ini tidak hidup dalam alam Cinderella. Saya tetap sama dengan keluarga biasa.
(lihat KA071101, 130—133)

(9.4) Saya kan masyarakat biasa di daerah bukan di dalam lingkaran dekat dengan presiden.

(KA071101, 151—154)

Dalam (9.3) dan (9.4) di atas B menyatakan bahwa dirinya sama dengan orang keluarga, masyarakat, atau rakyat biasa. Dikaitkan dengan bagian ujaran pada (9) yaitu, “Artinya, kedaulatan di tangan rakyat, harus menjadi kekuatan baru di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan,” (lihat yang bergaris bawah) kata *rakyat*--dalam frasa *kedaulatan di tangan rakyat*--juga mencakupi diri penutur. Sementara itu, maksud yang terkandung dalam frasa *kekuatan baru* pada bagian itu dapat bersumber pada diri penutur. Demikian pula kata *semua* dalam ujaran bagian, “...*semua harus bisa punya kontribusi...*” pada (9.2) juga dapat mencakupi diri penutur. Dengan demikian, pokok-pokok pesan tersirat yang dikomunikasikan oleh B atas penggunaan “perubahan” pada (9) dapat dikonstruksikan seperti pada (K-9) berikut.

(K-9) Sebagai keluarga atau masyarakat (*rakyat*) biasa, B juga dapat melibatkan diri menjadi kekuatan baru dan berkontribusi di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan.

Petunjuk lain, yang tidak kalah penting adalah penggunaan kata *pemerintah* dalam frasa *sistem dan manajemen pemerintah di masa depan*, pada (9). Kata *pemerintah* di situ,--selain dapat merujuk pada ‘pemerintah daerah tertentu’--juga dapat merujuk pada ‘pemerintah negara’ sebagai tingkat yang lebih tinggi. Penggunaan kata *pemerintah* tersebut dapat digolongkan sebagai konteks atau implikatur umum menurut kategori Gazdar (1979; diacu oleh Gunarwan 2004:15). Dualisme rujukan penggunaan konteks yang umum seperti itu menandakan kata tersebut mempunyai ketaksaan. Dalam hal ini, ujaran B melanggar maksim Cara dengan submaksim kedua (*avoid ambiguity* ‘hindari ketaksaan’).

Mengingat pada pendapat sejumlah ahli pragmatik yang sudah dirujuk pada bab-bab terdahulu, ketaksaan ini tampak benar-benar sebagai salah satu strategi penutur untuk mengomunikasikan pesan dan argumentasi politiknya dalam bentuk implikatur. Keterlibatan penutur dalam kata/frasa *rakyat*, *kekuatan baru*, dan kata *semua* (seperti yang dijelaskan di atas), serta penggunaan frasa *pemerintah di*

masa depan memperkuat adanya reflektivitas implikatur penutur untuk terlibat dalam pemerintahan negara di masa yang akan datang.

Selanjutnya, penjelasan di atas dapat juga dikaitkan dengan data (10) di bawah ini.

- (10) A : Apakah kondisi yang ada ini, sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu?
 B : Bagi saya, faktornya bukan di situ. **Tantangan bangsa ini sudah berubah**. Geopolitik, geoekonomi. Kapitalisme global yang mewarnai dalam konteks dunia ini, itu sudah **berubah**. Mestinya, **strategi republik juga berubah**. Masalahnya kan di situ. Selama tidak **berubah**, ya tidak pernah akan bisa menghadapi tantangan zamannya.
 A : Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini.

(KA071101,81—85; lihat juga (28.1))

Penutur B pada (10) adalah penutur yang sama dengan B pada (9). Pada (10) di atas, B malah dengan berulang-ulang menggunakan kata *berubah* (sebagai alih-alih “perubahan”). Tuturan B tersebut merupakan argumentasinya terhadap pertanyaan, “*Apakah kondisi yang ada ini, sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu?*” Apabila dibandingkan dengan ujarannya pada (9), tampak arah dan maksud dari “perubahan” pada (10) cenderung kepada persoalan kenegaraan. Sementara itu, arah dan maksud “perubahan” pada (9) cenderung pada persoalan daerah tertentu. Di sini tampak bahwa cakupan maksud “perubahan” pada (10) lebih luas daripada (9). Keluasan itu diperkuat oleh penggunaan kata *bangsa* dan *republik* pada (10). Selanjutnya, penggunaan kata *bangsa* dan *republik* itulah yang turut memperkuat kesimpulan bahwa penutur benar-benar mempunyai maksud dan tujuan untuk melibatkan dirinya dalam kepentingan politik tertentu terkait pemerintahan negara di masa yang akan datang. Dengan demikian, relevansi pertanyaan A dengan B dapat diringkaskan dalam konstruksi (K-10) berikut ini.

- (K-10) B menilai reformasi dan strategi yang diambil pemerintah saat ini kurang tepat karena strategi itu membuat masyarakat tidak siap menghadapi

tantangan global dan ini menjadi masalah. Oleh karena itu, B menginginkan adanya “perubahan” dalam hal strategi kebijakan dalam republik Indonesia.

Pengujaran B dengan menggunakan kata *berubah* secara berulang-ulang dapat disimpulkan sebagai bentuk ilokusi *mendesakkan*. Tindak penutur untuk ‘mendesak’ perubahan itu, mengindikasikan pula bahwa B mengetahui cara untuk melakukan “perubahan” itu. Ujaran itu sekaligus mengimplikasikan kesan bahwa jika diandaikan penutur saat ini atau saat yang akan datang menduduki posisi politik tertinggi dalam negara, dia akan merealisasikan kemampuannya untuk melakukan perubahan sebagaimana diujarkan dalam diargumentasikannya baik pada (9) maupun pada (10).

Pokok pesan (K-10) di atas didukung dan diperkuat lagi oleh ujaran B pada (10.1) berikut ini.

(10.1)B : [...] untuk pertahanan keamanan negara, kita ini maritim, tapi kebijakannya kontinental. Ya. Pertahanan maritim itu masih berpusat di Jakarta sama Surabaya. Itu sama dengan pemerintahan Hindia Belanda, yang mempertahankan pelabuhan perdagangan VOC. Mustinya pertahanan keamanan itu menghadap ke luar. Ya, ada di Yogya, ada di Merauke, ada di Padang, ada di Pulau We, ada di Manado. Yang di dalam itu hanya untuk nangkap teritorial ya. Nangkap *illegal logging*, *illegal fishing*, kan gitu. Pertahan itu harus ke luar karena kita maritim. Kenapa saya bicara begitu? Karena globalisasi ini makin di Fasifik ini makin tinggi. Berarti kapal yang lewat Indonesia di sekitar Riau, itu akan makin besar. Iya kan? Khususnya China. Yang punya pelabuhan kan sebelah timur. Sebelah barat kan perbatasan daratan. Seratus ribu dwtk ke atas kan tidak bisa lewat Selat Malaka. [...] Berarti harus Riau, [...] Selat Sunda. Ya kan? Saya ditanya, bagaimana pendapat Sultan dengan DCA? Saya nggak setuju saat ini. Karena apa? Karena akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau. [...] **Kenapa yang ngontrol tidak Indonesia sendiri?**

A : Ini visi seorang presiden ini.

(KA071101, 113—120; lihat juga data (24))

Ujaran B pada (10.1) di atas termasuk dalam bagian dari argumentasi “perubahan” yang diujarkan B, baik pada (9) maupun (10). Dengan (10.1) di atas, “perubahan” sudah lebih condong pada lingkup politik yang lebih luas yakni sistem politik negara. Pada (10) penutur secara eksplisit menyebutkan adanya permasalahan negara yang penanganannya harus diubah, antara lain, pertahanan maritim yang masih terpusat di wilayah tertentu, sistem pertahanan-keamanan

masih menghadap ke dalam, pengontrolan sistem perdagangan internasional di Riau bukan oleh Indonesia, dan sebagainya. Dengan argumentasi B tersebut, A sebagai petutur langsung pada (10.1) menyimpulkan ujaran B sebagai '*visi seorang presiden*'. Kesimpulan tersebut juga menjadi pemerkuat tambahan terhadap asumsi keberadaan maksud/tujuan B akan terlibat pada kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Berikut konstruksinya.

(K-10) B mengujarkan "(9), (9.1), (9.2), (10), dan/atau (10.1) +> 'B bermaksud untuk terlibat dalam posisi politik tertentu (menjadi presiden) di masa yang akan datang'.

Dengan demikian, pesan yang disampaikan melalui implikatur tersebut benar-benar sebagai bentuk visi-misi seorang (calon) presiden. Pesan ini lebih kuat daripada sekadar pesan 'memberikan pada kesempatan pada rakyat x (rakyat biasa) untuk menjadi Gubernur x' seperti pada (E-9).

Keterkuatan pesan (K-10) inilah ujaran B dapat disebut sebagai strategi pengenalan dirinya sebagai seseorang yang memahami "perubahan." Maksud dan tujuan akhirnya adalah agar M mengenal dan mengetahui maksud politik penutur. Dengan demikian, apa pun realitas implikatur dari ujaran-ujaran B, refleksivitasnya adalah 'B menginginkan agar M mempertimbangkan diri B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang'.

Bandingkan variasi konstruksinya pada bentuk (i) dan (ii) dalam (K'-10) berikut.

(K'-10) B mengujarkan hal yang berhubungan dengan "perubahan" adalah karena B:

- (i) 'ingin dipertimbangkan secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.
- (ii) '?ingin memberikan kesempatan saja pada rakyat x (rakyat biasa) untuk menjadi Gubernur x, tanpa ada maksud menjadi presiden.'

Berdasarkan perbandingan (i) dan (ii) di atas, tampak bentuk (ii) dengan penyandingannya terhadap konstruksi utama, dapat dikatakan kurang berterima secara pragmatik.

Berbeda dari penutur dan bentuk ujaran di atas, penggunaan “perubahan” pada data (11) di bawah ini juga mempunyai reflektivitas implikatur yang serupa dengan data-data di atas.

- (11) C : [...] Seharusnya Bapak lebih konsentrasi di partai p. Kalau *trus* kalah karena Pak X waktu itu, ya tetap bertahan di situ karena jadi problem juga, *gitu lho*. Seharusnya, seorang pemimpin yang cerdas, kepribadian yang integritasnya kuat kalau bergabung dengan partai p lagi, pasti [dan] saya yakin bahwa [B] punya potensi untuk maju.
- B : Saya tidak bisa masuk atau duduk manis dalam suatu kendaraan yang saya sendiri sudah tidak cocok di dalamnya.
- A : Tidak cocok karena kalah, Pak?
- B : [...] Bukan karena kalah. Karena **saya masih mempunyai suatu obsesi bahwa harus ada perubahan di negeri ini**. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa seorang yang malu dan takut untuk berbuat dia tidak akan mengalami **perubahan**.

(TDD080708,203; 213—217; lihat juga TDD080101, 59—62; TDD080708,233—248)

Konteks yang melatarbelakangi pendesakan “perubahan” pada ujaran (11) atas adalah B mendirikan sebuah partai baru. Sebelumnya, B adalah anggota partai p, tetapi B keluar dari partai p tersebut. Dengan keluarnya B dari partai p, secara internal disebutkan bahwa ada kalangan yang menduga bahwa B melakukan hal itu terkait dengan adanya rencana B untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Sementara itu, secara eksternal B adalah salah seorang dari nama yang disebutkan pada data (1).

Pada (11) di atas terdapat pertanyaan C yang berbunyi, “... *Seharusnya Bapak lebih konsentrasi di partai p.*” Unsur “alasan” dalam jawaban B terhadap pertanyaan C ialah perubahan. Dengan perkataan lain, “perubahan” dijadikan B sebagai alasannya untuk keluar dari partai p. B bahkan menegaskan bahwa, “perubahan” adalah obsesi dirinya untuk diterapkan pada negara (Indonesia). Kata *obsesi* tersebutlah yang menjadi penanda performatif ‘mendesak’ sekaligus pemerkuat keberadaan maksud dan tujuan politik B untuk kelak terlibat dalam persaingan posisi politik tertentu di masa yang akan datang.

Kata *perubahan* tersebut setidaknya merujuk pada tiga aspek, yakni perubahan pada karier sendiri, perubahan pada sistem partai, dan perubahan pada

negara. Kebervarian ini menunjukkan adanya ketaksaan yang dimunculkan oleh penggunaan kata *perubahan*. Dalam hal ini, ujaran B juga melanggar maksim yang sama dengan data (9) dan (10) di atas. Pokok-pokok pesan yang dimungkinkan atas ketaksaan itu, antara lain, dikonstruksikan sebagai berikut.

- (a) B merasa di partai p, kariernya tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* ketidakberkembangannya itu dengan cara mendirikan partai baru supaya B dapat berkembang.
- (b) B merasa tidak bebas dari sistem partai p. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* sistem itu supaya B terbebas dari sistem partai p dengan cara mendirikan partai baru.
- (c) B merasa sistem pencalonan presiden di partai p kurang tepat. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* sistem pencalonan itu dengan sistem pencalonan yang tepat menurut B dengan cara mendirikan partai baru.
- (d) B kecewa terhadap sistem-sistem lainnya di partai p. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* sistem-sistem lain itu dengan suatu sistem yang lebih baik daripada sistem partai p dengan cara mendirikan partai baru.
- (e) B merasa keadaan negeri sekarang ini kurang atau tidak baik. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* keadaan negeri itu menjadi lebih baik daripada keadaan sekarang dengan cara mendirikan partai baru.
- (f) Di partai p, B merasa terhambat melakukan sesuatu pada negeri. Oleh karena itu, B ingin *mengubah* keterhambatan itu supaya dapat melakukan sesuatu pada negeri yang maksud dengan cara mendirikan partai baru.

Karena semua pokok pesan di atas dimungkinkan sah secara pragmatis, bagian ujaran B pada (11) dapat dikonstruksikan menjadi seperti (K-11) di bawah ini.

- (K-11) ?B menyatakan tidak cocok pada suatu partai p bukan karena kalah, tetapi karena ingin perubahan sebagaimana dalam (a)—(f).

Namun, dalam konteks kepentingan politik di masa yang akan datang, konstruksi (K-11) di atas bukanlah sebagai maksud dan tujuan utama penutur. Maksud dan tujuan “perubahan” yang dikomunikasikan B di atas bukanlah sekadar pokok-pokok pesan seperti pada (a)—(f). Artinya, pendesakan “perubahan” pada data di atas tidak sekadar mengimplikasikan bahwa penutur hanya ingin sekadar menjadi ketua partai atau sekadar keluar dari suatu partai, tanpa maksud dan keinginan menduduki posisi politik tertentu dalam negara di masa yang akan datang. Lebih dari itu, penutur justru mempunyai maksud dan tujuan untuk menduduki posisi politik tertentu dalam negara.

Pokok pesan terkuat dalam pengujaran B tersebut tersebut adalah 'B ingin menduduki jabatan politik tertinggi dalam pemerintahan negara'. Dengan indikasi pokok pesan itu, penutur tentu mengharapkan penilaian yang positif bahkan dukungan dari M. Refleksivitas implikaturinya adalah seperti konstruksi (R-11) berikut.

(R-11) B ingin M mengetahui dan mempertimbangkan diri B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Selanjutnya, perhatikanlah konstruksi pokok-pokok pesan pada (K'-11) di bawah ini .

(K'-11) B mengujarkan "(11)" karena B--secara konteks politik B adalah orang yang berkecimpung dalam politik:

- (i) ?ingin menjadi ketua partai saja, tanpa bermaksud menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam suatu negara.
- (ii) ?ingin mengubah sistem kepartaian di Indonesia, tanpa bermaksud menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam suatu negara.
- (iii) ?ingin mengubah sistem pencalonan presiden di Indonesia, tanpa bermaksud menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam suatu negara.
- (iv) ?ingin mendirikan partai saja, tanpa bermaksud menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam suatu negara.
- (v) ingin menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam suatu negara.

Pokok pesan terkuat dari lima bentuk di atas adalah pokok pesan pada bentuk (v). Pokok pesan pada (v) itu sejalan dengan refleksivitas yang dikonstruksikan pada (R-11) di atas. Konteks yang mendukungnya ialah adanya tuturan B seperti (11.1) di bawah ini.

(11.1) B : Di partai p saya di sana hanya anggota kehormatan, calon presiden yang menunggu kabar baik bahwa saatnya bertarung kembali. Dan itu kan menunggu satu hal; tidak ada satu *action*.

(TDD080708, 246—248)

Pada (11.1) di atas B secara eksplisit mengujarkan, "...di partai p saya hanya anggota kehormatan, calon presiden yang menunggu kabar baik bahwa saatnya bertarung kembali." Hal ini dapat diartikan bahwa B tidak mendapat kepastian

untuk dicalonkan partai untuk posisi politik tertentu dalam pemerintahan negara. Dengan demikian, “perubahan” yang diujarkan B juga dapat dimaknai sebagai ‘perubahan dari situasi menunggu dicalonkan kepada situasi yang tidak lagi menunggu, tetapi langsung akan dicalonkan menjadi dalam posisi yang diinginkan’.

Pokok pesan lain yang tersirat dalam (11) adalah bahwa “perubahan” yang berhubungan dengan keadaan negara dapat dilakukan jika B berada dalam posisi politik tertinggi dalam negara. Berbeda dari itu, pokok pesan bahwa B sekadar ingin mengubah sistem kepartaian atau sistem pencalonan presiden, **tanpa** keinginan menjadi seseorang yang menduduki jabatan politik tertinggi dalam negara seperti bentuk (ii) pada (K’-11) berikut ini, termasuk kurang berterima secara pragmatik sebagai maksud dan tujuan utama penutur.

- (K’-11) B dapat melakukan perubahan di negeri ini:
 (i) dengan menjadi presiden.
 (ii) ?? tetapi B tidak bermaksud menjadi presiden.

Lemahnya bentuk (ii) itu didukung oleh konteks posisi penutur adalah sebagai ketua partai p yang didirikannya dan pernah juga mencalonkan diri sebagai presiden pada masa yang lalu. Selain itu, kalangan tertentu telah menduga bahwa B juga akan terlibat dalam persaingan posisi politik tertentu di masa yang akan datang.

Bentuk data pengujaran lain dengan reflektor “perubahan” dapat dicermati dalam cuplikan percakapan pada (12) berikut.

- (12) A : Berarti posisi orang yang akan ditantang nih, Bang B, cukup kuat nih. *Bagaimana strateginya, atau apakah Anda masih yakin* setelah mendengar paparan tadi bahwa memang Bang B juga punya peluang yang besar, begitu, *untuk menantang X ke depan.*
 B : Kalau saya, ya, **prinsip dasarnya itu bagaimana 2009 nanti, ya, mendapatkan pemimpin yang ada jaminanlah, ya, bisa merubah keadaan itu, yang lebih baik tentunya, administrasi rakyatnya, lebih bermartabat.**

(TDD080701, 164—165; lihat juga TDD080102, 286—300; TDD080701, 401—418)

Penutur B pada (12) di atas menggunakan kata *merubah* sebagai verba untuk “perubahan”. Konteks yang melatarbelakangi percakapan di atas, secara internal,

adalah pernyataan pengantar oleh A (pemandu acara) dalam data (2) Bab 4 ini. Konteks lain adalah B merupakan mantan gubernur di suatu daerah.

Ujaran B pada (12) adalah sebagai jawaban untuk pertanyaan perihal strategi dan keyakinan B. Penutur B menjawabnya dengan, “*Bagaimana ... mendapatkan pemimpin ... yang bisa merubah keadaan.*” Jawaban itu tampak kurang relevan dari sudut pandang PKS. Jawaban B yang relevan, misalnya, dengan konstruksi (K-12) berikut.

(K-12) Strategi saya [untuk menantang X ke depan] adalah dengan melakukan [strategi] x, y, dan atau z. Tentunya, saya yakin dengan semua hal itu.

Akan tetapi, ketidakrelevanan itulah yang menandakan adanya implikatur. B sengaja merumpangkan informasi seperti pada (K-12) untuk mengomunikasikan pesan politiknya. Selanjutnya, eksplikatur dari rumpang itu dapat dikonstruksikan seperti pada (E-12) berikut.

(E-12) merubah keadaan [dari keadaan yang kurang baik] itu [menjadi keadaan] yang lebih baik tentunya, [antara lain, menyangkut perubahan pada sistem] administrasi rakyatnya, dan [dari rakyat yang relatif kurang bermartabat, menjadi administrasi rakyat yang relatif] lebih bermartabat [lagi].

Catatan lain atas pendesakan B atas “perubahan” dalam (12) di atas adalah ujaran itu menajadi salah satu strategi penutur untuk memperkenalkan dan menawarkan dirinya serta untuk menarik perhatian M demi kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Secara ringkas, reflektivitas implikatur dalam ujaran itu dapat dikonstruksikan seperti pada (R-12) berikut.

(R-12) B ingin M mengetahui dan mempertimbangkan diri B secara positif terkait dengan kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Secara eksternal (R-12) di atas didukung oleh konteks penyebutan bahwa B telah menyatakan maksud dan rencananya untuk akan mencalonkan diri sebagai presiden (lihat TDD080101,16 atau TDD080102,286—88). Konstruksi (R-12) di atas didukung dan diperkuat oleh ujarannya yang lain, seperti pada (12.1) berikut.

- (12.1) B : [...] saya kan kebetulan ya, dipercaya menjadi gubernur ibukota negara 10 tahun, ya. Saya dipercaya teman-teman gubernur menjadi ketua asosiasi pemerintahan provinsi. Itu membekali gitu, membekali pengetahuan ya. Bukan saja di Jakarta, tetapi juga di bagian lain. Karena itu saya menawarkan diri. Nah, bahwasanya rakyat itu sudah cukup waktu menilai kita cocok, pilihlah saya. Tetapi kalau ternyata ada yang lebih baik, harus dapat yang paling baik dari kita.

(TDD080701, 167)

Pada (12.1) di atas B kemudian secara eksplisit mengatakan, “...*pilihlah saya.*” (lihat bagian yang bergaris bawah). Meskipun demikian, makna pragmatik “perubahan” pada (12), sebenarnya masih taksa. Beberapa pokok-pokok pesan yang dimungkinkan adalah sebagai berikut.

- (a) B memberikan saran atau nasihat kepada siapa pun yang ingin menjadi pemimpin di masa yang akan datang agar mengubah perilakunya dengan cara menjamin adanya kepastian keadaan (administrasi dan martabat) yang lebih baik di masa mendatang.
- (b) Pemerintah sekarang ini belum membuat sesuatu yang lebih baik terutama dalam administrasi dan martabat masyarakat. Oleh karena itu, sistem administrasi, sistem pemertabatan masyarakat harus diubah.

Namun, keeksplisitan keinginan menjadi presiden seperti pada (12.1) di atas, membuat pokok pesan (a) dan (b) menjadi lemah sebagai maksud dan tujuan utama penutur mengujarkan ujarannya itu.

Kuatnya reflektivitas implikatur yang dikonstruksikan pada (R-12) dan lemahnya pokok pesan (a) dan (b) dapat dipertimbangkan melalui perbandingan bentuk (i), (ii) dan (iii) pada konstruksi (K'-12) di bawah ini.

- (K'-12) B mengujarkan “(13), dan (13.1)” karena B--secara konteks politik B adalah orang yang berkecimpung dalam politik dan pernah menjadi gubernur:
- (i) ingin jadi presiden.
- (ii) ? hanya memberikan saran atau nasihat kepada siapa pun yang ingin menjadi pemimpin di masa yang akan data agar menjamin adanya kepastian (administrasi dan martabat) yang lebih baik di masa mendatang *sekalipun dirinya tidak menjadi presiden.*
- (iii) ? melihat pemerintah sekarang ini belum membuat sesuatu yang lebih baik terutama dalam administrasi, dan martabat masyarakat. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan, *tetapi bukan dengan B menjadi presiden.*

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa B mengujarkan (12) dan (12.1) tidak sekadar untuk memberi nasihat kepada pihak tertentu atau sekadar memberitahukan keadaan pemerintahan sekarang. Lebih dari itu, ujaran tersebut menyiratkan keinginannya untuk dipertimbangkan M secara positif demi kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Data lain penggunaan “perubahan” sebagai reflektor juga terdapat pada nukilan percakapan seperti pada data (13) berikut.

- (13) A : Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan buku yang diluncurkan, gitu, soal lokomotif *perubahan*. Bapak itu memang sudah mempersiapkan diri jadi capres, ya Pak, ya?
- B : [...] kami sebetulnya, mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan, karena negara kita ini sudah betul-betul tertinggal dan banyak sekali dari bangsa kita yang belum hidup layak. Harus ada perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.

(AKIM080814, 06—07; lihat juga AKIM080814, 08—09; AKIM080814, 37—38; AKIM080814, 39—40)

Konteks yang turut melatarbelakangi percakapan (13) di atas adalah penulisan dan peluncuran buku sebagaimana diujarkan oleh A. Dalam peluncuran buku itu disebutkan bahwa penutur menyatakan diri sebagai “*pemimpin perubahan*”. Dugaan kalangan tertentu atas pernyataan itu ialah ‘B sebenarnya berencana untuk melibatkan diri dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’. Salah satu bentuk pendugaan itu tampak pada ujaran A pada (13) di atas. Dalam hal itu, A bertanya, “*Bapak itu mempersiapkan diri jadi capres ya, Pak?*”.

Jawaban B atas pertanyaan itu adalah, “*...kami sebetulnya, mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan,...*”. Sekilas dari sudut pandang PKS jawaban B tersebut sudah dalam usaha untuk relevan dan memberi kontribusi ujarannya dengan seinformatif mungkin. Dalam hal itu, B mematuhi maksim Relevansi dan maksim Kuantitas. Namun, dalam pematuhan maksim Kuantitas (membuat kontribusi ujarannya dengan seinformatif mungkin, justru membuat ujarannya itu menjadi tidak jelas. Artinya, jawaban itu belum dapat disebutkan bermakna “Ya” atau “Tidak” sebagaimana diperlukan untuk menjawab pertanyaan A. Di sini B melanggar maksim Cara submaksim pertama (*avoid obscurity*).

Jawaban B untuk menyatakan “Tidak” seraya menyangkal dugaan sebagaimana tersirat dalam pertanyaan A, dapat dimungkinkan dengan eksplikatur sebagai berikut.

(E-13a) B: [Tidak. Kami mempersiapkan diri tidak untuk menjadi capres. Akan tetapi,] kami sebetulnya mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan [saja].

Eksplikatur di atas dapat menjadi benar jika “perubahan” yang diujarkan B benar-benar tidak terkait dengan kenegaraan. Namun, berdasarkan bagian yang mengikuti kata *perubahan* dalam ujaran B pada (13) di atas--yaitu B menggunakan kata *negara, bangsa, Indonesia, tertinggal, dan klausa belum hidup layak*--“perubahan” yang dilontarkan B justru berkaitan dengan kenegaraan. Kaitan tersebut bahkan lebih kuat daripada eksplikatur (E-13) di atas. Relevansinya dengan kenegaraan adalah bahwa persoalan keteringgalan negara dan kelayakan hidup bangsa merupakan masalah bagian dari kebijakan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara. Dengan keterkuatan itu, B tampak sengaja untuk melanggar maksim utama Kualitas (*try to make your contribution one that is true*). Artinya, penutur membuat kontribusi ujarannya dengan muatan informasi yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, kuatnya kebenaran dugaan terhadap adanya ‘rencana A untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’, dapat dikonstruksikan dengan eksplikatur (E-13b) berikut ini.

(E-13b) B: [Ya.] Kami [selain mempersiapkan diri untuk menjadi capres,] sebetulnya, [kami juga] mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan. [Namun, perubahan itu dapat dilakukan kalau kami menjadi presiden].

Dengan demikian, jawaban B pada (13) di atas jelas bukan sebagai penyangkalan atas asumsi bahwa dirinya mempersiapkan diri menjadi presiden. Sebaliknya, jawaban itu justru menguatkan dugaan bahwa ‘dirinya benar-benar sedang mempersiapkan diri menjadi *capres*’ (sebagaimana ditanyakan oleh A). Dengan perkataan lain, ujaran B pada (13) merupakan tindak membenaran dugaan

yang terdapat dalam ujaran A. Refleksivitasnya dapat dikonstruksikan seperti (R-13) berikut.

(R-13) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas implikatur pada (R-1) di atas kemudian diperkuat oleh ujaran-ujaran B, antara lain seperti (13.1) berikut ini.

(13.1)A : [...] Tapi, kalau Bapak tidak jadi pemerintah; nggak jadi anggota DPR, gimana mau merubahnya, Pak?

B : Ya, saya kira tidak cukup hanya sekadar DPR dan jadi pemerintah, ya, karena kalau tidak ada visi, visi yang lebih berdaulat untuk Indonesia, maka walaupun kita kaya sekali, tetapi rakyat kita tidak dapat menikmatinya.

(AKIM080814, 21—26)

Pada (13.1) di atas B secara eksplisit menyatakan bahwa pilihan posisi politik untuk melakukan “perubahan” bukan dengan menjadi bagian dari DPR atau pada posisi pemerintahan di bawah posisi presiden’. Implikasinya adalah ‘dengan menduduki posisi yang lebih tinggi dari posisi-posisi yang dieksplisitkan itu’. Konteks yang mendukung inferensi ini ialah bahwa B sudah pernah menjadi menteri. Artinya, dengan pernah menjadi menteri, B tidak lagi memaksudkan dirinya untuk dipertimbangkan secara positif untuk menjadi menteri. Oleh karena itu, bagian ujaran yang berisi, “*tidak cukup sekadar DPR atau jadi pemerintah*” (menteri atau gubernur) diartikan dengan B ingin menjadi presiden. Kuatnya kesimpulan terhadap posisi politik tersebut dapat cermati dengan membandingkan bentuk (i) dan (ii) pada konstruksi (K’-13) berikut.

(K’-13) B mengujarkan “(14)” dan/atau “(14.1)” karena B--secara konteks politik B adalah orang yang pernah terlibat dalam pemerintahan—ingin melakukan perubahan di negeri ini:

(i) dengan cara dirinya menjadi presiden.

(ii) ??tanpa bermaksud atau berkeinginan untuk menjadi presiden.

Berdasarkan konstruksi di atas, maksud B untuk melakukan perubahan tanpa keinginan untuk menjadi presiden, sebagaimana pada bentuk (ii) tampak sangat lemah.

Berbeda dari pengujaran-pengujaran di atas, B pada (14) berikut juga tampak berupaya mendesakkan “perubahan”. Akan tetapi, pendesakan itu juga mengandung refleksivitas seperti pada data-data pengujaran di atas.

(14) B : [...] New Zeland itu pernah itu (menjadi) negara yang paling ugal-ugalan, ya, menyambut dengan latah konsepnya Bu Margaret Techer dan dan apa... Pak Reagan itu, yaitu [*they know*] *where is no alternative yours*, semua buka, dagangan bebas, *startles judgement* dan lain-lain, akhirnya ekonomi New Zeland itu mentok, bahkan kemudian a... mau *collapses*, ya,

A : mmm

B : Tahun 99 mereka menyadari, ganti perdana menteri, sekarang sudah pulih.

(JB080111, 93—99)

Konteks yang melatarbelakangi percakapan di atas adalah wacana penilaian B atas reformasi di Indonesia. Ujaran B dengan mencontohkan proses perubahan di New Zeland, tampak sebagai analogi yang bagi penutur dapat diterapkan di negara Indonesia yang sedang dinilainya. Isu “perubahan” sebagai reflektor pada ujaran itu ditandai oleh pengujaran kata *ganti*. Kata tersebut bahkan dapat dinilai mempunyai derajat ketegasan yang lebih tinggi daripada kata *ubah* (Band. Gazdar 1979a diacu Levinson 1983: 132—46; Kearns 2000: 258—60).

Secara eksternal, B adalah salah seorang yang disebutkan akan terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang (lihat data (1)). Selain itu, B juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh karena itu, ujaran B pada (14) dapat dimaknai sebagai maksud dan keinginan B untuk terlibat lagi dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Terkait dengan kepentingan itu, ujarannya tersebut tampak mengandung refleksivitas dengan tujuan agar M mengetahui pola proses perubahan yang dikomunikasikan B.

Sebagai bentuk analogi, makna yang tersirat dalam ujarannya, “...mereka menyadari, *ganti perdana menteri, sekarang sudah pulih*,” adalah ‘perlunya perubahan dari keadaan yang kurang baik (yang diujarkan dengan, “*ugal-ugalan, latah, mentok dan collapses*) menjadi ‘tidak ugal-ugalan, tidak latah, tidak mentok, dan tidak *collaps* dengan cara mengganti seseorang sebagai pelaku kebijakan di negara itu’.

Catatan lain, ujaran B tersebut juga menyiratkan adanya sesuatu yang belum berubah di Indonesia oleh pemerintah sekarang ini (*incumbent*). Kesimpulan ini

diperkuat oleh ujaran B pada (14.1) berikut ini (perhatikan ujaran yang bergaris bawah).

(14.1)B: ... karena dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat yang kuat itu, sesungguhnya presiden dibantu wapres, itu bisa melakukan terobosan, terobosan yang...yang fundamental. [...] Jadi, nggak perlu ragu-ragu jangan maju-mundur. Jadilah seorang pemimpin yang *risk taking* yang besar itu, *space* juga besar, tetapi nampaknya....

A: karena mandataris rakyat ya? [...] bukan mandataris MPR.

B: Iya, iya Betul, betul. Ya. Cuma sepertinya, apa...tahun pertama tahun kedua tidak ada sesuatu yang baru.

(JB080111, 104—110)

Dalam bentuk praanggapan, ujaran B di atas mempunyai pokok pesan seperti (a) dan (b) di bawah ini.

- (a) Pemerintah sekarang (presiden dan wakilnya) belum/tidak melakukan sesuatu terobosan yang baru dan yang fundamental.
- (b) Pemerintah sekarang masih ragu-ragu dan kebijakannya terkesan maju mundur.

Kedua pokok pesan tersebut dapat dipertegas lagi oleh pengujarannya dalam sumber data lain (pendukungan secara eksternal). B secara eksplisit mengujarkan kenegatifan yang serupa dengan (14), yaitu dengan istilah *ugal-ugalan* seperti pada (14.2) di bawah ini.

(14.2)C: Tapi maaf, undang-undang dibikin waktu Bapak anggota DPR. [...]

B: [...] Tapi sekarang ini, waktu Anda, penanaman modal ini sekarang ugal-ugalan.

C: Ya, tapi undang-undangnya waktu Bapak.

B: [...] saya harus terangkan ya. [...] Ini penting sekali karena kalau ini nggak diberantas, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah itu kita sanggup ke mana?

(TDD080101, 33—38; 47—51)

Pada (14.2) di atas B secara langsung mengujarkannya kepada C bahwa C (sebagai bagian dari pemerintah sekarang) melakukan hal yang “ugal-ugalan”. Selain itu, B menggunakan kata *diberantas*. Kata itu tampak lebih tegas lagi daripada kata *ganti* pada (14) atau kata *diubah*.

Tambahan, pokok-pokok pesan lain yang dikomunikasikan melalui ujaran-ujaran B di atas adalah sebagai berikut..

- (c) Hingga saat ini belum terjadi perubahan [ke arah yang lebih baik].
- (d) Pelaku kebijakan tertinggi perlu diganti.
- (e) Perubahan [ke arah yang lebih baik] mendesak untuk dilakukan.
- (f) Perubahan itu yang dimaksudkan B akan dilaksanakan jika B menjadi pelaku kebijakan tertinggi (presiden).

Pada dasarnya, ketika B mengomunikasikan pesan-pesan di atas dalam ujarannya, B sekaligus menginginkan M untuk mengetahui hal-hal tersebut. Pengomunikasian itu mengisyaratkan pula bahwa ‘perubahan ke arah yang lebih baik’ dapat terlaksana jika B menjadi pelaku kebijakan tertinggi dalam negara.

Karena secara konteks B juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden, ujaran-ujarannya itu mengindikasikan keinginannya untuk terlibat kembali dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, reflektivitas dari pokok-pokok pesan yang tersirat dalam ujaran B di atas adalah seperti pada (R-14) berikut.

- (R-14) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dan memilihnya kelak pada kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas di atas secara eksternal diperkuat oleh ujarannya seperti pada (14.3) di bawah ini.

- (14.3)A: [bagaimana] tentang korupsi?

B: Pendek sekali, pendek sekali. Saya punya teori yang *just plunge* untuk mengatasi korupsi ini, yaitu mulailah dari hulu bukan dari hilir. Sekarang ini korupsi sudah bertahun-tahun, sekarang pun ada KPK dan lain-lain, tapi yang diusut terus-menerus adalah yang hilir itu; Yang hulu itu tidak berani sama sekali. Jadi, kalau saya menjadi presiden, misalnya, dijukung rakyat dan izin Allah, saya akan mulai justru dari puncak piramid bukan dari bawah yang terlalu lama itu.

(BBM080904,01–2; lihat juga BBM080904, 03–04))

Pada (14.3) di atas, B secara eksplisit mengujarkan, “...*kalau saya menjadi presiden...saya akan...*” Dengan ujaran itu, B sesungguhnya menginginkan pendudukan M (perhatikan yang bergaris bawah).

Kuatnya reflektivitas pesan yang tersirat pada (R-14) di atas dapat dipertimbangkan melalui konstruksi (K’14) berikut ini.

- (K'-14) B mengujarkan "(14), (14.1), (14.2) dan/atau (14.3) karena B-- secara konteks politik B adalah orang yang berkecimpung dalam politik, lagi pula pernah mencalonkan diri sebagai presiden--ingin melakukan "perubahan":
- (i) dengan diri B sebagai presiden.
 - (ii) ??tetapi B tidak berniat untuk dipilih menjadi presiden.

Bagian (i) pada (K'-14) di atas, yakni keinginan untuk menjadi presiden adalah implikatur terkuat, sedangkan bagian (ii) dapat dianggap sebagai implikatur yang sangat lemah.

Berdasarkan keseluruhan data percakapan di atas, tampak bahwa performatif mendesakkan "perubahan" benar-benar menjadi salah satu instrumen percakapan politik sekaligus menjadi penanda reflektivitas (reflektor) penutur dengan tujuan agar dirinya dipertimbangkan oleh M secara positif. Implikatur dan reflektivitasnya dapat disimpulkan dengan konstruksi di bawah ini.

- ▶ B mengujarkan "(U)" pada (9)—(14):
+> 'B ingin menjadi presiden'.
- ▶ B mendesakkan perlunya "perubahan":
+> 'B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang'.

Tambahan, reflektivitas implikatur yang muncul melalui reflektor "perubahan" di atas akan diperkuat lagi oleh keberadaan reflektor lain seperti pada (4.2.1.2) berikut ini.

4.2.1.2 Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Menilai'

Reflektor kedua adalah "keadaan sekarang". Reflektor ini diperformatifkan melalui tindak 'menilai'. Berdasarkan latar belakang penuturnya, terdapat dua bentuk penilaian, yaitu 1) penilaian secara negatif, dan 2) penilaian secara positif. Penilaian negatif dilatarbelakangi oleh posisi penutur sebagai pihak yang berbeda dari pemerintah-sekarang (dalam istilah politik: *oposisi*), sedangkan penilaian positif dilatarbelakangi oleh posisi penutur sebagai bagian atau pendukung dari pemerintah (dalam istilah politik: *incumbent*). Dalam penilaian secara negatif, penutur mengomunikasikan bahwa keadaan-sekarang ini tidak baik, sedangkan

dalam penilaian secara positif penutur mengomunikasikan bahwa keadaan-sekarang sudah baik.

Nilai negatif yang diujarkan penutur, antara lain, ketertinggalan bangsa, kemiskinan atau kesusahan rakyat, pendidikan yang kurang baik, mekanisme dan strategi pemerintahan yang belum tepat, penegakan supremasi hukum yang terkendala, dan sistem pertahanan-keamanan yang semakin buruk.

Perhatikan contoh pengujarannya di bawah ini.

(15) A: Kalau berbicara perubahan, bukankah dulu pada saat pemerintahan sekarang pun Pak X, menjadi capres, mengusung perubahan juga. Lalu, kali ini perubahan apa yang Bapak tawarkan untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan bangsa kita?

B: [...] kita sudah 63 tahun merdeka, [...] reformasi sudah sepuluh tahun, tapi hanya sebagian kecil dari bangsa kita, yang telah menikmati arti dari kemerdekaan. Mayoritas lebih dari delapan puluh persen hidup saja susah. Nah, kami ingin agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan.

(AKIM080814, 10–11)

Posisi reflektor pada percakapan di atas ditandai oleh ujaran B pada bagian yang berbunyi, “[...] *kita sudah 63 tahun merdeka, [...] reformasi sudah sepuluh tahun [...]*” (lihat bagian yang bercetak tebal). Batas akhir waktu yang terdapat dalam ujaran itu merupakan waktu saat ujaran itu berlangsung. Batas waktu tersebutlah yang dapat ditandai sebagai “sekarang”. Sementara itu, bagian ujaran yang berbunyi, “*Mayoritas lebih dari delapan puluh persen hidup saja susah,*” (lihat ujaran B bagian yang bergaris bawah) menjadi menjadi salah satu petunjuk nilai negatif yang dikomunikasikan penutur.

Apabila diperbandingkan antara pertanyaan A (...*perubahan apa yang Bapak tawarkan untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan bangsa kita?*) dan jawaban B tersebut, tampak bahwa jawaban itu kurang relevan terhadap pertanyaan A. Dalam hal itu, ujaran B melanggar maksim relevansi PKS. Namun, di dalam pelanggaran itulah B tampak sedang berupaya untuk mengimplisitkan tawaran yang ditanyakan A, dengan cara menilai keadaan-sekarang. Hal itu ditandai oleh ujaran B bagian terakhir yang berbunyi, “*kami ingin agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan,*” Dengan cara apa agar mereka (M) ikut menikmati kemerdekaan? Hal itulah yang menjadi tawaran yang implisit dalam jawaban B.

Apabila direlevansikan (sebagaimana diteorikan dalam TR) proses untuk yang dilakukan B agar M dapat menikmati kemerdekaan, tentu harus dengan kebijakan, program, atau cara-cara tertentu (katakanlah itu sebagai a, b, atau c). Sementara itu, untuk melakukan hal tersebut, penutur harus menduduki posisi politik dalam negara.

Dengan mencermati jawaban B di atas, eksplikatur ujaran B, kurang lebih seperti konstruksi (E-15) berikut.

(E-15) Perubahan yang saya tawarkan adalah dengan membuat suatu kebijakan yang lebih baik daripada kebijakan pemerintah sekarang dalam kurun waktu 63 tahun merdeka dan dalam kurun waktu sepuluh tahun reformasi. Kebijakan itu adalah a, b, c, dan lain-lain. Hal ini akan menjadikan sebagian besar bahkan seluruh bangsa kita akan dapat menikmati arti kemerdekaan. Hasilnya, mayoritas atau lebih dari delapan puluh persen hidupnya tidak susah, tetapi justru menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, mereka dapat disebut menikmati kemerdekaan. Itulah keinginan kami.

Konstruksi di atas akan relevan jika “perubahan” yang diujarkan sesuai dengan maksud dan keinginan penutur. Jika dihubungkan lagi dengan data pada (13.1), ujaran B pada (15) di atas juga mengarah pada keinginan penutur untuk menjadi presiden.

Pokok pesan lain yang tersirat dalam ujaran B tersebut adalah ‘baik pemerintah sekarang, maupun pemerintah sebelumnya, belum atau tidak melakukan sesuatu yang baik’. Implikasinya adalah bahwa penutur dapat melakukan sesuatu yang baik jika dirinya menjadi presiden di masa yang akan datang. Dengan demikian, penutur mengharapkan M agar mengetahui hal-hal yang diimplikasikan itu. Lebih daripada itu, penutur juga menginginkan M agar mempertimbangkan pemerintah sekarang dan juga pihak lain secara negatif. Kesimpulan akan adanya harapan dan keinginan tersebut diperkuat oleh tuturannya pada (15.1) di bawah ini.

(15.1)B : Caranya, **tinggalkan jalan lama**, di dalam bidang ekonomi yang 40 tahun dianut sejak orba sampai saat sekarang ini dan ternyata gagal membawa kesejahteraan untuk mayoritas bangsa ini.

(AKIM080814, 13)

Penutur pada cuplikan di atas secara eksplisit menyatakan, “...*tinggalkan jalan lama...*”. Dengan demikian, ujaran itu secara implisit merekomendasikan dari penutur untuk dipertimbangkan oleh M secara positif sebagai seseorang yang akan menduduki jabatan politik tertinggi dalam pemerintahan negara . Secara umum, reflektivitas ujaran B pada (15) dan (15.1) di atas dapat dikonstruksikan seperti pada konstruksi (R-15) berikut ini.

(R-15) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Kuatnya reflektivitas tersebut dapat dicermati dengan membandingkan konstruksi (K'-15) dengan bentuk (i) dan (ii) di bawah ini.

(K'-15) B menilai keadaan-sekarang secara negatif dengan mengujarkan “(15) dan (15.1)” karena B-- secara konteks politik B adalah seorang mantan menteri dan sedang berkecimpung dalam politik--ingin M menikmati kemerdekaan:

- (i) dengan maksud agar dirinya dipilih menjadi presiden.
- (ii) ?tanpa maksud agar dirinya dipilih menjadi presiden.

Bentuk (i) relevan sebagai sebagai tujuan utama penutur, sedangkan bentuk (ii) dapat dianggap kurang relevan. Selain ujaran B pada (15) di atas terlihat tidak relevan dari sudut pandang PKS, ujaran itu juga kurang jelas. Di sini ujaran B dapat dianggap melanggar maksim prinsip utama PKS (*make your contribution such as is required, [...]*). Dalam hal itu, penutur telah membuat kontribusi ujarannya tidak seperti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan A (B menjawab ujaran A, bukan dengan tawaran yang real sebagaimana ditanyakan oleh A). Karena bukan dengan suatu tawaran yang real, ujaran B sekaligus telah melanggar maksim Cara khususnya submaksim pertama (*avoid obscurity* ‘hindari ketidakjelasan’). Lebih jauh, jawaban B dapat dikatakan bertele-tele atau tidak ringkas. Dalam pada itu, ujaran B juga telah melanggar submaksim ketiga (*avoid unnecessary prolixity* ‘hindari ketakringkasan). Namun, sekali lagi, seperti halnya dengan pelanggaran maksim Relevansi, pelanggaran atas prinsip utama PKS dan kedua submaksim Cara tersebut, sengaja dilakukan penutur--alih-alih menilai keadaan-sekarang secara negatif--untuk mengimplisitkan tujuan utamanya.

Apabila maksim dan prinsip di atas dipatuhi, tuturan B pada (15) relatif menjadi seperti B pada (15) berikut ini.

- (K-15) A: Kalau berbicara perubahan, bukankah dulu pada saat pemerintahan sekarang pun Pak X, menjadi capres, mengusung perubahan juga. Lalu, kali ini perubahan apa yang Bapak tawarkan untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan bangsa kita?
 B: **Perubahan yang saya tawarkan untuk Indonesia, masyarakat, dan bangsa kita adalah a, b, dan/atau c.**

Berbeda dari penutur dan percakapan di atas, reflektor “keadaan-sekarang” juga dapat dicermati dalam cuplikan percakapan pada (16) berikut. Dalam hal ini, B juga menilai keadaan sekarang secara negatif.

- (16) A: Ada satu iklan yang menyebutkan angka kemiskinan kita 49,5 persen. Kemudian, dibantah oleh a..., orang yang paling tinggi posisinya di negeri ini dibantah oleh orang nomor satu, “Tidak sampai sebegitu kok; BPS bilang cuma 16,5 persen.” Jadi, berbeda angka kemiskinan. [...] Kita...saya akan minta tanggapan dari anggota Fraksi Partai p, [...] Silakan, Mas B!
 B: Nah, kalau kita lihat sekarang ini, tidak hanya angka kemiskinan, tapi program-program pemerintah yang mana yang itu berdampak pada pemiskinan rakyat. [...] Ini yang menurut saya sejak reformasi sampai sekarang, bahkan ke depan belum ada kejelasan kapan persoalan kemiskinan dan pemiskinan ini akan selesai?

(TDD080102, 122—124;172—173; mirip dengan KT080215, 119—113)

Salah satu konteks yang melatarbelakangi percakapan di atas adalah B sebagai pihak oposisi terhadap pemerintah-sekarang. Nilai negatif yang dikomunikasikan B terindikasi dari penggunaan bentuk ujaran *tidak hanya angka kemiskinan* [yang meningkat], *tetapi [...] pemiskinan*. Penutur B tampak secara sengaja menggunakan kata *kemiskinan* dan *pemiskinan*. Secara semantik, dua kata ini jelas memiliki nilai efek dan daya yang berbeda. Unsur makna yang tersirat dari penggunaan kata *pemiskinan* adalah ‘adanya usaha dan unsur kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kemiskinan bagi M’ (Band. KBBI 2008: 921). Sebagai oposisi, B juga memaksudkan M agar mengetahui pesan yang tersirat itu sekaligus mengarahkan M agar mempunyai penilaian negatif terhadap pemerintah-sekarang.

Pada pengujaran selanjutnya, B secara tidak langsung juga menilai pihaknya (partai p yang di dalamnya B terlibat) secara positif. Dia mengimplikasikan bahwa

partainya tersebut, mampu melakukan sesuatu yang baik bagi M di masa yang akan datang, bahkan telah melakukannya pada masa yang lalu. Pokok pesan ini terindikasi dari ujaran A pada (16.1) berikut ini (lihat ujaran A).

(16.1)B: A..., ketergantungan kita terhadap korporasi, *big* korporasi itu semakin hari semakin tinggi. Ini yang sampai hari ini tidak ada keberanian politik pemerintah bahkan semakin tingginya tingkat ketergantungan kita.

A: *Mmm*. Zaman X, berani ya, Bang?

B: Ada mulai keberanian. Persoalannya ya, waktu itu, kesra-nya itu Pak Y₁, menkopolkam-nya Pak Y₂.

(TDD080102, 173—178; mirip dengan KT080215, 103—110)

Pada (16.1) di atas, A menangkap pesan tersirat (implikatur) dari ujaran B yakni '*Zaman X berani*' (zaman X adalah zaman ketika partai p yang di dalamnya B terlibat). Eksplikatur dari penggunaan kata *berani* atau *keberanian* ialah 'lebih berani melakukan sesuatu yang baik daripada pemerintah-sekarang'.

Nilai positif yang diujarkan B perihal X adalah "*ada mulai keberanian*". Sembari memberi nilai positif bagi X, penutur B juga menambahkan nilai negatif pada Y₁ dan Y₂. Dalam hal itu, Y₁ dan Y₂ adalah pihak yang terlibat dalam pemerintahan-sekarang dan juga masa yang lalu. B menyebutkan bahwa sesuatu yang menjadi bagian penyebab persoalan pada pemerintahan zaman X adalah karena Y₁ dan Y₂ terlibat di dalamnya. Mereka dinilai oleh B dengan ujaran, "*tidak ada keberanian*". Tujuan B untuk menambahkan nilai negatif tersebut adalah agar M turut menilai pemerintah sekarang secara negatif.

Secara garis besar, konstruksi pokok pesan yang tersirat dalam ujaran B, baik pada (16) maupun (16.1) adalah sebagai berikut.

- (a) Pada masa pemerintahan X ada keberanian.
- (b) Sesuatu sikap yang disebut sebagai "keberanian" diperlukan untuk mengatasi kemiskinan M.

Dari sudut pandang PKS, jawaban B pada (16) dan (16.1) sudah mematuhi maksim Kuantitas, yaitu hal keinformatifan. Dalam hal itu, B sengaja menggunakan kata *kemiskinan* berbarengan dengan kata *pemiskinan*. Pembarengan itu tampak sebagai upaya penutur untuk memberi peningkatan daya (*force*) informasi. Kata *pemiskinan* tersebut secara kuantitas (Band. Gazdar 1979a

diacu Levinson 1983: 132—46; Kearns 2000: 258—60) mempunyai nilai rasa negatif yang lebih tinggi daripada kata *kemiskinan*. Secara gramatikal makna kata *kemiskinan* ialah 'keadaan sudah miskin', sedangkan dalam kata *memiskinkan* terdapat 'usaha untuk memiskinkan atau membuat M menjadi miskin' (band. KBBI 2008: 921). Gradasi nilai yang lebih tinggi itulah yang menjadi salah satu pesan yang dikomunikasikan penutur secara tersirat dengan tujuan agar M turut mengetahui kenegatifan pemerintah-sekarang.

Daya pesan itu secara konteks terkait dengan tujuan politik tertentu di masa yang akan datang. Di balik penilaian-penilai di atas, secara refleksif penutur mengharapkan sesuatu dari M. Refleksivitasnya dapat dikonstruksikan seperti pada (R-16) berikut.

(R-16) B menginginkan M agar mempertimbangkan partai p--yang dalam partai p tersebut B dan X terlibat-- secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Relevansi refleksivitas pada (R-16) di atas dapat dipertimbangkan melalui perbandingan penggunaan bentuk (i) atau (ii) pada konstruksi (K'-16) berikut.

(K'-16) B mengujarkan "(16) dan (16.1)" karena B-- secara konteks politik B adalah seorang yang berkecimpung dalam politik--menginginkan M:

- (i) agar mempertimbangkan pihaknya secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.
- (ii) *agar tidak mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Tampak bahwa dengan bentuk (ii), dengan tujuan agar M tidak mempertimbangkan B secara positif, tidak berterima (anomali) secara pragmatik.

Reflektor serupa dengan penutur yang berbeda dari (16) di atas, dapat dicermati pada nukilan percakapan (17) di bawah ini.

(17) B: Saya interupsi.

A: Ooh?

B: Karena ada kalimat "*lebih berani*". Itu lebih berani dengan/dari siapa? Dari pada diri saya. Kenapa? Saya mengalami dua presiden. Kalau saya berbeda pendapat, lebih baik saya diam; daripada timbul masalah bangsa Indonesia ini. Tapi, saya sekarang sadar, sesadar-sadarnya bahwa ternyata diam saya itu salah. Kenapa? Karena diam saya ini, sampai hari ini, *yah*, beliau itu mengatakan, sampai hari ini rakyat Indonesia tetap miskin dan bodoh.

(KA071101, 316—318)

Posisi reflektor dalam ujaran itu ditandai oleh kata *sekarang* dan frasa *sampai hari ini* (lihat bagian yang dicetak tebal). Sementara itu, nilai negatif yang dikomunikasikan penutur secara langsung ditandai oleh frasa tetap miskin dan bodoh (lihat bagian terakhir yang bergaris bawah). Penilaian itu, sebenarnya, merupakan kutipan penutur dari orang tertentu. Walaupun demikian, ketika hal itu dikutip B, ujaran kutipan itu menyiratkan pemberanan B atas nilai negatif yang terkandung dalam kutipannya itu. Artinya, B juga mempunyai penilaian yang sama dengan pihak yang ujarannya dikutip B.

Secara umum, pokok pesan yang tersirat dalam ujaran B pada (17) di atas adalah sebagai berikut.

- (a) B tidak bisa lagi bersikap “diam” atas keadaan-sekarang (miskin dan bodoh) yang terjadi pada M. Oleh karena itu, penutur mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu [perubahan].

Selanjutnya, B menjabarkan kondisi negatif tersebut secara lebih luas meliputi bangsa Indonesia dan pemerintahan (*dua presiden*). Penjabaran ini turut memperkuat dugaan bahwa B bermaksud untuk melibatkan diri dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang (sebagaimana pula maksud penutur tersebut merupakan bagian dari reflektor lain, di antaranya, reflektor “perubahan” pada 4.2.1.1).

Selain itu, ujaran tersebut juga memperkuat implikatur pada konteks pengarah, dan implikatur positif data (6) pada tabel 4.1, serta implikatur yang ditangkap penutur A pada data (10.1). Dalam hal itu, B benar-benar bermaksud dan bersedia untuk dicalonkan menjadi presiden di masa yang akan datang. Dengan demikian, reflektivitas yang tersirat dalam implikatur ujaran B pada (17) di atas dapat dikonstruksikan seperti pada (R-17) berikut.

- (R-17) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Penilaian negatif yang sama juga dikomunikasikan oleh penutur yang berbeda dari (17) di atas seperti oleh B pada (18) berikut ini.

- (18) A : [...] bagaimana hubungan Anda dengan Pak X akhir-akhir ini?
 B : Akhir-akhir ini, a... baik. Begitu ya. Jadi, a..., setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian kita...saya selalu berusaha berfikir jernih a...dan a... selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat [...]
 A : Jadi, tidak ada dendam?
 B : Saya kira dendam itu, ndak ada, nda ada gunanya itu ... Saya berusaha itu. Saya merasa, yah, apa sih dalam arti pangkat dan jabatan, menghabiskan energi terlalu banyak membicarakan tentang
 A : Masa lalu.
 B : dia begini, dia begitu. Ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah.
 A : Ini yang ngomong ketua x.
 B : Iya. Benar. Iya kan? Rakyat kita susah. Cari pekerjaan susah; guru-guru, tanya gajinya mereka gimana?

(KA080208, 01—14)

Inti pesan politik penutur yang terpenting sebagai reflektor dalam cuplikan percakapan (18) di atas adalah, "... sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah." Percakapan di atas masih berhubungan dengan data (5) dan sebagian dikutip kembali menjadi (18.1) di bawah ini.

- (18.1)C : [...] *apakah Pak B masih mempunyai ambisi untuk menjadi presiden?*
 A : *Masih ingin menjadi presiden?*
 [...]
 B : Saya merasa kok kurang pande, ya. Yang naif saya. Jadi, bukan (tertawa). Jadi saya kira banyak lain yang lebih pantas.

(KA080208,46—53)

Berdasarkan pertanyaan C pada (18.1) di atas, terdapat praanggapan bahwa B mempunyai ambisi menjadi presiden di masa yang akan datang. Praanggapan tersebut tampak seolah-olah disangkal oleh B. Akan tetapi, sebagaimana telah dipostulatkan di awal (lihat tabel 4.2) sesungguhnya penyangkalan B tersebut dengan ujaran, "*Saya merasa kok kurang pande... banyak lain yang lebih pantas,*" tampak sangat lemah. Sebaliknya, implikatur terkuat adalah bahwa 'B sungguh masih ingin menjadi presiden'. Kuatnya implikatur itu didukung oleh ujaran seperti (18), yakni melalui penilaiannya yang negatif terhadap keadaan-sekarang. Selain itu, implikatur tersebut diperkuat lagi oleh penggunaan kata *bangsa*, *negara*, dan *rakyat*. Dalam hal itu, B mengujarkan, "*Saya selalu mencari yang lebih baik untuk bangsa, negara, dan rakyat...*" (lihat bagian yang bergaris bawah

pada (18)). Apabila B benar-benar menyangkal pernyataan A dan C, konstruksi (K-18) berikut menjadi kurang berterima secara pragmatik.

(K-18) ??Bmengujarkan, “*Saya selalu mencari yang lebih baik untuk bangsa, negara, dan rakyat,*” tetapi saya tidak berkeinginan untuk menjadi presiden.

Pada data (18) respons B yang berbunyi, “*Akhir-akhir ini baik,*” merupakan bentuk pematuhan sejumlah maksim PKS, yaitu maksim Relevansi, Kualitas, Kuantitas submaksim pertama, dan maksim Cara. Secara Kualitas, B dianggap telah mengatakan yang sebenarnya, yakni hubungan B dengan seseorang benar-benar baik. Berdasarkan TR ujaran B telah sah karena B tidak dalam kondisi yang dipersalahkan dengan respons itu. Dari segi maksim Relevansi PKS, jawaban B telah sesuai dan terkait dengan materi pertanyaan A. Dalam hal itu, ujaran B dengan, “*Akhir-akhir ini baik...*” relevan dengan pernyataannya, “*Bagaimana hubungan Anda dengan Pak X akhir-akhir ini?*”

Sementara itu, secara Kuantitas jawaban B sudah cukup informatif. Demikian juga dari segi maksim Cara terutama dengan submaksim pertama (*avoid obscurity*) dan submaksim kedua (*avoid ambiguity*). Penutur B telah membuat ujarannya dengan jelas dan tidak taksa.

Di sisi lain, B mengabaikan submaksim kedua dari maksim Kuantitas. Dalam hal itu, B memberi informasi yang melebihi dari informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan A. Penutur B tampak sengaja melebihkan hal itu sebagai strategi itu untuk memberi informasi tambahan, yakni perihal keadaan-sekarang yang dianggapnya kurang baik. Penambahan informasi itulah yang menjadi bagian dari strategi penutur untuk merefleksifkan maksud ujarannya. Informasi tersebut di antaranya, seperti yang bercetak tebal pada (18), yakni, “*Ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah [...] Rakyat kita susah. Cari pekerjaan susah; guru-guru, tanya gajinya mereka gimana?*” Implikasi dari pesan itu adalah ‘B ingin melakukan sesuatu yang baik bagi M’, misalnya, memberi lapangan pekerjaan, menaikkan gaji guru, dan lain-lain. Namun, manifestasi keinginan B tersebut adalah B harus menjadi seseorang yang menduduki posisi politik tertinggi dalam negara. Dengan demikian, tujuan

utama untuk melebihkan informasi itu ialah untuk menarik perhatian M. Refleksivitasnya dapat dikonstruksikan seperti pada (R-18) berikut ini.

(R-18) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Tambahan informasi lain adalah persoalan ekonomi dan keamanan negara. Hal ini juga turut menandakan refleksivitas dan kepolitikan ujaran B pada (18) di atas. Persoalan ekonomi dan keamanan itu dapat dicemati dalam (18.2) berikut.

(18.2)B : Supaya ekonomi jalan. [...] tidak mungkin orang dagang, orang jualan kalau dia **dirampok**. Tidak mungkin orang berangkat ke pasar kalau di jalan dia akan di..di..**bunuh** atau tokonya **dibakar**.
(KA080208, 19)

Pada (18.2) di atas, B menyebutkan bahwa persoalan ekonomi berkaitan dengan dengan persoalan keamanan. Praanggapan yang dapat muncul dari ujaran itu adalah 'ada orang berdagang, tetapi orang itu dirampok, dibunuh, dan tokonya dibakar.' Ujaran (18.2) ini termasuk bagian dari penilaian B terhadap keadaan-sekarang. Dalam pada itu, terimplikasi bahwa B peduli untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan keamanan tersebut. Namun, secara politik pokok pesan itu tentu berhubungan dengan refleksivitas implikatur pada (R-18) di atas.

Berbeda dari nilai negatif di atas, penutur B pada (19) di bawah ini justru memberikan penilaian yang positif terhadap keadaan-sekarang.

(19) A : [...] Menurut Anda, kita sudah sampai di mana, Pak, kalau kita bicara tentang **sepuluh tahun** sudah sampai di hari atau di titik yang di mana kita sudah bisa ber...menarik nafas lega dan bergembira?

B : Kalau kita lihat secara jujur dari otoritarian pada waktu itu, sekarang tentu kita **jauh lebih baik** dari sisi itu. Politik juga **jauh lebih stabil** kalau kita lihat dari situ. Walaupun tentu bahwa banyak mengatakan bahwa ini banyak hal-hal yang formalistis kita capai, belum esensi-esensinya tentu aaa lebih perbaiki. Kedua, dari segi hukum tentu **banyak hal yang telah dicapai, banyak juga yang musti harus dicapai lebih jauh lagi**. Bahwa penertipan itu **jauh lebih baik** kalau kita lihat sisi bagaimana penertiban, bagaimana **banyaknya koruptor-koruptor yang sudah mendapat ganjaran juga masih dalam pengejaran**.

(TDD080101, 18—19)

Nilai positif yang diberikan oleh B terhadap “keadaan-sekarang” ditandai oleh frasa *jauh lebih baik*, *jauh lebih stabil*, dan *banyak hal yang telah dicapai* (lihat bagian yang bergaris bawah). Sebagai konteks, B adalah sebagai bagian dari pemerintah-sekarang. Dengan nilai itu, tersirat bahwa B telah sudah melakukan hal yang baik. Hal itu dikomunikasikan B dengan tujuan agar dirinya dan pihak pemerintah-sekarang dinilai secara positif. Dalam kaitannya dengan kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang, B bermaksud ingin dipertimbangkan secara positif oleh M. Refleksivitas implikaturnya dapat dikonstruksikan seperti pada (R-19) berikut.

(R-19) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Penilaian positif serupa juga dikomunikasikan penutur politik yang berbeda dari (19) di atas, seperti B pada (20) berikut.

(20) A : Pak B, Anda disebut lokomotif reformasi begitu; yang menggerakkan gerbong reformasi, adakah hal-hal tertentu yang setelah kita melihat sepuluh tahun terakhir, adakah hal-hal tertentu yang menurut Anda, Anda sesali Anda lakukan ketika itu?

B : [...] Ya, alangkah nikmatnya kita sekarang ini bisa mengetahui berbagai ... opini dari berbagai corak atau kelompok masyarakat. Kemudian, amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu juga, menurut saya, lumayan sekali, sekalipun tentu masih ada kekurangan di sana sini, tetapi dibandingkan dengan sebelum diperbaiki empat tahapan itu, yang ini sudah jauh lebih baguslah. Kemudian juga otonomi daerah telah dinikmati oleh rakyat kita dari Merauke sampai Sabang. Ini kalau saya ke mana-mana, Pak Gubernur, Pak Bupati mengatakan, “Pak B, kita sekarang senang alhamdulillah. Kami bisa membangun dengan kemampuan sendiri dengan semangat... apa... dan lain-lain.”

(TDD080101, 20—21)

Sedikitnya terdapat enam perangkat yang menjadi petunjuk penilaian secara positif dalam ujaran B di atas (perhatikan bagian yang bergaris bawah). Penutur pada bagian pertama menyebutkan, “...alangkah nikmatnya sekarang ini...” pada bagian lain terdapat klausa *sekarang senang*. Bagian tersebut merupakan sejumlah petunjuk keberadaan reflektor “keadaan sekarang”. Sementara itu, penilaian positif ditandai oleh penggunaan kata *nikmat*, dan frasa *telah dinikmati*, *lumayan*

sekali, jauh lebih bagus, sekarang senang, klausa kami bisa membangun. Penilaian positif tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan A yang berbunyi, “...setelah kita melihat sepuluh tahun terakhir, adakah hal-hal tertentu yang menurut Anda, Anda sesali Anda lakukan ketika itu?” tampak kurang relevan sebagai sesuatu yang disesali oleh B. Kekurangrelevanan itu tampak menjadi pengabaian B terhadap maksim relevansi dalam parameter PKS. Selain melanggar maksim Relevansi, B juga melanggar maksim Kuantitas karena memberi informasi yang lebih daripada yang diperlukan sebagai jawaban untuk sesuatu yang disesalnya. Tujuan pengabaian dan pelanggaran adalah untuk mengomunikasikan bahwa ‘dirinya telah melakukan sesuatu yang baik di masa yang lalu’.

Di samping itu, penutur juga mengomunikasikan bahwa dirinya telah dinilai orang lain (gubernur dan bupati) secara positif perihal B. Dalam kaitannya dengan kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang, pesan itu tampak sebagai alat penutur untuk membangun paradigma positif kepada M tentang diri penutur. Tujuannya adalah agar citra positif penutur terbangun dalam pemikiran M sehingga M dapat terarahkan untuk mempertimbangkan diri penutur secara positif dalam kepentingan politik tertentu.

Dalam konstruksi, reflektivitas pesan yang dikomunikasikan penutur dengan percakapannya dalam (20) di atas, dapat dirumuskan dengan (R-20) berikut.

(R-20) B menginginkan M agar kelak mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Berdasarkan kelima data utama di atas dan dengan segala data pendukungannya, tampak jelas bahwa performatif tindak ‘menilai’ menjadi salah satu reflektor penting dan kuat untuk menunjukkan reflektivitas implikatur dalam ujaran penutur politik. Secara umum, reflektivitas kelima data ujaran itu dapat dinotasikan dengan konstruksi berikut ini.

- ▶ B mengujarkan “(U)” pada (15)—(20):
+> ‘B ingin menjadi presiden’.
- ▶ B menilai “keadaan-sekarang”:
+> ‘B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’.

Setelah terlihat bahwa reflektor pertama dan kedua saling memperkuat, dua reflektor tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan reflektor ketiga, yakni “keterlibatan pihak asing”, seperti yang akan dijelaskan dalam 4.2.1.3 berikut ini.

4.2.1.3 Performatif yang Terkait dengan Tindak ‘Mempermasalahkan’

Tindak ‘mempermasalahkan’ dalam percakapan politik terkait dengan keterlibatan pihak asing dalam kebijakan negara. Keterlibatan itulah yang selanjutnya menjadi reflektor ketiga. Secara umum, penutur menyebut bahwa hal yang terkait dengan pihak asing, (misalnya, penutur menggunakan kata/frasa *neoliberalisme*, *neoimperialisme*, *neokolonialisme*, *korporasi asing*, atau *kekuatan asing*) adalah untuk menunjukkan penolakannya terhadap keterlibatan asing itu. Namun, penolakan itu terkomunikasikan secara tersirat melalui pengujaran yang mempermasalahkan keterlibatan pihak asing itu. Berikut contoh pengujarannya.

- (21) B : Belum lama ini Pak Mahatir berpidato, ya, di depan para tokoh NGO Asia Tenggara, beliau mengatakan, “*It was the lead President Sukarno from Indonesia, who reminded us the dangerous of the new imperialism and new colonialism they would return, a... they have returned, ya, to the international sin.*” Artinya, yang saya nggak enak itu, justru Pak Mahatir, ya, bukan tokoh Indonesia yang ...mengingatkan bahwa dulu adalah Bung Karno yang mengingatkan bahwa *neoimperialisme* dan *neokolonialisme* itu akan kembali itu. Dan memang sekarang sudah kembali Mas. [...] kenyataannya sekarang ini kedaulatan ekonomi kita, sudah kita gadaikan, Mas. Jadi, hampir separoh perbankan dikuasai *korporasi asing*. Bank maksud saya. Kemudian juga seluruh kontrak karya migas dan mineral kalau kita periksa kembali, itu untuk kepentingan gede-gede *korporasi asing* dan kerugian kita, habis-habisan juta. [...]

(JB080111, 01—03; 11—15)

Reflektor dalam ujaran (21) di atas ditunjukkan oleh penggunaan kata/frasa *neoimperialisme*, *neokolonialisme*, *korporasi asing*, dan *korporasi asing* (lihat bagian yang bercetak tebal). Sementara itu, bagian yang menyiratkan bahwa ujaran itu sebagai permasalahan adalah ujaran bagian yang berbunyi, “...*yang saya nggak enak itu...*” dan “...*sekarang ini kedaulatan ekonomi kita, sudah kita gadaikan...*” serta bagian yang berbunyi, “...*kerugian kita habis-habisan juta,*” (lihat bagian yang bergaris bawah).

Dalam pertimbangan PKS, secara keseluruhan ujaran di atas tampak dikemas dengan pematuhan terhadap maksim Kualitas dan Kuantitas. Disebut mematuhi maksim Kualitas adalah karena terindikasi B mengujarkan hal itu dengan suatu keyakinan dan bukti-bukti yang cukup. Hal itu ditandai dari pengacuannya terhadap tokoh Mahatir dan Bung Karno. Selain itu, penutur juga berupaya menegaskan keyakinannya dengan kata *memang* dalam bagian ujaran yang berbunyi, “...*dan memang sekarang sudah kembali...*” dan kata *kenyataannya* dalam ujaran yang berbunyi, “...*kenyataannya sekarang ini kedaulatan ekonomi kita, sudah kita gadaikan.*” Paduan dari bukti-bukti dan keyakinan itulah ujaran B tampak mematuhi maksim Kuantitas. Paduan itu menandakan bahwa B berupaya untuk mengomunikasikan pesan-pesannya dengan seinformatif mungkin.

Di samping sebagai penolakan, ujaran itu juga mengimplikasikan bahwa penjelasan penutur menjadi salah satu bentuk tindak penutur untuk menilai pemerintah-sekarang (sebagaimana penilaian itu telah dijelaskan dalam analisis reflektor kedua). Namun, terkait dengan konteks politik, ujaran itu juga menjadi bentuk persuasi penutur untuk membentuk paradigma tertentu pada M. Dalam hal itu, M diharapkan mempunyai pandangan positif terhadap B dan negatif terhadap pemerintah-sekarang.

Pokok-pokok pesan politik yang tersirat dari ujaran itu, antara lain, sebagai berikut.

- (a) Penutur mengingatkan pemerintah-sekarang agar tidak terlalu melibatkan pihak asing.
- (b) Penutur menginginkan M agar mempertimbangkan pihak pemerintah-sekarang secara negatif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa mendatang.

Apabila dihubungkan dengan konteks politik, pesan terkuat dari dua pokok pesan di atas ialah (b). Kuatnya pesan itu didukung oleh ujaran lain dari sumber data yang berbeda seperti pada (21.1) berikut ini.

(21.1)A : Pak B, mau ditanggapi?

B : Ya, saya mendukung yang empat sentrum tadi. [...] Jadi satu lagi, ya... (audiens tertawa). Satu lagi itu adalah korupsi yang dilakukan oleh big corporation seperti **Exxon Mobile, Freeport, Mikemorren,**

dan sebagainya itu (Audiens bertepuk tangan). Itu yang memegang (sambil B memeragakan memegang tengkuk sendiri) tengkuk pemerintah. Jadi pelayan kita ini. Kita ini dengan mental *inlanders* itu tidak berani ngangkat kepala karena melihat George Bush dan konco-konconya itu seperti raja di raja, kita ini seperti bangsa jongos kira-kira seperti itulah.

(TDD080101, 289—300; lihat juga 26--27)

Dengan membandingkan pokok-pokok pesan (a) dan (b) di atas dengan ujaran penutur B pada (21.1)--terutama oleh bagian ujaran yang berbunyi, "*Itu yang memegang tengkuk pemerintah*," dan konteks gestur (peragaan penutur)--tampak bahwa penutur benar-benar menginginkan M untuk menilai pemerintah secara negatif. Namun, di balik itu terimplikasi bahwa B menunjukkan dirinya sebagai orang yang peduli dan mampu untuk tidak menjadi seperti pemerintah-sekarang. Oleh karena itu, dalam kepentingan politiknya di masa yang akan datang, penutur menginginkan agar M menilai dirinya secara positif. Refleksivitas tersebut dapat dikonstruksikan seperti pada (R-21) berikut.

(R-21) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas pada (R-21) di atas diperkuat oleh ujaran B pada sumber data yang berbeda, seperti pada (14.3) yang dikutip kembali menjadi (21.2) berikut ini.

(21.2)A : [...] tentang korupsi?

B : Pendek sekali, pendek sekali. Saya punya teori yang *just plunge* untuk mengatasi korupsi ini, yaitu mulailah dari hulu bukan dari hilir. Sekarang ini korupsi sudah bertahun-tahun, sekarang pun ada KPK dan lain-lain, tapi yang diusut terus-menerus adalah yang hilir itu; Yang hulu itu tidak berani sama sekali. Jadi, **kalaupun saya menjadi presiden, misalnya, didukung rakyat dan izin Allah, saya akan mulai justru dari puncak piramid bukan dari bawah yang terlalu lama itu.**

(BBM080904,01--2; lihat juga BBM080904, 03--04))

Pada (21.2) di atas, B mengandaikan dirinya sebagai presiden dengan ujaran, "...*kalaupun saya menjadi presiden, misalnya, didukung rakyat dan izin dari Allah, saya akan...*" (lihat bagian yang bercetak tebal). Pengandaian itulah yang membuat refleksivitas implikatur yang terdapat dalam ujaran B menjadi kuat

Muatan permasalahan yang serupa dengan (21) di atas, dengan performatif tindak ‘mempermasalahkan’ juga terdapat pada petikan percakapan pada (22) berikut ini.

- (22) A : Apa tawaran jalan baru dari Bapak?
 B : Jalan baru itu adalah jalan *antineokolonialisme*, yaitu jalan yang kita tidak mau diatur, dicengkram oleh kekuatan asing yang menentukan strategi apa yang harus kita anut di dalam bidang ekonomi dan tidak mengutamakan kepentingan nasional. [...] industri kita tidak bisa cari gas, PLN tidak ada gas, bahkan rakyat disuruh dari tadinya, apa namanya ini, pake minyak tanah, pindah ke gas, gasnya nggak ada. Kenapa? Karena ada undang-undang migas yang mengatakan salah satu pasalnya Indonesia hanya boleh menggunakan maksimum 25 persen dari gas yang dihasilkan. Ini adalah bentuk daripada *neokolonialisme*.

(AKIM080814, 14—15; 21–23)

Alih-alih mempermasalahkan keterlibatan asing, penutur B pada (22) di atas bahkan mengajak M untuk menjadi *antineokolonialisme*. Akan tetapi, dalam rangka kepentingan politik di masa yang akan datang, cuplikan ujaran tersebut secara keseluruhan cenderung sebagai upaya penutur untuk menyampaikan pesan politiknya secara refleksif.

Dari sudut pandang PKS, jawaban B dengan ujaran yang berbunyi, “*Jalan baru itu adalah jalan antineokolonialisme...*” terhadap pertanyaan A, “*Apa tawaran jalan baru...?*” tampak di satu sisi sudah sesuai prinsip utama dan sejumlah maksimnya. Jawaban itu sudah relevan dengan pertanyaan A, kontributif dan informatif sebagaimana diperlukan untuk menjawab pertanyaan A, jelas, dan tidak taksa. Namun, di sisi lain B juga membuat kelebihan informasi dengan permasalahan gas, PLN, dan Undang Migas. Kelebihan informasi ini, merupakan bentuk pelanggaran ujaran B terhadap maksim Kuantitas submaksim kedua: *Do not make your contribution more informative than is required*. Hal yang diformasikan itu dianggap sebagai bentuk masalah yang ditimbulkan oleh keterlibatan pihak asing dalam negara.

Sebagai taktik komunikasi, reflektor ketiga dalam ujaran B tersebut tampak sebagai alat pemberitahuan B perihal permasalahan itu pada M agar M mempunyai pandangan tertentu baik kepada pemerintah-sekarang, maupun

kepada diri penutur. Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa ujaran penutur menyiratkan pokok pesan seperti (a) berikut.

- (a) Nilailah dan pertimbangkanlah pemerintah-sekarang dan pihak lain secara negatif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Apabila dikaitkan dengan konteks dugaan bahwa B berencana akan melibatkan dirinya dalam kepentingan politik di masa yang akan datang, B dalam ujarannya secara refleksif menginginkan pertimbangan positif bahkan dukungan dari M. Refleksivitas itu dapat dikonstruksikan seperti (R-22) berikut.

- (R-22) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Untuk mencermati kerelevanan refleksivitas di atas, pertimbangkanlah bentuk (i) dan (ii) dalam konstruksi (K'-22) berikut.

- (K'-22) B mengujarkan "(22)" karena B--secara konteks politik B adalah seorang mantan menteri. Selain itu, saat pengujaran berlangsung, B masuk dalam dunia politik-- menginginkan M:
- (i) agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.
 - (ii) *agar tidak mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Dari konstruksi di atas, tampak maksud, tujuan, dan keinginan B untuk dipertimbangkan oleh M seperti pada bentuk (i) lebih kuat daripada bentuk (ii). Sebaliknya, bentuk (ii) dengan maksud, tujuan, dan keinginan utama "agar tidak dipertimbangkan" dapat dikatakan sebagai anomali. Artinya, B tidak mungkin mengujarkan hal seperti pada (22) dan (22.1) tanpa mempunyai maksud refleksif.

Memang, penutur menyampaikan tujuan politiknya itu tidak dengan cara yang eksplisit. Akan tetapi, ujarannya telah menyiratkan bahwa dirinya berkeinginan dan bermaksud menjadi presiden. Kuatnya implikasi itu didukung oleh kesimpulan A dalam ujarannya pada bagian akhir cuplikan percakapan (22.2) berikut ini

- (22.2)A : Caranya Pak? Kalau tadi kan disampaikan, kata Bung Fadhil, nggak bisa kalau nggak jadi *policy maker*. Sekarang capres masih dari parpol. Kira-kira partai mana yang lirik Bapak?
- B : [...] caranya sederhana. Sekarang itu rakyat sudah betul-betul nggak suka dengan empat L: lu lagi-lu lagi. (A tertawa). Ya. Dan ternyata betulkan? Di tujuh provinsi tokoh-tokoh yang tidak dikenal yang namanya disebut *last minute* mengalahkan gubernur yang sedang berkuasa, mengalahkan jenderal.
- A : Tapi SBY sama Megawati masih dua tertinggi popularitasnya lho, Pak. Jangan salah.
- B : Itu kan saat ini, ya kan? Menurut saya itu suatu hal yang dinamis, *rating* bisa berubah.
- A : Jadi, benar kan juga saya, **sebetulnya kalau Bapak itu ingin jadi capres, begitu kan?**

(AKIM080814, 78–86)

Pada percakapan di atas, kesimpulan A tidak dalam situasi yang dipersalahkan oleh B.

Berbeda dari penutur di atas, ujaran penutur B pada (23) di bawah juga menandakan “keterlibatan pihak asing” sebagai reflektor politiknya.

- (23) A : Baik. Kita...saya akan minta tanggapan dari anggota Fraksi p, ada Mas B di sini. Silakan Mas B.
- B : Nah, kalau kita lihat sekarang ini, tidak hanya angka kemiskinan, tapi program-program pemerintah yang mana yang itu berdampak pada pemiskinan rakyat. [...] ketergantungan kita terhadap korporasi, *big korporasi* itu semakin hari semakin tinggi. Ini yang sampai hari ini tidak ada keberanian politik pemerintah bahkan semakin tingginya tingkat ketergantungan kita. Kalau kita tidak berani mengatakan tidak terhadap ketergantungan korporasi asing, mau apa kita? Kalau *Exxon Mobile* sebenarnya bisa kita kelola ternyata dikasikan, *Block Cepu* sebenarnya kita ngelola dikasikan *Exxon Mobile*, mau apa kita?

(TDD080102, 172—196)

Istilah “*big korporasi*, *korporasi asing*, *Exxon Mobile*, dan *Block Cepu* merupakan petunjuk untuk keberadaan reflektor “keterlibatan pihak asing” dalam ujaran itu. Seperti halnya pada data sebelumnya, tindak ‘mempermasalahkan’ keterlibatan asing pada (23) di atas juga merupakan strategi penutur untuk memberi penilaian negatif pada pemerintah-sekarang. Alih-alih mempermasalahkan pihak asing,

penutur sebenarnya mengomunikasikan pokok pesan tertentu, antara lain, sebagai berikut.

- (a) Pemerintah-sekarang tidak mau bertindak.
- (b) Ketidakmauan pemerintah dalam bertindak telah mengakibatkan kerugian bagi M.

Atas permasalahan yang muncul oleh keterlibatan pihak asing itu, B mengomunikasikan refleksivitasnya secara implisit dalam ujarannya, pada bagian, "...*sebenarnya bisa kita kelola...*". Kata *kita* pada bagian tersebut cenderung merujuk pada pihak partai B secara khusus. Dalam hal itu, *kita* secara konteks politik dapat berarti '*partai penutur*'. Artinya, pihak yang 'bisa mengelola' itu adalah partai p (yang di dalamnya B terlibat). B mengujarkannya dengan tujuan agar M mengetahui bahwa pihak B (dalam kategori partai) mampu melakukan sesuatu tindakan yang baik, antara lain, menolak keterlibatan pihak asing dan melakukan "pengelolaan" sendiri atas perusahaan tertentu. Konstruksi refleksivitas itu dapat dirumuskan dengan (R-23) berikut.

(R-23) B menginginkan M agar mempertimbangkan pihak B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Penggunaan kata *kita* (alih-alih partai penutur) seperti oleh B pada (23) di atas juga dilakukan B yang lain yang secara konteks masih dalam satu partai seperti dalam (23.1) di bawah ini. Data percakapan (23.1) ini sekaligus memperkuat refleksivitas implikatur (R-23) di atas.

- (23.1)C : [...] Memang kebijakan kenaikan harga BBM ini sesuatu yang tidak populer, tetapi pemimpin itu harus membuat kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, [...].
- B : Kalau bicara soal itu,
- A : Oke, kita harus lanjutkan nanti Bang C, Pak B, sebentar...
- B : Sebentar, satu menit aja. **Kita punya solusi-solusi strategis**, sebenarnya tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi juga bisa. **Kita punya**, kalau soal itu. **Kita punya**, kok. **Kita siap**.
- C : Bagaimana? Dunia... Seratus tiga puluh lima dolar per barel, semua dunia menghadapi hal yang sama,
- B : **Kita siap**. Ini kan karena kelemahan pemerintah [...]

(AKIM0800625, 129—149)

Kata *kita* dalam ujaran B pada bagian “*Kita punya solusi-solusi strategis, [...] kita siap*” lebih cenderung merujuk pada pihak B secara eksklusif. Dalam hal itu, A, C atau pihak pemerintah-sekarang tidak termasuk di dalam kata *kita* tersebut. Hal itu dapat dibandingkan dengan bagian terakhir ujaran B yang menyatakan “*Ini kan, kelemahan pemerintah.*” Tentu akan menjadi kurang berterima secara pragmatik apabila B menggunakan kata *kita*, misalnya, dengan “*??Ini kan, kelemahan kita*”. Hal ini menandakan bahwa kata *kita* pada (23.1) di atas, tidak mencakupi pemerintah dan pada pihak lain.

Berbeda dari penutur-penutur di atas, penutur B pada (24) berikut mempermasalahkan “keterlibatan pihak asing” bukan dengan kaitan korporasi asing, melainkan dengan sistem pertahanan negara.

- (24) A : Itu kondisi yang membuat Anda sampai saat ini merasa sedih, ya?
 B : [...] Jadi, pendapat saya, Pak: untuk pertahanan keamanan negara, kita ini maritim. Tapi kebijakannya kontinental. Ya. Pertahanan maritim itu masih berpusat di Jakarta sama Surabaya. Itu sama dengan pemerintahan Hindia Belanda, yang mempertahankan pelabuhan perdagangan VOC. [...] ya. Mustinya pertahanan keamanan itu menghadap ke luar. Ya, ada di Yoga, ada di Merauke, ada di Padang, ada di Pulau We, ada di Manado. [...] Saya ditanya, bagaimana pendapat B dengan DCA? Saya nggak setuju saat ini. Karena apa? Karena akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau. Kenapa yang ngontrol tidak Indonesia sendiri?
 A : Ini visi seorang presiden ini.

(KA071101,112–120)

Data (24) ini sama dengan data (10.1). Data (10.1) menjadi konteks pendukung atas adanya reflektivitas ketika penutur mendesak untuk mengadakan “perubahan”. Dalam ujaran ini, penutur mendesak “perubahan” terkait dengan sistem pertahanan-keamanan. Namun, ketika B mengujarkan bagian yang bercetak tebal pada (24) di atas, bagian itu menjadi penanda reflektor yang sama dengan reflektor pada data (21) dan/atau (23).

Konteks utama pengujaran (24) di atas adalah adanya dugaan bahwa B bermaksud menjadi presiden di masa yang akan datang. Setelah B mengujarkan, “...*akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau*” (lihat yang bergaris bawah), A selanjutnya menyimpulkan ujaran itu sebagai ‘*visi seorang presiden*’. Relevansi A untuk

menyimpulkan itu tentu didasari oleh pengetahuan (*knowledge world*) A bahwa persoalan pertahanan keamanan adalah wewenang seorang presiden sebagai pelaku (eksekutif) kebijakan tertinggi dalam satu negara.

Pokok-pokok pesan yang tersirat dalam ujaran B pada (24) di atas, di antaranya, adalah sebagai berikut.

- (a) Indonesia tidak menjadi pengontrol perdagangan internasional di negara Indonesia sendiri.
- (b) Seharusnya Indonesia yang mengontrol perdagangan internasional di negara Indonesia sendiri.
- (c) Waspada kekuatan asing di Indonesia

Pokok pesan pada (a) sekaligus memperkuat reflektor kedua, yaitu “keadaan-sekarang” yang dinilai kurang baik (negatif), sedangkan pokok pesan pada (b) menjadi bentuk penilai negatif penutur pada pemerintah-sekarang. Pokok pesan (c) menjadi inti permasalahan yang ditunjukkan oleh reflektor “keterlibatan pihak asing”. Pokok pesan lain yang terimplikasi dari tiga pokok pesan di atas adalah sebagai berikut.

- (d) Jika B menjadi pelaku kebijakan tertinggi di Indonesia, B akan membuat Indonesia menjadi pengontrol perdagangan internasional di negara Indonesia sendiri.

Dengan demikian, ujaran B pada (24) merupakan alat penutur untuk memberitahukan kepada M perihal pokok-pokok pesan di atas dan keadaan sekarang, serta perlunya perubahan. Sehubungan dengan pokok-pokok pesan itu, secara refleksif penutur mengharapkan M untuk mempertimbangkan diri B atas rencananya untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Refleksivitas itu dapat dikonstruksikan sebagai berikut.

(R-24) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Kuatnya refleksivitas tersebut dapat dicermati dengan membandingkan variabel bentuk (i) dan bentuk (ii) pada konstruksi (K'-24) berikut.

- (K'-24) B mengujarkan "(24) atau (10.1)" karena B-- secara konteks politik B adalah seorang gubernur (yang tidak bersedia dipilih lagi menjadi gubernur), tetapi berkecimpung dalam politik-- menginginkan M:
- (i) agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.
 - (ii) *agar tidak mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Kesamaan ide pokok yang tergambar pada data (21)—(24) di atas menjadikan "keterlibatan pihak asing" menjadi salah satu reflektor penting untuk dicermati dalam percakapan politik. Reflektor tersebut patut dicatat sebagai salah satu ciri reflektivitas implikatur percakapan politik dalam analisis bahasa politik secara sinkronis. Secara umum, konstruksi reflektivitas implikatur dari reflektor "keterlibatan pihak asing" dapat dirumuskan seperti konstruksi di bawah ini.

- ▶ B mengujarkan "(U)" pada (21)—(24):
+> 'B ingin menjadi presiden'.
- ▶ B mempermasalahkan "keterlibatan pihak asing":
+> 'B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang'.

Dalam pada itu, reflektor ketiga yang sudah dijelaskan di atas turut menjadi pemerkuat adanya reflektivitas penutur melalui reflektor yang lain, termasuk reflektor keempat pada 4.2.1.4 di bawah ini.

4.2.1.4 Performatif yang Terkait dengan Tindak 'Mempertanyakan'

Reflektor keempat dalam percakapan politik adalah hal yang terkait dengan "keutuhan negara dan bangsa". Dari reflektor ini tampak penutur sedang mengomunikasikan pesan politiknya secara refleksif dengan 'mempertanyakan' keutuhan negara dan bangsa (Indonesia). Penutur mempertanyakan hal itu agar muncul kesan bagi M bahwa negara sedang dalam keadaan kurang utuh atau terancam keutuhannya. Perhatikanlah contoh pengujaran pada data (25) berikut.

- (25) B : A... Saya lihat dari, dari a... berbagai apa nama ya, lima atau enam nama tadi, mereka adalah nama orang-orang, kebanyakan, ya, orang-orang yang sudah terjun ke dunia politik atau sudah mengikuti pilkada. Nah, saya nggak melakukan itu. Saya malah bertanya, "Kenapa

masyarakat percaya dengan...melalui poling tadi?" Seolah-olah memilih saya. Seolah-olah.

- A : Atau, jangan-jangan karena peran Nagabonar ya?
 B : Saya nggak ngerti. Mungkin persepsi tadi yang terbentuk dari karakter yang saya mainkan. Nah, tadi saya katakan lagi, kalau memang karena kerinduan kepada moralitas pemimpin dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang **bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini**, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.
 A : Wah, ini kayaknya udah orasinya capres cawapres ini.

(AKIM 080611, 98—107)

Posisi reflektor pada percakapan di atas ditandai oleh ujaran B dengan pertanyaan, “...*bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini...*” (lihat yang bercetak tebal). Konteks (secara eksternal) yang melatarbelakangi percakapan (25) di atas adalah iklan yang ditokohi penutur yang dianggap sebagai iklan politik penutur. Hal itu dianggap pula sebagai penanda bahwa B berencana akan terlibat dalam kepentingan politik tertentu (lihat AKIM 080611, 03—16). Selanjutnya, terdapat pula penyebutan yang menunjukkan bahwa penutur termasuk salah satu yang dipertimbangkan secara positif oleh M dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Konteks lainnya ialah pertanyaan A pada (7), “... *mau atau tidak mau untuk terjun dan akhirnya maju dalam kancah politik?*” (lihat data ujaran A pada data (7)).

Dengan konteks-konteks tersebut, ujaran B pada (25) di atas—terutama oleh bagian yang berbunyi, “...*bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini...*” menandakan bahwa kalimat itu diucapkan penutur benar-benar untuk tujuan politiknya di masa yang akan datang. Dengan pertanyaan itu, muncul praanggapan bahwa keutuhan negara sedang terancam. Pengimplikasian informasi dalam praanggapan itu merupakan salah satu strategi penutur untuk mencapai tujuannya. Tujuan itu, antara lain, adalah agar M mengetahui dan turut khawatir atas keterancaman itu. Pada akhirnya, penutur mengharapkan M untuk mempertimbangkan B dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, pokok pesan yang dapat dirumuskan dari ujaran B tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- (a) Keutuhan NKRI dalam keadaan tidak baik. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang dapat memperbaikinya (menyatukan).

- (b) Cita-cita masyarakat yang paling baik itu ialah kerinduan pada pemimpin yang bermoralitas baik; dan kerinduan untuk menyatukan secara utuh NKRI.

Selain sebagai upaya pemberitahuan, ujaran itu juga sebagai strategi penunjukan keinginan, kepedulian, dan kemampuan B untuk melakukan sesuatu yang baik demi keutuhan negara dan bangsa. Selanjutnya, argumentasi B disimpulkan A sebagai "orasi capres/cawapres". Ketika petutur A menyimpulkan ujaran-ujaran B sebagai "orasi capres/cawapres" tidak terindikasi bahwa B menolak atau membantah hal itu (band. juga dengan data (7) di awal). Berdasarkan TR, kesimpulan A menjadi relevan karena A tidak dalam posisi yang dipersalahkan atas kesimpulannya itu. Dengan demikian, ujaran dan pokok-pokok pesan yang tersirat di dalamnya juga menggambarkan reflektivitas sebagai berikut.

- (R-25) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas di atas diperkuat oleh ujaran B pada bagian bagian terakhir, "[...] *saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.*" Ujaran ini menandakan bahwa "pemilihan yang dilakukan M atas dirinya" dianggap sebagai sesuatu yang baik. Akan tetapi, pengujaran B dengan bagian tersebut masih menimbulkan ketaksaan. Artinya, selain dengan pokok pesan pada (b), bagian ujaran itu juga dapat mempunyai implikasi pokok pesan seperti (c) berikut.

- (c) Cita-cita masyarakat yang paling baik itu ialah karena M memilih dirinya.

Dimungkinkannya konstruksi pokok pesan (c) di atas, menandakan bahwa ujaran B melanggar maksim Cara submaksim kedua (*avoid ambiguity*). Dalam hal itu, makna yang terkandung dalam ujaran B yang berbunyi, "... *kalau memang karena kerinduan kepada x, kemudian bagaimana menyatukan y, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik,*" dapat diinferensikan dengan pokok pesan (b) atau (c). Akan tetapi, dalam hubungannya dengan kepentingan politik penutur di masa yang akan datang, pesan terkuat dari tiga pokok pesan itu cenderung seperti pada (c). Hal itu diperkuat oleh bagian ujarannya yang berbunyi, "...*bagaimana menyatukan NKRI secara utuh...*" sebagai ujaran yang bersifat politik. Apabila direlevansikan menurut TR, pemikiran tentang cara menyatukan negara, merupakan bagian dari otoritas seorang pemimpin negara.

Penutur B lain seperti pada (26) di bawah ini juga menandakan keraguan penutur akan ancaman keutuhan negara dan bangsa. Berikut pengujarannya.

- (26) A : Baik. Kalau boleh tahu, apa saja persoalan bangsa saat ini, yang membuat Anda sedih atau kecewa.
 B : Begini ya. Kita ini para pemimpin mengatakan bahwa kita harus *survive* menghadapi globalisasi. Yah. Tantangan masa depan ini yang diperebutkan untuk *survive*-nya suatu bangsa di *Pacific range*: Laut Cina Selatan sama Lautan Pasifik. [...]. Nah, sekarang masalahnya, untuk *survive* itu, yah. Yang harus dibangun yah, pemerintah pusat maupun daerah harus accountable; dalam arti transparan. Tapi persyaratan itu belum bisa kita penuhi, karena kita masih bicara, **NKRI bisa utuh nggak ya? Kebangsaan ini, selesai nggak, ya? Ini kan masalah** yang sebetulnya sudah harus selesai Republik ini dibangun Pak. Tapi sampai sekarang masih ... ini persoalan di sini [...]

(KA071101, 93–99)

Khusus pada bagian yang dicetak tebal, B mengujarkan, “...*NKRI bisa utuh nggak ya? Kebangsaan ini, selesai nggak, ya? ...*” Bagian ini tampak sebagai pengomunikasian keterancaman keutuhan negara dan bangsa. Keterancaman itu didukung oleh ujarannya yang menyatakan, “*Ini kan masalah...Sampai sekarang ini persoalan...*” (bagian yang bergaris bawah).

Tindak B untuk mempertanyakan keutuhan negara dan bangsa, tampak sebagai upayanya untuk mempengaruhi M agar terkondisikan sebagaimana dipertanyakan oleh B. Rumusan pokok pesan yang tersirat dalam tindakan itu adalah sebagai berikut.

- (a) Keutuhan NKRI dalam keadaan tidak baik (terancam).

Dari pengondisian itu, tentu terimplikasikan pula perlunya penanganan. Ketika hal itu diargumentasikan, penutur sekaligus menyiratkan bahwa dirinya peduli, bahkan terkesan mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Dengan ilokusi-ilokusi itulah ujaran B dianggap bermuatan politik. Karena kepolitisan itulah ujaran B dapat dikatakan B mengharapkan M untuk mempertimbangkan B secara refleksif untuk kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Seperti yang sudah disebutkan pada penjelasan reflektor-reflektor di atas, B merupakan salah seorang yang diduga akan melibatkan diri dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian reflektivitas ujaran B dengan

reflektor “keutuhan negara dan bangsa” dapat dirumuskan seperti pada konstruksi (R-26) di bawah ini.

(R-26) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas di atas diperkuat oleh data (9), (10), (10.1), (17), dan (24). Dalam hal itu, B telah menyoroti perlunya “perubahan”, menilai negatif keadaan-sekarang, dan mempermasalahkan keterlibatan pihak asing. Demikian pula pada (26) di atas memperkuat data lainnya.

Tindak ‘mempertanyakan’ juga terdapat dalam data ujaran yang berbeda dari penutur di atas, yakni seperti dalam ujaran B pada (27) berikut ini.

(27) A : Oke. Faktanya sekarang sudah ada 34 parpol dan aaa, aaa, resikonya seperti itu tadi akan sulit sekali membentuk pemerintahan yang kuat, berarti, ya, lagi-lagi koalisi-koalisi yang semi-permanen

B : Betul! Yang saya khawatirkan ke depan, gitu. Nanti, kalau tidak ada yang mayoritas, kemudian pemerintahan sudah dibentuk dengan susah payah dengan koalisi ini. Yang terjadi apa? Presiden yang terpilih tidak bisa bekerja, tanpa dukungan parlemen [...]. Mau nggak mau presiden harus bekerja sama dengan parlemen; dengan DPR; dengan segala kekuaragannya. Karena itu dugaan saya dengan adanya ini, mau nggak mau ke depan, saya usulkan: presiden yang terpilih itu adalah mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu: satu, dua, tiga, empat, atau apa. Atau yang lain-lain kemudian dengan posisi oposisi tidak apa-apa. Itu baru ideal bahwa bangsa kita ini akan kita bisa arahkan untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya.

(TDD080708,147—153)

Pengondisian kekhawatiran oleh B tampak dalam ujarannya pada bagian yang berbunyi, “...Yang saya khawatirkan ke depan, gitu ...” (lihat bagian yang bergaris bawah). Pada akhir kutipan B mengujarkan, “*Itu baru ideal bangsa kita ini akan bisa kita arahkan...*”

Konteks yang melatarbelakangi percakapan (27) adalah wacana banyaknya partai politik yang akan berkompetisi pada tahun 2009. Banyaknya partai yang akan berkompetisi itu disebutkan A mempunyai risiko terhadap bentuk pemerintahan yang kuat (perhatikan ujaran yang bergaris bawah). Sehubungan dengan itu, B membenarkan risiko itu. Penutur B bahkan secara eksplisit menyatakan kekhawatirannya. Namun, kekhawatiran yang dimaksudkan, dimanfaatkan B untuk mengomunikasikan pesan politiknya secara refleksif.

Refleksivitas itu tampak pada ujarannya yang berbunyi, “*Presiden terpilih itu adalah mereka yang mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu...*” Partai yang dimaksudkan B dalam ujarannya itu adalah partai p yang di dalamnya B terlibat. Penutur tampak secara yakin mengujarkan hal itu, dan meyakini pula bahwa partai p termasuk partai yang akan menang dalam pemilu.

Ditinjau berdasarkan PKS, keyakinan B mengujarkan hal itu termasuk dalam mengondisikan kekhawatiran itu, tampak sebagai upaya B untuk mematuhi maksim Kualitas submaksim yang pertama: *Do not say what you believe to be false* ‘jangan mengatakan sesuatu yang kamu yakini salah.

Keyakinan B akan agrumentasinya itu, didukung oleh ujarannya pada seperti pada nukilan (27.1) berikut ini.

(27.1)A : [...] Oh, jangan-jangan kemudian kecurigaan orang memang partai p senang nih banyak partai. Jadi kan suara-suara ini jadi terpecah. Sementara suara partai x sendiri masih tetap akan ada setidaknya-tidaknya yaah, berapa persenlah begitu. [...] Suara-suara kandidat yang lain akan terpecah-pecah, jadinya menang. Jadi ini strategi partai p juga sebetulnya.

B : Oke, kami ambil hikmahnya saja kalau gitu. Kalau gini sudah terjadi gini, mau apa? *Toh partai p punya modal besar: 25 juta.* Dari massa kita yang kalau dalam kondisi darurat pun masih, insyallah akan bersama-sama partai p karena mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu *plat form* kami jelas, gitu.

(TDD080708,95—98)

Secara eksplisit B menyatakan partai p (yang di dalamnya B terlibat) mempunyai modal besar. Di ujung kutipan B bahkan sengaja menambahkan informasi dengan ujaran, “*plat form kami jelas...*” Informasi tersebut ditambah dengan argumentasi B sebelumnya, tampak menjadi suatu pesan yang berfungsi untuk mempengaruhi M, terutama atas kekhawatiran yang diujarkannya. Salah satu pokok pesan yang tersirat adalah seperti pada (a) berikut ini.

(a) Presiden yang akan datang idealnya dari partai pihak B.

Kuatnya pokok pesan tersebut dapat dicermati melalui pertimbangan bentuk (i) dan (ii) pada (K'-27) berikut ini.

- (K'-27) B mengujarkan "(27) atau (27.1)" karena B-- secara konteks politik B adalah seorang yang berkecimpung dalam politik--menginginkan presiden mendatang dari partai p:
 (i) yang dalam hal itu B terlibat.
 (ii) ?? yang dalam hal itu B tidak terlibat.

Bagian (i) berterima secara pragmatik sebagai maksud terkuat penutur, sedangkan (ii) menjadi kurang berterima secara pragmatik. Alasannya, tidak mungkin B mengujarkan ujarannya itu (lihat ujaran B pada (27) terutama bagian yang bergaris bawah), tetapi dengan mengharapkan presiden dari partai lain. Oleh karena itu, reflektivitas maksud tersirat penutur dapat dikonstruksikan seperti pada (R-27) berikut.

- (R-27) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Reflektivitas di atas didukung dan diperkuat lagi oleh ujaran B seperti pada (27.2) berikut ini.

- (27.2)B : Partai p kan punya pengalaman bertahun-tahun; bersama-sama dalam kondisi gelombang pasang naik bangsa ini. Artinya apa? Pilih aja yang jelas yang sudah mempunyai pengalaman batin dalam hal itu. [...]

(TDD080708,142)

Pada ujaran (27.2) di atas, secara eksplisit B mengujarkan, "*Artinya apa? Pilih aja yang jelas yang sudah mempunyai pengalaman batin dalam hal itu.*" (lihat bagian yang bergaris bawah). Jelas, pihak yang maksudkan B--sebagai pihak yang mempunyai pengalaman--adalah partai p yang di dalamnya B terlibat.

Berdasarkan penguraian data (25)—(27) beserta data pendukungnya, terlihat bahwa reflektor "keutuhan negara dan bangsa" kuat untuk menunjukkan reflektivitas implikatur yang terkandung dalam ujarannya. Konstruksi umum atas tindak mempertanyakan "keutuhan negara dan bangsa" dapat dipostulatkan seperti berikut.

- B mengujarkan "(U)" pada (25)—(27):
 +> 'B ingin menjadi presiden'.

- ▶ B mempertanyakan “keutuhan negara dan bangsa”:
- +> ‘B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’.

4.2.1.5 Performatif yang Terkait dengan Tindak ‘Mengargumentasikan’

Reflektor kelima ialah “ide pendiri bangsa”. Reflektor ini diidentifikasi dari seringnya penutur politik menggunakan istilah *founding’s father* ‘pendiri bangsa’ dan nama *Bung Karno*. Pengacuan ini secara umum merupakan bentuk strategi untuk memberi pesan bahwa penutur mengujarkan sesuatu yang benar dan cukup bukti atas argumentasi-argumentasinya. Ditinjau dari parameter PKS, pengacuan itu merupakan upaya penutur untuk mematuhi maksim kualitas. Seperti halnya dengan reflektor yang lain, penutur melalui reflektor ini mengharapkan M meyakini segala sesuatu yang diujarkan penutur. Berikut contoh data percakapannya.

- (28) A : Saya menangkap *nada kecewa* dari ucapan Anda ini.
 B : Nah, karena begini ya Bapak. Sebelum republik ini ada, ya, bangsa ini sudah ada. Ya, biarpun masih berupa etnik-etnik, [...] yang dibangun oleh para “*founding’s father*” masyarakat etniknya sendiri-sendiri. Yah, itu sudah terbentuk aspek-aspek simbol, filosofi, tradisi sebagai kearifan lokal. Di mana strategi yang digunakan adalah pendekatannya spiritual, berarti bicara moralitas dan etika. Berarti *character building*. Jadi, strategi yang digunakan adalah strategi kebudayaan: memanusiakan manusia untuk membangun peradaban dan kemandirian. Tapi begitu republik itu ada, konsepsi yang dibangun, itu pendekatannya materi. Akhirnya, ukurannya duit. Jadi, orang punya moralitas baik, akhirnya, harga kamu berapa? Apakah itu sebetulnya bangsa ini akan dibangun? Kalau pendapat saya, “Tidak.” Pendekatannya bukan materi. Itu adalah konsepsi Barat, bukan konsepsi orang Indonesia, orang Timur. Ya, pendekatannya harus tetap pendekatan kebudayaan.

(KA071101,85—86)

Secara garis besar, respons B terhadap A tampak sebagai kondisi bahwa A tidak dalam situasi yang dipersalahkan atas bentuk kesimpulan dalam pernyataannya yang berbunyi, “*Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini.*” Dengan demikian, respons B dapat dianggap relevan menurut parameter TR. Situasi itu tampak dalam argumentasi B dengan mengemukakan adanya “aspek-aspek” (simbol, filosofi, kearifan, pendekatan spiritual, moralitas, dan etika) yang menurutnya telah dibentuk oleh *founding’s father*. Pengargumentasian aspek yang

menurut B telah dibangun oleh *founding's father*, adalah upaya penutur untuk menawarkan kembali aspek-aspek itu kepada M. Penawaran yang demikian itu, tentu terkait dengan sesuatu yang telah diasumsikan kalangan tertentu bahwa bermaksud untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Salah satu implikasi dari penawaran itu adalah 'sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah-sekarang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan aspek-aspek yang dibangun oleh *founding's father* tersebut'. Ketersiratan pesan ini didukung diperkuat oleh isi percakapan (28.1) berikut ini.

(28.1) A : Apakah kondisi yang ada ini, sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu?

B : Bagi saya, faktornya bukan di situ. **Tantangan bangsa ini sudah berubah.** Geopolitik, geoekonomi. Kapitalisme global yang mewarnai dalam konteks dunia ini, itu sudah **berubah**. Mestinya, **strategi republik juga berubah.** Masalahnya kan di situ. Selama tidak **berubah**, ya tidak pernah akan bisa menghadapi tantangan zamannya.

A : Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini.

(KA071101,81—85)

Pada percakapan di atas, implikatur jawaban B atas pertanyaan, "*Apakah kondisi yang ada ini, sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu?*" adalah 'Tidak sesuai'. Hal itu ditandai oleh penyimpulan yang diujarkan oleh A bahwa respons B adalah 'nada kekecewaan'.

Dalam pada itu, penutur B membenarkan pula kesimpulan A sebagaimana dalam awal ujarannya pada (28) yang berbunyi "*Karena begini...*". Bagian tersebut menandakan bahwa kesimpulan A itu telah benar dan sesuai dengan situasi pemikiran B. Selain itu, reflektor kelima ini saling terkait dengan reflektor lainnya, antara lain, dengan reflektor "perubahan" seperti yang terdapat pada (28.1) di atas. Selain terkait dengan reflektor "perubahan", juga terkait dengan reflektor "keterlibatan pihak asing". Hal itu tampak pada frasa yang digunakan penutur pada (28) yaitu *konsepsi Barat* (lihat ujaran (28) bagian yang bergaris bawah). Berdasarkan hal itu, salah satu makna pragmatik yang terkandung dalam pengujaran B atas tema "perubahan" dengan konteks politik adalah 'kembali ke pemikiran *founding's father*'.

Dengan keterkaitan reflektor-reflektor tersebut, membenaran B melalui (28) sekaligus menjadi strategi B untuk memberitahukan bahwa diri penutur

bermasygul atas keadaan-sekarang. Selain itu, ujaran tersebut juga menjadi strategi B untuk mempengaruhi M agar terbentuk suatu paradigma yang sama dengan penutur tentang perlunya “perubahan”. Relevansi “perubahan” yang didesakkan penutur sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan pemimpin pemerintahan tertinggi dalam negara. Relevansi itulah yang memperkuat kesimpulan bahwa B benar-benar bermaksud untuk terlibat dalam posisi politik tertinggi (presiden) di masa yang akan datang. Kesimpulan ini mengakibatkan ujaran-ujaran B mengandung aspek reflektivitas implikatur, yaitu perihal harapan B terhadap M. Reflektivitas tersebut dapat dikonstruksikan seperti (R-28) berikut.

(R-28) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Selanjutnya, reflektor ini memperkuat adanya maksud dan tujuan politik B yang terdapat dalam ujaran A pada (3) dalam konteks wacana yang berbunyi, “[...] bahwa ketidaksediaan X untuk dipilih sebagai gubernur adalah sebuah strategi untuk menuju kepada pemilihan presiden tahun 2009 [...]”. Selain itu, reflektor ini juga memperkuat implikatur (6b dan 6c) pada konteks pengarah, yaitu ‘B bersedia maju pada tahun 2009’. Demikian pula reflektor ini memperkuat simpulan A pada (10.1) yang menyimpulkan bahwa ujaran-ujaran B adalah ‘visi seorang presiden’.

Selain diperkuat oleh reflektor lainnya, reflektivitas ujaran di atas juga diperkuat oleh tuturan berikutnya, seperti pada (28.2) berikut ini.

- (28.2)A : Jadi, sosok presiden yang ideal untuk tahun 2009, seperti apa itu?
 B : Ya, sebetulnya kalimat saya hanya sederhana: yang memahami roh Pancasila. Selesai.
 A : Penjabarannya yang berat.
 B : Ya, nggak? Lho, hanya dua: rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan kok.
 A : **Berarti, B-lah calon yang paling tepat.**

(KA071101,85—86; lihat juga data (10.1))

Di akhir cuplikan (28.2), A menyimpulkan bahwa B merupakan ‘sosok presiden yang ideal’.

Penjelasan B perihal “pemahaman akan roh Pancasila”, dengan ‘*rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan*’ pada (28.2) sebenarnya telah tersirat dalam

ujaran B sebelum (28.2) di atas. Rasa ketuhanan, misalnya, diujarkan B seperti pada (28.3) di bawah ini.

(28.3)B : Dengan jujur saja, ya. Sebelum saya satu malam men-*declare* itu, ya. Saya jumat malam jam 12 malam itu saya masih berada di dalam masjid, ya.

A : Untuk ...?

B : Untuk merenung, ya di dalam mesjid: apa yang saya lakukan ini benar. Dengan segala kejujuran, keikhlasan, ya, dengan hati nurani yang jernih, dan itu saya temukan.

(KA071101,72—73)

Adapun kriteria *rasa kemanusiaan* telah diujarkan B seperti pada data (28) di atas, yaitu “...*memanusiakan manusia*...” (lihat bagian yang bergaris bawah pertama). Sementara itu, kriteria *roh Pancasila* yang dijelaskan oleh B terkait dengan strategi kebudayaan yang dibentuk oleh *founding's father*, yaitu “*simbol, dan filosofi sebagai tradisi kearifan lokal, serta pendekatan spiritual, moralitas, dan etika.*” Dua kriteria inilah yang dianggap B sebagai sosok presiden yang ideal. Selanjutnya, A menginterpretasikan bahwa dua kriteria tersebut terdapat dalam diri B dengan ujaran, “*Berarti, B-lah calon yang paling tepat.*” Berdasarkan TR, interpretasi A menjadi benar karena A tidak dalam situasi yang dapat dipersalahkan atas interpretasi itu.

Data pengujaran yang lain dengan reflektor serupa, tetapi oleh penutur yang berbeda dan juga sumber data yang berbeda adalah seperti pada data (29) di bawah ini.

(29) B : [...] saya terus terang ya, saya kritik ini kepada seluruh anak bangsa ya, mestinya teman-teman TNI Saptamarga, teman-teman Polri Tribrata, teman-teman politisi di Senayan, tapi juga a... tokoh intelektual dan lain-lain bahwa diingat kembali pesan “founding's father” kita itu, ya. Karena memang kenyataannya sekarang ini kedaulatan ekonomi kita sudah kita gadaikan, Mas. Jadi, hampir separoh perbankan dikuasai korporasi asing. Bank maksud saya.
[...]

B : Bahkan Mas, saya punya tesis sederhana, ya. Kalau kita ingin melepaskan diri dari kutukan kemelaratan abadi, yang kita alami sekarang ini, cuma satu, yaitu kita kembali ke pemikiran “founding's father” kita, kita proteksi sumber daya alam kita, pertama-tama untuk bangsa sendiri, kedua baru kita apa... *share* dengan korporasi asing, mereka mungkin punya managerial *noho*,

A : m...

B : mereka punya keahlian, mereka punya kapital atau uang, nggak apa-apa, ya. Tetapi, menomorsatukan kepentingan bangsa, itu saya kira

sesuatu kewajiban absolut. Kalau nggak, kita seperti dikadalinlah istilah anak muda itu,

A : m...

B : di...apa.... dibodohin, gitu.

(JB080111, 11—13; 55—59; lihat juga (21))

Seperti halnya data lain, pengargumentasian “ide pendiri bangsa” sebagai reflektor pada data (29) di atas, juga berkaitan dengan reflektor lainnya. Pada data (29) tersebut, pengargumentasian “ide pendiri bangsa” berkaitan dengan keadaan-sekarang dan keterlibatan pihak asing (lihat bagian yang bergaris bawah pada (29)). Secara internal, data ini juga berkaitan dengan data (14). Pada data (14) penutur mendesak perlunya “perubahan”. Perlunya “perubahan” itu terindikasi dalam ujaran B “*Tahun 99 mereka (New Zeland) menyadari, ganti perdana menteri, sekarang sudah pulih.*”. Selain itu, maksud “perubahan” itu juga terdapat dalam data (29) di atas, yaitu ‘kembali pesan *founding's father*, bahkan mengajak kembali ke pemikiran *founding's father*’ (lihat yang bercetak tebal pada (29)). Argumentasi itu sekaligus menjadi strategi penunjukan diri penutur bahwa dia mengetahui dan mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan ide dan pesan *founding's father*.

Dengan demikian, pengargumentasian “ide pendiri bangsa” di atas menyiratkan pokok pesan seperti (a) berikut.

- (a) Keadaan sekarang tidak sesuai dengan ide dan pesan *founding's father*. Ketidaksesuaian itu telah mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi bangsa dan negara.

Pada data percakapan (29) di atas B mengomunikasikan pesan bahwa dirinya akan mengingat dan menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan *founding's father*, seandainya B menduduki posisi politik tertinggi sebagai pengambil kebijakan dalam negara (presiden). Terkait dengan konteks politik, dalam ujaran B tersirat bahwa dirinya bermaksud untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Atas semua pengargumentasian itu, terutama dengan reflektor “ide pendiri bangsa” terdapat reflektivitas yang mengindikasikan keinginan B seperti pada konstruksi (R-29) berikut.

(R-29) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Refleksivitas di atas diperkuat oleh pengandaian B pada sumber data lain (lihat (14.3)) atau dikutip kembali menjadi (29.1) berikut ini.

(29.1)A : [...] tentang korupsi?

B : Pendek sekali, pendek sekali. Saya punya teori yang *just plunge* untuk mengatasi korupsi ini, yaitu mulailah dari hulu bukan dari hilir. Sekarang ini korupsi sudah bertahun-tahun, sekarang pun ada KPK dan lain-lain, tapi yang diusut terus-menerus adalah yang hilir itu; Yang hulu itu tidak berani sama sekali. Jadi, **kalau saya menjadi presiden, misalnya, didukung rakyat dan izin Allah**, saya akan mulai justru dari puncak piramid bukan dari bawah yang terlalu lama itu.

(BBM080904,01–04; lihat juga (23))

Berdasarkan ujaran B pada (29.1) di atas, khususnya bagian yang menyatakan, “[...] *kalau saya menjadi presiden, misalnya, didukung rakyat dan izin Allah*, [...]” mengindikasikan bahwa B benar-benar mempunyai tujuan untuk menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari sumber data lain seperti pada (29.2) di bawah ini, respons B dengan ujaran, “*Saya menunggu sinyal dari langit*,” bukanlah sebagai pengingkaran atas adanya keinginan B untuk mencalonkan diri sebagai presiden di masa yang akan datang, sebagaimana ditanyakan oleh A.

(29.2)A : Pak B, berani bilang malam ini [...], berani bilang, “Saya juga calon presiden.”?

B : Saya menunggu sinyal dari langit

(TDD080102,352–353)

Tidak jauh berbeda dari dua data di atas, dalam data percakapan pada (30) berikut, juga ditemukan reflektor yang serupa. Dalam hal ini, B menyebutkan nama tokoh tertentu, yang secara konteks dapat disebut sebagai seseorang yang termasuk dalam kategori *founding's father*, yaitu *Bung Karno*.

(30) C : [...] Seharusnya Bapak lebih konsentrasi di partai p. Kalau trus kalah karena Pak X waktu itu, ya tetap bertahan di situ karena jadi problem juga, *gitu lho*. Seharusnya, seorang pemimpin yang cerdas, kepribadian yang integritasnya kuat kalau bergabung dengan partai p lagi, pasti, saya yakin, bahwa punya potensi untuk maju.

B : Saya tidak bisa masuk atau duduk manis dalam suatu kendaraan yang saya sendiri sudah tidak cocok di dalamnya.

A : Tidak cocok karena kalah, Pak?

B : [...] Bukan karena kalah. Karena saya masih mempunyai suatu obsesi bahwa harus ada perubahan di negeri ini. Nah, **Bung Karno** mengatakan bahwa seorang yang malu dan takut untuk berbuat dia tidak akan mengalami perubahan.

(TDD080708,203; 213—217; lihat juga data (11))

Data percakapan (30) di atas merupakan data yang sama dengan data (11) pada 4.2.1.1. Dalam data (11) penutur mendesakkan “perubahan” dengan mengacu pada perkataan *Bung Karno*. Secara konteks penyebutan *Bung Karno* merupakan bentuk konteks khusus dari *founding's father* atau pendiri bangsa.. Pengujaran nama *Bung Karno* menjadi konteks yang lebih khusus daripada pengujaran istilah *founding's father*. Pengacuan ini dapat ditandai sebagai salah satu reflektor seperti halnya juga data (28) dan (29) di atas. Namun, pengacuan terhadap pendapat *Bung Karno* digunakan penutur dalam kaitannya untuk melakukan “perubahan” (reflektor pertama).

Berbeda dari (30) di atas, pengacuan pada *Bung Karno* pada (31) di bawah ini, berkaitan erat dengan “keadaan-sekarang” (reflektor kedua) dan “keterlibatan pihak asing” (reflektor ketiga).

(31) B : Ya. Sebentar. Persoalan kita sekarang ini, ada nggak keberanian untuk menuntaskan persoalan kita.

A : Tapi Mas, saya senang Anda memakai kata *kita* karena itu berarti semua dan termasuk... dan termasuk juga tanggung jawab pemerintahan sebelumnya.

B : Oh, iya. Ya sekarang, kalau **Bung Karno** bicara soal “*Samen bundeling van alle revolutie praktijk*.”² [...] Kalau kita tidak berani mengatakan, “Tidak” terhadap ketergantungan korporasi asing, mau apa kita?

(TDD080102, 178—192; Band, (15.3))

Penutur B pada (31) di atas merujuk pada perkataan *Bung Karno*. Perujukan tersebut merupakan upaya B untuk menunjukkan bahwa ujarannya khususnya bagian yang berbunyi, “*Persoalan kita sekarang ini, ada nggak keberanian untuk menuntaskan persoalan kita,*” mengandung kebenaran dan kecukupan bukti. Dari sudut pandang PKS, penggunaan tersebut adalah bentuk pematuhannya terhadap maksim Kualitas. Hal yang dikomunikasikannya dengan pematuhan itu adalah

² ‘penggalangan kekuatan bersama untuk melakukan revolusi’

kesan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk bersama-sama (sebagaimana dalam perkataan Bung Karno) dalam memikirkan dan memberi solusi terhadap persoalan bangsa atau negara. Pengomunikasian itu dilakukan penutur untuk mempengaruhi M yang refleksivitasnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

(R-31) B menginginkan M agar mempertimbangkan B (dan/atau pihak partai yang dalam hal itu B terlibat) secara positif kelak dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Berdasarkan data (28)—(31) di atas tampak bahwa pemanfaatan “ide pendiri bangsa” dalam percakapan politik dapat menunjukkan bahwa penutur mempunyai maksud tertentu secara politik dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Secara umum, refleksivitas “ide pendiri bangsa” sebagai reflektor dapat dikonstruksikan sebagai berikut.

- ▶ B mengujarkan “(U)” pada (28)—(31):
+> ‘B mempunyai tujuan politik tertentu’.
- ▶ B mengargumentasikan “ide pendiri bangsa”:
+> ‘B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’.

4.2.1.6 *Performatif yang Terkait dengan Tindak ‘Mengatasnamakan’*

Reflektor keenam ialah segala sesuatu pengujaran penutur yang terkait dengan moral, amanah, dan/atau pengabdian. Selanjutnya, moral, amanah, dan/atau pengabdian ini disingkat dengan MAP. Dalam hal ini, penutur membuat ujarannya dengan tindak performatif ‘mengatasnamakan’. Tujuan utama dari performatif ini adalah untuk mencitrakan diri sebagai orang mempunyai MAP dalam pandangan M. Reflektor ini juga turut memperkuat keberadaan refleksivitas maksud yang tersirat dalam ujaran-ujaran penutur perihal rencana keterlibatan penutur dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Hal itu dapat dicermati pada sejumlah data berikut.

- (32) A : Padahal Anda itu ikut konvensi waktu itu partai p, untuk mencalonkan diri Anda.
B : Tapi Bapak mesti salah, saya pada waktu ke daerah tidak pernah kampanye. (tertawa)
(audiens bertepuk tangan) **Kampanye saya adalah bagaimana, pada waktu itu, pada konvensi partai p kampanye saya bagaimana**

semestinya kader partai p itu memilih calon presiden. Jangan dirinya sendiri yang memilih, tapi tanya rakyat: siapa yang pantas untuk dipilih.

- A : Itu moral yang Anda hendak buat waktu itu?
B : Oh, iya. Saya kampanyenya seperti itu.

(KA071101,322—328)

Penutur B pada (32) di atas menjelaskan “kepantasan seseorang untuk dipilih [menjadi presiden]”. Penjelasan kepantasan itu, selanjutnya, disimpulkan oleh A sebagai “moral”. Simpulan itu, selanjutnya, dibenarkan oleh B dengan respons, “Oh, iya.” Dari sudut pandang TR, dapat disebutkan bahwa A berada dalam situasi yang tidak dipersalahkan atas kesimpulannya itu. Namun, berbicara tentang kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang, “kepantasan” atau “moral” yang disebutkan B pada (32) di atas dapat merujuk pada diri B. Dalam hal itu, ketika B mengujarkan, “[...] *siapa yang pantas untuk dipilih.*” ujaran B yang lain, misalnya, pada (28.2) atau (28.3) menyiratkan pesan bahwa ‘dirinya juga pantas dipilih’.

Pokok pesan ini memperkuat dengan pokok pesan pada perangkat lain, misalnya, pada (9), (10), (10.1), atau (26) dan sebaliknya.. Dalam pada itu, B membicarakan seraya mengusulkan perubahan pada sistem kenegaraan, (antara lain dalam segi strategi politik, ekonomi, atau keamanan). Reflektor MAP dengan penutur yang sama sekaligus memperkuat pokok pesan di atas adalah seperti (32.1) berikut.

- (32.1) A : Kembali lagi dikaitkan dengan ambisi Anda untuk menjadi orang nomor satu, dan ini Anda atur strateginya dengan tidak bersedia dipilih menjadi gubernur. Kalau ada tudingan semacam itu, apa jawaban Anda?
B : Saya kira tudingan itu wajar karena ini pendapat orang yang harus dihargai. Ya. Jadi, masyarakat juga supaya paham ya. Sebelum almarhum ibu berangkat ke Amerika, beliau memanggil saya, ya. Beliau menanyakan, kamu mau bersedia tidak, berjanji sama saya? “Janji apa?” Saya bilang begitu. Kamu harus bisa berjanji. Empat hal yang harus bisa kamu laksanakan.
A : Apa itu?
B : Ya, satu, “**Kamu bersedia nggak berjanji, untuk bisa mengayomi semua orang, biarpun mungkin orang itu tidak senang sama diri kamu?**” Saya berjanji untuk itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak melanggar peraturan negara. Yang ketiga, ya. Berjanji untuk lebih berani mengatakan: yang benar itu benar, yang salah itu salah) ...Yang empat, berjanji tidak boleh punya ambisi apa pun, kecuali mensejahterakan rakyat.”

(KA071101, 311—320)

Reflektor MAP tampak pada rincian empat hal yang harus dilakukan B (sebagaimana B mengaku telah berjanji untuk menerapkan MAP itu). Respons B pada (32.1) di atas merupakan jawaban atas “tudingan” sebagaimana diandaikan oleh A. Dalam hal itu, alasan B untuk tidak bersedia dipilih lagi menjadi gubernur karena pesan atau amanah dari seseorang (orangtua B). Selain sebagai amanah, B telah pula berjanji untuk beberapa hal (ujaran B bagian kedua) yang terkait dengan kepentingan M (perihal *mengayomi*), peraturan negara, keberanian untuk mengatakan yang benar, dan kesejahteraan M. Ketika hal ini menjadi benar-benar sebagai alasan B untuk tidak bersedia dipilih menjadi gubernur, MAP itu mengindikasikan pula bahwa B sesungguhnya sudah memenuhi kepastian yang disyaratkan pada (32) di atas. Dengan demikian, MAP yang disampaikan B di atas mengandung reflektivitas seperti pada konstruksi (R-32) di bawah ini.

(R-32) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Dari segi parameter PKS, penutur B berupaya untuk relevan dalam merespons pertanyaan A. Namun, B tampak sengaja memberi informasi lain sebagai argumentasi tambahan untuk menjawab pertanyaan A. Dalam hal itu, A meminta B untuk menanggapi tudingan yang dimungkinkan muncul atas ketidakbersediaan B (lihat ujaran A pada (32.1) bagian pertama) untuk dipilih kembali menjadi gubernur. Alasan itu justru dikaitkan oleh B dengan sesuatu janji dengan seseorang. Selanjutnya, penjelasan “janji” itu merupakan upaya tindak penutur untuk mengomunikasikan MAP tersebut bagi M.

Tidak jauh berbeda dari B pada (32) di atas, penutur B pada data (33) berikut juga mencitrakan dirinya sebagai pelaku MAP untuk tujuan politiknya.

(33) A : ... saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak X akhir-akhir ini?

B : Akhir-akhir ini, *a...* baik. Begitu ya. Jadi, *a...*, setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian kita, **saya selalu berusaha berpikir jernih, dan selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat.**

(KA080208, 01—02)

Pada ujaran di atas, penutur B di satu sisi juga sudah tampak berupaya untuk membuat jawabannya relevan, informatif, benar, dan jelas sesuai dengan beberapa maksim PKS. Namun di sisi lain, terjadi juga penambahan informasi yang berlebih dari sekadar menjawab hubungan B dengan X. Penutur menambahkan informasi bahwa dirinya selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat. Kelebihan informasi inilah yang menjadi bentuk pemunculan reflektor MAP.

Percakapan (33) tersebut berkaitan dengan data (5) dalam konteks pengarah pada 4.1.2. Dalam data (5), penutur menyebutkan dirinya sebagai seorang yang kurang pantas dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang. Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada 4.1.2, sesungguhnya penolakan B— untuk terlibat dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang tidaklah kuat.

Ketidakuatan tersebut di atas didukung oleh konteks, antara lain, secara eksternal pada data (2) B termasuk salah seorang yang disebut sebagai orang yang berpotensi terlibat dalam pertarungan posisi politik tertentu (*pilpres*) di masa yang akan datang. Sementara itu, secara internal didukung oleh ujaran B perihal sesuatu “untuk bangsa, negara, dan rakyat pada (33) di atas. Apabila direlevansikan berdasarkan TR, politik kenegaraan merupakan bagian dari otoritas pemimpin tertinggi dalam negara. Ujaran ini juga sejalan dengan ujaran penutur lainnya (misalnya, B pada data (10.1), (25), atau (28.2), yang selanjutnya, ujaran-ujaran seperti itu dapat diinterpretasikan sebagai ‘visi-misi’, ‘orasi’, atau ‘sosok ideal’ seorang presiden. Oleh karena itu, perangkat MAP tersebut menyiratkan pesan keinginan B untuk duduk pada posisi politik tertinggi dalam negara. Secara refleksif, keinginan itu dapat dikonstruksikan seperti pada (R-33) berikut.

(R-33) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Apabila dicermati, ujaran B sebagai sebuah respons terhadap pertanyaan A, tampak merupakan pengalihan yang disengaja penutur untuk tetap mengarahkan tujuan politisnya secara refleksif kepada M. Walaupun ujaran itu merupakan taktik penutur dengan cara menambahkan informasi, ujaran ini masih dapat dianggap informatif dan relevan dengan pertanyaan A.

Data lainnya ialah seperti pada data (34) di bawah ini. Pada percakapan ini, MAP sebagai reflektor berkombinasi dengan reflektor pertama. Penutur menjabarkan “perubahan” dengan mengatasnamakan MAP. Pengatasmamaan ini termasuk salah satu strategi penutur untuk mencitrakan dirinya sebagai pelaku MAP.

(34) A : Berarti posisi orang yang akan ditantang nih, Bang B, cukup kuat nih. Bagaimana strateginya, atau apakah Anda masih yakin setelah mendengar paparan tadi bahwa memang Bang B juga punya peluang yang besar, begitu, untuk menantang X ke depan.

B : *Kalau saya, ya, prinsip dasarnya itu bagaimana 2009 nanti, ya, mendapatkan pemimpin yang ada jaminanlah ya. Bisa merubah keadaan itu, yang lebih baik tentunya, administrasi rakyatnya, lebih bermartabat.*

(TDD080701,164—165)

Kategori MAP dalam percakapan (34) di atas ditandai oleh ujaran B pada bagian, “...*bisa merubah keadaan [ke arah] yang lebih baik dan administrasi rakyat yang lebih bermartabat.*” Perihal “*ada jaminan*” yang diujarkan penutur merupakan strategi penutur untuk memberitahukan bahwa penutur dapat melakukan hal itu. Dengan perkataan lain, penutur memberi jaminan untuk sesuatu hal seperti pada (34), apabila penutur berada dalam posisi politik tertinggi dalam negara. Pokok pesan tersebut dapat konstruksikan seperti (a) berikut ini.

(a) B memberi jaminan bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu, yaitu mengubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik dan membuat administrasi rakyat lebih bermartabat.

Secara eksternal, terdapat konteks (lihat lampiran 3: TDD080101, 13—16 (lamp.3-B); TDD080102, 286—288; 339; 344 (lamp. 3-C); TDD080701, 01 (lamp. 3-H)) yang menyebutkan bahwa penutur B secara eksplisit telah menyatakan diri berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden di masa yang akan datang. Ujaran (34) merupakan ilokusi pemberitahuan B tentang sesuatu mengenai dirinya. Dalam konteks politik B mengharapkan M untuk memahami implikatur dari ujarannya. Dengan demikian, pokok pesan (a) di atas mempunyai reflektivitas dengan konstruksi sebagai berikut.

(R-34) B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang.

Reflektor keenam ini secara umum berperan untuk memperkuat reflektivitas implikatur pada reflektor lainnya. Kesamaan ide (perihal MAP) mengindikasikan bahwa penutur berupaya untuk berupaya membangun citra positifnya dalam pandangan M. Reflektivitas pengatasnamaan ini dapat dikonstruksikan sebagai berikut.

- ▶ B mengujarkan “(U)” pada (32)—(34):
+> ‘B mempunyai tujuan politik tertentu’.
- ▶ B mengatasnamakan agrumentasi dan niatnya atas dasar “MAP”:
+> ‘B menginginkan M agar mempertimbangkan B secara positif dalam kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang’.

Tambahan pula, kesalingterkaitan keenam reflektor di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Ketika penutur mendesakkan “perubahan” (lihat (10.1)), dan mempermasalahkan keterlibatan pihak asing, atau mempertanyakan keutuhan negara dan bangsa (lihat data (24) dan (26)), serta berargumentasi pada ide pendiri bangsa (lihat data (28)), pengujaran-pengujaran itu cenderung disimpulkan (oleh A) sebagai ‘visi seorang presiden’, bahkan ditandai sebagai ‘sosok presiden yang ideal’ (lihat (28.2)). Sebaliknya, kelima reflektor tersebut juga berperan sebagai pemerkuat terhadap reflektor MAP di atas.

4.3 Fungsi dan Nilai Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik

Sebagaimana yang telah disebutkan pada 4.2, reflektivitas implikatur percakapan akan dicermati berdasarkan dua sudut pandang: a) sudut pandang penutur dan b) sudut pandang petutur. Setelah 4.2.1 di atas menjelaskan reflektivitas implikatur berdasarkan sudut pandang penutur, subbab 4.3 ini akan menjelaskan reflektivitas implikatur berdasarkan sudut pandang petutur.

Dari sudut pandang petutur, reflektivitas implikatur yang terkesan dari pengujaran penutur dapat dikatakan sebagai penunjukan sikap dan kesan tertentu

kepada atau menurut petutur. Sikap itu ditemukan dalam fungsi ilokusi yang tersirat dalam ujaran (selanjutnya, disingkat dengan *fungsi*), sedangkan kesan tertentu itu akan teridentifikasi dari baik-buruknya nilai rasa yang ditangkap petutur (kesan tersebut diistilahkan sebagai nilai).

Kategori fungsi dalam penelitian menggunakan taksonomi yang diadopsi disintesis dari taksonomi fungsi tindak tutur yang dirumuskan oleh Austin (1962), Searle (1975), Fraser (1975 dalam Cole dan Morgan), dan Leech (1983). Dari keempat ahli ini, taksonomi untuk penelitian ini lebih berkiblat pada usulan Leech. Namun, terdapat satu kategori fungsi yang diusulkan Fraser yang dipandang harus digunakan dalam penelitian ini, yakni kategori sugestif. Dengan demikian sintesis taksonomi dalam penelitian ini adalah *asertif, direktif, komisif, ekspresif, rogatif, dan sugestif*.

Untuk kajian nilai, penelitian ini memanfaatkan maksim-maksim sopan-santun dalam PSS. Secara ringkas maksim-maksim itu diskalakan dalam empat kutub, yaitu skala untung-rugi, puji kecam, setuju-taksetuju, dan skala simpati-antipati (lihat tabel 2.3). Pada dasarnya, nilai-nilai tersebut terimplikasi dari reflektor dan bentuk performatif pengiringnya.

Selain menjadi hasil pengimplikasian, fungsi dan nilai tersebut juga dapat mengimplikasikan atau menurunkan fungsi dan nilai lain, yang secara teknis (pragmatis) dapat dikatakan fungsi-nilai turunan atau derivatif. Pola pengimplikasian fungsi dan nilai melalui reflektor-reflektor yang disebutkan pada 4.2.1 dapat dijelaskan dalam enam pembahasan berikut.

4.3.1 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Mendesakkan'

Pencermatan implikasi fungsi dan nilai pada bagian ini didasarkan pada kajian reflektivitas implikatur pada 4.2.1.1. Ketika reflektivitas implikatur pada kajian itu terbukti benar sebagai tujuan utama penutur politik, reflektivitas implikatur tersebut memiliki implikasi-implikasi terhadap fungsi dan nilai tindak tuturnya. Implikasi itu dapat dijelas sebagai berikut.

Fungsi utama yang terimplikasi dari penggunaan reflektor "perubahan" adalah fungsi *mendesakkan* (dalam taksonomi fungsi ini termasuk dalam kategori *sugestif*). Selain berfungsi untuk mendesak, reflektor itu juga berfungsi untuk

menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang ditunjukkan melalui penggunaan reflektor itu ialah keberadaan sikap arif atau sikap bijaksana dalam diri penutur terkait dengan kepentingan M (dalam taksonomi fungsi *menunjukkan* termasuk dalam *asertif*). Pengimplikasian fungsi tersebut pun, juga mengimplikasikan fungsi lainnya, yakni fungsi *menawarkan* (dalam taksonomi fungsi ini termasuk dalam *komisif*). Dalam pada itu, penutur menawarkan “perubahan” yang di dalamnya tersirat nilai keuntungan. Implikasi-implikasi tersebut dapat dicermati pada data-data yang sudah disajikan dalam 4.2.1.1. Untuk mewakili data-data tersebut, di bawah ini data dikutip kembali beberapa data sebagai bahan pencermatan. Sebagai contoh, data (9) pada 4.2.1.1 dikutip kembali menjadi data (35a) seperti di bawah ini.

(35a) A: Pak B, pernyataan Anda untuk tidak bersedia dipilih kembali sebagai Gubernur x, sebenarnya alasan yang jujur itu apa sih?

B: Bagi saya, dulu, sebelum republik ini ada, ada yang namanya pemerintahan Kasultanan x yang bersifat kerajaan. Oleh Almarhum orangtua saya, sebagai bentuk dukungan kepada republik. Pemerintahan yang bersifat kerajaan itu, menjadi DI x bagian dari republik. Berarti dari pemerintahan kerajaan menjadi suatu wilayah yang mendukung kedaulatan di tangan rakyat. Jadi, sejarah bagi saya terulang lagi. [Oleh karena itu,] saya *men-declare*, “Saya tidak bersedia [untuk menjadi Gubernur x].” Saya melihat bahwa tantangan zaman ini sudah **berubah**. Artinya, kedaulatan di tangan rakyat harus menjadi kekuatan baru di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan. Saya ingin masyarakat x tunduk pada sistem dan manajemen pemerintah daerah.

(KA071101, 6—22)

Berdasarkan percakapan di atas, dapat diringkaskan bahwa salah satu alasan B untuk tidak bersedia dipilih kembali sebagai gubernur (lihat ujaran A) adalah untuk kepentingan “perubahan” (lihat ujaran B yang dicetak tebal). “Perubahan” itu selanjutnya diperjelas dengan bagian “... *kedaulatan di tangan rakyat harus menjadi kekuatan baru*...” Dalam hal itu B menggunakan kata *harus*, dan kata *sistem*. Selain itu juga terdapat frasa *kedaulatan di tangan rakyat, kekuatan baru*, dan *manajemen pemerintah di masa depan* (lihat ujaran B yang bergaris bawah). Kata *harus* dalam ujaran itu menjadi petunjuk keberadaan fungsi *mendesakkan*. Sementara itu, frasa *kedaulatan di tangan rakyat* menjadi petunjuk keberadaan nilai “keuntungan” bagi M; *kekuatan baru* dan kata *sistem* menjadi petunjuk keberadaan fungsi ‘menawarkan’ (keuntungan).

Implikasi fungsi dan nilai yang serupa juga dapat dilihat dalam data (12) pada 4.2.1.1. Data itu dikutip kembali menjadi contoh (35b) seperti di bawah ini.

(35b) A: Berarti posisi orang yang akan ditantang nih, Bang B, cukup kuat nih. *Bagaimana strateginya, atau apakah Anda masih yakin* setelah mendengar paparan tadi bahwa memang Bang B juga punya peluang yang besar, begitu, *untuk menantang X ke depan.*

B: Kalau saya, ya, prinsip dasarnya itu bagaimana 2009 nanti, ya, mendapatkan pemimpin yang ada jaminanlah, ya, bisa merubah keadaan itu, yang lebih baik tentunya, administrasi rakyatnya, lebih bermartabat.

(TDD080701, 164—165)

Jawaban B di atas tidak dapat disebut sebagai “suatu strategi atau keyakinan diri penutur” sebagaimana diperlukan untuk menjawab pertanyaan A. Namun, seperti halnya dengan (35a), B pada (35b) menggunakan kata *merubah* sebagai jawaban (dalam hal itu *merubah* merupakan salah satu penanda reflektor “perubahan”). Secara umum, perubahan dan penjaminan yang diujarkan B pada (35b) di atas (lihat ujaran B bagian yang bergaris bawah) adalah salah satu bentuk fungsi *menawarkan*. Sementara itu, bagian ujaran dengan frasa *sesuatu yang lebih baik dan lebih bermartabat* menjadi petunjuk (menunjukkan) keberadaan nilai “keuntungan” (bagi M). Dengan penjaminan dan penawaran tersebut, terimplikasi bahwa B sedang menunjukkan kearifan dirinya terkait dengan kepentingan M dalam kebutuhan akan keadaan yang lebih baik dan bermartabat.

Satu contoh lagi ialah data (14) pada 4.2.1.1, yang selanjutnya dikutip kembali sebagai contoh (35c) seperti berikut.

(35c) B: [...] New Zeland itu pernah itu (menjadi) negara yang paling ugal-ugalan, ya, menyambut dengan latah konsepnya Bu Margaret Techer dan dan apa... Pak Reagan itu, yaitu [*they know*] *where is no alternative yours*, semua buka, dagangan bebas, *startles judgement* dan lain-lain, akhirnya ekonomi New Zeland itu mentok, bahkan kemudian a... mau *collapses*, ya,

A : *mmm*

B : Tahun 99 mereka menyadari, ganti perdana menteri, sekarang sudah pulih.

(JB080111, 93—99)

Dalam analisis masalah yang pertama (lihat uraian untuk data (14) pada 4.2.1.1) telah disebutkan bahwa ujaran B di atas adalah satu bentuk argumentasi dalam bentuk contoh sekaligus analogi. Contoh dan analogi itu menyiratkan

bahwa proses perubahan yang terjadi di New Zeland dapat dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Pada ujaran terakhir terdapat bagian yang menyatakan *ganti perdana menteri*. Bagian itu sekaligus menjadi petunjuk keberadaan reflektor “perubahan”.

Seperti halnya dengan penutur pada (35a) dan (35b) terindikasi sedang berupaya melakukan tindak ‘mendesak’ (perubahan), demikian juga dengan B pada (35c) di atas. “Pergantian” yang disebutkan B menunjukkan adanya sesuatu yang harus diubah secara mendesak. Dalam pada itu, pergantian tersebut sekaligus mengimplikasikan nilai “keuntungan”. Salah satu petunjuk adanya nilai itu adalah B menyebutkan bahwa “*New Zeland sekarang sudah pulih*”. Selanjutnya, pendesakan dan tawaran perubahan yang dikomunikasikan oleh B, sekaligus juga menyiratkan fungsi tindak ‘menunjukkan’ bahwa dirinya arif terkait dengan kepentingan M.

Selain ‘menunjukkan’ sikap “kearifan” sebagai sikap positif penutur, ujaran B secara umum juga menyiratkan penunjukan sikap negatif terhadap pihak ketiga (termasuk pemerintah-sekarang dan/atau pemerintah sebelumnya). Dalam hal itu, pihak ketiga dikesankan ‘tidak atau belum mampu melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik terkait dengan kepentingan M’. Dengan fungsi ini, penutur memberi efek nilai atau kesan bahwa M telah mengalami suatu “kerugian”. Namun, nilai ini bukan sebagai nilai langsung (implikatur terkuat) dari penggunaan perangkat tema ini.

Berdasarkan implikasi nilai “keuntungan” dan “kerugian” di atas, di satu sisi penutur terkesan **mengarahkan** M agar memaksimalkan nilai simpati dan meminimalkan nilai antipatinya terhadap penutur. Fungsi ‘mengarahkan’ di sini termasuk ke dalam kategori *sugestif*). Di sisi lain, penutur juga **mengarahkan** M untuk memaksimalkan keantipatian dan meminimalkan nilai kesimpatianya terhadap pihak ketiga.

Nilai-nilai tersebut di atas mempunyai derajat kelangsungan dan biaya pemrosesan yang berbeda terhadap makna pragmatik pengujarannya. Jika nilai-nilai tersebut dinotasikan dengan n_1, n_2, \dots, n_n , biaya pemrosesannya dapat dapat dinotasikan menjadi $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_n$ (nilai₁ lebih kecil daripada nilai₂, nilai₃, ...dan nilai_n). Sebagai catatan, urutan nilai ini tidak dapat disebut saling

memperikutkan. Perbedaan biaya pemrosesan nilai untuk perangkat pertama ini dapat dicermati dalam relevansi berikut.

(K-35) Pendesakan B (terhadap semua pihak) untuk melakukan perubahan adalah penunjukan kearifan B. Kearifan itu mempunyai suatu nilai: yang menguntungkan (n_1) bagi M. Dengan keuntungan itu, M diharapkan dapat memiliki simpati yang maksimal terhadap B (n_2) dan simpati yang minimal terhadap pihak ketiga (n_3). Selanjutnya, B diharapkan pula untuk memiliki antipati yang minimal terhadap B (n_4), tetapi antipati maksimal terhadap pihak ketiga (n_5).

Untuk menguji koherensi dan relevansi nilai terhadap fungsi yang mengimplikasinya pada (K-35) di atas dapat dicermati dengan mengubah penyandingan implikasi-implikasi fungsi dan nilai itu tampak seperti pada (K'-35) berikut.

- (K'-35) (i) Tindak B dengan mendesakkan "perubahan" befungsi untuk menawarkan keuntungan bagi M.
 (i) ?Tindak B dengan mendesakkan "perubahan" befungsi untuk memaksimalkan simpati M terhadap B.
 (ii) ?Tindak B dengan mendesakkan "perubahan" befungsi untuk meminimalkan simpati M terhadap pihak ketiga.
 (iii) ? Tindak B dengan mendesakkan "perubahan" befungsi untuk meminimalkan antipati terhadap B.
 (iv) ?Tindak B dengan mendesakkan "perubahan" befungsi untuk memaksimalkan antipati terhadap pihak ketiga.

Pengonstruksian di atas memperlihatkan bahwa bentuk (ii)—(v) memiliki rumpang, masing-masing dengan biaya yang berbeda. Bentuk (ii) terumpangkan oleh biaya fungsi menawarkan dan nilai keuntungan sebagaimana pada (i). Dalam hal itu, nilai simpati terhadap B terkait dengan kemunculan nilai "keuntungan" dari "perubahan" yang ditawarkan B untuk M. Bentuk (iii), selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai pada bentuk (i), juga terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai pada bentuk (ii), yaitu fungsi 'mengharapkan' dengan nilai "simpati" yang maksimal. Artinya, nilai "simpati" yang minimal terhadap pihak ketiga merupakan konsekuensi dari kemunculan nilai "simpati" yang maksimal terhadap B.

Bentuk (iv), selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai pada bentuk (i) dan (ii), juga terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai pada bentuk (iii), yaitu fungsi meminimalkan nilai “simpati” pada pihak ketiga. Dalam hal ini, nilai “antipati” yang minimal terhadap B adalah konsekuensi dari nilai-nilai yang mendahuluinya. Bentuk (v), selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang ada dalam bentuk (i), (ii), dan (iii), juga terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang ada pada bentuk (iv), yaitu, fungsi meminimalkan nilai “antipati” bagi B.

Dengan demikian, pola pengimplikasian fungsi dan nilai tindak ‘mendesak’ atas reflektor “perubahan” seperti halnya dalam (K-35) di atas dapat dikonstruksikan dengan (FN-35) berikut.


(FN-35) Fungsi mendesak \rightarrow menawarkan \rightarrow keuntungan (n_1) \rightarrow simpati yang maksimal (n_2) \rightarrow simpati yang minimal (n_3) \rightarrow antipati yang minimal (n_4) \rightarrow antipati yang maksimal (n_5).

$$(n_1 \rightarrow n_2 \rightarrow n_3 \dots n_n)$$

Sebagai catatan, nilai positif yang maksimal merupakan nilai yang secara refleksif mengarah kepada diri penutur, sedangkan nilai positif yang minimal mengarah kepada pihak ketiga. Di kutub lain, nilai negatif yang maksimal cenderung mengarah kepada pihak ketiga, dan nilai negatif yang minimal secara refleksif mengarah kepada penutur.

Implikasi fungsi, nilai, dan biaya pemrosesan refleksivitas implikatur di atas dapat diringkaskan dalam Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mendesakkan Perubahan

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
mendesakkan	Perubahan	1. menawarkan 2. menunjukkan 3. mengarahkan	memaksimalkan <i>keuntungan</i> bagi M	
			memaksimalkan <i>simpati</i> bagi B	
			meminimalkan <i>simpati</i> bagi pihak ketiga	
			meminimalkan <i>antipati</i> pada B	
			memaksimalkan <i>antipati</i> pada pihak ketiga	

4.3.2 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak 'Menilai'

Sebagaimana telah diuraikan dalam 4.2.2.2. bahwa performatif tindak 'menilai' mempunyai dua bentuk penilaian: (a) penilaian negatif dan (b) penilaian positif. Penilaian negatif penutur terhadap keadaan-sekarang berfungsi untuk **menunjukkan** bahwa dirinya **mengeluhan** keadaan itu. Fungsi ini terimplikasi dari ujaran penutur melalui penggunaan ujaran berkonotasi negatif (misalnya, penutur mengujarkan, "*Hingga sekarang ini rakyat tetap susah, miskin, bodoh, dan sebagainya*). Dalam taksonomi fungsi, tindak 'mengeluhan' atau 'berkeluh' ini termasuk dalam fungsi *asertif*. Tindak penutur untuk 'mengeluhan' keadaan itu, selanjutnya akan mengimplikasikan adanya nilai "kerugian" pada M. Nilai "kerugian" tersebut secara tidak langsung dituduhkan (fungsi 'menuduh') sebagai akibat dari tindakan pihak ketiga sebagai pihak yang sedang atau pernah memerintah.

Perlu dicatat, keadaan yang tidak baik dan "kerugian" tersebut masih berkaitan dengan penggunaan reflektor pertama. Dalam hal ini, reflektor kedua menjadi salah satu motivasi penutur untuk mencetuskan reflektor pertama. Secara umum, alasan yang terkomunikasikan secara tersirat melalui ujaran penutur adalah adanya tindakan atau kebijakan pemerintah-sekarang telah mengakibatkan "kerugian" bagi M. Tindakan dan kebijakan tersebutlah yang menjadi alasan penutur untuk 'menawarkan', dan bahkan untuk 'mendesakkan' perubahan. Dalam keberkaitan itu pula terdapat kesamaan tujuan penutur dalam dua reflektor ini, yakni penutur sesungguhnya bertujuan untuk 'mengarahkan' M agar memaksimalkan "antipati" sekaligus meminimalkan simpatinya terhadap pihak ketiga. Di kutub lain, penutur juga 'mengarahkan' M untuk memaksimalkan "simpati" dan meminimalkan "antipati"-nya terhadap diri penutur.

Implikasi fungsi dan nilai tersebut dapat dicermati dalam dua contoh di bawah ini. Dua contoh ini merupakan kutipan langsung dari data (15) dan (17) dalam analisis strategi pada 4.2.1.2. Secara berurutan, kedua data tersebut dibuat menjadi data (36a) dan (36b) sebagai berikut.

- (36a) A: Kalau berbicara perubahan, bukankah dulu pada saat pemerintahan sekarang pun Pak X, menjadi capres, mengusung perubahan juga. Lalu, kali ini perubahan apa yang Bapak tawarkan untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan bangsa kita?

B: [...] kita sudah 63 tahun merdeka, [...] reformasi sudah sepuluh tahun, tapi hanya sebagian kecil dari bangsa kita, yang telah menikmati arti dari kemerdekaan. **Mayoritas lebih dari delapan puluh persen hidup saja susah. Nah, kami ingin agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan.**

(AKIM080814, 10–11)

(36b) B: Saya interupsi.

A: Ooh?

B: Karena ada kalimat "*lebih berani*". Itu lebih berani dengan/dari siapa? Dari pada diri saya. Kenapa? Saya mengalami dua presiden. Kalau saya berbeda pendapat, lebih baik saya diam; daripada timbul masalah bangsa Indonesia ini. Tapi, saya sekarang sadar, sesadar-sadarnya bahwa ternyata diam saya itu salah. Kenapa? Karena diam saya ini, sampai hari ini, *yah*, beliau itu mengatakan, sampai hari ini rakyat Indonesia tetap miskin dan bodoh.

(KA071101, 316–318)

Secara umum, ujaran B dengan reflektor "keadaan-sekarang" dan secara khusus pada dua contoh di atas telah memberi petunjuk bahwa penutur 'berkeluh' atas keadaan-sekarang yang dianggap kurang baik. Hal ini terimplikasi, misalnya, dari bagian ujaran B yang menyatakan *kami ingin agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan* dalam (36a). Dengan ujaran itu, terimplikasi suatu praanggapan bahwa M belum menikmati sesuatu yang baik (kemerdekaan). Jelas, hal ini mengimplikasikan pula suatu "kerugian" pada sikap bahwa M. Hal inilah yang menjadi petunjuk bahwa penutur dapat dikatakan berkeluh atas situasi itu. Demikian juga dengan bagian ujaran B pada (36b) yang berbunyi, "... *ternyata diam saya itu salah*". Bagian ini bahkan mengimplikasikan suatu penyesalan diri atas sikap "diam" yang telah dilakukan oleh orang yang mengujarkannya. Walaupun ujaran itu merupakan ujaran yang dikutip oleh B, ujaran itu juga sekaligus bentuk tindak tutur yang mewakili pemikiran B.

Kembali kepada ujaran B pada (36a) di atas, pada bagian terakhir terdapat bagian ujaran yang menyatakan, "*lebih dari delapan puluh persen hidup saja susah*". Bagian ujaran itu tampak sejalan dengan ujaran B pada (36b), yang menyatakan, "*sampai hari ini rakyat Indonesia tetap miskin dan bodoh*". Kedua pernyataan tersebut dapat menjadi petunjuk atas keberadaan fungsi 'menunjukkan' dan implikasi nilai "kerugian" pada M. Keberadaan fungsi-fungsi dan nilai tersebut berimplikasi juga pada tujuan penutur untuk (fungsi) 'mengarahkan' M agar turut menilai pihak pemerintah sekarang dengan nilai yang negatif

Berlawanan dengan penilaian-penilaian penutur pada dua cuplikan di atas, penutur sebagai bagian dari pemerintahan ‘menilai’ keadaan-sekarang justru dengan positif. Walaupun demikian, penilaian tersebut tetap mengandung reflektivitas untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Implikasi fungsi dan nilai yang terjadi atas penilaian yang positif itu dapat dilihat, misalnya, dalam data yang diambil dari data (19) pada 4.2.1.2, yang dikutip kembali sebagai contoh (37a) di bawah ini.

(37a) A: [...] Menurut Anda, kita sudah sampai di mana, Pak, kalau kita bicara tentang **sepuluh tahun** sudah sampai di hari atau di titik yang di mana kita sudah bisa ber...menarik nafas lega dan bergembira?

B: Kalau kita lihat secara jujur dari otoritarian pada waktu itu, sekarang tentu kita **jauh lebih baik** dari sisi itu. Politik juga **jauh lebih stabil** kalau kita lihat dari situ. Walaupun tentu bahwa banyak mengatakan bahwa ini banyak hal-hal yang formalistis kita capai, belum esensi-esensinya tentu aaa lebih perbaiki. Kedua, dari segi hukum tentu banyak hal yang telah dicapai, banyak juga yang musti harus dicapai lebih jauh lagi. Bahwa penertiban itu **jauh lebih baik** kalau kita lihat sisi bagaimana penertiban, bagaimana banyaknya koruptor-koruptor yang sudah mendapat ganjaran juga masih dalam pengejaran.

(TDD080101, 18—19)

Secara ringkas, B pada percakapan di atas mengatakan bahwa keadaan-sekarang jauh lebih baik. Keadaan itu meliputi otoritas pemerintahan, politik, hukum, dan penanggulangan korupsi (perhatikan bagian yang bergaris bawah).

Fungsi pertama yang terimplikasi dari penilaian positif penutur, adalah fungsi ‘melaporkan’. Penutur melaporkan bahwa dirinya bersama pihak pemerintah telah melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu selanjutnya menjadi petunjuk adanya implikasi nilai “keuntungan” bagi M (dalam taksonomi fungsi ‘melaporkan’ tersebut termasuk dalam kategori *asertif*). Pelaporan “keuntungan” itu sebenarnya merupakan bentuk pengapresiasian (terimplikasi adanya fungsi kedua yaitu fungsi ‘mengapresiasi’) diri penutur atas kinerjanya (fungsi ‘mengapresiasi’ termasuk dalam kategori *ekspresif*). Dengan demikian, akan terimplikasi pula nilai pujian terhadap dirinya sendiri.

Tujuan akhir pengujian itu adalah agar M dapat meningkatkan dan memaksimalkan nilai “kesimpatian”-nya. Di kutub lain M diarahkan untuk meminimalkan “keantipatian”-nya terhadap penutur.

Implikasi-implikasi fungsi dan nilai pada percakapan di atas, serupa dengan implikasi yang terdapat dalam percakapan (37b) di bawah ini. Percakapan ini adalah data yang sama dengan data (20) pada pembahasan strategi dalam 4.2.1.2.

(37b) A: Pak B, Anda disebut lokomotif reformasi begitu; yang menggerakkan gerbong reformasi, adakah hal-hal tertentu yang setelah kita melihat sepuluh tahun terakhir, adakah hal-hal tertentu yang menurut Anda, Anda sesali Anda lakukan ketika itu?

B: [...] Ya, alangkah nikmatnya kita sekarang ini bisa mengetahui berbagai ... opini dari berbagai corak atau kelompok masyarakat. Kemudian, amendemen Undang-Undang Dasar 45, itu juga, menurut saya, lumayan sekali, sekalipun tentu masih ada kekurangan di sana sini, tetapi dibandingkan dengan sebelum diperbaiki empat tahapan itu, yang ini sudah jauh lebih baguslah. Kemudian juga otonomi daerah telah dinikmati oleh rakyat kita dari Merauke sampai Sabang. Ini kalau saya ke mana-mana, Pak *Gubernur*, Pak *Bupati* mengatakan, “Pak B, kita sekarang senang alhamdulillah. Kami bisa membangun dengan kemampuan sendiri dengan semangat... apa... dan lain-lain.”

(TDD080101, 20—21)

Sedikitnya terdapat lima petunjuk yang menandakan implikasi fungsi dan nilai dalam ujaran B di atas (perhatikan bagian yang bergaris bawah). Bagian-bagian yang digarisbawahi pada ujaran itu merupakan petunjuk bahwa penutur memberi nilai yang positif terhadap keadaan sekarang. Ketika mengujarkan nilai positif itu, penutur sekaligus ‘melaporkan’ bahwa dirinya pernah melakukan sesuatu yang telah menjadi “keuntungan” bagi M dalam masa sepuluh tahun (sebagaimana ditanyakan oleh A). Sesuatu yang baik itu ialah “kebebasan memberi opini, amendemen UUD 1945, otonomi daerah, dan sebagainya”.

Selain ‘melaporkan’ hal-hal tersebut, penutur juga ‘melaporkan’ apresiasi dari sejumlah kalangan (lihat kata *gubernur* dan kata *bupati* yang dicetak miring) atas segala sesuatu yang telah dilakukan oleh B. Pelaporan tersebut sekaligus juga menjadi bentuk fungsi ‘mengapresiasi’ dirinya sendiri untuk mengimplikasikan nilai “pujian” yang maksimal bagi dirinya. Selanjutnya, fungsi dan nilai itu

mengimplikasikan fungsi lain, yakni fungsi untuk ‘meningkatkan’ nilai “simpati” M terhadap penutur.

Berdasarkan keempat data percakapan di atas, dapat dicatat bahwa proses pengimplikasian fungsi-fungsi dan nilai-nilai itu memerlukan biaya yang berbeda. Proses pengimplikasian kedua bentuk performatif tindak ‘menilai’ pada percakapan di atas dapat dikonstruksikan seperti (K-36) dan (K-37) berikut.

(K-36) Secara negatif:

Penilaian B terhadap keadaan-sekarang adalah untuk ‘menunjukkan’ kemasygulan B dan keadaan bahwa M: telah di-“rugi”-kan (n_1) dengan sikap dan tindakan (keputusan) pihak ketiga. Dengan keadaan dan “kerugian” itu, M diharapkan dapat memaksimalkan “antipati” (n_2), meminimalkan “simpati” (n_3), meminimalkan “pujian” (n_4), dan memaksimalkan “kecaman” (n_5) kepada pihak ketiga.

(K-37) Secara positif:

Penilaian B terhadap keadaan-sekarang adalah untuk ‘melaporkan’ dan ‘mengapresiasi’ diri sendiri bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik dan “menguntungkan” (n_1) M. Hal ini sekaligus menjadi nilai “pujian” (n_2) bagi B. Dengan demikian, M diharapkan dapat memaksimalkan “simpati” (n_3) pada B dan meminimalkan “antipati”-nya (n_4) terhadap B.

Untuk mencermati koherensi dan relevansi dua konstruksi di atas, dapat dilakukan dengan cara menukar posisi fungsi dan nilai yang ada sebagai nilai terlangsung (sebagai n_1) terhadap konstruksi utama. Perhatikan pengonstruksian pada (K’-36) berikut.

- (K’-36) (i) Tindak B untuk menilai “keadaan-sekarang” secara negatif adalah untuk mengeluhkan dan menunjukkan bahwa M telah dirugikan.
 (i) ?Tindak B untuk menilai “keadaan-sekarang” secara negatif adalah untuk memaksimalkan antipati terhadap pihak ketiga.
 (ii) ?Tindak B untuk menilai “keadaan-sekarang” secara negatif adalah untuk meminimalkan simpati terhadap pihak ketiga.
 (iii) ?Tindak B untuk menilai “keadaan-sekarang” secara negatif adalah untuk meminimalkan pujian terhadap pihak ketiga.

Bentuk (ii) terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang terimplikasi pada bentuk (i), yaitu fungsi ‘mengeluhkan’ dan ‘menunjukkan’ nilai “kerugian” pada M. Artinya, nilai “antipati” yang maksimal terhadap pihak ketiga merupakan konsekuensi dari nilai “rugi” yang ditunjukkan dan dikeluhkan B. Bentuk (iii),

selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang terdapat pada bentuk (i), juga oleh biaya fungsi dan nilai yang terdapat pada bentuk (ii), yaitu nilai “antipati” terhadap pihak ketiga. Dalam hal itu, meminimalan nilai “simpati” sebagai implikasi ketiga merupakan akibat dari pemaksimalan nilai “antipati” dalam bentuk (ii) sebagai nilai yang mendahuluinya.

Bentuk (iv), selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai seperti yang terdapat dalam bentuk (i) dan (ii), juga terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang terdapat dalam bentuk (iii), yaitu meminimalan nilai “simpati” pada pihak ketiga. Dengan perkataan lain, nilai “pujian” yang minimal pada bentuk (iv) adalah akibat dari meminimalan “simpati” yang mendahuluinya. Catatan, nilai-nilai di atas dapat dikaitkan dengan peningkatan nilai positif bagi penutur, tetapi nilai positif mempunyai biaya proses yang lebih besar lagi.

Dengan demikian, pola pengimplikasian fungsi dan nilai performatif tindak ‘menilai’ atas reflektor “keadaan-sekarang” secara negatif sebagaimana pada (K-36) di atas dapat dipostulasikan seperti pada (FN-36) berikut.

(FN-36) Fungsi ‘mengeluhkan’ \rightarrow ‘menunjukkan’ \rightarrow “kerugian” (n_1) \rightarrow “antipati” yang maksimal (n_2) \rightarrow “simpati” yang minimal (n_3) \rightarrow “pujian” yang minimal (n_4).

$(n_1 \rightarrow n_2 \rightarrow \dots n_n)$

Untuk mencermati relevansi implikasi fungsi dan nilai atas tindak ‘menilai’ secara positif, dapat dicermati melalui pertukaran kelangsungan fungsi dan nilai seperti pada beberapa konstruksi pada (K’-37) di bawah ini.

- (K’-37) (i) Tindak B untuk ‘menilai’ terhadap “keadaan-sekarang” secara positif adalah untuk melaporkan dan mengapresiasi bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang baik dan “menguntungkan” M.
- (ii) ?Tindak B untuk ‘menilai’ terhadap “keadaan-sekarang” secara positif adalah untuk memaksimalkan “pujian” bagi diri B.
- (iii) ?Tindak B untuk ‘menilai’ terhadap “keadaan-sekarang” secara positif adalah untuk memaksimalkan “simpati” pada B.
- (iv) ?Tindak B untuk ‘menilai’ terhadap “keadaan-sekarang” secara positif adalah untuk meminimalkan “antipati” terhadap B.

Bentuk (i) dengan fungsi ‘melaporkan’ dan ‘mengapresiasi’ sebagai implikasi terlangsung, jelas koheren dan berterima secara pragmatik. Selanjutnya, bentuk (ii)—(iv) menjadi kurang koheren karena rumpang biaya fungsi dan nilai yang terdapat pada konstruksi-konstruksi sebelumnya.

Bentuk (ii) terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang terdapat dalam bentuk (i), yaitu fungsi ‘melaporkan’ dan ‘mengapresiasi’ sesuatu nilai yang “menguntungkan” M. Dalam hal itu, “pujian” bagi B pada bentuk (ii) merupakan konsekuensi dari nilai “keuntungan” yang dilaporkan oleh B pada bentuk (i). Bentuk (iii), selain terumpangkan oleh biaya yang terdapat dalam bentuk (i), juga terumpangkan oleh biaya yang terkandung dalam bentuk (ii), yaitu fungsi ‘memaksimalkan’ nilai “pujian” bagi B. Ini menjelaskan bahwa “simpati” pada B muncul karena nilai “pujian” yang mendahuluinya. Bentuk (iv), selain terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai yang terdapat pada bentuk (i) dan (ii), juga terumpangkan oleh biaya yang terdapat dalam bentuk (iii), yaitu fungsi memaksimalkan nilai “simpati” bagi B. Artinya, nilai “antipati” yang minimal terhadap B merupakan konsekuensi dari nilai “simpati” maksimal yang mendahuluinya.

Dengan demikian, pola pengimplikasian fungsi dan nilai performatif tindak ‘menilai’ atas reflektor “keadaan-sekarang” secara positif sebagaimana pada (K-37) di atas dapat dituliskan seperti pada (FN-37) berikut.


(FN-37) Fungsi ‘melaporkan’ \rightarrow ‘mengapresiasi’ \rightarrow “keuntungan” (n_1) \rightarrow “pujian” yang maksimal (n_2) \rightarrow “simpati” yang maksimal (n_3) \rightarrow “antipati” yang minimal (n_4).

$(n_1 \rightarrow n_2 \rightarrow \dots n_n)$


Tambahan, pembalikan terhadap urutan konsekuensi di atas akan menjadikan konstruksi itu tidak koheren bahkan menjadi anomali (misalnya, “simpati” yang minimal \rightarrow “antipati” yang maksimal). Keanomalian dan ketidakkohherenan itu disebabkan nilai negatif yang terkandung dalam “kerugian” cenderung berkolokasi dengan nilai negatif yang terkandung dalam “antipati”. Sementara itu, nilai “antipati” cenderung berkolokasi dengan nilai “simpati”.

Fungsi dan nilai penggunaan reflektor “keadaan-sekarang” di atas dapat gambarkan dalam Tabel 4.6 dan 4.7 berikut ini.

Tabel 4.6 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Menilai Keadaan-Sekarang (Negatif)

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
menilai (negatif)	Keadaan-Sekarang	1. mengeluhkan 2. menunjukkan 3. mengarahkan 4. mengecam	kerugian yang maksimal pada M	
			antipati yang maksimal terhadap pihak ketiga	
			simpati yang minimal terhadap pihak ketiga	
			pujian yang minimal bagi pihak ketiga	
			kecaman yang maksimal bagi pihak ketiga	

Tabel 4.7 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Menilai Keadaan-Sekarang (Positif)

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
menilai (positif)	Keadaan-Sekarang	1. melaporkan 2. mengapresiasi diri	keuntungan yang maksimal bagi M	
			pujian yang maksimal bagi B	
			simpati yang maksimal bagi B	
			simpati yang minimal bagi pihak ketiga	

4.3.3 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak ‘Mempermasalahkan’

Secara garis besar, dari penganalisisan strategi pada 4.2.1.3 telah disinggung bahwa penutur tersirat melakukan tindak ‘mempermasalahkan’ melalui pengaitannya dengan “keterlibatan pihak asing”. Tindak itu dilakukan penutur sebagai bentuk penolakannya terhadap keterlibatan itu, sekaligus menjadi ketidaksetujuannya terhadap sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang. Bentuk-bentuk tersebutlah yang menjadi petunjuk adanya fungsi ‘menolak’ yang terimplikasi dari fungsi ‘mempermasalahkan’ dalam reflektor ketiga itu. Dalam pada itu, dua fungsi tersebut terimplikasi melalui penyebutan seraya ‘menunjukkan’ kebijakan pemerintah yang lebih “menguntungkan” pihak asing, dan M menjadi pihak yang di-“rugi”-kan atas kebijakan itu. Di sinilah terindikasi adanya fungsi ‘menunjukkan’ dan nilai “kerugian”.

Terkait dengan kepentingan politik di masa yang akan datang, fungsi dan nilai tersebut berperan untuk ‘mengarahkan’ M agar turut “tidak setuju” atas kebijakan pemerintah sekaligus turut ‘menolak’ keterlibatan asing. Hal yang menjadi harapan penutur adalah keminimalan “kesetujuan” dan “simpati” M terhadap pihak pemerintah-sekarang. Data (38a) berikut adalah sebagai contoh pengujarannya.

(38a) B: Belum lama ini Pak Mahatir berpidato, ya, di depan para tokoh NGO Asia Tenggara, beliau mengatakan, *“It was the lead President Sukarno from Indonesia, who reminded us the dangerous of the new imperialism and new colonialism they would return, a... they have returned, ya, to the international sin.”* Artinya, yang saya nggak enak itu, justru Pak Mahatir, ya, bukan tokoh Indonesia yang ...mengingatkan bahwa dulu adalah Bung Karno yang mengingatkan bahwa neo-imperialisme dan neo-kolonialisme itu akan kembali itu. Dan memang sekarang sudah kembali Mas. [...] kenyataannya sekarang ini kedaulatan ekonomi kita sudah kita gadaikan, Mas. Jadi, hampir separoh perbankan dikuasai korporasi asing. Bank maksud saya. Kemudian juga seluruh kontrak karya migas dan mineral kalau kita periksa kembali, itu untuk kepentingan gede-gede korporasi asing dan kerugian kita, habis-habisan juta. [...]

(JB080111, 01—03; 11—15)

Percakapan (38a) di atas merupakan data yang sama dengan data (21) pada 4.2.1.3. Tindak ‘mempermasalahkan’ pada ujaran itu ditandai oleh sejumlah bagian ujaran, yaitu adanya peringatan seseorang tokoh (lihat juga uraian reflektor “ide pendiri bangsa”, yang tidak diindahkan oleh pemerintah-sekarang, dan justru tokoh negara lain yang mengindahkan peringatan itu. Permasalahan lain ialah kembalinya neo-imperialisme dan neo-kolonialisme, tergadainya kedaulatan ekonomi, penguasaan perbankan oleh korporasi asing, dan kerugian yang besar bagi M. Ketika menyebutkan (‘menunjukkan’) masalah inilah penutur terkesan sedang berupaya untuk ‘memberitahukan’ sekaligus ‘menolak’ keterlibatan asing itu (fungsi ‘mempermasalahkan’, ‘menolak’, ‘memberitahukan’, dan ‘menunjukkan’ dalam reflektor ini termasuk dalam kategori *asertif*). Fungsi-fungsi inilah yang mengimplikasikan tindak penutur untuk ‘mengarahkan’ M agar meminimalkan “kesetujuan” dan “kesimpatian”-nya terhadap pemerintah-sekarang (fungsi ‘mengarahkan’ termasuk dalam kategori *sugestif*). Di kutub lain, M juga

diarahkan untuk memaksimalkan “ketaksetujuan”-nya kepada pemerintah-sekarang.

Pengimplikasian serupa juga dapat terlihat dalam contoh percakapan lain, seperti (38b) di bawah ini. Percakapan ini merupakan data yang sama dengan data (23) dalam penganalisisan strategi pada 4.2.1.3.

(38b) A: Baik. Kita...saya akan minta tanggapan dari anggota Fraksi p, ada Mas B di sini. Silakan Mas B.

B: Nah, kalau kita lihat **sekarang ini**, tidak hanya angka kemiskinan, tapi program-program pemerintah yang mana yang itu berdampak pada **pemiskinan rakyat**. [...] **ketergantungan kita terhadap korporasi, big korporasi itu semakin hari semakin tinggi**. Ini yang **sampai hari ini** tidak ada keberanian politik pemerintah bahkan semakin tingginya tingkat ketergantungan kita. Kalau kita tidak berani mengatakan tidak terhadap ketergantungan korporasi asing, mau apa kita? ***Kalau Exxon Mobile sebenarnya bisa kita kelola ternyata dikasikan, Block Cepu sebenarnya kita ngelola dikasikan Exxon Mobile***, mau apa kita?

(TDD080102, 172—196)

Tindak ‘mempermasalahkan’ tampak pada cara penutur ketika memberi jabaran seraya ‘memberitahukan’ sejumlah masalah, yaitu kemiskinan, program pemerintah yang berdampak pada pemiskinan, tingginya ketergantungan terhadap korporasi asing, dan ketiadaan keberanian pemerintah. Pemberitahuan ini merupakan bentuk lain dari cara penutur untuk ‘mempermasalahkan’ dan ‘menolak’ keadaan itu. Selanjutnya, fungsi tersebut sekaligus mengimplikasikan pengarahan (fungsi ‘mengarahkan’) kepada M agar turut ‘menolak’ keadaan itu. Dalam pada itu pula terimplikasi adanya nilai “kerugian” terhadap M oleh masalah-masalah itu. Namun, dalam konteks kepentingan politik tertentu di masa yang akan datang, tujuan akhir penutur dengan implikasi yang tersirat di dalam ujarannya adalah untuk ‘mengarahkan’ M memaksimalkan “ketaksetujuan” dan meminimalkan “kesetujuan” serta “simpati”-nya terhadap pemerintah-sekarang.

Relevansi biaya pemrosesan nilai dari fungsi penggunaan reflektor “keterlibatan pihak asing” ini dapat dituliskan sebagai berikut.

(K-38) Tindak B untuk ‘mempermasalahkan’ keterlibatan pihak asing adalah untuk ‘memberitahukan’ sekaligus ‘menolak’ keterlibatan tersebut karena hal itu telah mengakibatkan “kerugian” pada M (n_1). Dengan

pemberitahuan “kerugian” itu, B ‘mengarahkan’ M untuk memaksimalkan “ketaksetujuan”-nya (n_2) dan meminimalkan “kesetujuan”-nya (n_3) terhadap pihak ketiga. Dengan fungsi itu, penutur sekaligus ‘mengarahkan’ M untuk meminimalkan “kesimpatian”-nya (n_4) dan memaksimalkan “keantipatian”-nya (n_5) terhadap pihak ketiga.

Apabila konstruksi (K-38) di atas dikonstruksikan kembali seperti pada (K'-38) di bawah ini, tampak sejumlah bagian memiliki kerumpangan fungsi dan nilai pengimplikasinya. Kerumpangan itu mengakibatkan sebagian konstruksi itu tidak koheren atau kurang berterima secara pragmatik sebagaimana dalam penjelasan konstruksi serupa dalam penjelasan reflektor yang lain.

- (K'-38) (i) Tindak B untuk ‘mempermasalahkan’ keterlibatan pihak asing adalah untuk ‘memberitahukan’ sekaligus ‘menolak’ keterlibatan tersebut karena hal itu telah mengakibatkan “kerugian” pada M.
- (ii) ?Tindak B untuk ‘mempermasalahkan’ keterlibatan pihak asing adalah untuk ‘mengarahkan’ M memaksimalkan “ketaksetujuan”-nya terhadap pihak ketiga.
- (iii) ?Tindak B untuk ‘mempermasalahkan’ keterlibatan pihak asing adalah untuk ‘mengarahkan’ M meminimalkan “kesetujuan”-nya terhadap pihak ketiga.
- (iv) ?Tindak B untuk mempermasalahkan keterlibatan pihak asing adalah untuk mengarahkan M meminimalkan kesimpatianya terhadap pihak ketiga.
- (v) ?Tindak B untuk ‘mempermasalahkan’ keterlibatan pihak asing adalah untuk ‘mengarahkan’ M memaksimalkan “keantipatian”-nya terhadap pihak ketiga.

Kelangsungan bentuk (ii) terhadap konstruksi utama, kurang koheren karena dirumpangkan oleh fungsi dan nilai sebagaimana terdapat dalam bentuk (i). Nilai “ketaksetujuan” pada bentuk (ii) seharusnya muncul setelah pemberitahuan nilai “kerugian”. Demikian pula pada bentuk (iii) harus didahului oleh nilai yang terkandung dalam bentuk (i) dan (ii) secara berurutan. Nilai-nilai itulah yang selanjutnya mengimplikasikan nilai “kesimpatian” yang minimal bagi pihak ketiga pada bentuk (iv), dan nilai “keantipatian” yang maksimal juga bagi pihak ketiga pada bentuk (v).


Selanjutnya, pola pengimplikasian fungsi dan nilai performatif tindak ‘mempermasalahkan’ atas reflektor “keterlibatan pihak asing” sebagaimana pada (K-38) di atas dapat dinotasikan seperti pada (FN-38) berikut.

(FN-38) Fungsi ‘menolak’+> ‘memberitahukankan’ +> “kerugian” (n_1) +> “ketaksetujuan” yang maksimal (n_2) +> “kesetujuan” yang minimal (n_3) +> “simpati” yang minimal (n_4)+> “antipati” yang maksimal (n_5).

$$(n_1 + > n_2 + > \dots n_n)$$

Dalam bentuk tabel, implikasi fungsi dan nilai tindak ujar B atas reflektor “keterlibatan pihak asing” di atas dapat diringkaskan seperti pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8 Fungsi dan Nilai Kelangsungan
Tindak Mempermasalahkan Keterlibatan Pihak Asing

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
mempermasalahkan	Keterlibatan Pihak Asing	1. menolak 2. memberitahukan 3. menunjukkan 4. mengarahkan	kerugian yang maksimal bagi M	
			ketaksetujuan yang maksimal oleh M	
			kesetujuan yang minimal oleh M	
			simpati yang minimal terhadap pihak ketiga	
			antipati yang maksimal terhadap pihak ketiga	

Perlu dicatat, fungsi-fungsi dan nilai yang diimplikasinya adalah untuk membentuk nilai positif secara maksimal kepada diri penutur secara refleksif. Sebaliknya, fungsi-fungsi dan nilai tersebut meminimalkan nilai yang positif terhadap pihak ketiga. Di sisi lain, penutur juga ‘mengarahkan’ nilai negatif secara maksimal terhadap pihak ketiga, sedangkan nilai negatif itu diharapkan menjadi minimal bagi dirinya.

4.3.4 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak ‘Mempertanyakan’

Fungsi ‘mempertanyakan’ dalam percakapan politik, berkombinasi dengan reflektor “keutuhan negara dan bangsa” (lihat 4.2.1). Secara umum, fungsi ini termasuk dalam kategori *rogatif*. Fungsi ini akan mengimplikasikan fungsi lain, yakni fungsi ‘mengondisikan’. Dalam hal ini, penutur ‘mempertanyakan’ keutuhan negara dan bangsa adalah untuk ‘mengondisikan’ suatu kekhawatiran pada M perihal keterancaman keutuhan tersebut. Pengondisian itu sendiri

sekaligus mengindikasikan adanya nilai “kerugian” pada M yang akan terjadi. Berikut data pengujarannya (data ini sama dengan data (25) pada 4.2.1.4).

- (39a) B : A... Saya lihat dari, dari a... berbagai apa nama ya, lima atau enam nama tadi, mereka adalah nama orang-orang, kebanyakan, ya, orang-orang yang sudah terjun ke dunia politik atau sudah mengikuti pilkada. Nah, saya nggak melakukan itu. Saya malah bertanya, “Kenapa masyarakat percaya dengan...melalui poling tadi?” Seolah-olah memilih saya. Seolah-olah.
- A : Atau, jangan-jangan karena peran Nagabonar ya?
- B : Saya nggak ngerti. Mungkin persepsi tadi yang terbentuk dari karakter yang saya mainkan. Nah, tadi saya katakan lagi, kalau memang karena kerinduan kepada moralitas pemimpin dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.
- A : Wah, ini kayaknya udah orasinya capres cawapres ini.

(AKIM 080611, 98—107)

Dalam penjelasan data (25) telah disebutkan bahwa pernyataan B di atas membentuk praanggapan bahwa negara (NKRI) yang disebutkan dalam ujaran itu dalam keadaan kurang atau tidak utuh. Walaupun sebagai praanggapan, hal tersebut dapat dipastikan sebagai salah satu yang dikomunikasikan penutur secara sengaja. Di sinilah terindikasi nilai “kerugian”. Ketika penutur ‘mempertanyakan’ hal itu, penutur sekaligus ‘menunjukkan’ kepeduliannya terhadap keutuhan bangsa dan negara serta kepentingan M (termplikasi nilai “kearifan”). Implikasi lain adalah keterancaman ini pasti terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini. Dalam hal itu, pemerintah dianggap tidak dapat mengakomodasi keutuhan yang sedang dipertanyakan itu (di sini tersirat fungsi ‘menuduh’). Tujuan akhirnya adalah penutur ‘mengharapkan’ M memaksimalkan simpatinya terhadap penutur.

Pola pengimplikasian yang serupa dengan data di atas, juga dapat dilihat dalam cuplikan percakapan di bawah ini (bandingkan dengan data (27) pada 4.2.1.4).

- (39b) A : Oke. Faktanya sekarang sudah ada 34 parpol dan aaa, aaa, resikonya seperti itu tadi akan sulit sekali membentuk pemerintahan yang kuat, berarti, ya, lagi-lagi koalisi-koalisi yang semi-permanen.
- B : Betul! Yang saya khawatirkan ke depan, gitu. Nanti, kalau tidak ada yang mayoritas, kemudian pemerintahan sudah dibentuk dengan susah payah dengan koalisi ini. Yang terjadi apa? Presiden yang terpilih tidak bisa bekerja, tanpa dukungan parlemen [...]. Mau nggak mau presiden harus bekerja sama dengan parlemen; dengan DPR; dengan segala

kekuarungannya. Karena itu dugaan saya dengan adanya ini, mau nggak mau ke depan, saya usulkan: presiden yang terpilih itu adalah mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu: satu, dua, tiga, empat, atau apa. Atau yang lain-lain kemudian dengan posisi oposisi tidak apa-apa. Itu baru ideal bahwa bangsa kita ini akan kita bisa arahkan untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya.

(TDD080708,147—153)

Dalam ujaran di atas, sesuatu yang menjadi kekhawatiran B adalah sulitnya membentuk pemerintahan yang kuat (sebagaimana disebutkan oleh A). Tampak bahwa kesulitan yang dimaksudkan itu akan berpengaruh pada keidealan bangsa (sebagaimana dalam ujaran B bagian terakhir yang bergaris bawah). Dalam keberpengaruhan itulah terindikasi pengondisian (fungsi ‘mengondisikan’) kekhawatiran oleh B. Pengondisian itu selanjutnya menjadi bentuk tindak penutur untuk ‘menunjukkan’ adanya potensi “kerugian” yang juga akan melibatkan M.

Kembali kepada tujuan politik, pengondisian itu digunakan penutur mengusulkan tujuan politiknya dengan ujaran, “...*presiden yang terpilih itu adalah mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu...*” (lihat bagian yang dicetak tebal). Salah satu konteks yang mendukung reflektivitas dalam ujaran itu ialah bahwa partai p (yang di dalamnya B terlibat) merupakan salah satu partai besar. Pengujaran ini sekaligus menjadi petunjuk keberadaan fungsi ‘mengarahkan’. Penutur ‘mengarahkan’ M untuk memaksimalkan “simpati”-nya kepada pihak B, dan meminimalkannya bagi pihak ketiga. Di sisi lain, penutur juga ‘mengarahkan’ M untuk memaksimalkan “antipati”-nya terhadap pihak ketiga dan meminimalkannya bagi pihak B.

Biaya pemrosesan nilai atas fungsi-fungsi tersebut dapat dideskripsikan seperti dengan konstuksi (K-39) berikut.

(K-39) Tindak B untuk ‘mempertanyakan’ keutuhan negara dan bangsa adalah upaya penutur untuk ‘menunjukkan’ bahwa pihak ketiga telah membuat “kerugian” (n_1) bagi M secara maksimal. Dengan kerugian itu M diarahkan untuk meminimalkan “simpati”-nya (n_2) pada pihak ketiga itu, dan bahkan (mungkin) untuk memaksimalkan “antipati” (n_3) pada pihak ketiga tersebut. Sebaliknya, M diharapkan untuk memaksimalkan “simpati” (n_4) pada B.


Dengan demikian, pelompatan informasi fungsi dan nilai seperti pada bentuk-bentuk di bawah ini (kecuali bentuk (i)) akan mengurangi koherensi konstruksi itu secara pragmatik.

- (K'-39) (i) Tindak B untuk 'mempertanyakan' keutuhan negara dan bangsa adalah untuk 'mengondisikan' kekhawatiran (adanya "kerugian") pada M.
- (ii) ?Tindak B untuk 'mempertanyakan' keutuhan negara dan bangsa adalah untuk meminimalkan "simpati" M terhadap pihak ketiga.
- (iii) ?Tindak B untuk 'mempertanyakan' keutuhan negara dan bangsa adalah untuk memaksimalkan "antipati" M kepada pihak ketiga.
- (iv) ?Tindak B untuk 'mempertanyakan' keutuhan negara dan bangsa adalah untuk memaksimalkan "simpati" M terhadap B.

Pada (K'-39) di atas tampak bahwa bentuk (ii) terumpangkan oleh biaya fungsi dan nilai kerugian seperti pada bentuk (i). Artinya, peminimalan nilai "simpati" pada pihak ketiga muncul setelah pengindikasian nilai "kerugian" sebagaimana pada bentuk (i). Demikian juga "antipati" yang maksimal pada bentuk (iii) muncul karena peminimalan "simpati" pada bentuk (ii), dan seterusnya.

Berdasarkan hal itu, fungsi dan nilai serta biaya kelangsungan atas reflektor keempat ini dapat digambarkan dalam Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mempertanyakan Keutuhan Negara dan Bangsa

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
mempertanyakan	Keutuhan Negara dan Bangsa	1. mengondisikan 2. menuduh 3. menunjukkan	<i>kerugian yang maksimal bagi M</i>	
			<i>simpati yang minimal terhadap pihak ketiga</i>	
			<i>antipati yang maksimal terhadap pihak ketiga</i>	
			<i>simpati yang maksimal terhadap B</i>	

Selanjutnya, pola pengimplikasian fungsi dan nilai performatif tindak 'mempertanyakan' atas reflektor "keutuhan negara dan bangsa" sebagaimana pada (K-39) di atas dapat dipostulasikan seperti pada (FN-39) berikut.

(FN-39) Fungsi ‘mengondisikan’ +> ‘menuduh’ +> ‘menunjukkan’ +> “kerugian” (n_1) +> “simpati” yang minimal (n_2) +> “antipati” yang maksimal (n_3) +> “simpati” yang maksimal (n_4).

($n_1 +> n_2 +> \dots n_n$)

Perlu dicatat, nilai yang positif yang maksimal secara refleksif bagi penutur dan minimal bagi pihak ketiga, sedangkan nilai negatif yang maksimal ditujukan pada pihak ketiga, dan minimal bagi penutur.

4.3.5 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak ‘Mengargumentasikan’

Penjelasan penutur dalam berbagai hal dengan merujuk pada ide para pendiri bangsa (*founding's father*) sebagai bahan argumentasinya merupakan salah satu strategi penutur untuk ‘memperkuat’ pendapatnya (termasuk pendapatnya mengenai perubahan, keadaan-sekarang, keterlibatan pihak asing, dan reflektor lainnya). Dengan pengargumentasian itu, penutur terkesan setuju dengan pemikiran para pendiri bangsa itu. Akan tetapi, di sisi lain, pengargumentasian itu terkesan juga sebagai upaya penunjukan sesuatu keadaan yang terjadi sekarang ini tidak sesuai bahkan menyimpang dari ide (cita-cita) para pendiri bangsa itu. Hal ini sekaligus mengimplikasikan adanya nilai “kerugian”. Berikut contoh pengujarannya (diambil dari data (28) pada 4.2.1.5).

(40a) A: Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini.

B: Nah, karena begini ya Bapak. Sebelum republik ini ada, ya, bangsa ini sudah ada. Ya, biarpun masih berupa etnik-etnik, [...] yang dibangun oleh para “*founding's father*” masyarakat etniknya sendiri-sendiri. Yah, itu sudah terbentuk aspek-aspek simbol, filosofi, tradisi sebagai kearifan lokal. Di mana strategi yang digunakan adalah pendekatannya spiritual, berarti bicara moralitas dan etika. Berarti *character building*. Jadi, strategi yang digunakan adalah strategi kebudayaan: memanusiasikan manusia untuk membangun peradaban dan kemandirian. Tapi begitu republik itu ada, konsepsi yang dibangun, itu pendekatannya materi. Akhirnya, ukurannya duit. Jadi, orang punya moralitas baik, akhirnya, harga kamu berapa? Apakah itu sebetulnya bangsa ini akan dibangun? Kalau pendapat saya, “Tidak.” Pendekatannya bukan materi. Itu adalah konsepsi Barat, bukan konsepsi orang Indonesia, orang Timur. Ya, pendekatannya harus tetap pendekatan kebudayaan.

(KA071101,85—86)

Alasan B untuk kecewa (sebagaimana diujarkan oleh A) adalah pembangunan konsepsi materi yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam membuat kebijakan di republik (lihat bagian yang bergaris bawah pada ujaran B). Dengan hal itu, B menganggap bahwa konsepsi itu tidak sesuai dengan (konsepsi) yang dibangun oleh para *founding's father*. Penjabaran (fungsi 'mengargumentasikan') B tentang konsepsi-konsepsi *founding's fathers* itu merupakan bentuk fungsi untuk 'menunjukkan' bahwa B setuju dan mempunyai konsep pemikiran yang sejalan dengan *founding's fathers* itu. Seperti yang sudah disebutkan pada penjelasan data (28) bahwa perujukan ini menjadi bentuk pematuhan B terhadap maksim Kualitas. Dalam hal itu, penutur dengan merujuk pendapatnya kepada ide pendiri bangsa bertujuan untuk 'menunjukkan' bahwa segala sesuatu yang dijabarkannya benar cukup bukti. Kebenaran dan kecukupan bukti itulah yang mengimplikasikan pemerkuatan (fungsi 'memperkuat') dengan reflektor ini.

Perihal sesuatu yang dianggap "tidak sesuai" yang diargumentasikan B menunjukkan adanya nilai "kerugian". Sementara itu, di balik penunjukan "kerugian" itu, B juga mengimplikasikan tawaran "keuntungan" melalui keinginannya untuk menerapkan ide pendiri bangsa tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks politik fungsi dan nilai itu mengimplikasikan fungsi untuk 'mengarahkan' M agar ber-"simpati" maksimal, sedangkan "antipati" menjadi minimal terhadap B.

Contoh pengimplikasian fungsi dan nilai seperti yang dijelaskan di atas, juga dapat dicermati dalam data (30) yang selanjutnya dikutip sebagai contoh (40b) di bawah ini.

- (40b) C : [...] Seharusnya Bapak lebih konsentrasi di partai p. Kalau trus kalah karena Pak X waktu itu, ya tetap bertahan di situ karena jadi problem juga, gitu lho. Seharusnya, seorang pemimpin yang cerdas, kepribadian yang integritasnya kuat kalau bergabung dengan partai p lagi, pasti, saya yakin, bahwa punya potensi untuk maju.
- B : Saya tidak bisa masuk atau duduk manis dalam suatu kendaraan yang saya sendiri sudah tidak cocok di dalamnya.
- A : Tidak cocok karena kalah, Pak?
- B : [...] Bukan karena kalah. Karena saya masih mempunyai suatu obsesi bahwa harus ada perubahan di negeri ini. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa seorang yang malu dan takut untuk berbuat dia tidak akan mengalami perubahan.

(TDD080708,203; 213—217; lihat juga data (11))

Sedikit berbeda dari alasan B pada (40a), alasan B pada (40b) di atas untuk mengatakan “tidak cocok” (lihat ujaran A) adalah obsesi perubahan yang dimilikinya. Sembari mematuhi maksim Kualitas, B ‘memperkuat’-nya dengan ‘mengargumentasikan’ perkataan Bung Karno (lihat ujaran yang bergaris bawah). Secara konteks, *Bung Karno* dikenal sebagai salah satu tokoh yang dapat dikategorikan sebagai pendiri bangsa.

Jika ditelisik lagi, terdapat ujaran B yang menyatakan keharusan (terdapat frasa *harus ada*; lihat yang bercetak tebal). Keharusan di situ mempraanggapkan bahwa ada sesuatu yang belum berubah dan mendesak untuk diubah (di sinilah terimplikasi nilai “kerugian”). Walaupun sebagai praanggapan, inferensi praanggapan itu sesungguhnya menjadi bagian dari pokok pesan yang dikomunikasikan penutur. Selain sebagai obsesi dirinya, perubahan yang diharuskan itu juga dianggap sesuai dengan perkataan Bung Karno (lihat ujaran B bagian terakhir). Kesesuaian itulah yang menjadi pengimplikasi nilai “keuntungan” sebagai sesuatu yang ditawarkan oleh B. Pada akhirnya, penutur mengomunikasikan itu adalah untuk ‘mempengaruhi’ M untuk memaksimalkan “simpati” dan meminimalkan “antipati”-nya terhadap penutur. Sementara itu, atas sesuatu yang tidak sesuai dengan ide para pendiri bangsa yang dilakukan oleh pihak ketiga, penutur menginginkan M agar memaksimalkan “antipati” dan meminimalkan “simpati”-nya terhadap pihak ketiga itu.

Secara garis besar, implikasi fungsi dan nilai yang terdapat dalam penggunaan reflektor “ide pendiri bangsa” ini dapat dirumuskan seperti (K-40) di bawah ini.

(K-40) Tindak B untuk ‘mengargumentasikan’ ide-ide para pendiri bangsa adalah upaya B untuk ‘memperkuat’ segala pendapatnya. Pengargumentasian itu ‘menunjukkan’ suatu “kerugian” dan ‘menawarkan’ suatu “keuntungan”. Dengan penunjukan itulah B ‘mempengaruhi’ dan ‘mengarahkan’ M untuk memaksimalkan “simpati” (n_1) dan meminimalkan “antipati”-nya (n_2) terhadap B. Di kutub lain, B juga ‘mempengaruhi’ dan ‘mengarahkan’ M agar meminimalkan “simpati” (n_3) dan memaksimalkan “antipati”-nya (n_4) terhadap pihak ketiga.

Pelompatan informasi fungsi dan nilai pada konstruksi di atas akan mengakibatkan ketidakoherenan dan kekurangrelevanan konstruksi itu. Perhatikan, misalnya, bentuk-bentuk (ii)—(iv) pada (K'40) di bawah ini.

- (K'40) (i) Tindak B untuk 'mengargumentasikan' ide para pendiri bangsa adalah untuk 'mempengaruhi' dan 'mengarahkan' M agar memaksimalkan "simpati"-nya terhadap B.
- (ii) ?Tindak B untuk 'mengargumentasikan' ide para pendiri bangsa adalah untuk 'mempengaruhi' dan 'mengarahkan' M agar meminimalkan "antipati"-nya terhadap B.
- (iii) ?Tindak B untuk 'mengargumentasikan' ide para pendiri bangsa adalah untuk 'mempengaruhi' dan 'mengarahkan' M agar meminimalkan "simpati"-nya terhadap pihak ketiga.
- (iv) ?Tindak B untuk 'mengargumentasikan' ide para pendiri bangsa adalah untuk 'mempengaruhi' dan 'mengarahkan' M agar memaksimalkan "antipati"-nya terhadap pihak ketiga.

Penyandingan langsung bentuk (ii) terhadap konstruksi utama (K'40) akan merumpangkan nilai simpati yang disebabkan argumentasi penutur. Demikian pula bentuk (iii) terumpangkan oleh nilai biaya pada (i) dan (ii), sedangkan bentuk (iv) terumpangkan oleh tiga nilai yang harus mendahuluinya.

Deskripsi fungsi dan nilai pengargumentasian di atas dapat digambarkan dalam tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mengargumentasikan Ide Pendiri Bangsa

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
mengargumentasikan	Ide Pendiri Bangsa	1. memperkuat 2. menunjukkan 3. mempengaruhi	<i>simpati</i> yang maksimal bagi B	
			<i>antipati</i> yang minimal terhadap B	
			<i>simpati</i> yang minimal terhadap pihak ketiga	
			<i>antipati</i> yang maksimal terhadap B	

Keruntutan pengimplikasian fungsi dan nilai performatif tindak 'mengargumentasikan' atas reflektor "ide pendiri bangsa" sebagaimana pada (K-39) di atas dapat dipostulatkan seperti pada (FN-40) berikut.

(FN-40) Fungsi ‘memperkuat’ +> ‘menunjukkan’ +> ‘mempengaruhi’ +> “simpati” yang maksimal (n_1) +> “antipati” yang minimal (n_2) +> “simpati” yang minimal (n_3) +> “antipati” yang maksimal (n_4).

($n_1 + > n_2 + > \dots n_n$)

Sebagai catatan, nilai yang positif yang maksimal secara refleksif bagi penutur dan minimal bagi pihak ketiga, sedangkan nilai negatif yang maksimal ditujukan pada pihak ketiga, dan minimal bagi penutur.

4.3.6 Implikasi Fungsi dan Nilai Tindak ‘Mengatasnamakan’

Salah satu pesan yang dikomunikasikan penutur politik dalam ujarannya ialah MAP (lihat 4.2.1.6). Ketika penutur, misalnya, menawarkan perubahan, menilai keadaan sekarang, dan pencetus reflektor lainnya, terimplikasi bahwa penutur ‘mengatasnamakan’ hal itu sebagai MAP. Pengatasnamaan itu berfungsi untuk ‘mencitrakan’ diri penutur sebagai seseorang yang baik. Pencitraan itu akan mengimplikasikan adanya nilai “pujian” bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, perhatikan contoh (41a) di bawah yang dikutip kembali dari data pendukung (32.1) pada 4.2.1.6. Sebagai catatan, walaupun sebagai data pendukung, sebenarnya data itu dapat diperlakukan sebagai data utama.

- (41a) A : Kembali lagi dikaitkan dengan ambisi Anda untuk menjadi orang nomor satu, dan ini Anda atur strateginya dengan tidak bersedia dipilih menjadi gubernur. Kalau ada tudingan semacam itu, apa jawaban Anda?
- B : Saya kira tudingan itu wajar karena ini pendapat orang yang harus dihargai. Ya. Jadi, masyarakat juga supaya paham ya. Sebelum almarhum ibu berangkat ke Amerika, beliau memanggil saya, ya. Beliau menanyakan, kamu mau bersedia tidak, berjanji sama saya? “Janji apa?” Saya bilang begitu. Kamu harus bisa berjanji. Empat hal yang harus bisa kamu laksanakan.
- A : Apa itu?
- B : Ya, satu, “Kamu bersedia nggak berjanji, untuk bisa mengayomi semua orang, biarpun mungkin orang itu tidak senang sama diri kamu?” Saya berjanji untuk itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak melanggar peraturan negara. Yang ketiga, ya. Berjanji untuk lebih berani mengatakan: yang benar itu benar, yang salah itu salah) ...Yang empat, berjanji tidak boleh punya ambisi apa pun, kecuali mensejahterakan rakyat.”

(KA071101, 311—320)

Apabila dicermati, hubungan antara pertanyaan A dan jawaban B, penutur B tampak berupaya untuk relevan, informatif, dan jelas. Namun, informasi yang diberikan B menjadi berlebih dari sekadar memberi tanggapan terhadap tudingan. Di sini B melanggar maksim Kuantitas submaksim yang kedua³. Penutur menambahkan informasi yang berupa MAP, di antaranya adalah “menyejahterakan rakyat” (bandingkan juga dengan pola pelanggaran B pada data (33/41b) setelah penjelasan data ini). Jelas, tujuan B membuat atau melanggar maksim itu adalah untuk ‘mencitrakan’ dirinya sebagai seorang yang pantas dipertimbangkan oleh M. Dengan pencitraan itulah terimplikasi fungsi yang ‘menunjukkan’ nilai kearifan dan pujian kepada B serta fungsi yang ‘menawarkan’ nilai “keuntungan” kepada M. Hal inilah yang selanjutnya ‘mengarahkan’ seraya ‘mengharapkan’ M untuk memaksimalkan “kesimpatian”-nya, dan meminimalkan “keantipatian”-nya terhadap B. Di kutub lain, penutur ‘mengarahkan’ M untuk meminimalkan “kesimpatian”-nya dan memaksimalkan “keantipatian”-nya terhadap pihak ketiga.

Implikasi yang serupa juga dapat dicermati dalam pengujaran lain seperti pada data (41b) di bawah ini (data yang sama dengan data (33) pada 4.2.1.6).

- (41b) A : ... saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak X akhir-akhir ini?
 B : Akhir-akhir ini, a... baik. Begitu ya. Jadi, a..., setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian kita, saya selalu berusaha berpikir jernih, dan selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat.

(KA080208, 01—02)

Pada penjelasan strategi (data (33) pada 4.2.1.6) telah dijelaskan bahwa di samping penutur telah berupaya untuk relevan, informatif, benar, dan jelas sesuai dengan beberapa maksim PKS, di sisi lain, penutur sengaja menambah informasi yang lebih dari sekadar menjawab hubungannya dengan X. Ketika penutur menginformasikan bahwa dirinya selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat, di sinilah terlihat MAP.

Sebagaimana penutur lainnya, MAP yang dikomunikasikan itu mengimplikasikan upaya penutur untuk ‘mencitrakan’ dirinya sebagai seorang yang baik (antara lain, terpuji, arif, atau peduli terhadap kepentingan M). Dalam

³ *Do not make your contribution more informative than is required.*


pada itu, secara jelas terlihat nilai “keuntungan” yang ditawarkannya. Namun, dalam konteks politik pengimplikasian fungsi dan nilai itu adalah upaya B untuk menarik “simpati” M secara maksimal, dan meminimalkan “antipati” M terhadap dirinya.

Secara umum, pola pengimplikasian fungsi dan nilai dalam reflektor MAP dapat disederhanakan dalam konstruksi (K-41) berikut.

(K-41) Tindak B untuk ‘mengatasnamakan’ tindakannya sebagai MAP adalah untuk ‘membangun citra’ positif bagi dirinya sendiri. Hal itu berfungsi untuk memaksimalkan “pujian” (n_1) bagi diri B dengan tujuan untuk memaksimalkan “simpati” (n_2) dan meminimalkan “antipati” (n_3) terhadap penutur. Seiring dengan itu, (dimungkinkan pula) penutur ‘mengharapkan’ agar “simpati” (n_4) terhadap pihak ketiga menjadi minimal dan “antipati” (n_5) menjadi maksimal.

Implikasi fungsi dan nilai di atas beserta biaya kelangsungannya dapat digambarkan dalam Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11 Fungsi dan Nilai Kelangsungan Tindak Mengatasnamakan MAP

Performatif	Reflektor	Fungsi	Nilai	Biaya
mengatasnamakan	MAP	1. mencitrakan 2. mempengaruhi 3. mengharapkan	<i>pujian</i> yang maksimal bagi B	
			<i>simpati</i> maksimal bagi B	
			<i>antipati</i> yang minimal bagi B	
			<i>simpati</i> minimal terhadap pihak ketiga	
			<i>antipati</i> yang maksimal terhadap pihak ketiga	

Relevansi kelangsungan fungsi atau nilai-nilai yang terdapat dalam (K-41) atau pada Tabel 4.11 di atas dapat dengan perubahan posisinya seperti pada (K'-41) berikut.

- (K'-41) (i) Tindak B untuk ‘mengatasnamakan’ tindakannya sebagai MAP adalah untuk ‘mencitrakan’ diri penutur sebagai orang yang baik sehingga “pujian” termaksimalkan baginya.
(ii) ?Tindak B untuk ‘mengatasnamakan’ tindakannya sebagai MAP adalah untuk memaksimalkan “simpati” terhadap diri B.

- (iii)?Tindak B untuk ‘mengatasnamakan’ tindakannya sebagai MAP adalah untuk meminimalkan “antipati” M terhadap B.
 (iv)?Tindak B untuk ‘mengatasnamakan’ tindakannya sebagai MAP adalah untuk meminimalkan “simpati” M kepada pihak ketiga.

Ketidakkoherenan bentuk (ii)—(iv) di atas disebabkan nilai “simpati” pada bentuk itu seharusnya dikondisikan oleh pencitraan dan nilai “pujian” pada bentuk (i). Demikian juga “antipati” yang minimal pada bentuk (iii) dapat muncul karena diimplikasikan oleh nilai “simpati” pada bentuk (ii). Selanjutnya, keminimalan “antipati” terhadap B dalam bentuk (iii) itulah yang mengondisikan keminimalan “simpati” untuk pihak ketiga dalam bentuk (iv). Keruntutan fungsi terhadap implikasi nilai-nilai performatif tindak ‘mengatasnamakan’ atas reflektor “MAP” sebagaimana pada (K-41) di atas dirumuskan dengan konstruksi (FN-41) di bawah ini.

(FN-41) Fungsi ‘mencitrakan’ +> ‘mempengaruhi’ +> ‘mengharapkan’ +> “pujian” yang maksimal (n_1) +> “simpati” yang maksimal (n_2) +> “antipati” yang minimal (n_3) +> “simpati” yang minimal (n_4).
 (n_1 +> n_2 +>... n_n)

Dalam pada itu, nilai yang positif yang maksimal secara refleksif diarahkan kepada diri penutur dan minimal bagi pihak ketiga, sedangkan nilai negatif yang maksimal ditujukan pada pihak ketiga, dan minimal bagi diri penutur.

Berdasarkan penganalisisan fungsi dan nilai atas keenam reflektor dan performatif pengiringnya, tampak memiliki keruntutan implikasi dalam fungsi beserta nilai-nilainya bergantung pada reflektornya. Hal ini menandakan bahwa runtutan atau keterpolaan pengimplikasian nilai-nilai tersebut bersifat kontekstual sebagaimana salah satu ciri bahasa pragmatik.

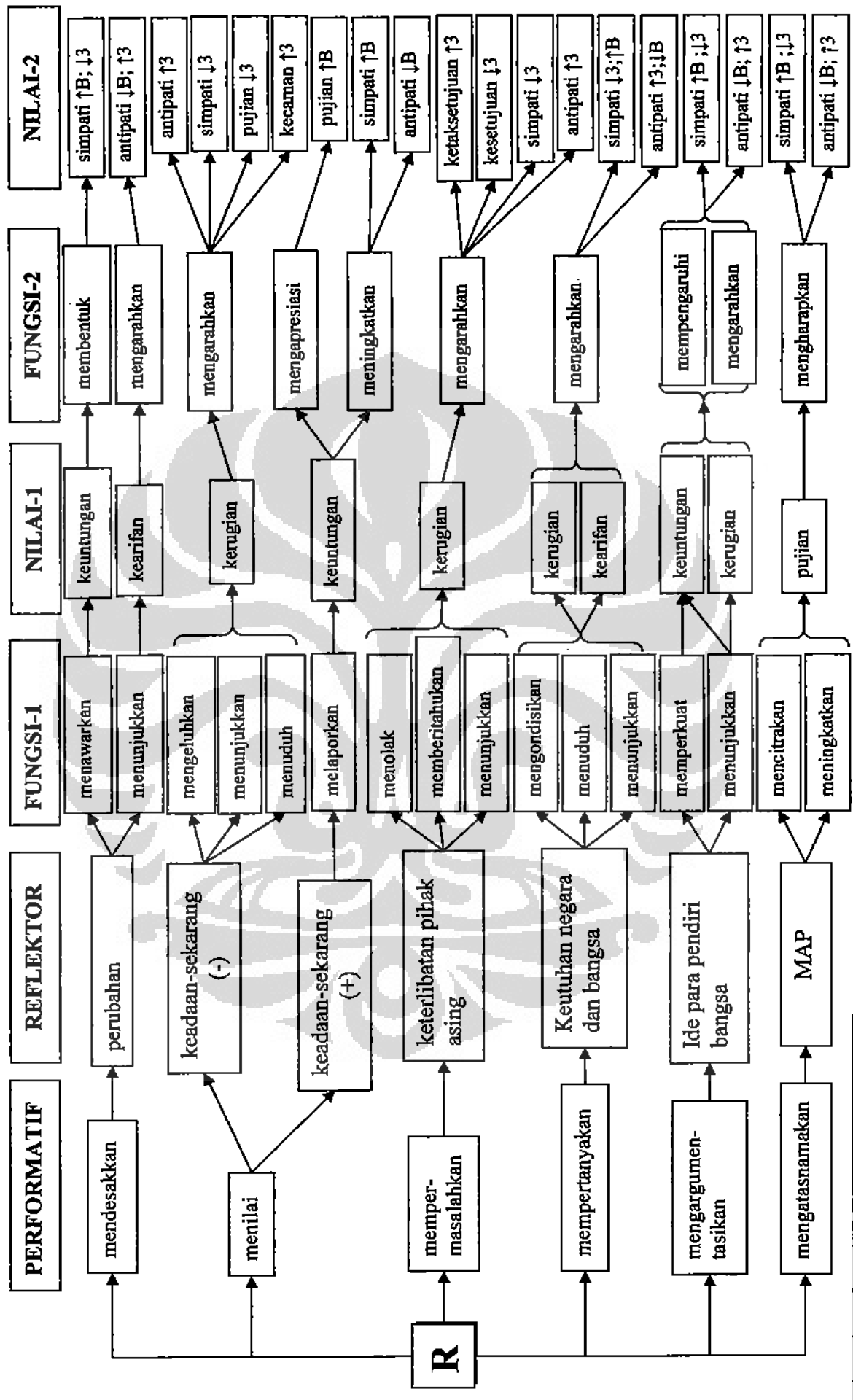
BAB 5 SIMPULAN

Percakapan dalam tayang bincang politik menjelang kampanye-resmi pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk pemakaian bahasa yang sarat implikatur. Dalam implikatur percakapan itu dimungkinkan terdapat berbagai aspek makna yang bersifat pragmatik, di antaranya, aspek reflektivitas. Aspek reflektivitas bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu aspek makna yang diutamakan penutur dalam percakapannya. Oleh karena itu, reflektivitas menjadi ciri yang penting untuk dicermati.

Ciri reflektivitas dalam implikatur percakapan seperti disebutkan di atas, adakalanya sebagian sudah dapat terdeteksi dari respons penutur. Dalam hal itu, penutur kerap sudah dapat menginferensikan ujaran-ujaran tertentu dari penutur politik sebagai ujaran yang bermuatan reflektif, antara lain, sebagai orasi politik, sebagai bentuk visi-misi, sebagai kampanye, atau sebagai bentuk persiapan penutur untuk posisi politik tertentu di masa yang akan datang. Akan tetapi, sebagian lagi dapat ditelusuri melalui perangkat tertentu (reflektor) yang digunakan penutur dalam ujarannya. Namun, perlu dicatat, dua tahap pengidentifikasian reflektivitas tersebut bukanlah tahap yang terpisah atau bertentangan, melainkan yang sepadan dan saling mendukung.

Berdasarkan penelusuran terhadap percakapan tayang bincang politik dalam masa sepuluh menjelang kampanye-resmi pemilu, terdapat enam reflektor, yaitu 1) perubahan, 2) keadaan-sekarang, 3) keterlibatan pihak asing, 4) keutuhan negara dan bangsa, 5) ide pendiri bangsa, dan 6) MAP (moral, amanah, dan pengabdian). Reflektor-reflektor tersebut masing-masing diiringi bentuk performatif yang menandakan cara penutur untuk mengomunikasikan pesan politiknya. Bentuk performatif itu secara berturut-turut adalah mendesakkan, menilai, mempermasalahkan, mempertanyakan, mengargumentasikan, dan mengatasnamakan.

Konstruksi yang dibentuk performatif terhadap reflektornya akan menunjukkan implikasi fungsi dan nilai beserta implikasi fungsi dan nilai turunannya. Implikasi fungsi dan nilai turunan tersebut dapat disebutkan sebagai *fungsi-nilai derivatif*. Selanjutnya, konstruksi reflektivitas implikatur percakapan dengan muatan bentuk performatif, reflektor, fungsi dan nilai, beserta implikasi derivatif itu dapat digambarkan seperti dalam Skema 5.1 berikut.



Skema 5. 1 Konstruksi Refleksivitas Implikatur Percakapan

Keterangan: R= RefleksivitasB= penutur ;
 3= pihak ketiga; ↑= maksimal; ↓= minimal

Walaupun di satu sisi penutur kerap melanggar prinsip dan/atau sejumlah maksim PKS, di sisi lain, penutur adakalanya mematuhi prinsip dan/atau maksim PKS. Strategi pematuhan itu dapat disimpulkan dalam Tabel 5.2 berikut.

Kategori	Maksim	Realits Pematuhan
Prinsip Utama	Buatlah ujaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuan dan hal itu dapat dimengerti pada saat percakapan berlangsung	Ujaran penutur adakalanya dibuat sudah sesuai dengan yang diperlukan dalam hal maksud dan tujuan.
Kualitas	1 Jangan mengatakan sesuatu yang diyakini salah.	Penutur cenderung mengatakan sesuatu dengan tampak yakin bahwa sesuatu itu tidak salah
	2 Jangan mengatakan sesuatu jika tidak cukup bukti.	Penutur cenderung mengatakan sesuatu disertai oleh bukti-bukti.
Kuantitas	1 Buatlah ujaran seinformatif mungkin	Penutur cenderung berupaya membuat ujarannya dengan seinformatif mungkin.
	2 Jangan membuat ujaran lebih dari informasi yang dibutuhkan.	cenderung tidak dipatuhi
Relevansi	Buatlah ujaran dengan hal yang relevan	Adakalanya penutur membuat ujarannya secara relevan
Cara	1 hindari ketidakjelasan	Ujaran penutur kerap tidak jelas
	2 hindari ketaksaan	cenderung tidak dipatuhi
	3 buat secara ringkas	cenderung tidak dipatuhi
	4 buat secara runtut	tidak teridentifikasi

Tabel 5. 3 Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pematuhannya

Sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ahli pragmatik, pelanggaran satu maksim atau lebih merupakan konsekuensi dari pematuhan maksim yang lain. Demikian juga dalam percakapan dalam tayang bincang politik. Penutur politik dapat berada dalam posisi mematuhi prinsip utama dan maksim Kuantitas submaksim yang pertama, yaitu membuat kontribusi atau ujaran seinformatif mungkin, tetapi keinformatifan itu juga kerap harus mengorbankan maksim Relevansi (buatlah ujaran itu dengan hal yang relevan) dan maksim Cara submaksim kedua (hindari ketaksaan).

Oleh karena kecenderungan penutur untuk tidak mematuhi maksim sebagaimana pada Tabel 5.2 di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran penutur politik cenderung taksa, tidak ringkas, dan bertele-tele. Kesimpulan ini memperkuat pencermatan Renkema (2004: 255) terhadap wacana politik dengan

Akan tetapi, pola yang terbentuk itu bersifat kontekstual dan bergantung pada reflektor yang merefleksifikannya. Kebergantungan pola itu dapat dijelaskan, misalnya, dengan mencermati contoh pola konstruksi (1) berikut.

- (1) Penawaran keuntungan untuk membentuk simpati yang maksimal kepada penutur; simpati yang minimal terhadap pihak ketiga dikomunikasikan penutur dengan cara:
- (i) mendesakkan perubahan.
 - (ii) ??menilai keadaan sekarang.
 - (iii) ??mempermasalahkan keterlibatan pihak asing.
 - (iv) ??mempertanyakan keutuhan negara dan bangsa
 - (v) ??mengargumentasikan ide pendiri bangsa
 - (vi) ??mengatasnamakan MAP.

Konstruksi (1) di atas membuktikan bahwa nilai simpati yang dimaksudkan penutur terimplikasi dari penawaran keuntungan, dan penawaran keuntungan itu terimplikasi dari pendesakan perubahan, seperti pada bentuk (i), bukan dari penilaian keadaan-sekarang (bentuk (ii)), atau dari tindak mempermasalahkan keterlibatan asing (bentuk (iii)), dan seterusnya. Walaupun hal itu dimungkinkan, tentu harus dengan biaya pemrosesan yang lebih tinggi.

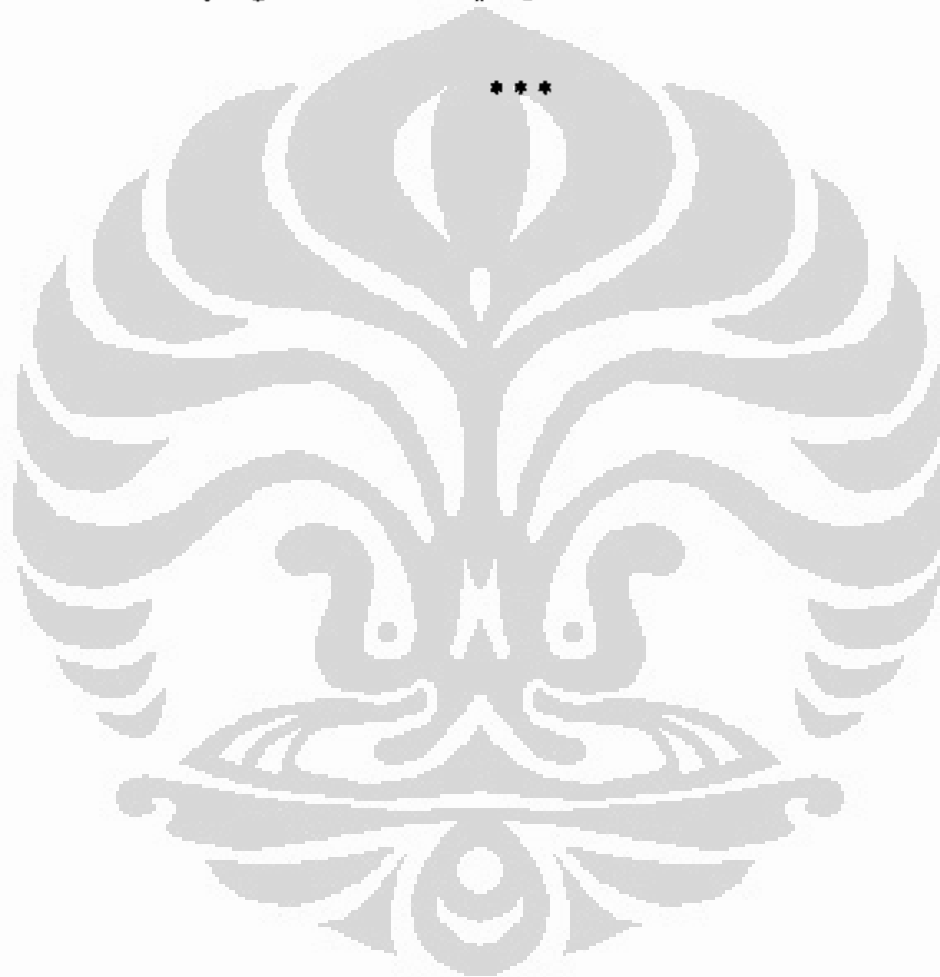
Berdasarkan PKS, reflektivitas implikatur diproduksi penutur dalam dua kategori strategi: *pertama*, strategi melanggar prinsip dan/atau sejumlah maksim, dan *kedua*, strategi mematuhi prinsip dan/atau sejumlah maksim. Strategi pertama tersebut dapat disimpulkan dalam Tabel 5.2 berikut.

Kategori	Maksim	Realitas Pelanggaran
Prinsip Utama	Buatlah ujaran sebagaimana diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuan dan hal itu dapat dimengerti pada saat percakapan berlangsung	Ujaran penutur kerap tidak seperti yang diperlukan dalam hal maksud dan tujuan.
Kualitas	1 Jangan mengatakan sesuatu yang diyakini salah.	kerap tidak dilanggar
	2 Jangan mengatakan sesuatu jika tidak cukup bukti.	kerap tidak dilanggar
Kuantitas	1 Buatlah ujaran seinformatif mungkin	kerap tidak dilanggar
	2 Jangan membuat ujaran lebih dari informasi yang dibutuhkan.	Ujaran penutur kerap melebihi dari informasi yang dibutuhkan
Relevansi	Buatlah ujaran dengan hal yang relevan	Ujaran penutur kerap kurang relevan
Cara	1 hindari ketidakjelasan	Ujaran penutur kerap tidak jelas
	2 hindari ketaksaan	Ujaran penutur kerap taksa
	3 buat secara ringkas	Ujaran penutur kerap bertele-tele
	4 buat secara runtut	tidak teridentifikasi

Tabel 5. 2 Bandingan Prinsip dan Maksim terhadap Realitas Pelanggarannya

kesimpulan bahwa ketaksaan sudah merupakan salah satu kebutuhan strategi dalam komunikasi politik.

Perihal tersebut di ataslah yang dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan dan penjelasan teori komunikasi khususnya dalam percakapan politik. Dalam hal itu, temuan atas reflektor dan bentuk performatif pengiringnya, serta implikasi fungsi dan nilai, hingga implikasi turunannya (implikasi derivatif) dapat dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian atau perbandingan proses antara hal yang diujarkan dan hasil yang kelak akan dicapai penutur.



DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. and Poole, M. 2001. *Assignment and Thesis Writing (4th Edition)*. Australia: Wiley.
- Blakemore, Dianne. 1992. *Understanding Utterance: An Introduction to Pragmatics*. Oxford UK: Blackwell.
- Cole, P dan Morgan, J.L. (ed). 1975. *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*. New York: Academic Press.
- Cruse, D. Alan. 2004. *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Cruse, D. Alan. 1991. *Lexical Semantics*. New York: Cambridge University Press.
- Crystal, David. 1992. *Dictionary of Language and Languages: An Encyclopedic*. London: Penguin Books.
- Davis, Wayne. 2005. "Implicature". Dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy.htm) 18 November 2007.
- Fraser, B. 1975. *Hedged Performatives*. Dalam Cole & Morgan, 1975: 187—193.
- Grandy, Richard and Warner, Richard. 2006. *Paul Grice*, Stanford Encyclopedia of Philosophy.htm. (18 November 2007).
- Grice, H.P. 1975. *Logic and Conversation*. Dalam Cole & Morgan, 1975: 41—58.
- Griffiths, Patrick. 2006. *An Introduction to English Semantics and Pragmatics*. Edinburgh: University of Edinburgh.
- Gumperz, John L. 1982. *Discourse Strategies*. New York: Cambridge University Press.
- Gunarwan, Asim. 2004. "Dari Pragmatik ke Pengajaran Bahasa": Materi Kuliah Program Doktor LTBI UNIKA ATMA Jaya Jakarta (Makalah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. IKIP Singaraja, 29 November 2004).
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Jaszczolt, K.M. 2002. *Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and Discourse*. London: Pearson Education.
- Kearns, Kate. 2000. "Implikatur and Semantic Change". Dalam Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert & Chris Bulcaen eds. *Handbook of Pragmatics 2000*. Amsterdam: John Benjamins.
- Kearns, Kate. 2000. *Semantics: Modern Linguistics*. London: Macmillan Press LTD.
- Leech, Geoffrey. 1981. *Semantics: The Study of Meaning (Second edition-Revised and Updated)*. Middlesex: Penguin Books. Ltd.
- Leech, Geoffrey N. 1983. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman Inc.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Levinson, Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, Stephen C. 2000. *Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature*. London: The MIT Press.

- Mackey, Alison dan Susan M. Gass. 2005. *Second Language Research: Methodology and Design*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Masinambow, E.K.M. 2001. "Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya" dalam *Meretas Ranah: Bahasa, Semiotika, dan Budaya*. Jogjakarta: Penerbit Yayasan Bentang Budaya.
- Mey, Jacob L. 2001. *Pragmatics: An Introduction (Second Edition)*. Malden/Oxford: Blackwell.
- Nunan, David. 1992. *Research Methods in Language Learning*. New York: Cambridge University Press.
- Ogden, C.K. dan Richards, I.A. 1952. *The Meaning of Meaning: A Study of The Influence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism*. London: Routledge & Kegan Paul LTD.
- Portner, Paul. 2006. "Meaning" (dalam *An Introduction to Language and Linguistics*. Chapter 4: 138—166). Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahyono, F.X., at al.. 2005. "Kearifan dalam Bahasa: Sebuah Tinjauan Pragmatis terhadap Profil Kebahasaan Media Massa pada Masa Pascaorde Baru". Dalam *Makara Seri Sosial Humaniora*. Vol. 9, No. 2. Desember 2005. Depok. Universitas Indonesia.
- Renkema, Jan.2004. *Introduction to Discourse Studies*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Saeed, John I. 2003. *Semantics*, second edition. Oxford: Blackwell Publishing.
- Schmandt, Henry J. 2002. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. (terjemahan dari *A History of Political Philosophy*. 1960. The Bruce Publishing Company, United America; diterjemahkan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, penerbit Pusataka Pelajar, Yogyakarta).
- Searle, J.R. 1975. *Indirect Speech Acts*. Dalam Cole & Morgan, 1975: 59—82.
- Sperber, D and Wilson, D. (dalam G. Ward and L. Horn (eds) *Handbook of Pragmatics*. Oxford: Blackwell, 607-632) dalam *Relevance Theory*.htm. 3 Juli 2008.
- Sperber, D and Wilson, D. 1995. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell.
- Sperber, D and Wilson, D. 1986. "Inference and Implicature" (dalam Steven, Davis. Edt. 1991. *Pragmatics: A Reader*). Oxford University Press.
- Thomas, Jenny. 1995. *Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics*. London/New York: Longman.
- Verschuieren, Jef. 1999. *Understanding Pragmatik: Understanding Language Series*. London: Arnold.
- Wray, A., Kate Trott, dan Aileen Bloomer. 1998. *Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language*. London: Arnold.
- Yule, George. 1996. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.

JADWAL PENELITIAN

November 2007 -- Juli 2009

NO	KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN		
		Nov. 2007 - Juni 2008			Jul-08			Agust-08			Sep-08				Okt.-08 -- Juni.-09	Jul-09
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Penyusunan proposal															
2	Ujian Proposal															
3	Pengambilan data															
4	Penyuntingan data															
5	Analisis dan Bimbingan															
9	Ujian Pratesis															
10	Penyuntingan Tesis															
11	Bimbingan															
12	Ujian Tesis															

REKAPITULASI DATA TAYANG BINCANG YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI

NO	TANGGAL	TOPIK	TAYANG BINCANG	KODE DATA	TELEVISI	TOKOH UTAMA DALAM WACANA POLITIK	
						NAMA	ORGANISASI/KARIER
1	01 November 2007	Sri Sultan Hamengku Buwono X	Kick Andy	KA071101	Metro TV	Sri Sultan Hamengku Buwono X	Golkar/Gubernur Yogyakarta
2	15 November 2007	Gus Dur	Kick Andy	KA071115	Metro TV	Gus Dur	PKB/NU/ Mantan Presiden
3	01 Januari 2008	Meretas Jalan Reformasi I	To Day's Dialogue	TDD080101	Metro TV	Jusuf Kalla	Golkar/Wapres
4	02 Januari 2008	Meretas Jalan Reformasi II		TDD080102		Amien Rais	PAN/Mantan Ketua MPR
5	11 Januari 2008	-	Jalan Bincang	JB080111	Jack TV	Wiranto	Hanura/Mantan Pangab
6	01 Februari 2008	Detik-Detik yang Menentukan	Kick Andy	KA080201	Metro TV	Budiman Sudjatmiko	PDIP
7	08 Februari 2008	-	Kick Andy	KA080208	Metro TV	Sutiyoso	Mantan Gubernur DKI
8	15 Februari 2008	Bersaksi di Tengah Badai	Kick Andy	KA080215	Metro TV	Amien Rais	PAN/Mantan Ketua MPR
9	15 Februari 2008	Setelah Interplasi, Lalu?	Kupas Tuntas	KT080215	Trans TV	Habibie	Mantan Presiden/Tekokrat
10	11 Juni 2008	Survei Selebriti dalam Politik	Apa Kabar Indonesia Malam	AKIM080611	TV One	Prabowo Subianto	Genindra/Pangkostrad
11	25 Juni 2008	Hak Angket	Save Our Nation	SON080625	Metro TV	Wiranto	ABRI/Mantan Pangab
12	25 Juni 2008	DPR Setuju Hak Angket BBM	Apa Kabar Indonesia Malam	AKIM080625	TV One	Syanef Hasan	Ketua FPD
13	01 Juli 2008	Mencari Pemimpin Alternatif	To Day's Dialogue	TDD080701	Metro TV	Dradjat Wibowo	Wakil Ketua FPAN
14	08 Juli 2008	Banyak Parpol Banyak Problem	To Day's Dialogue	TDD080708	Metro TV	Ganjar Pranowo	Sekretari FPDIP
15	14 Agustus 2008	Bursa Pemimpin Nasional	Apa Kabar Indonesia Malam	AKIM080814	TV One	Dedi Miswar	Artis
						Priyo Budi Santoso	Golkar
						Aria Bima	PDIP
						Toto	PAN
						Andi Mallarangeng	Partai Demokrat/Jubir Kepres
						Ramson Siagian	PDIP
						Sutiyoso	Mantan Gubernur DKI
						Andi Mallarangeng	PD/Jubir Kepresidenan
						Sutrisno Bachir	Ketua umum PAN
						Wiranto	Hanura/Mantan Pangab
						Priyo Budi Santoso	Golkar
						Rizal Ramli	Mantan Menteri
						Fadhil Hasan	Pengamat Ekonomi

KA071101

Judul/Topik : Sri Sultan Hamengku Buwono X
 Tokoh utama : Sri Sultan Hamengku Buwono X
 Nama Acara : Kick Andy
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 01 November 2007
 Kode Induk Data : KA071101,01--n

Sesi-1

1. AN¹ : Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa beliau tidak lagi bersedia untuk dipilih sebagai Gubernur DI Yogyakarta, menimbulkan banyak spekulasi: ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini ada sesuatu dibalik keputusan atau pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Masyarakat di Yogyakarta pendapatnya terbagi dua: ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Dan spekulasi mulai muncul bahwa Sri Sultan tidak bersedia karena Sri Sultan merasa kecewa pada pemerintah pusat yang tidak juga mengolah aspek RUU keistimewaan Yogyakarta yang sudah diajukan sejak tahun 2005. Dan saat ini Kick Andi dan juga saya berada di Yogyakarta untuk mendengar langsung, apa jawaban dari Sri Sultan terhadap berbagai rumors yang beredar seputar ketidaksediaan beliau untuk tampil sebagai gubernur kembali. Dan untuk itu, semua hadirin di sini, mari kita sambut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
2. (Audience bertepuk tangan, Sri Sultan Hamengku Buwono X masuk dan bersalaman)
3. AN : Terima kasih, silakan duduk. Jadi suatu kehormatan bagi saya di Yogya dan berbicara di depan Anda dan ditemani seorang sultan. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita simak tayangan berikut ini, ya! Ini dia tayangannya.
4. Monolog: Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah tokoh masyarakat yang sangat dikenal dekat dengan rakyatnya. Raja keraton [nga] Yogyakarta Hadiningrat ini, juga masih merupakan gubernur DI Yogyakarta sejak tahun 1998. Statusnya yang merupakan raja keraton [nga] Yogyakarta Hadiningrat membuat dia banyak didukung masyarakat Yogyakarta untuk menjadi gubernur. Namun, sayangnya, Sri Sultan memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam pemerintahan atau setidaknya ia menolak dicalonkan untuk menjadi gubernur untuk periode mendatang. Ini menimbulkan banyak reaksi khususnya di masyarakat Yogyakarta. Sebagian ingin agar ia tetap menjabat sebagai gubernur. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mempunyai nama asli Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito. Ia dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1988. Pemikiran modern Sri Sultan pun tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM, dan juga peranan serta ajaran dari sang ayah.
5. (audience bertepuk tangan)
6. AN : Baik, Pak Sultan, pernyataan Anda untuk tidak bersedia dipilih kembali sebagai Gubernur DI Yogyakarta, sebenarnya alasan yang jujur itu apa sih?
7. SS : Kenapa itu menjadi suatu *question* sebetulnya?
8. AN : Karena banyak orang tidak percaya semudah itu Anda me... menyatakan, "Tidak bersedia." Pasti ada latar belakang lain...
9. SS : Semudah itu atau memang tidak biasa? Gitu lho.
10. AN : Tidak (tertawa)... Tidak biasa. Alasan pensiun kurang bisa diterima, ya. Masih gagah seperti ini.
11. SS : Jadi begini yah. Bapak yah. Bagi saya, dulu, sebelum republik ini ada, ada yang namanya pemerintahan Kasultanan Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Ya. Oleh

¹ Andy F. Noya

- Almarhum orang tua saya, sebagai bentuk dukungan kepada republik, ya, pemerintahan yang bersifat kerajaan itu, menjadi DI Yogyakarta bagian dari...
12. AN : republik
 13. SS : republik.
 14. SS : Berarti dari pemerintahan kerajaan menjadi suatu wilayah yang mendukung kedaulatan di tangan rakyat. Saya yakin pada saat itu pun juga timbul pro dan kontra. Tapi keputusan itu saya anggap melebihi kemampuan zamannya. Jadi, sejarah bagi saya terulang kembali. Yeah, di mana saya menyampaikan, men-*declare* saya tidak bersedia.
 15. AN : Ya.
 16. SS : **Saya melihat bahwa tantangan zaman ini sudah berubah.**
 17. AN : Sudah berubah,
 18. SS : Ya,
 19. AN : Artinya,
 20. SS : Artinya, bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan di tangan rakyat, ya, itu harus menjadi kekuatan baru di dalam proses membangun sistem dan manajemen pemerintah di masa depan.
 21. AN : Ya.
 22. SS : Saya ingin bagaimana masyarakat Yogyakarta **tunduk** pada sistem dan manajemen pemerintah daerah. Yah.
 23. AN : Ini menarik karena berarti Anda menafikan komitmen ayah Anda Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan pemerintah bahwa jabatan gubernur DI Yogyakarta dijabat seumur hidup oleh Sultan.
 24. SS : Tidak ada kalimat itu.
 25. AN : Jadi dalam undang-undang 1950, itu sebenarnya tidak tercantum
 26. SS : Ya. Di dalam undang-undang 32/2004 pun dikatakan adalah gubernur itu dari keluarga Keraton Yogyakarta. Wakil gubernur dari keluarga Muro Paku Alaman, tidak menyebut Sultan.
 27. AN : Jadi, Anda tidak merasa mengkhianati komitmen ayah Anda
 28. SS : Tidak. Tapi republik ini sudah final. Itu yang tidak akan saya khianati dari bagian republik.
 29. AN : Luar biasa yah.
 30. SS : Yah. Nah, Sehingga karena kedaulatan di tangan rakyat itu, harapan saya itu masyarakat itu **tunduk** pada sistem dan manajemen yang dibangun oleh pemerintah.
 31. AN : Artinya, Anda mendukung pilkada langsung. Begitu?
 32. SS : Itu terserah kebijakan pemerintah. Bukan yang saya maksud...
 33. AN : dipahami sepenggal
 34. SS : Jangan sampai, dengan pemahaman itu, jangan sampai masyarakat Yogyakarta hanya tergantung pada seorang sultan, untuk masa depan. Itu tidak akan bisa, yah,
 35. AN : Ini menarik karena
 36. SS : menatap masa depan.
 37. AN : sultan-sultan beberapa di daerah lain, justru ingin memperkuat, yah, memperkuat kekuasaannya, tapi Anda justru mau melepaskan.
 38. SS : Keraton itu sekarang bukan, bukan konteks pada kekuasaan politik. Kebudayaan. [...] Harus bisa memberikan penyearahan kepada masyarakatnya.
 39. AN : Tapi kalau ada yang kemudian mencoba melihat dari perspektif yang berbeda bahwa kemunduran Anda ini akibat Anda marah kepada pemerintah pusat yang tidak juga menggodok RUU keistimewaan.
 40. SS : Bagi saya, marah (atau) tidak marah itu ada ekspresi pada diri seseorang, yeah. Tapi bagi saya bukan. [...] Nanti, undang-undang yang keluar itu menafikan saya, juga tidak ada masalah kok. Karena apa? Karena DI Yogyakarta, itu sudah diabdikan untuk republik, ya terserah undang-undang yang membuat pemerintah, apa pun bentuknya.
 41. AN : Tapi kalau yang lebih nakal, bilang, "Sultan takut bertarung, ketika pemilihan langsung, takut kalah."
 42. SS : [tertawa] Masalahnya bukan masalah pemilihan langsung ataupun penetapan, yah. Masalahnya, orang itu harus tahu batas pada suatu momentum. Hanya masalahnya ya

itu, kalau saya mungkin, ya, tidak biasa, ya, orang punya jabatan mengundurkan diri dengan mudah.

43. AN : Orang lain malah mencari ya?
44. SS : Yah, orang lain malah mencari, misalnya gitu. Ya kan? Nah, kalau saya dianggap suatu *leader* di daerah, mungkin saya memberikan keputusan itu melebihi zamannya. Melebihi orang berpikir. Jadi, menimbulkan pro dan kontra. Gitu. Tapi saya punya itikat jujur; saya ingin melihat, bagaimana, apakah nanti keputusannya undang-undang untuk DI Yogyakarta, apa pun, harapan saya hanya satu: bagaimana ada kepastian masyarakat Yogya menatap masa depan ini lebih baik. Itu aja.
45. AN : Dan ini semua rakyat Yogya.
46. (audience bertepuk tangan)
47. SS : Saya tidak mau masyarakat Yogya hanya punya ketergantungan oleh seorang Hamengku Buwono. Saya tidak mau... Itu rakyat Yogya ini akan dipenjara di dalam membangun kreativitas inovasi. Biarkan dia bisa membangun peradaban dengan kemandirian sendiri, punya prinsip sendiri. Tidak tergantung pada orang lain, di dalam membangun kebersamaan. Ya semua harus bisa punya kontribusi.
48. AN : Jika kalau masih ada yang memahami bahwa Sultan adalah gubernur seumur hidup DI Yogyakarta, kemudian khawatir bahwa dengan mundurnya Anda itu menimbulkan kekosongan; ada *gap* karena apa pun juga RUU Keistimewaan itu kan belum dijadikan prioritas oleh pemerintah pusat.
49. SS : Ya, tapi kan dalam pasal 17 dalam *tartib* dimungkinkan presiden itu... mengambil peran dalam menganggap sesuatu undang-undang itu menjadi prioritas.
50. AN : Jadi Anda tidak khawatir bahwa ini akan terjadi kekosongan. Pasti ada penggantinya.
51. SS : Pasti.
52. AN : Nah, saya nggak tahu apakah masyarakat Yogya siap menerima gubernur yang bukan Sultan.
53. SS : Yaah, saya kira kalau sekarang kegamangan orang saja. Yah, kegamangan, ya mungkin punya kekhawatiran, nanti bagaimana, apa yang akan terjadi, ya kan. Mungkin bayangannya takut kalau nanti dasarnya hanya *money politic*, tidak memihak kepada rakyat. Ya, kan. Masyarakat lupa, bahwa domisili saya tetap di Yogya bukan pindah dari Yogya.
54. AN : (tertawa)
55. (Audiens bertepuk tangan)
56. SS : Ya, kan? Biar pun saya tidak gubernur, tetap kewajiban saya jadi Sultan kan sampai saya mati. Ya, saya akan tetap memihak masyarakat saya. Kalau nan—gitu..
57. (Audiens bertepuk tangan)
58. AN : Nggak ada pilkada sultan, gitu, ga ada ya?
59. SS : Nanti kalau gubernur yang akan datang siapa pun bertentangan dengan kehendak masyarakatnya, saya tidak akan memihak gubernur. Saya akan memihak masyarakat saya.
60. (Audiens bertepuk tangan)
61. SS : Gitu lho. Ya kan?
62. AN : Baik. Satu pernyataan yang luar biasa dari Sri Sultan Hamengkubuwono X tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy.

Sesi 2

63. AN : Baik. Pak Sultan. Kalau dilihat tadi gambaran yang ada, walaupun tidak bisa mewakili seluruh masyarakat Yogyakarta, Anda menyatakan berkali-kali, Anda tidak bersedia dipilih. Bahkan dalam suatu kegiatan *Pisoan Ageng* misalnya, Anda menegaskan kembali bahwa Anda tidak bersedia dipilih. Tapi kemudian dorongan begitu besar agar Anda kembali menjabat sebagai gubernur, apakah Anda berubah pikiran?
64. SS : Saya kira kan orang tidak tahu, bahwa saya sebelum menyatakan itu, saya punya kegelisahan yang hampir satu bulan.
65. AN : Apa itu?
66. SS : Ya untuk mengambil sikap itu.
67. AN : Apa pertimbangan yang m-
68. SS : Ya, kan?

69. AN : sangat
70. SS : Itu akan tadi timbul pro dan kontra. Ya. Tapi juga tidak hanya timbul pro dan kontra. Mungkin masyarakat sebagian mengatakan saya mengkhianati para pendahulu saya.
71. AN : Ya. Itu yang cukup kuat.
72. SS : Iya kan? Itu kan semua mewarnai di dalam kegelisahan saya. Ya. Saya tidak hanya berdialog dengan istri dengan anak, dan sebagainya. Saya mencoba merenuung, ya. Dengan jujur saja, ya. Sebelum saya satu malam men-*declare* itu, ya. Saya jumat malam jam 12 malam itu saya masih berada di dalam masjid, ya.
73. AN : Untuk ...?
74. SS : Untuk merenung, ya di dalam mesjid: apa yang saya lakukan ini benar. Dengan segala kejujuran, keikhlasan, ya, dengan hati nurani yang jernih, dan itu saya temukan. Makanya saya... dengan...apa ... dengan pasti saya mengatakan, "Saya tidak bersedia."
75. AN : Tapi, apakah Anda tahu, bahwa Anda mengecewakan banyak warga Yogyakarta?
76. SS : Itu bisa terjadi saat ini. Ya. Tapi saya punya harapan, seperti yang saya sampaikan pada waktu dialog di *pisonan ageng*. Itu mungkin kegamangan, kekhawatiran. Ya. Dan itu mungkin menjadi ... apa ... hati bersedih, tapi siapa tahu bahwa nanti sebetulnya dengan UU keistimewaan Yogyakarta itu ditemui bukan hati yang sedih, tapi hati yang berbahagia. Siapa tahu! Untuk rakyat.
77. AN : Anda mencoba melihat dari sisi itu.
78. SS : Oh, iya toh. Karena bagaimana pun Yogyakarta sepenuhnya dari awal perjuangan diabdikan untuk republik. Saya yakin, pemerintah pun faham itu.
79. AN : Pandangan Anda tentang pemerintah yang sekarang, bagaimana?
80. SS : Saya tidak bisa menilei ya, dalam arti bagaimanapun, sebagus-bagusnya pemerintah republik, sejelek-jeleknya pemerintah republik, itu adalah pemerintahan bangsa saya termasuk saya secara konstitusi, saya mendukung itu.
81. AN : Tapi, apakah kondisi yang ada ini, sesuai dengan cita-cita reformasi yang Anda cita-citakan dulu?
82. SS : Bagi saya, faktornya bukan di situ.
83. AN : Di mana?
84. SS : Tantangan bangsa ini sudah berubah. Geopolitik, geoekonomi, yah. Kapitalisme global yang mewarnai dalam kontek dunia ini, itu sudah berubah. Mestinya, strategi republik juga berubah. Masalahnya kan di situ. Iya kan. Selama tidak berubah, ya tidak pernah akan bisa menghadapi tantangan zamannya.
85. AN : Saya menangkap nada kecewa dari ucapan Anda ini.
86. SS : Nah, karena begini ya Bapak. Sebelum republik ini ada, ya, bangsa ini sudah ada. Ya, biarpun masih berupa etnik-etnik. Ya, yang dibangun oleh para *founding's father* masyarakat etniknya sendiri-sendiri. Yah, itu sudah terbentuk aspek-aspek simbol, filosofi, tradisi sebagai kearifan lokal. Di mana strategi yang digunakan adalah pendekatannya spiritual, berarti bicara moralitas dan etika. Berarti *character building*. Jadi, strategi yang digunakan adalah strategi kebudayaan: memanusiakan manusia untuk membangun peradaban dan kemandirian. Tapi begitu republik itu ada, konsepsi yang dibangun, itu pendekatannya materi. Akhirnya, ukurannya duit. Jadi, orang punya moralitas baik, akhirnya, harga kamu berapa? Apakah itu sebetulnya bangsa ini akan dibangun? Kalau pendapat saya, Tidak. Pendekatannya bukan materi. Itu adalah konsepsi Barat, bukan konsepsi orang Indonesia, orang Timur. Ya, pendekatannya harus tetap pendekatan kebudayaan.
87. AN : Jadi, sosok presiden yang ideal untuk tahun 2009, seperti apa itu?
88. SS : Ya, sebetulnya kalimat saya hanya sederhana: yang memahami roh Pancasila. Selesai.
89. AN : Penjabarannya yang berat.
90. SS : Ya nggak? Lho, hanya dua: rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan kok.
91. AN : Berarti, Sultan-lah calon yang paling tepat.
92. SS : Tidak mesti. Ya kan? Orang Jawa itu, faham itu.
93. AN : Baik. Kalau boleh tahu, apa saja persoalan bangsa saat ini, yang membuat Anda sedih atau kecewa.
94. SS : Begini ya. Kita ini para pemimpin mengatakan bahwa kita harus *survive* menghadapi globalisasi. Yah. Tantangan masa depan ini yang diperebutkan untuk *survive*-nya

- suatu bangsa di *Pacific range*: Laut Cina Selatan sama Lautan Pasifik. Di situ manusianya paling besar. Berarti konsumennya paling besar. Yah. Yang kedua, duitnya juga paling banyak, dan teknologinya juga paling tinggi. Jadi, produk dari Eropa tidak mungkin akan produk jadi untuk dijual masuk kawasan itu. Tidak akan kompetitif, tapi menjadi bahan yang diurai, baru di...(ada ekspresi gerakan tangan) produk jadi di dekat kawasan itu untuk bisa harga itu kompetitif.
95. AN : Dan di situlah peran yang bisa kita mainkan.
96. SS : Ya kan. Haah. Jadi, makin mengglobal. Itu makin..., makin strategis posisi republik Indonesia. Yah. Nah, sekarang masalahnya, untuk *survive* itu, yah, yang harus dibangun yah, pemerintah pusat maupun daerah harus *accountable*. Dalam arti transparan. Rekrutment transparan, kebijakan transparan, kontroling transparan, memungkinkan aspirasi masyarakat tumbuh, sehingga terjadi kreativitas-inovasi, Di situ demokratisasi akan tumbuh, dengan harapan masyarakatnya maju, dinamis, sejahtera, mendapatkan pelayanan dari pemerintah makin baik. Itu persyaratan minimal untuk mengglobal. Tapi persyaratan itu belum bisa kita penuhi, karena kita masih bicara, NKRI bisa utuh nggak ya? Kebangsaan ini, selesai nggak ya? Ini kan masalah yang sebetulnya sudah harus...
97. AN : sudah harus selesai.
98. SS : selesai Republik ini dibangun Pak. Tapi sampai sekarang masih [...] ini persoalan di sini.
99. AN : kita berputar di situ.
- 100.SS : Belum ngomong minimal (tertawa) bagaimana membangun pemerintahan yang transparan
- 101.AN : belum lagi mundur ke abad...
- 102.SS : Iya toh. Iya kan. Karena apa? Karena kita hanya dididik bahwa bhineka itu mengakui keikaan, itu sudah final. Tapi kita kurang diajari oleh pemimpin kita keikaan ini juga untuk menghargai kebhinekaan. Karena ada fakta, keikaan ini ada dominasi yang sifatnya negatif, bukan positif.
- 103.AN : Apa itu?
- 104.SS : Orang Jawa merasa mayoritas, ya, sehingga semua harus nama Jawa, seluruh republik. Mustinya, masyarakat Jawa ini memberikan rasa pengayoman, perlindungan pada yang minoritas.
- 105.AN : Ini yang ngomong, Sultan lho.
- 106.(audiens bertepuk tangan).
- 107.SS : Oh iya, Ya kan? [...] Yang kedua, Islam mayoritas, jangan memaksakan kehendak, tapi yang kecil itu merasa justru diayomi oleh agama yang mayoritas.
- 108.(audiens bertepuk tangan).
- 109.SS : Nah, berarti keikaan itu mengakui kebhinekaan.
- 110.AN : dan sebaliknya.
- 111.SS : Ini sekarang masih dipertanyakan. Belum ngomong sejahtera dan dapat pelayanan publik sebagai persyaratan global. Belum aspek pertahanan keamanan.
- 112.AN : Itu kondisi yang membuat Anda sampai saat ini merasa sedih ya?
- 113.SS : Iya kan. Jadi, pendapat saya, Pak: untuk pertahanan keamanan negara, kita ini maritim. Tapi kebijakannya kontinental. Ya. Pertahanan maritim itu masih berpusat di Jakarta sama Surabaya. Itu sama dengan pemerintahan Hindia Belanda, yang mempertahankan pelabuhan perdagangan VOC... ya. Mustinya, pertahanan keamanan itu menghadap ke luar. Ya, ada di Yoga, ada di Merauke, ada di Padang, ada di Pulau We, ada di Manado. Yang di dalam itu hanya untuk nangkap territorial ya. Nangkap *illegal logging*, *illegal fishing*, kan gitu. Pertahan itu harus ke luar karena kita maritim. Kenapa saya bicara begitu? Karena globalisasi ini makin..di Fasifik ini makin tinggi. Berarti kapal yang lewat Indonesia di sekitar Riau, itu akan makin besar. Iya kan. Khususnya China. Yang punya pelabuhan kan sebelah timur. Sebelah barat kan perbatasan daratan. Seratus ribu dwtk atas kan tidak bisa lewat Selat Malaka
- 114.AN : Jadi harus lewat situ.
- 115.SS : Berarti harus Riau
- 116.AN : perekonomian berkembang

- 117.SS : Selat, Selat Sunda. Ya kan. Saya ditanya, bagaimana pendapat Sultan dengan DCA? Saya nggak setuju saat ini. Karena apa? Karena akan ada kekuatan lain, yang kontrol perdagangan internasional ini, di wilayah Republik Indonesia di Riau
- 118.AN : Karena dimungkinkan,
- 119.SS : Kenapa yang ngontrol tidak Indonesia sendiri?
- 120.AN : Ini visi seorang presiden ini.
- 121.(audiens bertepuk tangan)
- 122.AN : Baik. Menarik untuk tetap mengikuti pemikiran-pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena itu jangan beranjak dari tempat Anda. Ikuti terus pendapat-pendapat, pandangan Sri Sultan Hamengku Buwono X berkaitan dengan kesultanan Yogyakarta. Pastikan bersama saya.

Sesi 3

- 123.AN : Ketika reformasi dimulai, Sultan adalah salah satu tokoh yang ikut mendorong percepatan terjadinya reformasi. Nah, ini menarik sekali. Seorang Sultan, kemudian secara terbuka, Anda menyatakan bahwa Anda mendukung terjadinya reformasi. Apa yang terjadi pada diri Anda waktu itu?
- 124.SS : Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa garis imajiner itu sebagai dasar sikap (yang perilaku yang harus yang harus dilakukan, ... sebagai bentuk kepemihakan, ya, itu yang harus dilakukan. Kalau saya tidak melakukan sebetulnya malah dipertanyakan.
- 125.AN : tapi kalau..
- 126.SS : Tapi kalau dilakukan, malah, ... ya memang harus seperti itu, kan gitu.
- 127.AN : Orang tetap melihat Anda sebagai sultan, sebagai raja. Kok ikut campur urusan pemerintahan negara.
- 128.SS : Lho, masalahnya... masalahnya kan tidak memahami bahwa konstelasi ini sudah berubah. Orang terlalu banyak melihat [...] film kerajaan.
- 129.AN : [tertawa]
- 130.SS : Gitu lho. Jadi, sepertinya saya itu hidup di dalam zaman Cinderella, mesti keliru.
- 131.(audiens tertawa sambil bertepuk tangan)
- 132.AN : Jadi, saya ini salah ya (tertawa)
- 133.SS : Saya ini tidak hidup dalam alam Cinderella. Saya tetap sama dengan keluarga biasa.
- 134.AN : Apa betul Anda puasa sampai satu bulan sebelum memutuskan bahwa Anda mendukung reformasi ini?
- 135.SS : Ya betul.
- 136.AN : Jadi, dalam puasa itu pertanyaan atau peperangan batin macam apa yang sedang terjadi waktu itu?
- 137.SS : Ya memang sudah waktunya pemerintah harus berubah.
- 138.AN : Nah, ini kan menarik karena...
- 139.SS : Karena tidak memberikan manfaat untuk rakyat.
- 140.AN : Artinya, secara terbuka waktu itu, Anda berhadapan dengan Orde Baru.
- 141.SS : Iya.
- 142.AN : Dan Orde Baru adalah Pak Harto
- 143.SS : Mm (mengangguk)
- 144.AN : Dan itu Anda sadari betul itu sikap itu, ya?
- 145.SS : Iya (dengan ekspresi meyakinkan)
- 146.SS : Soalnya kalau ... kalau Pak Harto itu terus ... memenangkan pertempuran itu, mungkin Daerah Istimewa itu sudah berubah saat itu.
- 147.AN : Berubah jadi apa?
- 148.SS : Ya mungkin daerah biasa. Dan saya ditangkap kok saat itu.
- 149.(audiens tertawa dan bertepuk tangan) [...]
- 150.SS : Itu dari awal sebagai konsekuensi yang sudah saya pahami.
- 151.AN : Mm. Tapi boleh tahu sebelum terjadinya reformasi, hubungan Anda dengan Pak Harto, dan keluarga cendana, seperti apa sih?
- 152.SS : Ya saya kalau, ya taunya tau, tapi kan nggak punya komunikasi.
- 153.AN : Kalau dikaitkan...
- 154.SS : Saya kan masyarakat biasa di daerah bukan di dalam lingkaran dekat dengan presiden.

- 155.AN : Jadi, Anda tidak punya hubungan pribadi, begitu?
- 156.SS : Nggak.
- 157.AN : Dengan keluarga juga?
- 158.SS : Ya kenal aja. Tau aja.
- 159.AN : Ya pasti. Kita kan kenal presiden kita. (tertawa)
- 160.(Audiens tertawa)
- 161.AN : Nah, dikaitkan dengan Pak Harto, masih juga ada tanda tanya yang menggantung ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan mengundurkan diri, atau tidak bersedia lagi menjadi wakil presiden.
- 162.SS : Mm.
- 163.AN : Bolehkah kita tahu, apakah alasan yang sebenarnya waktu itu?
- 164.SS : Ya, kesehatan saja.
- 165.AN : Alasan kesehatan waktu itu agak berat diterima. Orang selalu menduga, selama ini sampai hari ini, bahwa sikap untuk tidak dipilih lagi menjadi wapres, karena Sri Sultan Hamengkubowono ke-9 merasa tidak pas lagi dengan sikap yang diambil Pak Harto dengan peristiwa Malari. Kemudian, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pak Harto kepada anak-anak dan keluarga.
- 166.SS : Ya, mungkin penafsiran seperti itu bisa terjadi. Tapi, masalahnya bagi saya apakah semua itu harus dibuka.
- 167.(audiens tertawa, tepuk tangan)
- 168.AN : Apa itu bisa diartikan konfirmasi bahwa itu benar?
- 169.(audiens tertawa lagi)
- 170.SS : Belum tentu alasan seperti itu (menggeleng), tapi saya tidak bisa mengatakan. Iya kan? Kalau geger, gimana?
- 171.AN : Tapi ini kan satu kebenaran sejarah yang harusnya juga dibukakan kepada publik.
- 172.SS : Mungkin Bapak bisa mengatakan seperti itu, tapi Bapak harus menyadari bahwa orang tua saya itu sultan, saya pun juga sultan. Apa yang saya lakukan, ya, masyarakat tidak usah mengucap terima kasih tidak ada masalah. Nanti kalau saya sudah mati, rakyat Indonesia juga melupakan saya, nggak ada masalah. Yang penting, saya sudah melaksanakan kewajiban yang harus saya lakukan. Itu aja.
- 173.AN : Tapi boleh jujur, nggak? Jangan ada dusta di antara kita.
- 174.SS : Oh, iya. Begini ya, Bapak ya. Contoh ya, lima tahun sebelum almarhum itu wafat, saya berdialog. Yah. Almarhum itu menulis catatan sejarah (atau) tidak, pada saat beliau berjuang. Dia mengatakan sama saya, "Tidak."
- 175.AN : Tidak membuat catatan
- 176.SS : Ya. Wah, kalau begitu, bangsa ini kehilangan sejarah perjuangan. Ya bukan urusan saya. Ya kan? Kenapa bukan urusan saya? Kan Anda gap sejarah yang kosong.
- 177.AN : Ya.
- 178.SS : Kalau almarhum itu bersedia bicara, saya rekam, nanti saya tulis. Ya. Saya bacakan, kalau memang sudah benar, diparaf, saya *fight*. Pada waktu itu, saya mengatakan itu.
- 179.AN : Ya. Reaksi almarhum?
- 180.SS : Tidak akan saya lakukan.
- 181.AN : Tidak akan.
- 182.SS : Tidak akan saya lakukan
- 183.AN : Tetap tidak mau ...
- 184.SS : Beliau mengatakan, "Kamu harus tahu: saya ini sultan yang kewajibannya mengabdikan untuk masyarakat, rakyat bangsa saya. Dan itu sudah saya lakukan. Ya sudah, selesai. Nanti kalau saya mati, rakyat Indonesia ingat saya, ya syukur; tidak ya nggak apa-apa. Yang penting pada waktu saya hidup, saya sudah melaksanakan kewajiban yang harus saya lakukan.
- 185.SS : Pada waktu itu saya menentang.
- 186.(audiens bertepuk tangan)
- 187.AN : Anda menentang.
- 188.SS : Menentang.
- 189.AN : Anda tetap ngotot bahwa...
- 190.SS : Ngotot, Ya.
- 191.AN : Sejarah perlu mencatat ini.

- 192.SS : Tapi akhirnya saya menggantikan posisi beliau. Ya, kalau sultan adanya hanya mengabdikan sebagai suatu kewajiban, ya apalagi, yang akan dilakukan? Ya dilakukan saya, sudah, selesai. Diingat ya syukur, tidak ya, nggak apa-apa. Ya toh?
- 193.AN : Nggak diingat, ya keterlaluhan lah ya?
- 194.(tertawa dan tepuk tangan)
- 195.SS : Iya, kan?
- 196.AN : Ya
- 197.SS : Pada waktu itu beliau wafat, iya kan, akhirnya persyaratan untuk mendapatkan pahlawan nasional, itu kan keluarga harus mengajukan permohonan.
- 198.AN : Asataga.
- 199.SS : Ya, toh? Itu kan, ketentuan perundang-undangan kan begitu. Saya mengatakan, "Nggak. Saya nggak akan saya ajukan." Nah, gimana? Ya sudah terserah pemerintah saja. Mau menghargai orang tua saya ya silakan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak bersedia untuk mengajukan permohonan, kepada pemerintah supaya orang tua saya diangkat menjadi pahlawan nasional. Itu tidak akan saya lakukan.
- 200.AN : Dan, beliau juga melarang Anda untuk menggunakan nama beliau sebagai nama jalan, nama gedung, macam-macam, begitu?
- 201.SS : Ya. Bareng patung.
- 202.AN : Patung.
- 203.SS : Ya.
- 204.AN : Alasannya tadi ya?
- 205.SS : Ya beliau tidak bersedia saja.
- 206.AN : Dikultuskan.
- 207.SS : Ya. Ya tadi itu. Diingat ya syukur, tidak juga ndak apa-apa.
- 208.AN : Karena ini pengabdian.
- 209.SS : Ya, iya.
- 210.AN : Luar biasa. Dan satu hal...
- 211.SS : Lho, sultan itu kan ngabdinya sampai mati. (tertawa)
- 212.AN : Kasihan ya?
- 213.SS : Oh, iya.
- 214.(audiens tertawa)
- 215.SS : Ya kalau saya, saya mau enak sendiri, mungkin lahir saya tidak paling... tidak menjadi orang...orang yang paling tua.
- 216.AN : Kalau boleh milih, ya?
- 217.SS : A..., iya. Tapi kalau paling tua, sudah. kewajibannya kan hanya ngabdikan, ya sudah. Dilakukannya ikhlas aja.
- 218.AN : Anda ini sedang mengeluh?
- 219.(audiens tertawa)
- 220.SS : Apa, nggak. Ya kan, kewajiban yang harus dilakukan.
- 221.AN : Penegasan. Bukan keluhan.
- 222.AN : Ada hal penting lain, yaitu serangan umum.
- 223.SS : Ya.
- 224.AN : Setelah belakangan beliau tiada,
- 225.SS : Mm
- 226.AN : Kemudian banyak sekali orang mencoba menuliskan, buku, catatan yang menyatakan bahwa sejarah harus diluruskan.
- 227.SS : Mm
- 228.AN : Bahwa penggagas serangan umum adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan Pak Harto. Anda sendiri meyakini seperti apa?
- 229.SS : Saya tidak bisa mengatakan itu, ya. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah itu tidak akan pernah selesai masalahnya. Karena yang tahu hanya dua orang itu sebagai pelaku.
- 230.(audiens tertawa)
- 231.AN : Yang satu masih bisa ditanya.
- 232.(audiens tertawa)
- 233.SS : Jadi tidak akan pernah selesai (tertawa)
- 234.AN : tapi secara lisan, pernah nggak beliau bercerita kepada Anda, apa yang terjadi sebenarnya.

- 235.SS : Ya, pernah. Tapi kan hanya dari satu sisi. Sisi yang lain kan belum (tertawa).
 236.AN : Kita nggak boleh tau yang sisi ini ya?
 237.SS : Hmm.
 238.AN : maksa, maksa.
 239.(audiens tertawa)
 240.SS : Saya kira, perbedaan itu juga merupakan sejarah sendiri sajalah.
 241.AN : Jadi, Anda tidak ingin mengungkapkan
 242.SS : tidak usah itu menjadi suatu polemik yang hanya akan menistakan orang tua-tua kita.
 Itu aja.
 243.AN : ini kearifan seorang Sultan, nih.
 244.(audiens bertepuk tangan)
 245.SS : Itu kita anggap sebagai satu sejarah yang pernah terjadi...
 246.(tepuk tangan)
 247.SS : di dalam republik. Itu aja.

(Pengalihan topik)

- 248.AN : Mbah Marijan
 249.SS : Mm
 250.(audiens tertawa)
 251.AN : Pernah menolak perintah Anda untuk mengungsi ketiga Gunung Merapi meletus, orang-orang Jakarta, sebagian besar orang Yogya, kemudian menilai: Sultan marah sekali. Apa betul?
 252.SS : Saya tidak pernah memerintahkan Mbah Marijan untuk turun dari Gunung Merapi.
 253.(Audiens tertawa)
 254.AN : Orang Jakarta selalu salah
 255.(audiens tertawa)
 256.SS : Ya kan?
 257.AN : Jadi apa persisnya... bagaimana persisnya?
 258.SS : tapi kewajiban Bupati Bantul, Bupati Sleman untuk mengungsikan semua penduduknya,
 259.AN: Termasuk Mbah Marijan
 260.SS : Termasuk Mbah Marijan, ya. Saya tidak pernah memerintahkan Mbah Marijan untuk turun gunung mengungsi. Karena apa? Ya. Kalau sampai Mbah Marijan itu mengungsi, ya, berarti kalau tentara dia desersi. Jadi, orang seperti Mbah Marijan itu lebih baik mati melaksanakan tugas daripada mengungsi. Gitu lho.
 261.(audiens bertepuk tangan)
 262.SS : Karena itu kewajiban yang harus dia lakukan.
 263.AN : Jadi, Anda bukannya marah, malah Anda respek.
 264.SS : Oh, iya! Jadi, pemimpin itu malah nyuruh Mbah Marijan mestinya.
 265.(Audiens bertepuk tangan)
 266.SS : Gitu. Tau dia di mana bertanggung jawab pada kewajiban yang harus dia lakukan.
 267.AN : Tapi, juga ada hal yang aneh, ketika pada acara Golkar beberapa waktu yang lalu, Anda menyediakan diri Anda menjadi penerjemah Mbah Marijan.
 268.SS : Mm.
 269.AN : Padahal Mbah Marijan kan abdi dalem. Anda rajanya kok malah menerjemahkan rakyat
 270.SS : Emang gak boleh?
 271.AN : Aneh aja.
 272.(semua tertawa)
 273.AN : Apa konsep
 274.SS : Itu kan penafsiran orang.
 275.AN : Apa konsep yang ada dalam diri Anda sehingga Anda bersedia.
 276.SS : Dia mengatakan, "Saya ini tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik."
 277.AN : Penerjemah banyak. Kenapa harus Anda?
 278.SS : Lho, saya ini yang memerintahkan dia untuk hadir.
 279.(Audiens tertawa)
 280.AN : Jadi kualat ini sebenarnya.
 281.SS : Ya tidak. Ya kan

- 282.AN : Terus...,
- 283.SS : Saya minta dia yang hadir. Karena dipanggil wapres aja dia tidak mau hadir. "Karena saya bukan bawahannya wapres, saya bawahannya Sri Sultan."
- 284.AN : O... (ekspresi memahami)
- 285.SS : Iya kan? Nah, karena apa? Karena bahasa Jawa itu di Keraton punya tata cara mengucap kalimat. Biarpun mungkin sebagian orang Jawa paham, belum tentu pada aspek materi yang diucap, itu dipahami, gitu.
- 286.AN : Tapi Anda tidak merasa kemudian direndahkan.
- 287.SS : Lho, untuk apa kita merasa direndahkan?
- 288.AN : Karena Anda raja.
- 289.SS : Ah, itu logika...logika... ya Cinderella tadi itu.
- 290.(Semua tertawa, audiens bertepuk tangan)
- 291.SS : Dalam, dalam hubungan antara bawahan sama atasan, saya memperlakukan bawahan lebih baik, kan sesuatu hal yang sifatnya etika maupun manusiawi aja. Memang kalau sudah bos, tidak bisa menghargai bawahannya.
- 292.AN : biasanya begitu.
- 293.(audiens tertawa dan bertepuk tangan)
- 294.SS : Ya itu yang tidak semestinya harus dilakukan dilakukan oleh seseorang, gitu.
- 295.AN : Baik Bos Sultan.
- 296.(semua tertawa)
- 297.AN : Ya. Bagaimana Anda mempersiapkan anak-anak Anda sebagai anak-anak raja dalam kehidupan modern?
- 298.SS : Ya. Tradisi di Keraton itu, bagi anak laki-laki, begitu dia sunat, ya, dia harus berpisah dengan orang tua, karena tinggalnya di kasatrian. Ya. Dia hidup sendiri. Ya. Di situ tumbuh kemandirian. Tetapi bagi seorang anak wanita, dia tetap di keputren bersama ibunya. Kan gitu?
- 299.AN : Ya
- 300.SS : Ini yang saya anggap tidak ada keseimbangan antara kemandirian yang anak laki-laki dengan kemandirian anak wanita, karena di situ ada orang tuanya, sedangkan yang laki-laki hidup sendiri untuk *survive*. Ya. Nah, sehingga wanita ini bisa *mbo-mbo'an* ini. Ya kan. Hanya tergantung pada orang tuanya. Kemandiriannya kurang.
- 301.AN : "*Mbo-mbo'an*" itu bahasa Indonesianya, opo?
- 302.(audiens tertawa)
- 303.SS : Punya ketergantungan sama
- 304.AN : Ketergantungan pada orang...ibunya
- 305.SS : Pada orang tuanya, pada ibunya
- 306.AN : Iya.
- 307.SS : Ya kan. Ya. Sedangkan dia ada pelayan. Nanti apa-apa, suruhan pelayan aja. [...] ya. Nah, biarpun saya punya pelayan, ya, anak saya saya didik untuk meminta sesuatu supaya pelayan itu mengambilkan sesuatu, saya minta harus mengatakan minta tolong. Biarpun dia pembantu, trus diperintah seenak sendiri, saya tidak mau. Tolong ambilkan itu. Begitu datang terima kasih. Jadi yang namanya terima kasih, kalau salah mengatakan maaf, itu saya biasakan. Karena itu hubungannya dengan etika kehidupan bermasyarakat.
- 308.AN : Tidak peduli dia anak raja.
- 309.SS : Oh iya.
- 310.AN : Baik. Masih berkaitan dengan dugaan sementara orang bahwa ketidaksediaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk dipilih sebagai gubernur adalah sebuah strategi untuk menuju kepada pemilihan presiden tahun 2009. apakah betul? Pastikan Anda masih di Kick Andy.

Sesi 4

- 311.AN:Ya. Kembali lagi dikaitkan dengan ambisi Anda untuk menjadi orang nomor satu, dan ini Anda atur strateginya dengan tidak bersedia dipilih menjadi gubernur DI Yogyakarta. Kalau ada tudingan semacam itu, apa jawaban Anda?

- 312.SS : Saya kira tudingan itu wajar karena ini pendapat orang yang harus dihargai. Ya. Jadi, masyarakat juga supaya paham ya. Sebelum almarhum ibu berangkat ke Amerika wafat, saya tidak akan lupa: tanggal 29 Agustus; beliau kan wafat tanggal 2 Oktober ya.
- 313.AN : Apa yang terjadi?
- 314.SS : Sebelum beliau pergi ke Amerika, ya, di keraton ada upacara, begitu selesai, beliau memanggil saya, ya. Beliau menanyakan, kamu mau bersedia tidak, berjanji sama saya? Karena memang, kenapa hal itu terjadi? Karena bulan February sebelumnya beliau sudah mendesain, bagaimana terjadi suksesi di Keraton Yogya dan Pura Paku Alaman. Ya, beliau mengatakan sama saya. "Janji apa?" Saya bilang begitu. Kamu harus bisa berjanji. Empat hal yang harus bisa kamu laksanakan.
- 315.AN : Apa itu?
- 316.SS : Ya, satu, "Kamu bersedia nggak berjanji, untuk bisa mengayomi semua orang, biarpun mungkin orang itu tidak senang sama diri kamu?" Saya berjanji untuk itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak melanggar peraturan negara. Yang ketiga, ya Berjanji untuk lebih berani mengatakan: yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya interupsi.
- 317.AN : Ooh?
- 318.SS : Karena ada kalimat "*lebih berani*". Itu lebih berani dengan si... dari siapa? Dari pada diri saya. Kenapa? Saya mengalami dua presiden. Kalau saya berbeda pendapat, lebih baik saya diam; daripada timbul masalah bangsa Indonesia ini, tapi saya sekarang sadar, sesadar-sadarnya bahwa ternyata diam saya itu salah. Kenapa? Karena diam saya ini, sampai hari ini, hah, beliau itu mengatakan, sampai hari ini rakyat Indonesia tetap miskin dan bodoh. Makanya saya minta Mas Jun, kalau manggil saya kan nama kecil.
- 319.AN : Mas Jun
- 320.SS : Harus berani mengatakan, lebih berani dibandingkan diri saya. Yang empat, berjanji tidak boleh punya im ambisi apa pun, kecuali mensejahterakan rakyat.
- 321.AN : Presiden kan bisa mensejahterakan rakyat?
- 322.SS : Kan, tapi kalau saya mengatakan saya akan maju menjadi calon presiden, berarti saya punya ambisi.
- 323.AN : Padahal Anda itu ikut konvensi waktu itu Golkar, untuk mencalonkan diri Anda.
- 324.SS : Tapi bapak mesti salah, saya pada waktu ke daerah tidak pernah kampanye. (tertawa)
- 325.(audiens bertepuk tangan)
- 326.SS : Kampanye saya adalah bagaimana, pada waktu itu, pada konvensi Golkar, kampanye saya bagaimana semestinya kader Golkar itu memilih calon presiden. Jangan dirinya sendiri yang memilih, tapi tanya rakyat. Siapa yang pantas untuk dipilih.
- 327.AN : Itu moral yang Anda hendak buat waktu itu?
- 328.SS : Ohh iya. Saya kampanyenya seperti itu.
- 329.AN : Kalau rakyat mendukung, dan partai-partai mendukung Anda untuk maju pada tahun 2009, bersediakah Anda?
- 330.SS : Itu ulasannya masyarakat. Kalau memang memerlukan saya, akan mencari diri saya.
- 331.(audiens bertepuk tangan)
- 332.SS : tapi saya tidak akan mengatakan di tahun 2009 saya akan maju menjadi calon presiden, itu tidak mungkin akan saya lakukan.
- 333.(audiens bertepuk tangan).
- 334.AN : Baik. Pak Sultan, ini kebetulan banyak warga Yogyakarta yang hadir di sini, kita minta ada dua, ya, mencoba mewakili pandangan orang Yogya atau pertanyaan mungkin. Silakan.
- 335.PL : Punten dalem sewu, Kanjeng Sultan. Bukan berarti saya [nggigi mongso], namun saya melihat Sultan Yogya adalah sosok yang [mrusak duruwiminarah] yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Masalahnya yang saya lihat, Kanjeng Sultan Yogya tidak memiliki pangeran patih. Lima orang anaknya, perempuan semua, saya ke depan berangan-angan betapa indahnya kalau Yogya nanti, sepeninggal Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 akan dipimpin oleh seorang sultan perempuan,

- misalnya Ratu Pembayun. Yang ingin saya tanyakan, siapa kira-kira Kanjeng Sultan?
Terima kasih.
- 336.AN : Oke, satu lagi.
- 337.FTR: Selamat malam. Nama saya Fitri. Saya mau bertanya: menurut Sultan, ke depannya pemilihan kepala daerah seperti apa yang diinginkan Sultan secara pribadi. Terima kasih.
- 338.SS : Coba saya menjawab yang pertama ya. Saya ini kalau bertemu di *workshop* maupun seminar, kebetulan yang hadir itu ibu-ibu. Ya, itu mesti ditanya. Ya, Kenapa tidak poligami, gitu.
- 339.(audiens tertawa)
- 340.SS : Ya. Bukan pendapatnya masalah poligami, tapi nggak. Kenapa tidak poligami? Nah, saya mengatakan yah, saya sih laki-laki maunya seperti itu.
- 341.(audiens tertawa)
- 342.SS : Ya, tapi bukan. Tapi, (audiens masih tertawa) ya, tapi, zaman sudah berubah. Ya. Zaman sudah berubah. Dan keyakinan pada agama saya, bukan masalah saya orang Islam, bukan masalah kawin empat orang itu dimungkinkan, tapi saya ti...merasa ya tidak bisa berbuat adil menurut hati nuraninya, kalau punya istri lebih dari satu.
- 343.(audiens bertepuk tangan)
- 344.SS : Ya, kalau yang satu saya kasih sepuluh ribu-sepuluh ribu mungkin bisa.
- 345.AN : Gampang ya?
- 346.SS : Tapi, hati nuraninya bisa berbeda, Pak. Itu yang saya tidak merasa mampu membuat keadilan untuk itu. Dan yang kedua, kalau saya kawin lagi, ibu-ibu setiap hari demonstrasi di rumah.
- 347.(audiens tertawa)
- 348.SS : Tapi, apa? Ya memang tantangan wanita sekarang sudah berbeda. Ya. Bagaimana wanita sekarang itu juga ingin menuntut hak-haknya. Logika saya, kalau saya kembalikan kepada pertanyaan Pak Langit tadi,
- 349.AN : Putra mahkota
- 350.SS : Saya punya adik, laki-laki juga banyak, tapi anak saya wanita. Ya terserah masyarakat Yoga. Kalau memang harus laki-laki, silakan, tapi kalau memang ibu-ibu menuntut persamaan hak, bahwa wanita itu juga memungkinkan untuk bisa menggantikan karena presiden pun pernah wanita, ya silakan saja.
- 351.(audiens bertepuk tangan)
- 352.AN : Dalam ketentuan di kesultanan dimungkinkan, ya?
- 353.SS : Nah, masalahnya memang akan mengubah konstelasi. Tapi, ya kan, bahwa keraton ini sekarang bukan kekuasaan politik, tapi adalah pengemban budaya. Kan masalahnya di situ.
- 354.AN : Baik. Menarik sekali dan tadi,
- 355.SS : Yang kedua, ya.
- 356.AN : Pemilihan kepala daerah macam apa yang Anda ...
- 357.SS : Bagi saya sangat sulit ya, saya tidak mau saya punya pendapat, nanti ditafsirkan sebagai bentuk aspirasi. Ya kan. Tapi sudah saya katakan ya, karena bentuk DI Yogyakarta dari pemerintahan kerajaan itu sudah final, dan itu diabdikan sepenuhnya untuk negara dan bangsa, ya sudah terserah pemerintah saja. Keputusan apa pun. Apakah keluarga saya, apakah orang lain boleh, ya silakan terserah keputusannya. Itu kan? Apakah penetapan maupun pemilihan, ya asal undang-undang bunyinya itu, ya sudah, dilaksanakan dengan baik saja, gitu.
- 358.(audiens bertepuk tangan)
- 359.AN : Baik. Sekali lagi, masih banyak hal yang menarik dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10, dan pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy.
- 360.(audiens bertepuk tangan)

Sesi 5

- 361.AN : Baik. Tadi kita sudah mendengar sikap Anda tentang poligami. Padahal sebagai sultan Anda dimungkinkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, bahkan memiliki

selir, banyak. Kira-kira begitu. Tapi Anda tetap memilih yang satu itu saja. Nah, apa istimewanya sih istri Anda?

- 362.(audiens tertawa)
 363.AN : di mata Anda.
 364.SS : Sebetulnya, bagi saya bukan faktor keistimewaan istri ya. Saya produk dari poligami saya tidak mau itu menimpa anak saya.
 365.AN : Jadi karena orang tua Anda berpoligami, Anda melihat ada sisi yang tidak pas buah Anda pribadi?
 366.SS : Anak saya
 367.AN : Anda khawatir perasaan anak karena Anda merasakannya?
 368.SS : Merasakan. Itu aja.
 369.AN : Apa yang Anda rasakan?
 370.(audiens tertawa)
 371.SS : Ya kan? Bagimanapun dengan ibu yang berbeda akan timbul masalah ... sesama anak. Saya tidak mau itu terjadi pada anak-anak saya.
 372.(audiens bertepuk tangan)
 373.AN : Kalau saya mencoba nakal, nih, jangan-jangan Anda sebenarnya takut sama istri.
 374.(audiens tertawa)
 375.SS : Yah, saya lebih baik dikatakan begitu juga boleh.
 376.(audiens tertawa)
 377.AN : Tapi, istri Anda juga punya prinsip antipoligami ya? Dalam beberapa...
 378.SS : Oh iya
 379.AN : kesempatan saya mendengar bahwa...
 380.SS : Ya kalau istri saya komentarnya mudah kok.
 381.AN : Apa itu?
 382.SS : Kalau Pak Sultan mau poligami, ya silakan. Wong itu nanti kalau menimbulkan masalah yang rugi juga Pak Sultan sendiri.
 383.(beberapa audiens tertawa)
 384.AN : Jadi mulai ngancam ini.
 385.SS : Ya, kan? Yang rugi kan bukan dia. Tapi kan Pak Sultan sendiri yang dirugikan. Bisa ada orang yang tidak menghargai, karena tuntutan ...khususnya para wanita untuk bisa menaikkan derajat keseimbangan dengan laki-laki menyangkut masalah gender. Kan gitu.
 386.AN : Ya, kita sudah mendengar penilaian Sultan terhadap istri. Sekarang kita simak, penilaian istri kepada Sultan. Ini dia penilaiannya.

Tanggapan GKR HEMAS tentang Sri Sultan Hamengku Buwono X

- 387.RED : Bagaimana kesan Ibu selama mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X
 388.GKRH : Kesan yang a... setelah sembilan belas tahun menjadi sultan itu kan, memang berbeda dengan a... menatap kehidupan selama 36 tahun sebagai istri. Jadi pada waktu sembilan belas tahun yang lalu kita sudah harus merubah a... sikap dan a... hidup kita
 389.(cut redaksi)
 390.RED : Hal-hal apa saja yang menarik dan menyenangkan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X
 391.GKRH : Kalau ndasa dalem itu adalah orang yang sangat demokratis dan sangat luar biasa untuk saya karena selama tiga puluh tahun saya melihat beliau itu adalah satu sosok a... apa namanya sangat sabar
 392.(cut redaksi)
 393.RED : Bagaimana Cara Ibu menghadapi hidup terpisah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X?
 394.GKRH : Untuk keseimbangan kehidupan kami tentu nya adalah saling pengertian yang saling terbangun, karena sekarang posisi saya yang juga punya tugas di Jakarta tentunya adalah a..., pertama adalah kesepakatan kami itu bisa membagi waktu
 395.(cut redaksi)
 396.(audiens bertepuk tangan)
 397.AN : Ya, itu padangan seorang istri terhadap suaminya. Dan, Anda dibilang penyabar. Boleh tau nggak, batas kesabaran Anda itu sampai di mana sih?

398.(Audiens tertawa)

399.AN : Kapan Anda marah?

400.SS : Orang itu marah di dalam satu kehidupan rumah tangga, itu sesuatu hal yang itu pasti terjadi. Hanya cara marah saya ini berbeda. Ya. Dalam arti saya membangun dialog biarpun mungkin kalimat saya itu sangat tajam. Karena apa? Orang yang emosi itu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Kalau sebagai sultan sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, masyarakat yang akan dirugikan Pak.

401.AN : Luar biasa, Ya?

402.(audiens bertepuk tangan)

403.AN : Kalau Anda dilahirkan kembali, ini kembali berandai-andai, apakah Anda ingin tetap dilahirkan seperti sekarang atau ingin menjadi lain?

404.SS : Saya tidak bisa membayangkan itu, ya?

405.(audiens tertawa)

406.AN : Ini pertanyaan yang salah ini.

407.SS : Sulit untuk menjawab (tertawa) sulit untuk...untuk menjawab jadi sulit ini. Ya kan. Bagaimana membayangkan untuk dirinya kembali pada dirinya sendiri, seperti dirinya yang sekarang maupun yang lain, jadi saya tidak bisa membayangkan juga itu.

408.AN : Mungkin Anda membayangkan jadi saya kan bisa?

409.(audiens tertawa)

410.SS : Oh, ya mungkinlah...itu sajalah pilihan.

411.AN : Baik Pak Sultan, seperti biasa, kita biasanya membagi-bagikan buku, tapi kali ini karena semua nanti akan dapat buku, yang ini kita bagi untuk orang yang tidak bisa hadir di Yogya atau di acara ini.

TDD080101

Judul/Topik : Sepuluh Tahun Reformasi (Episode 1)
 Tokoh utama : Jusuf Kalla (JK), Amien Rais (AR), Wiranto (WR), Budiman Sudjatmiko (BS), Sutiyoso (YS), Dradjat Wibowo (DW)
 Nama Acara : To Day's Dialogue
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 01 Januari 2008
 Kode Induk Data : TDD080101,01--n

Sesi 1

1. NS¹ : Pemirsa, sepuluh tahun sudah reformasi bergulir. Banyak kemajuan yang kita peroleh. Namun, ada hal-hal yang masih menjadi pe-er besar bangsa ini. Ekses negatif dari reformasi. Sudah sepuluh tahun. Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum kita capai? Apa yang masih terus menjadi catatan dalam perjalanan bangsa ini? Sepuluh tahun terakhir. *To Day's Dialogue Special* awal tahun kali ini akan mengajak Anda untuk mengilas balik, meretas jalan reformasi; mencari apa penyebab kegagalan kalau memang reformasi itu gagal dan mencatat apa keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai? Sudah hadir pada malam ini Wakil Presiden, Bapak Muhammad Yusuf Kalla (JK). Selamat malam Pak Yusuf.
2. JK² : Selamat malam. Malam.
3. NS : Boleh kita berikan tepuk tangan dan sambutan terima kasih sudah hadir.
4. (audiens bertepuk tangan)
5. NS : Hadir juga mantan Ketua MPR, Bapak Amin Rais (AR), Salamualikum, selamat malam, Pak Amin.
6. (audiens bertepuk tangan)
7. AR³ : Walaikum salam. Selamat malam.
8. NS : Terima kasih sudah hadir.
9. AR : Terima kasih.
10. NS : Dan juga mantan Panglima ABRI, Jenderal Purnawirawan Wiranto. Selamat malam Pak Wiranto (WR).
11. WR⁴ : Selamat malam.
12. (audiens bertepuk tangan)
13. NS : Sudah tokoh-tokoh penggerak reformasi dan di studio juga seperti Anda saksikan sudah hadir berbagai kalangan: ada politisi dari berbagai partai politik; ada kalangan LSM; aktivis LSM; ada insan pers, dan juga saya lihat ada Bang Yos, mantan Gubernur Jakarta. Selamat malam, Bang Yos (BS).
14. BS : (berdiri dan melambaikan kedua tangan)
15. (audiens bertepuk tangan)
16. NS : Orang yang jauh-jauh hari sudah berani bilang, "Saya mau jadi presiden." Terima kasih sudah hadir. Bang Yos, ya. Kita akan memulai berdiskusi pada malam hari ini, tapi sebelumnya, saya ingin mengajak kita yang ada di studio juga pemirsa yang ada di rumah untuk menyaksikan satu tayangan pengantar berikut ini.

¹ Najwa Shihab

² Jusuf Kalla

³ Amin Rais

⁴ Wiranto

17. (ada tayangan tentang demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan tahun 1998, masalah hukum, kasus Munir, terbentuknya KPK, lepasnya Timor Timur dan gejala separtisme, dan lain-lain.)
18. NS : Ya, pemirsa. Akan ke mana bangsa ini menatap setelah sepuluh tahun berjalan reformasi? Sudah hadir di studio seperti yang tadi saya sampaikan: Wakil Presiden, Bapak Muhammad Yusuf Kala, mantan Ketua MPR, Bapak Amin Rais, dan mantan Panglima ABRI, Jenderal Purnawirawan Wiranto. Sayang sekali dua mantan presiden yang sedianya sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir, mantan Presiden Megawati dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, pada saat-saat terakhir membatalkan kehadirannya. A..., saya ingin mulai dialog malam ini dengan Anda, Pak Yusuf Kala. Sudah sepuluh tahun reformasi, empat kali ganti presiden, ganti kepemimpinan. Menurut Anda, kita sudah sampai di mana, Pak, kalau kita bicara tentang sepuluh tahun sudah sampai di hari atau di titik yang di mana kita sudah bisa ber...menarik nafas lega dan bergembira?
19. JK : Sepuluh tahun. A... empat presiden, seperti dikatakan tadi, artinya reformasi itu adalah kesinambungan dengan empat presiden. Dan tentunya masing-masing kita semua mempunyai andil, mempunyai tanggung jawab a... daripada pemerintahan ini. Reformasi, ... Pak Amin, ada yang tokohnya di sini tentu paling mengetahui target-target apa yang kita ingin capai. Namun demikian kita dapat a... sarikan kita tentu pada waktu itu ingin a... reformasi dalam politik, demokratisasi, dan tentu juga hal-hal yang baik. Kalau kita lihat secara jujur dari otoritarian pada waktu itu, sekarang tentu kita jauh lebih baik dari sisi itu. Politik juga jauh lebih stabil kalau kita lihat dari situ. Walaupun tentu bahwa banyak mengatakan bahwa ini banyak hal-hal yang formalistis kita capai, belum esensi-esensinya tentu a... lebih perbaiki. Kedua, dari segi hukum tentu banyak hal yang telah dicapai, banyak juga yang musti harus dicapai lebih jauh lagi. Bahwa penetapan itu a... jauh lebih baik kalau kita lihat sisi bagaimana penertiban, bagaimana banyaknya koruptor-koruptor yang sudah mendapat ganjaran juga masih dalam pengejaran. Tentu ukuran-ukuran reformasi itu walaupun banyak yang tidak puas. Tentu ini makan tempo. Tidak segampang itu.
20. NS : Ya. Pak Amin, Anda disebut lokomotif a... reformasi begitu yang menggerakkan gerbong reformasi, adakah hal-hal tertentu yang setelah kita melihat sepuluh tahun terakhir, adakah hal-hal tertentu yang menurut Anda, Anda sesali Anda lakukan ketika itu?
21. AR : Ya, ini milik kita semua, ya. Artinya, reformasi itu a... buah kerja dari mahasiswa dan rakyat Indonesia. Walaupun saudara tadi mengatakan lokomotif dan lain-lain, saya harus berendah hati bahwa ini sebenarnya adalah...apa...a... upaya kolektif bangsa. Bahwa ada beberapa orang yang ada di depan dan lain-lain itu hanya pembagian kerja. Mba Nazwa, menurut saya itu ref...apa...reformasi itu bukannya tanpa hasil. Yang mencolok saya kira adalah *in the firm of the press*. Ya. Alangkah nikmatnya kita sekarang ini bisa mengetahui berbagai enggel opini dari berbagai corak atau kelompok masyarakat. Kemudian, amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu juga, menurut saya, lumayan sekali, sekalipun tentu masih ada kekurangan di sana sini, tetapi dibandingkan dengan sebelum diperbaiki empat tahapan itu, yang ini sudah jauh lebih...apa...lebih baguslah. Kemudian juga otonomi daerah telah dinikmati oleh rakyat kita dari Merauke sampai Sabang. Ini kalau saya ke mana-mana, Pak Gubernur, Pak Bupati mengatakan, "Pak Amin, kita sekarang senang alhamdulillah. Kami bisa membangun dengan kemampuan sendiri dengan semangat...apa... dan lain-lain.
22. NS : Walaupun eksekusinya juga ada ya, Pak Amin?
23. AR : Tentu, tentu ada.
24. NS : menjadi raja-raja kecil mereka di daerah.
25. AR : Betul, ya, ya. Transfer korupsi dari pusat ke daerah itu juga sesuatu yang mencolok.
26. NS : Eksekus. Apakah itu kemudian Pak Amin menjawab pertanyaan saya, itulah hal-hal yang Anda sesali, dari hasil reformasi?
27. AR : Ya yang saya sesali, saya kira ada dua hal, ya. Yang pertama, itu politik uang itu sudah merajalela, luar biasa, ya. Saya tidak tahu menghentikannya. Ya. Dan yang kedua, ini korupsi itu sekarang sudah bergerak dari korupsi yang endogenous ya,

yang dalam negeri, itu menjadi korupsi yang exogenous, ya, di mana negara, ya legislatifnya, ya eksekutifnya—saya begini pake tangan kanan secukupnya—jasnya dipegang, tengkuknyalah korporasi besar didikte, Mba, untuk membuat undang-undang-undang migas, undang-undang perkebunan, undang-undang penanaman modal,

28. NS : Oke. Baik.
29. AR : itu yang menyebabkan kita sengsara, saya kira.
30. NS : Oke, Pak Amin, tapi kalau kita bicara... boleh tepuk tangan, karena ada yang mau tepuk tangan.
31. (audiens bertepuk tangan)
32. NS : Pak Amin, tapi kalau kita bicara....
33. JK : Tapi maaf...
34. NS : Ya.
35. JK : undang-undang dibikin waktu Bapak anggota DPR.
36. NS : Yah (tertawa)
37. AR : Ya nggak, betul, ya. Tapi sekarang ini waktu Anda penanaman modal ini sekarang ugal-ugalan.
38. JK : Ya, tapi undang-undangnya waktu Bapak.
39. AR : Kemudian...
40. (Audiens tertawa)
41. AR : Nggak, bukan di situ. Ya. Tapi saya MPR, Pak. MPR ya.
42. JK : Ya, anggota DPR juga.
43. AR : Tugas MPR. Saya bukan pimpinan, Pak.
44. JK : Tapi anggota DPR.
45. AR : Tapi Anda saya kira...
46. NS : Baik (tertawa)
47. AR : Betul, betul. Nggak, saya harus terangkan ya.
48. NS : Ya. Tapi...
49. AR : Ini penting sekali karena kalau ini nggak diberantas, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah
50. NS : Oke.
51. AR : itu kita sanggup ke mana.
52. NS : Pak Amin, tapi kita sepakat malam ini kita reformasi yang kita nilai bukan a... hanya tiga tahun kepemimpinan Bapak Muhammad Yusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudoyono
53. AR : Persis, ya, ya.
54. NS : tetapi reformasi sepuluh tahun termasuk ketika Anda mantan ketua MPR, ya?
55. AR : Betul, betul, betul.
56. NS : Oke, baik.
57. JK : (tertawa)
58. (Audiens tepuk tangan)
59. NS : Saya ke...(tertawa)... Pak Wiranto, mantan jenderal yang paling sakti ketika reformasi, itu Pak Wiranto. Pak, bagaimana kita harus menempatkan posisi Anda Pak dalam sejarah bangsa kalau kita bicara reformasi, menempatkan sosok Jenderal Wiranto, sebagai bagian reformasi, atau malah justru yang menentang reformasi ketika itu?
60. WR : Tapi gini. Saya kira saya akan berbicara lebih luas lagi ya. Kalau Pak Amin itu sebagai pendorong ya, Bergeraknya lokomotif reformasi, saya menetaskan ya?
61. NS : (tertawa)
62. WR : Ya, karena pada saat itu saya tidak tergiur untuk mengambil alih taat kala negeri dalam keadaan keos. Biasanya negara berkembang, militer tergiur untuk mengambil alih itu; taat kala negeri dalam keadaan ya sangat-sangat kacau ya. Tapi kita tidak. Kita memberikan jalan perubahan dengan harapan, reformasi itu kan suatu penataan kembali ya demokrasi kita. Demokrasi itu kan, Pak Yusuf Kalla mengatakan "cara". Nah, tapi taat kala kita terjebak kepada cara itu sendiri kita berputar-putar; masih demokrasi seperti apa yang harus kita lakukan, demokrasi apa yang harus kita pilih untuk negeri ini, maka kemudian kita ada perbedaan pendapat yang sangat tajam. Energi kita, waktu kita, tenaga kita habis ya untuk memincangkan cara itu, belum

sempat kita masuk ketujuan yang sesungguhnya: mencapai negara adil, makmur, sejahtera. Apalagi kemudian ada *mind set* terbalik ya, menurut saya, a... prosedural ketimbang esensi dari demokrasi itu sendiri. Artinya apa? Banyak sekarang produk-produk demokrasi dalam arti kita melaksanakan reformasi yang hanya prosedural sifatnya; ndak esensial.

63. NS : Oke.
64. WR : Seperti halnya kita, misalaya, membangun jalan tol ya. Jalan tol itu kan bebas hambatan. Prosedurnya bagus. Esensinya juga semua lancar. Tapi di kita: jalan tol dibangun kita membayar masuk ke sana kita macet.
65. NS : Kebanjiran lagi ya Pak ya. Malah harus bayar, kebanjiran, kena macet. Jadi,
66. AR : Nazwa,
67. WR : Artinya,
68. NS : untuk apa jalan tol dibangun? Ini salah Pak Amin ini membangun jalan tol ketika itu ya.
69. WR : (tertawa)
70. AR : Pa pa pa, ini penting sekali Puan ini. Jadi, ABRI waktu Pak Wiranto itu ABRI yang betul-betul kesetiaannya bukan pada pemerintah, tapi pada bangsa dan negara, ya.
71. (Audiens bertepuk tangan).
72. AR : Sehingga
73. NS : Oke.
74. AR : Sehingga inilah... ini ini harus begitu. Karena kalau kesetiaan pada pemerintah dia akan jadi alat pemerintah.
75. NS : Baik.
76. AR : Sekarang itu aja dulu ya.
77. NS : Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Masih ada banyak waktu untuk mendiskusikan ini. Setelah pariwisata saya akan juga meminta a... tanggapan dari hadirin yang hadir di studio sesaat lagi, tetaplah bersama kami *To Day's Dialogue Special* awal tahun.

Sesi 2

78. NS : Pemirsya, terima kasih Anda terus *To Day's Dialogue Special*: Meretas Jalan Reformasi. Saya akan langsung memberikan kesempatan kepada mantan aktivis mahasiswa yang juga dulu paling kencang berteriak-teriak berdemonstrasi di jalan, Rama Pratama (RP), silakan Mas Rama untuk mengomentari. Kalau saya minta dulu komentar terhadap tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini yang duduk di sebelah saya, bagaimana? Bagaimana menempatkan mereka dalam sejarah perjuangan reformasi bangsa ini?
79. RP⁵ : Ya tentu yang paling melekat di benak saya sebagai salah satu pelaku bersama teman-teman yang lain tentunya adalah Pak Amin Rais. Karena pada waktu itu beliau termasuk tokoh senior yang bisa berdiskusi dengan kita mahasiswa dan mau datang ke demonstrasi-demonstrasi kita di kampus.
80. NS : Mmmm.
81. RP : Di tengah situasi pada saat itu memang a... apa namanya... hampir semuanya tidak berpihak. Bahkan a... kalau mohon maaf, Gus Dur pada waktu itu melarang kita, "Sudahlah berhenti saja mendemo Pak Harto itu." pada waktu itu misalnya. Terus kalau ke Pak Wiranto ya, panglima gimana kita mau komunikasi gitu? (tertawa)
82. (semua tertawa)
83. RP : Jadi, saling tatap-tatap aja begitu kan, kita (tertawa) ya... kalau Pak Yusuf Kalla, mohon maaf kita nggak punya kesan apa pun tentang Pak JK, pada waktu itu ya, kalau sekarang kan tentu wakil presiden.
84. JK : Saya orang kampung waktu itu...
85. (semua tertawa)
86. NS : Tapi sekarang sangat berkesan ya. (tertawa)
87. RP : Ya, ya, ya, (tertawa)
88. NS : Baik. Baik. A... menilai evaluasi jalannya reformasi sejauh ini, Mas Rama, Anda kan sekarang tapi ikut menikmati reformasi nih, jadi anggota DPR.
89. RP : Sebenarnya, kalimatnya bukan...

⁵ Rama Pratama

90. NS : Ikut dapat mesin faks, ikut renovasi rumah,
91. (semua tertawa)
92. NS : ikut dapat gaji, ikut dapat macam-macam ni sekarang, Mas Rama.
93. RP : Ya, ya, ya (tertawa)
94. NS : Gimana, Mas?
95. RP : Jadi, bicara reformasi ini memang selalu seperti beban; ada pekerjaan yang pekerjaan yang belum diselesaikan. Trus juga seperti pekerjaan yang...apa...diburu *dead line* begitu, buat saya. Jadi, selalu ada beban apalagi proses ini juga ada korbannya dari teman-teman gitu. Jadi, membebani hati dan, tapi kan *life must go on*. Ya ini pilihan saya, dulu saya masuk partai. Kebetulan aja partainya beda sama Pak Amin. Jadi, waktu itu kita bisa kompak, trus sekarang kayaknya ada beberapa hal yang mungkin...karena beda partai, biasalah, begitu.
96. NS : Oke.
97. RP : Tapi, a... kalau kita bicara reformasi memang dari sisi saya tentunya juga teman-teman pasti banyak yang bilang, "Gak puas." begitu. Karena, memang, saya selalu mengatakan ini bagaikan jalan di tempat. Jadi, harusnya itu, walaupun ada lorong hitam, begitu ya, lorong gelap, tapi harusnya ada *light at the end of the tunnel*, gitu. Ada cahaya di ujung lorong, gitu.
98. NS : Ada juga a... saya lihat ada Mas Ridaya La Ode (RL), yang juga waktu itu mantan aktivis mahasiswa. Mas Ridaya, a... apakah kalau kita bilang reformasi apakah perlu membersihkan masa lalu, fokusnya harus di situ, atau menciptakan masa depan? Mulai dari mana?
99. RL⁶ : Saya kira kita harus cari keseimbangan antara keduanya, gitu. Kita bicara masa lalu, misalnya, kita akan mencari pelajaran penting untuk membangun, misalnya fondasi kita untuk masa depan. Sebut saja misalnya soal hak asasi manusia, gitu. Dan juga pemberantasan korupsi yang...salah satu problem yang yang paling fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Kita kan tampaknya sekarang kalau kita bicara pemberantasan korupsi
100. NS : Ya, baik.
101. RL : betul kita punya KPK, tetapi perilaku para politisi, perilaku a...apa namanya...pemrin...apa... aparat pemerintah hanya bergeser sedikit dibandingkan dengan praktek-praktek masa lalu.
102. NS : Oke. Kalau membersihkan masa lalu, konteksnya, perlu tidak memulai dari membuka lagi kasus mantan Presiden Suharto, kalau berbicara reformasi?
103. RL : Saya kira itu ada gunanya. Paling tidak dia bisa bane smar, seberapa jauh kita sebetulnya kita sanggup untuk mendobrak hambatan psikologis yang dimiliki oleh kita sebagai bangsa, terutama para penegak hukum, gitu.
104. NS : Oke.
105. RL : Karena, menurut saya, kalau sekali aparat kejaksaan, misalnya, dan pengadilan ya, badan peradilan kita sanggup mengadili Suharto secara jujur dan fair,
106. NS : Oke
107. RL : siapa pun nanti di kemudian hari akan sanggup untuk kita bawa, gitu.
108. NS : Jadi, menurut Anda itu tetap perlu untuk diprioritaskan. Pak Yusuf Kalla, Anda setuju dengan itu? Bahwa salah satu yang masih mengganjat dalam proses perjalanan reformasi adalah belum tuntasnya kasus mantan Presiden Suharto dan harus dituntaskan dulu?
109. JK : Saya kira begini persoalannya. Kita kan reformasi berjanji untuk menegakkan hukum kan? Kalau Pak Harto kan saya kira sejak dulu ingin diperiksa, tapi soal orang yang sakit, hukum juga mengatakan tidak bisa diperiksa. Jadi, bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hukum juga yang ditegakkan bahwa kalau orang sakit tidak mungkin diperiksa.
110. NS : mmm
111. JK : Itu, itu soalnya. Sederhana sekali soalnya.
112. NS : Oke. Pak Amin, bagaimana Pak? Karena kan ada Tap MPR tuh, yang juga buah atau hasil produk dari MPR ketika itu soal spesifik bicara ini.

⁶ Ridaya La Ode.

113. AR : Jadi, begini Mba Naswa...apa...Saya ada humility di sini. Artinya ada perasaan, kita juga harus berendah hati, ya. Jadi, Pak Harto itu sesungguhnya menjadi otokrat, menjadi pemimpin yang otoriter, itu karena seribu anggota MPR ya itu juga jadi "Yes man" dan "Yes women"; menginya-iyakan terus, tidak pernah ada orang berani a... nunjukkan...apa... tangan untuk usul aja tidak bisa. Bahkan ketika satu ketika ada sidang umum ada Brigjen siapa itu menunjukkan tangan itu, bat jadi headline paginya.
114. NS : mmm
115. AR : Nah, ini adalah kesan kolektif ya. Memang ada yang mengatakan Pak Amin itu, Pak Harto sudah jatuh, si Bird raksasa sudah jatuh, sudah nggak ada apa-apa, dicabuti bulunya begitu, ya. Sudah puas begitu. Menurut saya, harus ada jalan tengah, ya. Hukum ditegakkan, kalau perlu *in absentia*, tapi ditunjukkan kesalahan beliau, Pak Harto itu, ya, perkara mau diberikan grasi atau amnesty itu adalah urusan yang sedang berkuasa. Ya. Tapi kalau begini kan tergantung terus, ya. Dengan alasan sakit, dengan alasan segala macam, itu gak pernah selesai, sehingga siapa tahu kalau sampai beliau dipanggil ... Pak Harto dipanggil oleh a... Tuhan yang Mahakuasa itu, maka jadilah preseden yang sangat buruk, ternyata kalau sudah presiden tidak pernah ada keputusan hukumnya. Saya kira begitu, Mba.
116. NS : Mmmm. Jadi, penting untuk setidaknya...
117. AR : Even in absentia, ya,
118. NS : membuat status yang jelas.
119. AR : Ya saya kira.
120. NS : Dalam hal ini supaya tidak terus menerus a... menyeret bangsa ini dalam perdebatan yang tidak perlu.
121. AR : Persis.
122. NS : Pak Wiranto, bagaimana Pak? Kita tahu Anda dulu ajudan, karier pol...karier militernya juga mencapai puncak karena loyalis Pak Harto, dulu disebutnya seperti itu, Pak Wiranto,
123. WR : Oh, begitu ya?
124. NS : a...
125. (Audiens tertawa)
126. NS : Setidaknya disebutnya seperti itu (tertawa), apakah ada pandangan yang berbeda, Pak?
127. WR : Belum-belum sudah divonis sama dia.
128. (Audiens tertawa)
129. NS : (tertawa) itu vonis ya, Pak? Loyalis itu bagus.
130. WR : Begini Na, begini: kita ingat sembilan lapan ya, taat kala penyerahan kekuasaan dari Presiden Suharto kepada Wakil Presiden Habibie waktu itu, ya,
131. NS : Mram.
132. WR : saya kira publik masih ingat. Saya kemudian mengambil "maik" kemudian memberikan suatu statement politik dari ABRI. Ada lima poin. Poin keempat saya katakan bahwa ABRI akan menjaga keselamatan para mantan presiden, termasuk Suharto.
133. NS : mmm.
134. WR : Itu sebenarnya ada argumentasinya. Mengapa? Waktu itu ada dua ribu massa yang datang ke Cendana akan membunuh Presiden. Di jalanan ya; Nah, waktu itu saya katakan bagaimana mungkin presiden yang dua bulan sebelumnya secara aklamasi dipilih oleh rakyat di MPR, majelis tertinggi negara, kemudian dua bulan kemudian akan dibunuh rame-rame. Maka kemudian saya katakan, "Kita jaga keselamatan." Namun tidak berarti kemudian, hukum, itu kita juga kemudian menolak ya, dan ternyata memang a... a... Presiden Suharto, mantan Presiden Suharto diproses secara hukum. Nah, tatkala hukum kita jalankan, tentunya jangan ada intervensi lain. Jangan ada suatu dendam di situ. Jangan ada suatu rekayasa hukum di situ. Jangan ada "harus salah" di situ. Dan ternyata hukum sudah berjalan. Berjalan, dan kemudian ada keputusan hukum.
135. NS : Budiman Sujatmiko, mantan tahanan politik ketika zaman Suharto, apakah Anda juga orang yang melihat bahwa memang sudah cukup tidak usah lagi mengusik-ngusik a... Pak Harto, membiarkan a... hidup dengan tenang?

136. BS⁷ : Pertama, saya ingin menanggapi dulu pernyataan Pak Wiranto soal ABRI mengeluarkan statement politik
137. WR : Ya.
138. BS : Bagi saya itu suatu salah kaprah bahwa sebuah angkatan bersenjata bisa mengeluarkan statement politik. Artinya apa? Kita sadar pada waktu itu ABRI adalah kekuatan. Powerfull sekali. Sehingga statemen politik dari sebuah institusi yang seharusnya tidak politik, tapi karena sangat kuat sehingga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap proses jalannya penegakan hukum. Satu itu. Tatkala saya waktu itu masih di penjara dan menyaksikan dari layar televisi pidato pengunduran diri a... Presiden Suharto, dan kemudian Pak Wiranto mengambil *mic*, saat itu saya sudah berpikir: bayi ini...kira-kira akan mengalami cacat yang...yang... susah untuk ditolong. Karena itu menurut saya, adalah penting bagi kita untuk berefleksi
139. AR : Maksud... maksudnya bayi reformasi?
140. BS : Bayi reformasi, Pak Amin! (membetulkan) Bayi reformasi tentunya.
141. NS : Kalau sekarang sudah sepuluh tahun umurnya, Pak.
142. BS : Sudah sepuluh tahun, dan kita melihat bayi ini
143. NS : dan dan masih cacat
144. BS : berjalan pincang.
145. NS : Mas Budiman?
146. BS : Baik.
147. NS : masih cacat bayi itu? Anak kecil ini?
148. BS : Yah, masih. Saya kira masih. Satu itu. Karena ada pernyataan fatal soal ABRI melakukan statement politik yang menurut saya tidak benar.
149. NS : Oke. Baik. Kita akan *break*. Nanti kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Kami kembali sesaat lagi.
150. (Audiens bertepuk tangan)

Sesi 3

151. NS : Pemirsa terima kasih Anda terus di *To Day's Dialog: Meretas a... Jalan Reformasi*. Tadi adalah cuplikan berbagai kasus hukum setidaknya yang kecil yang terjadi di negeri ini dalam beberapa waktu yang lalu. Kalau kita bicara spesifik soal politik dan hukum a... sepanjang sejarah reformasi sepuluh tahun terakhir keluhan banyak orang yang selalu mengemuka adalah pemilu dan pilkada yang terus-menerus, Pak Yusuf itu hanya menguras energi politik rakyat, menghasilkan demokrasi yang prosedural, yang hanya melahirkan elit politik yang bertarung satu sama lain, tapi lupa pada kepentingan rakyat. Saya ingin tanya dalam posisi sebagai ketua umum salah satu partai terbesar di negeri ini. Partai Golkar. Anda sependapat itu, elit politik kita hanya sibuk bermain sendiri?
152. JK : Yaa, tentu a... pilkada sebagai bahagian daripada pemilu dan juga dan lainnya itu, adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Ya kita harus efisienkan caranya. Kalau sekarang itu lima ratus pemilu di Indonesia ini dan waktunya bertebaran, itu artinya secara pukul rasa, ti... tiap tiga setengah hari ada pemilu di Indonesia. Itu sangat tidak efisien. Karena pemilu di Makassar, pemilu di Ternate, demo aja ke Jakarta. Yaa semua menjadi masalah nasional.
153. NS : Apalagi kalau disuruh ulang lagi ya, Pak?
154. JK : Apala.. apalagi di Makassar itu (tertawa)
155. (Audiens tertawa)
156. NS : Tambah tidak efisien, gitu ya Pak ya? (tertawa)
157. (Audiens bertepuk tangan)
158. NS : Jadi (masih tertawa) ada...Anda...
159. JK : Jadi, jadi, harus diaturlah. Nah, sejak dua tahun lalu, saya sebagai ketua umum Golkar, mengusulkan agar itu disatukan. Supaya betul...disatukan saja dalam dua kali masing-masing 250 pilkada sehingga itu hanya dalam lima tahun lima kali saja kita ke TPS-lah waktu yang bersamaan.
160. NS : Mmm. Jadi menurut Anda memang perlu dipersingkat proses demokrasi yang...proses untuk cara untuk mencapai itu, Pak?

⁷ Budiman Sujatmiko (juga anggota fraksi PDIP)

161. JK : Iya.
162. NS : Terlalu melelahkan?
163. JK : Terlalu melelahkan.
164. NS : Oke.
165. JK : Apalagi sebagai ketua partai, tiap kali orang datang minta restu, minta apa itu... Capek itu.
166. NS : Cape (sambil tertawa)...Oke.
167. (Audiens tertawa)
168. JK : Satu kali ajalah.
169. NS : Oke. Ada dir...ada direktur a... LSI di sini, Mas Saiful Mujani, boleh saya minta komentar, apakah itu memang itu salah satu eksekusi... negatif dari reformasi, Mas, demokrasi prosedural yang melelahkan menghabiskan banyak uang dan membuat capek pikiran elit-elit politik?
170. JK : Lembaga survey kadang-kadang untung juga dia kalau ...
171. (semua tertawa), tapi tidak-tidak....
172. NS : Silakan, Mas.
173. SM^B: Oke. Terima kasih. A..., saya melihat bahwa di antara pemimpin kita a..., termasuk yang di sini a..., semacam mengalami kelelahan...apa, menghadapi demokrasi ini. A..., satu hal yang perlu di dicatat di sini ada...ada aspek prosedural di dalam demokrasi. Dan ada aspek atau komponen yang itu merupakan a..., cita-cita itu sendiri; punya nilai di dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, a..., mungkin kita sebut Singapura. Sebuah negara yang sangat sejahtera. Atau Malaysia negara yang secara ekonomis sejahtera; lebih sejahtera dari kita. Mahatir Muhammad pernah bilang buat apa demokrasi kebebasan kalau kita harus makan tikus. Dan saya agak tersinggung dengan pernyataan seperti itu.
174. NS : Mmm.
175. SM : Nah, itu...itu mengindikasikan bahwa di sana ada kesejahteraan, tapi orang masih mencari sesuatu; ada yang hilang di situ.
176. NS : Apa itu (suara kecil)
177. SM : Apa itu? Adalah kebebasan. Tadi disebutkan Pak Amin; kebebasan media, misalnya. Orang mau demonstrasi *anytime* di sini, tapi tentu saja *rule of law* itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, menurut saya, jangan mencoba mereduksi, apa, demokrasi ke dalam kesejahteraan ekonomi. Kalau cara itu, dulu, Presiden Suharto mungkin relatif sukses untuk pembangunan ekonomi tujuh persen dan sebagainya per tahun.
178. NS : mmm. Jadi, jadi me...
179. SM : Toh toh kita teriak-teriak pada waktu itu.
180. NS : mm
181. SM : Nah, apa kita mau mengulang lagi ke situ?
182. NS : Jadi, tapi memang itu melelahkan dan memang itu konsekuensi?
183. SM : Itu konsekuensi yang harus dibayar. Ada dua jalan: jalan China dengan cara otoritarian untuk kesejahteraan, dan jalan India yang sangat capek, berpuh-puluh tahun.
184. NS : Mm
185. SM : Dan menurut saya, Indonesia harus pake jalan India; bukan jalan China.
186. NS : Oke. Ada jalan Indonesia, Pak Amin, yang spesifik terhadap kasus kita?
187. (Audiens tertawa)
188. NS : Sehingga kita tidak perlu memilih China atau India?
189. AR : Yaa ,menurut saya gini. Kita seharusnya bisa *bowling down* kepada masalah kita sendiri. Tadi Anda bilang kok elit bertikai, melelahkan, dan lain-lain." Mba, saya kira di mana pun demokrasi, elit itu biasanya memang bertikai.
190. JK : (tertawa)
191. AR : Cuma masalahnya, bertikai untuk apa itu yang dilupakan.
192. NS : Mm
193. AR : Jadi kita ini sudah di-*brain wash* oleh... definisi politik itu *who gets what when and how*. Jadi, politik itu tentang siapa, dapat apa, kapan dan bagaimana. Tapi pertanyaan

^B Saiful Mujani

- why* 'mengapa'; mengapa ingin jadi presiden, jadi wapres dan lain-lain itu gak pernah ditanyakan. (012)
194. NS : Mm.
195. AR : Ya.
196. (audiens tertawa)
197. NS : Bapak mau nanya
198. JK : Bapak juga gak mau pernah...
199. AR : Jadi, kira-kira, ya, nggak...
200. (Audiens tertawa)
201. AR : Misalnya, misalnya.
202. (semua tertawa)
203. AR : Cuma misalnya, Pak. Tenang aja, Pak ya.
204. (Semua tertawa)
205. AR : Nah, jadi, jadi, jadi mengapa aku ingin jadi ini dan itu? Itulah yang penting; mengapanya itu, ya. Karena kalau mengapa itu terjawab, maka dia tahu bahwa a..., apa, dia itu amanat, *burden* ya, ada, apa, beban yang harus ditunaikan, yaitu untuk rakyat. Jadi bukan hanya, misalnya, ... *ess ga jadi ya, jadi apa* (tertawa) jadi... jadi, itulah pokoknya.
206. NS : Nggak apa-apa, Pak; nggak usah malu-malu malam ini. Silakan.
207. (hanya sebagian yang tertawa)
208. NS : Apa? ☺ Bapak, Bapak mau tanya ke Pak Yusuf mengapa jadi mau wakil presiden.
209. AR : Nggak, nggak, misalnya terlalu banyak menyanyi dan lain-lain, ya.
210. (Audiens tertawa)
211. AR : Atau main gitar, itu saya kira kurang pas menurut saya.
212. NS : Saya ingin minta tanggapan mantan raja di daerah, maaf, mantan gubernur di daerah ☺ ada Bang Yos (YS) di sini. Bang Yos, a..., kalau tadi dikatakan bahwa korupsi sekarang berpindah, jadi teman-teman Anda di daerah sekarang yang a..., rajin sekali main korupsi, bagaimana, Bang?
213. (semua tertawa)
214. YS⁹ : A..., sebenarnya, salah satu agenda reformasi itu kan membasmi korupsi. Dan kami para kepala daerah itu pastilah mendukung itu semua, kan. Nah oleh karena itu, di dalam membasmi korupsi pun harus dengan cara-cara yang tepat. Karena ada berbagai jenis korupsi, ya. Korupsi yang nyata-nyata merugikan negara itulah yang harus kita basmi habis-habisan.
215. NS : Ada korupsi yang tidak merugikan negara, Pak?
216. YS : Ada. Karena kesalahan administrasi, ya kan.
217. (semua tertawa, kecuali YS)
218. YS : Kesalahan administrasi, ya. Jadi, peraturan kita itu antara satu...
219. WR : Ini, baru dengar saya ini. (suara pelan)
220. YS : a... instansi dengan yang lain itu pun berbeda-beda sehingga para kepala daerah ada, yang berlatar belakang berbeda-beda, ada yang tentara, ada yang pedagang, ada yang politisi,
221. NS : Mm
222. YS : jadi mengartikan peraturan itu kadang-kadang salah interpretasi. Nah, karena kesalahan itu, padahal tidak ada uang negara yang hilang. Kena juga kan dia di tahanan. Nah, ada jenis ketiga lagi adalah korupsi karena terpaksa.
223. NS : Mm.Oke.
224. (Audiens tertawa)
225. YS : Aneh kan?
226. WR : Ini Padang ini, Padang: terpaksa.
227. YS : Terpaksa dilakukan.
228. NS : Terpaksa dilakukan karena uangnya kurang banyak, ya, Pak, ya?
229. YS : Ya. Benar. Contohnya, begini kan, Jadi SPPD, surat perintah jalan, ya, untuk seorang dirjen itu indeknya 240 ribu satu hari.
230. NS : mm

⁹ Sutyoso (Bang Yos)

231. YS : Berarti kalau dia ke luar kota untuk makan, untuk hotel, untuk transportasi, kadang-kadang punya tamu, harus seperti itu.
232. NS : mm
233. YS : Nah, karena itu supaya cukup, ya, perjalanan dinas yang seharusnya empat hari, dimanipulasi di atas kertas sepuluh hari supaya cukup.
234. JK : Sekarang co...sekarang sudah dirobah, Pak Yos.
235. YS : A..., udah dapat.
236. JK : Sudah sesuai ongkos, ya.
237. YS : Amin, Pak. Ya.
238. (Audiens tertawa)
239. JK : Sudah pas.
240. YS : Artinya, (tertawa), artinya, memang benar. Jadi ada yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan reformasi administrasi.
241. WR : (suara pelan) sistemnya berubah, tapi pelakunya belum (tertawa).
242. NS : Oke, Bang Yos. Ada, ada pakar a..., otonomi daerah yang juga sering bicara soal reformasi birokrasi, tadi Pak Wiranto sempat bilang kalau pun sistemnya berubah, tetapi pelaku-pelakunya belum berubah tuh, Mas Eko Prasajo (EP),
243. WR : (tertawa kecil)
244. NS : Anda setuju dengan itu?
245. EP¹⁰ : Ya, saya pikir yang perlu kita perbaiki adalah a..., *political main system*-nya, ya. Bagaimana seseorang elit itu dihasilkan dari proses pembinaan kader dan seterusnya. Saya melihat apa yang sekarang terjadi adalah banyak elit-elit politik yang tidak melalui proses *political main system*. Sehingga idelologi, kemudian a..., proses kaderisasi itu tidak berjalan.
246. NS : A..., Pak Jusuf ingin mengomentari? Lagi-lagi dalam kapasitas sebagai ketua umum salah satu partai terbesar. Kualitasnya kurang bagus, Pak. Kader-kader Bapak di daerah.
247. (Audiens tertawa)
248. NS : Gimana, Pak Jusuf?
249. JK : Yaa, itu kan relatif sekali yang namanya ke lokasi itu kan, karena kalau pembinaan langsung kan itu pertama harus dikenal, harus aksesibilitas. Berbeda dengan...kita tidak memilih S-3 di situ kan? Sulitnya di situ kan.
250. NS : Mmm
251. JK : Ya, bisa S-3 hebat, pintar, tapi tidak diketahui orang. Susah terpilih. Sulitnya itu pemilihan langsung, gitu. Kalau...jadi, kita tidak memilih yang terbaik dalam artian kemampuan orang memilih orang yang paling dipercaya oleh rakyat. Itu persoalannya.
252. NS : Mm. Dan itu...
253. JK : Itu resiko demokrasi.
254. NS : resiko demokrasi.
255. JK : Iya.
256. SM : Tapi saya melihat partai politik tidak memainkan peran itu. Jadi, kurang mengedepankan kompetensi dan menjegal, kalau boleh disebut begitu, oleh partai politik orang-orang yang memang tidak kompeten, hanya populer aja, pemain sinetron jadi presiden.
257. NS : Oke.
258. SM : Nah, oleh karena itu, menurut saya, di situ ada unsur pendidikan yang harus juga dilakukan oleh partai politik.
259. NS : Dan itu...
260. JK : Dan dan sebenarnya kita ditentukan sama beliau ini. Kalau surveynya bagus baru kita ikut.
261. (Semua tertawa)
262. WR : Saya, saya kira...
263. JK : Kita ikut sama dia (tertawa)
264. WR : Na, Na, ya, saya...saya salah satu bagian dari itu.

¹⁰ Eko Prasajo

265. NS : Kita akan masuk ke ke segmen lain. Ada banyak sekali PR reformasi. Kita akan mencoba sekelumit, sekelumit, sekelumit walaupun mungkin belum tuntas. Kita masuk sekelumit yang lain, yaitu sekelumit upaya pemberantasan korupsi. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Denny Indrayana (DI), ketua PUKAT, Pusat Kajian Antikorupsi, dari UGM soal pemberantasan korupsi setelah sepuluh tahun reformasi ini.
266. DI¹¹: Kalau reformasi mati, maka pembunuhnya adalah korupsi. Reformasi dan korupsi tidak pernah menjadi kawan. Dia adalah lawan abadi. Dan betul kata Pak Amin, betul gambaran pilkada, betul kata Pak Wiranto, cape karena *money politic*, itu pengakuan. Jadi, yang sekarang terjadi di saat kita meretas jalan reformasi setiap saat kita bisa kehilangan reformasi itu karena upaya pemberantasan korupsi ibarat pembedahan operasi kanker, itu baru mengangkat pinggirannya. Baru periveralnya.
267. NS : Mm
268. DI : Kita belum melakukan operasi besar korupsi di episentrumnya. Di pusat gempunya.
269. AR : Ya. (membenarkan)
270. NS : Siapa itu? Atau apa itu?
271. DI : Saya sering mengistilahkan ada empat wilayah yang belum disentuh upaya penegakan hukum antikorupsi. Pertama adalah istana, ring satu kekuasaan sekarang, itu di eksekutifnya,
272. AR : Tepuk tangan! (mengajak audiens)
273. NS : (tertawa)
274. DI : di legislatifnya,
275. (Audiens bertepuk tangan)
276. NS : Pak Amin yang memandu tepuk tangan. Oke.
277. DI : Eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya juga; terutama di mahkamah agung. Yang kedua adalah cendana: ring satu kekuasaan masa lalu. Yang ketiga adalah korupsi di senjata; di dunia militer dan kepolisian.
278. NS : Mm?
279. DI : Dan yang keempat korupsi pengusaha naga: para konglomerat-konglomerat hitam. BLBI dan sejenisnya. Istana, cendana, senjata, pengusaha naga adalah episentrum korupsi yang belum bisa disentuh bahkan oleh KPK sekalipun.
280. (sebagian bertepuk tangan)
281. NS : Kata kunci yang akan saya gunakan untuk menyambung ke audiens yang berikutnya adalah ketua KPK yang baru, dipilih oleh yang terhormat anggota DPR komisi tiga, Bapak Gayus Lumbuun (GL), silakan Pak Gayus untuk berkomentar sekaligus juga menilai reformasi hukum di negeri ini.
282. GL¹²: Iya, terima kasih. Pandangan harus lebih luas lagi. Kacamata kita, optik kita harus lebih luas me melihat bahwa keterpurukan negara di bidang hukum bukan hanya itu.
283. NS : Mau ditanggapi sedikit, Mas Deny? Singkat saja.
284. DI : Menurut saya, istana, cendana, senjata, pengusaha naga bahkan oleh KPK pun yang seharusnya lokomotif korupsi belum bisa disentuh.
285. NS : Oke.
286. DI : karena salah satunya kompromi-kompromi politik terlalu banyak di eksekutif dan juga di DPR.
287. NS : Oke. Silakan dilanjutkan. Singkat saja.
288. GL : Iya. Begini. Kita harus memulai dari reformasi birokrasi, sebenarnya. Kalau kita bicara hanya kepada korupsi itu bagian kecil dari birokrat-birokrat yang menggunakan kekuasaan. Sangat kecil.
289. NS : Pak Amin, mau ditanggapi?
290. AR : Ya, saya mendukung yang empat sentrum tadi. Episentrum tadi.
291. NS : Istana, cendana, senjata, naga.
292. AR : Ya. Tapi kom-nya tadi itu yang *high check corruption* tadi, ya. Itu sudah bagus sekali. Tambah lima, Pak. Kalau empat kan kurang bagus. Jadi satu lagi, ya.
293. (audiens tertawa)

¹¹ Denny Indrayana

¹² Gayus Lumbuun

294. AR : Satu lagi itu adalah korupsi yang dilakukan oleh big corporation seperti Exxon Mobile, Freeport Mikemorren, dan sebagainya itu,
295. (Audiens bertepuk tangan)
296. AR : Itu yang memegang (sambil memegang tengkuk sendiri) tengkuk pemerintah.
297. NS : Memegang tengkuk?
298. AR : Tengkun pemerintah.
299. NS : Mmm.
300. AR : Jadi, jadi pelayan kita ini. Ya. Jadi kita ini dengan mental *inlandder* itu tidak berani ngangkat kepala karena melihat George Bush dan konco-konconya itu seperti raja diraja, kita ini seperti bangsa jongos kira-kira seperti itulah.
301. NS : Pak Jusuf.
302. JK : Ya. Terima kasih. Saya sependapat bahwa korupsi sangat...musuh untuk semua. Pak Harto juga jatuh karena korupsi. Tapi korupsi tidak...bukanlah episentrumnya yang kita bikin karena puisi. Semua berakhir A.
303. (Audiens tertawa)
304. JK : Sehingga...bukan. Karena A sehingga istana nomor satu. Saya boleh yakinkan sama Anda. Anda boleh periksa istana. Siapa saja orangnya, silakan lapor saja. Dan Anda akan sulit menemui bahwa di situ sekarang ada orang yang paling korupsi di situ. Kalau soal itu, ya. Termasuk juga istana tempat saya
305. NS : (tertawa)
306. JK : Dua-duanyalah.
307. (Audiens bertepuk tangan)
308. JK : Tidak akan ada.
309. XX : Mba, Naswa bisa klarifikasi?
310. NS : Sebentar-sebentar. Silakan Pak.
311. JK : Yang kedua, a..., tentu kalau kita lihat pemberantasan korupsi, memang bahwa...saya ingin katakan bahwa kita korupsi masih banyak; tapi kalau kita lihat kapan negeri ini telah memeriksa, menangkap begitu banyak bekas menteri, gubernur masuk penjara, anggota DPR masuk penjara, anggota DPD masuk penjara, bupati masuk penjara. Kapan ada sejarah republik ini sampai begitu. Sehingga ketakutan korupsi itu sangat tinggi. Kenapa kelihatan banyak korupsi? Karena banyak yang ditangkap sehingga banyak isu korupsi. Dulu mungkin banyak korupsi, karena tidak ditangkap kelihatan tidak ada korupsi. Iya kan?
312. (sebagian audien tertawa)
313. JK : Iya! Begitu. Sekarang semua orang takut untuk korupsi. Saya kira saya mau katakan mustinya nyalinya lima orang baru mau mengorupsi sekarang ini. Bahwa masih ada korupsi, ya...a (mengiyakan) pasti setiap ada kekuasaan itu tidak akan hilang dari korupsi. Kedua, bahwa, Pak Amin, saya sependapat, saya selalu menghargai Pak Amin, tidaklah berarti sekarang ini juga kalau pemerintah dulu dicekokin sama Exxon, tidak berarti sekarang juga dicekoki.
314. (ada yang tertawa kecil)
315. JK : Cepu itu kami robah semua syarat-syaratnya. Natuna kita akan mendengar Bapak kita batalkan semua itu. Tidak ada nol itu a..., bagian Natuna a..., Indonesia. Tidak. Itu saya batalin untuk a..., kita batalin, a... pemerintah batalin itu...(tertawa).
316. (audiens tertawa dan bertepuk tangan)
317. JK : Betul.
318. WR : Nana, ada sesuatu yang....
319. JK : Jadi, jadi, tidak berarti kita di...bahwa dulu itu begitu mungkin, tapi sekarang kita betul-betul kuat.
320. NS : Dulu.
321. JK : Atas sarannya Pak Aminnya kita keataskan.
322. AR : Alhamdulillah.
323. NS : Gitu ya Pak, ya?
324. JK : Ya.
325. NS : Silakan Pak Wiranto, Anda mau menanggapi singkat saja.
326. WR : Ya. Begini. Saya kira kita tidak berbicara masalah puitis tadi. Itu boleh-boleh aja ya. Tapi ada sesuatu yang mendasar. Menurut saya, unsur hukum kan tiga kan? Ya. Ada

substansi hukum atau materi hukum, kemudian aparat hukum, dan kemudian budaya hukum.

327. NS : Oke.
328. WR : Nah, tiga-tiga bermasalah di kita. Pada saat kita mencoba untuk membangun satu hukum sebagai kesepakatan kolektif, sudah ada intervensi dulu masuk ke sana
329. NS : Intervensi dari?
330. WR : dari pihak-pihak yang ingin diuntungkan dari hukum itu sendiri.
331. NS : Oke.
332. WR : Apalagi bicara aparat penegak hukum.
333. NS : Baik.
334. WR : Harus kita bersihkan dulu dong. Hati nurani dimunculkan lagi di sana.
335. NS : Waduh, (tertawa)
336. (audiens bertepuk tangan)
337. WR : Sehingga penegak hukum...iya. Ini bukan apa-apa, bukan partai.
338. NS : Ini bolak-balik, Pak Wiranto, ini bolak-balik kampanye hati nurani.
339. WR : Ya, ngga apa-apa. Ya, mumpung di sini kan? (tertawa)
340. (semua tertawa)
341. JK : Tapi kalau mau pake aturan, berkarya juga kan?
342. NS : (tertawa)
343. WR : iya. Itu pasti, Pak.
344. NS : (tertawa) kata Pak Yusuf kalau pake hati nurani berkarya juga.
345. WR : Itu pasti. Itu pasti.
346. NS : Oke, supaya adil, silakan PAN mau kampanye supaya adil malam ini.
347. WR : Budaya hukumnya belum.
348. AR : Menurut saya, apa pun yang kita kerjakan kalau sampai lupa amanat rakyat nggak seru juga.
349. (semua tertawa)
350. NS : Oke.
351. AR : Ini sekedar sekedar meng.... (tidak jelas)
352. NS : Sebelum saya diprotes sama Pak Gayus Lumbun dan teman-teman dari PDI Perjuangan, kita akan *break*. Tetaplah bersama kami; kami akan kembali sesaat lagi.
353. (audiens bertepuk tangan)

Sesi 4

354. NS : Saya akan langsung mempersilakan kepada anggota komisi satu, Ali Mochtar Ngabalin (AM) untuk menyampaikan komentar spesifik-khusus terhadap terorisme dan aksi separatisme yang terjadi. Silakan.
355. AM : Terima kasih. Pertama, saya ingin tujukan kepada Jusuf Kalla, dengan harapan Bapak Jusuf Kalla harus bicara dengan jujur, dengan tenang, terbuka, dan jangan marah nanti menjelaskan kepada kami.
356. NS : (tertawa)
357. AM : Pertama begini ya. Apakah agenda pemberantasan terorisme di Negara Republik Indonesia ini menjadi agenda yang benar-benar datang dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keamanan negeri ini? Natal kemarin itu di beberapa daerah aparat keamanan instruksi untuk pengamanan A-1. Artinya apa? Pemerintah dan aparat sendiri meyakinkan kepada publik dan luar negeri bahwa negara kita tidak aman. Karena itu saya bertanya supaya pemerintah harus jujur dan terbuka upaya pemberantasan teroris itu adalah agenda republik Indonesia atau kita ini kaki tangan Amerika untuk kepentingan dagang, untuk mendapatkan biaya dari luar negeri?
358. NS : Oke.
359. AM : A... itu, Pak Jusuf Kalla harus jawab dengan SBY. Supaya jangan seluruhnya diarahkan kepada umat Islam. Cirinya yang saya katakan itu adalah celananya di atas mata kaki, testanya warna hitam, pake cambang, dan pake sorban, saya orang pertama kena.
360. NS : Ya (tertawa)
361. AM : Masalahnya saya keberatan, gitu.
362. NS : Oke. Apalagi namanya Ali depannya, ya.

363. AM : a... (=ya), Apalagi nama Ali lagi.
364. NS : Ali Mochtar Ngabalin lagi.
365. AM : Jadi tolonglah ini Pak Yusuf harus bicara jujur dengan kami ini sekarang. Begitu.
366. NS : Oke. Terima kasih, Bang Ali. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf:
367. JK : Pertama, saya ikut marah seperti Anda, Pak Amin apalagi, kan gitu kan? Bahwa sama sekali tidak ada masalah agama soal terorisme di situ. Terorisme Anda tahu undang-undangnya. Siapa yang berbuat mengambil tindakan yang menyebabkan katakanlah kematian orang yang tanpa ker... dengan siapa saja. Ada memasang bom di sana diketahui bukan musuhnya laki-laki, perempuan, anak-anak, Islam, Kristen bisa mati karena itu. Terorisme kan begitu. Kalau perangkan jelas, musuh kita yang kita hantam. Ini kan siapa saja. Jadi tidak ada urusannya soal agama. Siapa yang pasang bom, itu yang jadi teroris. Jadi sama sekali tidak ada soal Amerika, soal apa, soal apa, begitu. Apalagi soal Islam. Kita ini sama-sama Islam. Jadi tidak ada ru ru... pasti kita juga marah.
368. NS : Walaupun tidak berjenggot ya, Pak?
369. JK : Walaupun tidak berjenggot. Kumis aja.
370. NS : (tertawa).
371. JK : Jadi, tidak benar seperti itu.
372. NS : Tidak benar itu agenda titipan Amerika?
373. JK : Tidak ada. Pokoknya kita ingin menjaga keamanan dari negara. Itu aja. Itu saja.
374. NS : Oke. Mau ditanggapi...
375. JK : Jangan ada korban sia-sia.
376. AM : Pak, di tempat saya itu komisi pertahanan
377. JK : Mmm
378. AM : dan komisi inteligen
379. JK : Ya.
380. AM : Saya bisa menunjukkan kepada Bapak sejumlah dokumen.
381. JK : Boleh.
382. AM : Adakah Amrozi, Imam Samudra dan konco-konconya itu mampu membuat bom membunuh Denpasar itu? Sampe hari ini aparat keamanan tidak pernah menunjukkan bukti itu. Tapi sekarang...
383. NS : Sudah terbukti di pengadilan, proses hukum sudah selesai.
384. AM : Pengadilan mana yang baik di negeri ini, Na?
385. NS : Grasi ditolak, Mahkamah Agung sudah menolak, masih terus dipertanyakan?
386. AM : Mahkamah Agung dan pengadilan mana di negeri ini yang baik? Kalau ada uang seluruh habis perkara.
387. NS : Oh, yang baik cuma DPR ya, Bang Ali?
388. AM : Karena. Bukan! Saya mau ngasi tahu dalam upaya penegakan hukum.
389. NS : A... (=Ya)
390. AM : Oleh karena itu, jangan sampai karena ketidakjujuran dan ketidakadilan membuat kezaliman menjatuhkan hukuman eksekusi kepada orang lain.
391. NS : Oke.
392. (Audiens bertepuk tangan)
393. NS : Pak Yusuf, mau ditanggapi?
394. JK : Tidak ada komentar.
395. NS : Tidak ada komentar.
396. JK : Dia sudah berbicara sendiri bahwa itu a..., pendapat Saudara mm Ali, tapi saya kira kita tidak sependapat dalam hal tersebut.
397. NS : Tidak sep...a..., setuju untuk tidak setuju?
398. JK : Yap.
399. AM : Kata kunci saya, kata kunci saya: pemerintah Republik Indonesia harus menghentikan kebiasaannya menjadi subkordinat dari pemerintah
400. JK : Jadi kalau orang pas bom, kita biarin aja, gitu?
401. AM : adikuasa seperti Amerika.
402. JK : Jadi kalau ada orang pasang bom kita biarin aja?
403. AM : Pemerintah harus mengupayakan perlindungannya, tapi tidak menggunakan cara-cara yang dikembangkan oleh Amerika.

404. JK : Kolo...kalau..kalau tadi katakan kita perintahkan agar polisi mempe...a..., menjaga, Anda juga tidak mau, jadi bagaimana ini?
405. AM : Bukan. Saya...
406. AR : Nggak, maksudnya Pak Ali Ngabalin, dan di sini saya penengah, saya kira Anda betul.
407. AM : Pak Amin mau bantu saya atau mau dukung Pak Yusuf?
408. AR : Nda...bantu Anda, bantu Anda.
409. (semua tertawa)
410. AM : Silakan.
411. AR : Ya, jadi maksudnya walaupun kita mengamankan mesjid, gereja, kuil dan lain-lain, itu betul-betul murni, *genuine* dari kita sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan Washington dengan Bush yang a... itu.
412. AM : A...a (=Ya) tepuk tangan dong Pak Amin ini.
413. (semua tertawa dan tepuk tangan)
414. JK : Seratus persen benar dan tidak ada urusannya itu.
415. NS : Tidak ada urusannya.
416. JK : Tidak ada urusannya.
417. NS : Seratus persen benar. Oke. Baik. Kita sudah mengurai a..., baru empat masalah di bidang politik hukum, tadi juga kita sudah membahas sedikit soal pertahanan keamanan. Namun juga yang tidak kalah pentingnya kita akan melihat dan mengulas sejauh mana sebetulnya komitmen bangsa ini dalam penegakan HAM, dan juga a..., untuk permasalahan di bidang ekonomi yang sampai saat ini juga masih menyisakan berbagai isu di bidang ekonomi. Kita akan membahas itu dalam *To Day's Dialogue* a..., episode yang kedua. Pastikan bahwa Anda terus menyaksikan *To Day's Dialogue Special: Meretas Jalan Reformasi* episode yang kedua. Terima kasih.
418. (Audiens bertepuk tangan)

TDD080102

Judul/Topik : Meretas Jalan Reformasi (Episode 2)
 Tokoh utama : Jusuf Kalla (JK), Amien Rais (AR), Wiranto (WR), Budiman Sudjatmiko (BS), Sutyoso (YS), Dradjat Wibowo (DW)
 Nama Acara : *To Day's Dialogue*
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 02 Januari 2008
 Kode Induk Data : TDD080102,01--n

Sesi 5

1. NS : Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam *To Day's Dialogue: Meretas Jalan Reformasi*. Sudah hadir di studio mantan Ketua MPR, Bapak Amin Rais, Wakil Presiden, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, dan mantan Panglima ABRI, Jenderal Purnawirawan Wiranto. Terima kasih masih terus bersama kami, bapak-bapak, dan juga hadir berbagai kalangan *the audience* yang pada malam hari ini juga sudah memberikan banyak masukan kepada diskusi kita malam hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas soal politik, soal hukum, dan juga soal pertahanan dan keamanan. Episode kali ini kita akan melihat bagaimana jalannya reformasi di dua hal yang tidak kalah pentingnya. Penegakan HAM, dan juga seputar ekonomi, bagaimana mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan. Kita akan mulai dalam penegakan HAM. A..., dikatakan PR besarnya reformasi adalah belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran HAM. Ada kasus Trisakti, kasus Semanggi 1, kasus Semanggi dua, penghilangan paksa aktivis, dan lain-lain. Kalaupun ada proses hukum, tetapi katanya itu tidak menyentuh para jenderal. Atau para aktornya. Ada jenderal besar di sini: ada Pak Wiranto. Anda sependapat dengan itu, Pak? Bahwa penegakan hukumnya tidak mengenai orang-orang yang sebetulnya paling bertanggung jawab kalau kita bicara soal kasus-kasus HAM?
2. WR : Baiklah, Nana, ya. Bicara hukum, tentunya kita ada aturan mainnya, ya. Dan kita bicara menegakkan kebenaran di sana. **Tatkala hukum sebelum a..., dilaksanakan sudah ada target-target tertentu, tentu itu bukan hukum. Itu kebencian dan itu sesuatu yang harus kita hindarkan di negeri ini yang menghormati sepenuhnya penegakan hukum.** Nah, masalah-masalah yang disebut tadi sebagian ya, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, sudah diproses secara tuntas ya, saya sendiri sudah dipanggil ke DPR barangkali beberapa bulan, menjelaskan hal itu secara gamblang dan jelas kepada anggota DPR, dan akhirnya diputuskan di sana bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak bisa retroaktif, ya. Dan kemudian maka diputuskan untuk dilaksanakan pengadilan yang sedang berjalan. Dan itu sudah diselesaikan bahkan sudah ada keputusan hukum yang tetap. Mereka sudah dihukum. Siapa yang dianggap bersalah. Dan saat ini sudah selesai menjalani hukuman. A..., tiba-tiba itu dikatakan belum tuntas; tentu ini menimbulkan satu problem tersendiri dalam hukum nasional kita.
3. NS : Oke.
4. WR : Oleh karena itu barangkali harus ada kejujuran kita di sana. Untuk benar-benar menghormati satu kebenaran yang memang dihasilkan oleh suatu proses hukum yang jujur. Begitu.
5. NS : Mmm. Oke. Ada koordinator Kontras di sini, Bang Usman Hamid (UH). Silakan. Apakah memang tidak usah lagi mempersoalkan karena toh proses hukumnya sudah selesai. Setidaknya sudah ada yang diadili. Jadi, tidak usah menarik-narik yang lain.

6. UH¹: Ya. Esensi dari penegakan hak asasi manusia adalah bagaimana kita memberikan kepuasan terhadap korban. Tadi ketiga narasumber: Pak Jusuf Kalla, Pak Amin Rais, Pak Wiranto mengemukakan tentang pentingnya hukum. Sebenarnya kalau kita ingin bertanya, "Untuk apa hukum itu?", "Apakah untuk keadilan para korban?" Sudah sepuluh tahun mereka menunggu anaknya yang tidak pulang; sudah sepuluh tahun mereka kehilangan anak; dan kehilangan anak bagi mereka, kehilangan masa depan. Apa yang sudah kita berikan? Ada memang proses hukum pengadilan militer bulan Juni sembilan lapan, sebulan setelah peristiwa 12 Mei Trisakti. Tapi itu hanya memeriksa kesalahan prosedur. Dan apakah mungkin para prajurit di lapangan itu melakukan tembakan berdasarkan otonomi personal dirinya? Saya tidak melihat itu. Di mana tanggung jawab pengambil kebijakan tertinggi keamanan yang ketika itu melarang mahasiswa keluar kampus. Kalau keluar kampus, ABRI akan mengambil tindakan apa pun. Jadi, sekali lagi, di mana tanggung jawab kita?
7. NS : Oke.
8. UH : Peradilan militer adalah peradilan yang bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini. Kalaupun ada pengadilan militer yang kedua itu digelar ketika pansus di DPR sedang membahas masalah ini. Dan saya melihat banyak pertimbangan politik ketimbang hati nurani. Banyak pertimbangan politik ketimbang masalah keadilan. Jadi, banyak orang bicara tentang hukum, tapi sebenarnya takut kalau hukum itu ditegakkan.
9. NS : Usman Hamid.
10. (audiens bertepuk tangan)
11. NS : Ya, silakan Pak Wiranto ditanggapi debat. Baru nanti Pak Amin.
12. WR : Iya. Di sini barangkali saya sudah dapat sepenuhnya itu ya. Hanya di sini dirancukan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Beda satu kata, tapi a..., konsekuensinya dan risiko hukumnya sangat jauh, ya. Yang dituduhkan adalah pelanggaran HAM berat. Berarti suatu perencanaan yang sistematis, berdampak luas, berupa *genocide* atau *crimes again humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan itu semua harus merupakan kelanjutan dari *state polity*; kebijakan negara. Nah, saya katakan di sini dengan sepenuh hati; hati nurani barang kali,
13. (banyak yang tertawa)
14. WR: kalau kita tidak mengatakan itu suatu kampanye politik
15. (ada yang bertepuk tangan)
16. WR: tidak pernah ada perencanaan yang sistematis untuk membunuh mahasiswa. Tidak ada.
17. NS : Memang sayang sekali, waktunya tidak cukup banyak untuk membahas secara menditel, tapi kita akan lihat lagi aspek lain dalam penegakan HAM. Satu kasus yang sampai saat ini juga belum terpecahkan, yang kemudian bisa dikatakan menjadi simbol dari pemecahan kasus-kasus HAM adalah belum terungkapnya a..., pembunuhan aktivis HAM Munir. Kita akan lihat cuplikan dialog yang terjadi antara Polycarpus dan juga Hendardi, perdebatan seputar hal itu. Siapa sesungguhnya pembunuh Munir?
18. (cuplikan yang dimaksud tidak ditranskripsikan)
19. NS : Ya. Itu tadi cuplikan dialog yang terjadi antara Hendardi dan juga Polycarpus seputar terbunuhnya aktivis HAM Munir. Itu baru satu kasus yang menggambarkan betapa sebetulnya masih banyak yang harus dicari. Masih banyak yang harus dikejar oleh bangsa ini kalau kita bicara seputar penegakan HAM. Saya ingin minta komentar dari anggota komisi 3 DPR RI, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin (LH). Silaka Mas Lukman.
20. LH : Ya. A..., memang kita mungkin masih mengingat bahwa pengungkapan kasus Munir, itu pernah dikomentari oleh presiden kita, Pak Susilo Bambang Yudoyono, bahwa itu merupakan *test of our history*. Jadi ini adalah ujian bagi perjalanan sejarah a..., bangsa ini. Tapi, sebenarnya a..., selain ujian dari perjalanan bangsa, sebenarnya ini juga ujian. Jadi, kasus a..., pengungkapan kasus almarhum Munir, itu juga merupakan ujian bagi pemerintahan saat ini. Begitu. Pemerintahan yang saya maksud tidak hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif, dan seluruh

¹ Usman Hamid

penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mengungkap kasus ini. Oleh karenanya, a..., misalnya kepolisian saya pikir harus betul-betul serius karena ini pertarungan. Sebab almarhum Munir tidak hanya semata pembela HAM berskala nasional, tapi juga internasional. Artinya, dunia internasional itu melihat bagaimana bangsa ini mengungkap kasus ini dan ini adalah wujud dari komitmen kita bersama: bagaimana kita tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia itu.

21. NS : Oke. Bagaimana, Pak Jusuf Kalla, komitmen bangsa ini akan diukur dari salah satunya a..., tuntas apa tidak kasus aktivis a..., pembunuhan aktivis HAM Munir ini?
22. JK : Pertama tentu kita ingin selalu bersimpati kepada Saudara Almarhum Munir. Karena itu pemerintah sangat serius hal ini a..., polisi, jaksa, dan sekarang masih dalam proses pengadilan lagi, a... untuk kedua kalinya. Jadi, masih berjalan. Jadi, mudah-mudahan pada waktunya juga akan lebih terungkap. Memang, yaa, kasus pembunuhan ada yang mudah, ada yang susah. Jadi, tetapi bukan hanya kita. Pembunuhan Kennedy sampai sekarang tidak tau siapa yang bunuh. Apa kurangnya pengetahuan Amerika, apa kurangnya bukti, tapi sampai sekarang juga belum terungkap. Jadi bukan hanya kita yang tidak bisa mengungkap sesuatu. Lepas dari hal tersebut, ya.
23. NS : Mmmm (mendehem). Oke.
24. (Audiens bertepuk tangan)
25. JK : Tapi, sekarang pengadilan masih jalan. Saya harapkan tetap pemerintah tetap berusaha untuk mengungkap itu.
26. NS : Dan berarti janji-janji pemerintah itu akan terus dipegang ya, Pak?
27. JK : Ya, ya, ya, ya (mengangguk).
28. NS : Oke. Kita akan...
29. AR : Tapi mengapa Mba, Kennedy sampai sekarang tidak bisa dibuka. Karena penguasa jantungnya itu nggak pernah mau mengungkap.
30. NS : Mmm
31. AR : Di situ a...,
32. NS : Kalau kasus Munir, penguasa kita?
33. AR : Mirip-mirip saya kira.
34. NS : Mirip-mirip.
35. AR : (senyum dan mengangguk)
36. (Audiens tertawa).
37. NS : Oke. Siapa ini, Pak Amin?
38. AR : Walaihuallah.
39. NS : Wala...h, (tertawa). Oke. Baik. Kita akan *break*. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di *To Day's Dialogue: Meretas Jalan Reformasi*.
40. (Audiens bertepuk tangan)

Sesi 6

41. NS : Iya. Pemirsa terima kasih Anda terus di *To Day's Dialogue Special: Meretas Jalan Reformasi*. A..., sudah banyak hal yang kita bahas, tetapi kita belum membahas satu hal yang mungkin juga menjadi krusial kalau kita bicara reformasi: Mereformasi TNI. Sejauh mana hal itu telah dilakukan? Saya akan minta tanggapan dari Direktur Eksekutif Imparsial, Rachlan Nashidik (RN). Bung Rachlan silakan.
42. RN²: Kalau kita mau melihat sebetulnya, dari pandangan yang lebih umum, reformasi TNI itu berjalan di dalam arah yang benar sebetulnya. Kita sekarang mempunyai Undang-Undang TNI yang menempatkan otoritas politik sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam melakukan *deployment*, misalnya. Itu kita sudah punya sekarang. Dan itu satu langkah yang baik saya kira; yang benar, gitu. Jadi bukan bahwa kemudian, apa namanya, a..., tidak ada, tapi yang mau saya katakan adalah resistensi-resistensi tersebut itu bisa mengakibatkan proses ini berjalan ditempat, gitu. Itu yang terjadi, gitu. Terutama, dan saya kira ini bukan cuma karena kesalahan dari rekan-rekan di TNI tetapi karena juga sebagian dari teman-teman di parlemen karena a..., ada satu hal yang sangat menghambat proses reformasi TNI

² Rachlan Nashidik

itu adalah bagaimana sekarang ini doktrin hankamrata, itu sekarang sudah menjadi norma konstitusi, gitu. Dia tidak bisa lagi dites apalagi dikontes kecuali diubah, gitu.

43. NS : Oke.
44. RN : Itu suatu doktrin yang mengalami satu lompatan, apa namanya, status karena menjadi norma konstitusi kita, gitu.
45. NS : Oke.
46. RN : Padahal, sebetulnya kita mesti harus merumuskan: apakah benar yang kita butuhkan postur pertahanan kita adalah seperti yang masih berlaku di masa lalu? Gitu.
47. NS : Baik. Boleh tepuk tangan untuk a..., Direktur Eksekutif Imparsial, Rachlan Nashidik, terima kasih. Sebelum saya lempar ke Pak Wiranto, saya ingin minta komentar a..., spesifik khusus soal hak pilih TNI a..., sesuatu yang tentu juga menarik untuk dicermati. Ada perwakilan dari mahasiswa Universitas Indonesia, Bung Marbawi A. Katon (MK). Silakan Bung Marbawi. Ya, silakan.
48. MK³: Saya diminta khusus soal hak pilih TNI saya kira untuk 2009 masih agak sulit ya, karena kalau kita lihat sekarang yang tampil-tampil dari calon presiden 2009 ada tiga setidaknya akan menjadi capres nanti. Konsolidasi politik yang a..., akan mengarah pada perpecahan kubu TNI saya kira itu yang akan...ingin dihindari. Baik rezim yang berkuasa sekarang, maupun yang...di sini ada Bang Yos ingin maju ataupun Pak Wiranto yang akan maju. Tapi secara umum, saya setuju dengan Mas Rachlan tadi. Sebenarnya ada kemajuan a..., dalam reformasi TNI kita. Jadi buahnya adalah bergantinya militer otoriterian menjadi militer professional. Tapi saya kira ada beberapa catatan penting untuk dilihat kembali terkait nanti dengan, apa namanya, posisi TNI di 2009. Yang pertama soal a..., soal belum sepenuhnya TNI menjadi prajurit professional. Dalam hal ini kasus-kasus Alastrogo, misalkan.
49. NS : Oke.
50. MK : Itu kan belum tuntas, ya?
51. NS : Bentrok-bentrok TNI dengan polisi, begitu ya?
52. MK : Iya.
53. NS : Oke.
54. MK : Catatan lain, misalnya bentrok TNI dan Polri terkait dengan lahan perebutan lahan dan lain sebagainya.
55. NS : Iya.
56. MK : Jadi saya kira 2009 bukan soal kelembagaan. Kalau soal kelembagaan sudah selesai cuma ini soal politik. Ada banyak capres dari militer sama-sama ingin..., sebenarnya ingin menguasai faksi-faksi di tubuh militer, tapi juga demi kepentingan militer ingin menghindari itu semua. Saya kira...
57. NS : Itu itu, itu yang menghambat
58. MK : Iya.
59. NS : reformasi
60. MK : Dan SBY kan sebenarnya melakukan konsolidasi politik hal itu secara diam-diam, gitu.
61. NS : Begitu ya. Dengan bertemu para purnawirawan.
62. MK : Iya.
63. NS : Anda malu-malu bilang. Jadi saya yang bilang. Oke, silakan Pak Wiranto.
64. (Audiens tertawa)
65. WR : Wah, banyak ya.
66. NS : Mmmm.
67. WR : Yang pertama, sebenarnya reformasi internal TNI dimulai pada saat saya sebagai panglima waktu itu ya. Ada kesadaran untuk kita mereformasi diri tatkala kita tahu bahwa secara nasional kita sedang menjalankan reformasi. Kemudian muncullah ABRI abad 21, ya. Banyak sekali poin. Ada empat belas langkah. Tapi katakanlah saya akan mencuplik saja. Kita akan keluar dari politik praktis, kemudian dwifungsi ABRI kita hilangkan--berarti kekaryaannya ABRI kita bubarkan,
68. NS : Oke.
69. WR : pemisahan TNI-Polri, dan sebagainya. Banyak. Ada empat belas. Dan itu terus berlanjut sampai dengan kemarin saya masih mendengar adanya bisnis TNI yang kemudian diserahkan kembali kepada negara. Kemudian juga ada keinginan untuk

³ Marbawi A. Katon

- a..., melakukan suatu reformasi yang lebih...lebih mengarah kepada prajurit professional.
70. NS : Oke.
71. WR : Nah, di sini saya barangkali...
72. NS : Oke.
73. WR : mencoba menyoroti juga hak pilih tadi. Nah, ini saya heran ya, lapan tahun yang lalu saya didesak oleh kaum politisi untuk TNI keluar politik praktis; jangan ikut politik praktis. Belum tuntas, lapan tahun kemudian, sekarang politisi ngatakan masuk lagi, yah, hak pilih TNI. Ini kan nggak konsisten. Justru TNI konsisten: jangan, jangan, ya.
74. (audiens bertepuk tangan).
75. WR : Sebab lebih banyak, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
76. NS : Mmmm
77. WR : Mengapa? TNI yang sedang melaksanakan reformasi, konsolidasi, profesionalitas, diganggu dengan kembali memecah belah mereka hak sipil gak dipilih.
78. RN : Tapi kalau...
79. AR : Hak sipil sudah sekaligus, Mas. Karena begini. A..., bayangkan seorang komandan batalyon itu dekat dengan partai A, wakilnya dekat dengan partai B, ya keluarganya juga demikian, itu nanti masing-masing akan mencari vote untuk a..., apa, partainya itu. Jadi menurut saya TNI itu biarlah menjadi di atas segala unsur bangsa, dia alat negara, kesetiaannya tunggal kepada ideologi negara,
80. NS : Mmm,
81. AR : Tidak usah main utak-utik, utak-utik politik itu lho. Itu kan...? Menurut saya lho.
82. RN : Keberatan. Keberatan saya adalah menempatkan TNI sebagai...a... apa namanya, satu entitas yang berada di atas semuanya itu juga sebetulnya merupakan sumber...
83. AR : Nggak. Di atas bisa, kalau nggak di bawah semuanya.
84. WR : Itu dulu
85. AR : di bawah semuanya.
86. RN : Saya mau katakan sesuatu hal. Saya mau katakan suatu hal. Saya kita kita masih mencari cara agar ada aturan-aturan hukum yang mencegah semua kekhawatiran itu, tetapi kita melakukan enggan benar tanpa kita mencabut sebetulnya satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari warga negara. Termasuk warga negara yang menjadi anggota TNI.
87. WR : Saya punya pendapat itu ya.
88. RN : Hak memilih, misalnya.
89. NS : Oke.
90. RN : Saya mau katakan, ya.
91. NS : A... (=Ya)
92. RN : kalau kita mengatakan
93. NS : Oke.
94. RN : bahwa TNI ingin menjadi subjek yang penuh dari warga negara, maka saya kira adalah benar untuk mengembalikan
95. NS : Baik.
96. RN : memulihkan hak pol, a..., hak memilihnya.
97. NS : Baik
98. RN : Tetapi dengan syarat, ini saya kira titik krusialnya, Pak Amin, pihak tentara mesti pihak TNI mesti juga sadar bahwa kalau dia mau kembali menjadi subjek politik, gitu, sebagai warga negara ikut memilih, misalnya, dia pun menjadi subjek hukum yang tunduk kepada hukum yang sama dengan yang berlaku kepada warga negara sipil yang lain. Gitu.
99. NS : Oke.
100. RN : Contohnya peradilan militer. Nah, ini kan sekarang kalau dibilang, "kami udahlah nggak usah ikut politik, tetapi peradilan militer tetap, jalan juga dong. Jadi kapan militer melakukan perbuatan pelanggaran pidana segala macam,
101. NS : Baik.
102. RN : dia harus diperadilan militer. Ya nggak bisa begitu, gitu.
103. NS : Baik.
104. AR : Lebih praktis kalau dia punya hak memilih, dia juga punya hak kampanye juga, ya.
105. NS : Oke.

106. AR : Nah, kalau kampanyenya mereka ikut, lantas bagaimana? Saya belum bisa membayangkan.
107. NS : Trus supaya adil, supaya adil, supaya adil, saya minta yang menengahi adalah yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Ada komentar khusus soal ini?
108. JK : A..., sedikit saja. Begitu TNI taat kepada suprap??? sipil, saya kira tidak banyak negara di dunia yang panglima TNI-nya harus disetujui DPR. Begitu taatnya TNI.
109. NS : Mm.
110. JK : Saya wapres tidak punya hak menentukan panglima, tapi dia itu Ali Mochtar sebagai komisi satu penentu pemilih panglima, saya tidak.
111. NS : A...,
112. AM : kan negara republik, Pak Yusuf.
113. JK : A..., iya! Bukan itu bahwa tidak banyak negara di dunia seperti itu. Bayangkan itu bagaimana ketaatan TNI kepada sipil. Menham kita semua sekarang sipil selalu.
114. NS : Mm.
115. JK : Jadi, jangan kuatirkan masalah kemauan TNI bermacam-macam. Di situ saja kita lihat bagaimana ketaatan bertermu.
116. NS : Boleh tepuk tangan untuk kita semua.
117. (semua bertepuk tangan)
118. NS : Terima kasih banyak. Kita akan break. Ada, setelah ini kita akan spesifik membahas soal reformasi di bidang ekonomi satu hal juga yang sangat penting. Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di *To Day's Dialogue: Meretas Jalan Reformasi*.

Sesi 7

119. Sesi ini diawali dengan tayangan atau cuplikan antrean masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah, sembako, dan dana subsidi BBM.
120. NS : Ya. Terima kasih Anda terus di *To Day's Dialogue: Meretas Jalan Reformasi*.
121. (audiens bertepuk tangan)
122. NS : Tadi adalah cuplikan potret bagaimana negeri ini masih sebetulnya sangat jauh dari cita-cita bangsa, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Bagaimana mau sejahtera minyak saja masih antri? Bagaimana mau sejahtera kalau misalnya susah sekali mendapat beras karena harganya mahal. Angka kemiskinan yang kemudian selalu diperdebatkan berapa jumlahnya. Ada satu iklan yang menyebut angka kemiskinan kita 49,5 persen.
123. (Audiens bertepuk tangan)
124. NS : Kemudian, dibantah oleh a..., orang yang paling tinggi posisinya di negeri ini dibantah oleh orang nomor satu, "Tidak sampai sebegitu kok; BPS bilang cuma 16,5 persen." Jadi, berbeda angka kemiskinan. Pak Yusuf Kalla, seberapa miskin sih sebetulnya Indonesia, Pak?
125. (audiens tertawa)
126. JK : Tentu, kita jujur bahwa a..., pasti kita masih banyak orang miskin itu kenyataan. Tapi, a..., jumlahnya memang tergantung cara menghitungnya.
127. (audiens tertawa)
128. JK : Iya. Artinya begini: Karena tadi menyinggung Pak Wiranto, iklannya Pak Wiranto, minta maaf saja saya kira kita terus terang. Kalau kita sebutkan bahwa setengah rakyat ini miskin saya kira seluruh pemimpin bangsa juga bisa marah, dan rakyat bisa marah begitu besar kok rakyat bisa miskin. Yang kedua, kalau dua dolar itu a..., memang angka, tapi yang selalu dipakai bank dunia juga PBB itu satu dolar. Kita lihat MDG itu kan satu dolar. Bukan dua dolar, Pak Wiranto. Kalau dua dolar itu berarti satu rata-rata rumah tangga lima, berarti konsumsinya lima kali dua, sepuluh dolar, berarti seluruh konsumsinya tiga ratus dolar per bulan, itu berarti hampir tiga juta rupiah kalau konsumsinya tiga juta rupiah, kalau di rupiah, walaupun a..., ppp juga berbeda dengan dolar, tentu itu berarti bukan orang miskin untuk ukuran Indonesia. Biasanya dua dolar itu dipakai di negara-negara maju, tapi dengan negara yang berkembang, itu dipakainya sedolar, tapi kita di atasnya satu dolar. Itu 2.100 kalori, yaitu a... senilai hampir sejutalah pada dewasa ini. A..., seperti itu, Pak. Jadi

- itu pasti ada, tapi tidak, a..., besarnya, kita konsisten saja kepada angka nasional yang dipakai oleh Republik ini, dipakai oleh sejak dulu, sebanyak,...sejak zaman Pak Harto sampai sekarang itu adalah 16 setengah persen.
129. NS : Enam belas setengah persen (tertawa). Jadi, kalau ada angka di luar itu, kemudian iklan itu dijadikan iklan memerangi kemiskinan, gimana Pak Yusuf?
130. JK : Ya, tentu kita bisa menilai masing-masing bahwa itu memang ada PBB...apa, a..., angka-angkanya tidak jelas saya, tapi umumnya bank dunia memakai satu dolar untuk negara-negara seperti itu.
131. NS : Oh, berarti Pak Wiranto...
132. AR : Bre..bre...ntar. MDG
133. NS : Oke
134. AR : itu dua dolar setelah dua ribu...
135. JK : Lima belas
136. AR : lima belas, ya.
137. NS : Berarti salah ya Pak angkanya Pak Wiranto. Pak Wiranto salah Pak pasang iklannya.
138. AR : Nggak. Pak Wiranto ingin melihat negara lebih makmur.
139. (audiens tertawa)
140. NS : Waduh (tertawa) ini sudah dijawab. Sudah dijawab oleh Pak Amin Rais. Silakan Pak Wiranto.
141. WR : Ini kan berarti masalahnya kenapa saya pasang iklan? Yang kedua, kenapa saya pakai standar bank dunia? Kan begitu kan?
142. NS : Mmm
143. WR : Yang pertama saya kira baru saja keliling, yah, ke wilayah Indonesia, ketemu dengan orang-orang kecil, ya, kita mengadakan bakti sosial, saya lihat masih banyak orang yang perlu kita bantu, masih miskin. Lalu saya melihat data di BPS. Di situ juga ada data bank dunia. Nah, di sana dikatakan oleh BPS bahwa selama periode reformasi angka kemiskinan dan pengangguran selalu fluktuatif ya. Tidak banyak beda dengan angka-angka yang muncul pada tahun 2000-an.
144. NS : Mmm.
145. WR : Jadi sebenarnya jangan,...jangan
146. NS : Oke.
147. WR : Maaf, Pak. Saya nggak berdebat masalah angka itu, tapi ada suatu kelanjutan dari kemiskinan yang harus kita perangi bersama.
148. NS : Mmm.
149. WR : Okelah. Lupakanlah perbedaan persepsi itu karena memang standarnya lain.
150. NS : Mmm
151. WR : Metodanya lain. Kita lupakan itu pertentangan angka, tapi yang pasti kita akui bahwa negara kita sebagian rakyatnya masih miskin. Betul kan?
152. (audiens bertepuk tangan)
153. NS : Baik
154. WR : Mari kita atasi itu. Kita atasi itu bersama.
155. NS : Oke. Oke. Tapi, tapi mengatasinya kalau...
156. WR : Karena kembali tadi. Bukan hanya pemerintah.
157. NS : Oke.
158. WR : Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama; membantu pemerintah kok.
159. JK : Terima kasih, Pak. Terima kasih.
160. WR : Terima kasih kepada saya dong.
161. JK : Terima kasih!
162. NS : (tertawa)
163. (audiens tertawa; WR dan JK bersalaman; audiens bertepuk tangan)
164. NS : Oke. Tapi, tapi Pak Wiranto ada juga lho yang bilang, "Kok ada orang yang kerjanya cuma kritik aja. Padahal pemerintahnya siang-malam bekerja tidak henti-hentinya, tapi ada yang cuma mengkritik dan..."
165. WR : Nggak. Kita bakti sosial terus menerus juga.
166. NS : Oh, begitu ya, Pak, ya? (tertawa) Oke.
167. (audiens bertepuk tangan)
168. WR : Semampu kita. Semampu kita.
169. AR : Sesuai dengan Hanura.

170. WR : Hanura.
171. (semua tertawa)
172. NS : Baik. Kita...saya akan minta tanggapan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, ada Mas Aria Bima (AB) di sini. Silakan Mas Aria.
173. AB⁴: Nah, kalau kita lihat sekarang ini, tidak hanya angka kemiskinan, tapi program-program pemerintah yang mana yang itu berdampak pada pemiskinan rakyat. Jadi saya melihat justru bandul itu tidak semakin bendelunya itu ke tengah semakin rakyat itu sejahtera. Tapi yang jelas, bandulnya itu semakin a..., mempertkuat aspek-aspek yang mendukung pengeluaran rakyat yang semakin besar, yang mana peringkat pendapatannya semakin mengecil. Ini yang menurut saya sejak reformasi samapai sekarang, bahkan ke depan belum ada kejelasan kapan persoalan kemiskinan dan pemiskinan ini akan selesai? A..., ketergantungan kita terhadap korporasi, big korporasi itu semakin hari semakin tinggi. Ini yang sampai hari ini tidak ada keberanian politik pemerintah bahkan semakin tingginya tingkat ketergantungan kita.
174. NS : Mmm. Zaman Bu Mega, berani ya, Bang?
175. AB : Ada mulai keberanian.
176. (audiens tertawa)
177. NS : Oke. (tertawa) harus bilang gitu.
178. AB : Persoalannya ya, waktu itu Bu Mega, Kesra-nya itu Pak Jusuf Kalla, menkopolkamnya Pak a..., presiden kita sekarang.
179. NS : Oke. Oke.
180. AB : Ya. Sebentar. Persoalan kita sekarang ini...
181. NS : Baik.
182. AB : Ada nggak keberanian untuk menuntaskan...
183. NS : Tapi Mas Aria, saya senang Anda memakai kata *kita* karena itu berarti semua dan termasuk...
184. AB : Persoalan kita.
185. NS : dan termasuk juga tanggung jawab pemerintahan sebelumnya.
186. AB : Oh, iya. Ya sekarang...
187. NS : Ibu Megawati Sukarno Putri yang malam hari ini tidak jadi datang.
188. AB : Kalau Bung Karno bicara soal sam on bundeling van alleh revolution kraagten.
189. JK : Sya...h
190. NS : Oke (tertawa)
191. (semua tertawa)
192. AB : Kalau kita tidak berani mengatakan tidak terhadap ketergantungan korporasi asing, mau apa kita?
193. NS : Oke.
194. AB : Kalau Exxon Mobile sebenarnya bisa kita kelola ternyata dikasikan, Block Cepu sebenarnya kita ngelola dikasikan Exxon Mobile,
195. NS : Oke.
196. AB : Mau apa kita?
197. NS : Oke.
198. AB : Maka Pak Amin, Pak Amin ini kan harus ikut nanggung dosa. Sejak amandemen...
199. (Semua tertawa)
200. AB : konstitusi undang-undang dasar empat puluh lima pasal 33 yang diikuti oleh regulasi liberalisasi di bidang ekonomi dan sampai sekarang kita ini hanya menjadi instrumen
201. NS : Oke.
202. AB : bukan dirgen. Nah, kita mau menyalahkan siapa?
203. NS : Mmm
204. AB : Kita saya pikir kita sekarang perlu saling bergandengan tangan
205. NS : Baik.
206. AB : untuk bicara kesatuan, untuk bicara bicara kebersamaan, tidak hanya bersama, karena bersama nggak bisa.
207. NS : (tertawa)
208. AB : Harus ada kebersamaan.
209. NS : Oke. Itu sudah bawa-bawa jargon kampanye, Pak Kalla.

⁴ Aria Bima

210. (audiens tertawa)
211. AB : Harus ada kebersamaan sebagai bangsa.
212. JK : Bersama kita bisa.
213. AB : untuk bicara...
214. NS : Kata Pak Yusuf, "Bersama kita bisa". Maaf saya potong Mas Aria. Boleh tepuk tangan, Mas Aria Bima...
215. (audiens bertepuk tangan)
216. AB : Ya...a...a,
217. NS : Luar biasa. Oposisi sejati.
218. AB : kebersamaan itu harus ada.
219. NS : Boleh. Wah, Mas, sudah ditepukin sudah selesai. Masa?
220. (audiens tertawa)
221. NS : Mba Avi, silakan Mba Avi ditanggapi. Aviliani (AV), ekonom dari INDEF.
222. AV⁵: Ya. Mungkin yang harus kita bicarakan adalah masa depan ya. Tidak masa lalu terus. Yang pertama adalah masyarakat ini a..., dari segi pendapatan belum meningkat sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya tidak hanya semacam BLT saja, tapi membangun institusi di daerah-daerah karena ternyata masyarakat miskin tanpa institusi tidak akan bisa makmur. Ya. Karena tidak ada *sustainability* dari institusi untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik ya.
223. NS : Oke.
224. AV : Oleh karena itu dana anggaran yang besar nanti ada 65 triliun, itu kalau tidak digunakan secara *sustainability* maka akan habis setiap tahun begitu saja. Itu satu. Yang kedua adalah masalah stabilisasi harga. Itu akan menjadi masalah. Di tahun 2008 juga sama. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana institusi seperti Bulog itu harus melakukan stabilisasi harga seperti masa lalu. Karena biar bagaimana pun masyarakat ini belum mampu untuk membeli dengan harga pasar yang, a..., yang sekarang ini akan terus naik. Karena prediksinya 2008 harga pangan akan terus naik. Nah, ini yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, harus dari sisi *demand* dan sisi *suplay* harus sama-sama dilakukan. Karena kalau tidak saya rasa masyarakat tidak akan pernah bisa meningkatkan kesejahteraannya.
225. NS : Oke. Baik. Boleh saya minta komentar singkat dari Mas Drajat Wibowo (DW), singkat saja.
226. DW⁶: Kenapa kita nggak bisa mengentaskan kemiskinan? Itu karena reformasi, itu yang paling lambat, yang paling cilaka, itu adalah reformasi di bidang ekonomi.
227. NS : Oke.
228. DW: Kenapa demikian? Karena sejak zaman dulu sampai sekarang, itu kebijakan ekonomi kita, walaupun sudah ada reformasi, itu tetap dikuasai oleh kebijakan ekonomi yang pro-Washington, propasar, proasing. Pak Kalla ini sebenarnya sudah propelaku domestik. Cuma mungkin pelaku domestiknya masih terbatas di Bosowa sama Bakrie Brothers (sambil tertawa).
229. (sejumlah orang tertawa)
230. DW: Nah ini harus diperluas.
231. NS : Baik.
232. DW: Jadi kebijakan ekonomi harus kita rubah, kita perluas proekonomi domestik.
233. NS : Terima kasih Mas Drajat. Silakan, Pak Jusuf.
234. JK : Yang pertama saya kira sumbangan pikiran yang bagus semuanya ya. Pak Aria bahwa ini adalah suatu kesinambungan yang kita usahakan betul secara baik, a..., a..., secara bersama-sama. Kemudian Bu Avi tadi, saya juga bingung kalau mengatakan pendapatan tidak naik, jadi apa artinya 6 persen *gross*, apa artinya income per kapita yang naik, itu tanpa pendapatan yang naik? Ahli statistik sederhana pun mengetahui bahwa pendapatan naik. Itu kan? A..., kemudian juga a..., untuk stabilitas saya...saya kira memang pemerintah menjaga. Bulog berfungsi betul sekarang, kita...
235. DW: Maaf, Na. Boleh saya interupsi. Di DPR biasa interupsi.
236. NS : Singkat saja. Singkat.

⁵ Aviliani

⁶ Drajat Wibowo

237. DW: Singkat. Pendapatan memang naik, akan tetapi yang naik lebih banyak di kalangan atasnya, Pak. Yang di bawah ini yang lebih stagnan. Jadi itu yang harus jadi fokus pemerintah.
238. (audiens bertepuk tangan)
239. NS : Terima kasih. Silakan Pak Yusuf.
240. JK : Iya. Ya, tentu itu pikiran general, tapi tidak...tidak...a..., pasti ada suatu pendapatan yang....
241. AR : empat puluh persen
242. JK : yang baik. Tidak mungkin kalau....kalau nggak penuhlah pengemis di Jakarta ini kalau tidak ada kenaikan a...,
243. (audiens tertawa)
244. JK : hal tersebut. Kedua, a..., soal stabilitas, jadi ke Bulog memang kita penuh lagi kewajibannya, produksi pangan kita naikan...minta naik ke dua juta. Kasi pupuk dengan gratis. Kasih itu a... apa itu, a..., bibit gratis. Itu semua dijalankan seperti itu. A..., sama dengan pendidikan kesehatan.
245. NS : Oke.
246. JK : Kedua, a..., tentang tadi dikatakan pro konsensus Washington Consensus. Saya kira, sekiranya pemerintah pro itu, maka tidak ada subsidi 150 triliun, Bung Drajat. Anda tau sendiri kan?
247. NS : Mmm.
248. JK : Sekarang, kalau naik harga begini, 150 triliun, tidak ada kamusnya, oh saya tahu konsensus untuk itu. Kalau ada, a..., tidak ada subsidi. Sekarang penuh subsidi. Apakah beras, minyak tanah, semua disubsidi. A..., kedua, tentang, a..., hal-hal lain, saya kira kita sependapat bahwa kita memajukan bangsa ini secara betul dan kita tetap berpihak kepada kemampuan dalam negeri. Bukan hanya Bosowa atau Bakrie.
249. NS : Baik.
250. JK : Terbuka tendernya.
251. DW: (tertawa)
252. JK : Ratusan kok perusahaan yang dapat tender pemerintah. Tidak. Hal itu malah perusahaan itu jarang...tender pemerintah.
253. NS : Tidak ada Bosowa dan Bakrie ya, Pak?
254. JK : Tidak sama sekali. Tidak.
255. NS : Oke, oke. Baik. Kita harus *break*, mohon maaf Pak Amin, kita akan ada waktu melanjutkan setelah pariwisata. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan masuk ke bagian yang paling penting: bagian konklusi apa yang harus dilakukan bangsa ini ke depan setelah 10 tahun reformasi berjalan. Kami kembali sesaat lagi.

Sesi 8

256. NS : Ya, pemirsa
257. (audiens bertepuk tangan)
258. NS : Permira, ini adalah bagian atau segmen terakhir dari diskusi panjang kita dua episode diskusi seputar reformasi, Meretas Jalan Reformasi. Setelah sepuluh tahun reformasi berjalan dan kalau memang dikatakan masih banyak hal yang belum dicapai, apakah itu artinya kepemimpinan saat ini harus berganti dari yang tua ke yang muda? Apakah itu konklusinya? Haruskah yang muda merebut kepemimpinan itu dari yang tua, jika mau reformasi ini berhasil? Saya ingin kasih kesempatan kepada Bung Fadjoel a..., Rachman. Silakan Bung Fajrul (FR).
259. FR⁷ : A..., selamat malam, Pak Yusuf Kalla, Pak Amin Rais, Pak a..., Wiranto, dan juga Pak Sutiyoso. Saatnya Anda sebagai generasi magribi untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan Nasional karena hanya dengan jalan itu menurut saya, apa yang kita perbincangkan selama dua jam ini tidak akan berjalan dengan baik, kecuali Anda semua mengundurkan diri.
260. (beberapa audiens bertepuk tangan).
261. FR : Alasan saya sederhana sekali karena ternyata dari perbincangan tadi kalau hanya sekedar mengubah cara pandang, dan tidak mengubah generasi itu ternyata kita

⁷ Fadjoel Rachman

- hanya berputar pada masalah yang sama. Dua kejahatan utama a..., rezim Suharto Orde Baru, yang kita perangi, yaitu soal kejahatan korupsi, dan kejahatan hak azasi manusia, kemudian tadi ditambahkan lagi, yaitu persoalan ketimpangan sosial, ekonomi, itu menjadi masalah kita karena Anda semua berada di dalamnya.
262. NS : Jadi akan berbeda kalau kaum muda yang memimpin?
263. FR : Jadi, Anda semua adalah bagian daripada masalah tersebut
264. NS : mmm
265. FR : bukan bagian upaya dari pemecahan masalah.
266. NS : Dan itu akan berbeda kalau kaum muda yang melakukan a..., yang memimpin?
267. FR : Saya meyakini seperti itu, mirip sekali apa yang dilakukan oleh Hanrington. Dia mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk keluar dari sebuah sejarah yang kelam, sejarah yang kediktatoran adalah melepaskan diri dari generasi-generasi yang sebelumnya hidup dan dihidupi di dalamnya.
268. NS : Oke.
269. FR : Aa, dan kemudian yang kedua,
270. NS : Baik.
271. FR : menurut saya yang menjadi sangat penting, ini mirip dengan, kawan-kawan tua ini, mirip dengan kalau kita memakai metafora itu seperti ular begitu ya. Seperti ular beludak, begitu. Ular beludak itu walaupun dia berganti kulit, dia hanya akan sekedar berganti kulit dan namanya tetap sama.
272. NS : Oke.
273. FR : Nah, karena itu, menurut saya, upaya untuk menyelesaikan dua hal yang menjadi upaya kita kenapa menjatuhkan Suharto dan Orde Baru, yaitu soal kejahatan korupsi yang melibatkan Suharto di dalamnya
274. NS : Baik.
275. FR : tidak akan bisa diselesaikan oleh Pak Jusuf Kalla, tidak akan bisa diselesaikan oleh Pak Wiranto, ataupun bisa diselesaikan oleh Pak Sutiyoso.
276. NS : Baik. Terima kasih.
277. FR : Hanya generasi baru yang bisa melakukan dan menyelesaikannya.
278. NS : Baik.
279. FR : Terima kasih.
280. NS : Terima kasih, Bung Fadjoel Rachman. Oke baik. Saya kasih kesempatan kepada ketua DPP Partai Demokrat, Bung Anas Urbaningrum (AU). Silakan.
281. AU⁸: Terima kasih, Mba Nana. Mangga masak pohon, itu jauh lebih enak dan lebih mahal ketimbang mangga yang dikarbit. Karena itu menurut saya memilih pemimpin itu bukan soal, kontes tua atau muda, tetapi memilih pemimpin adalah kontes yang terbaik bagi rakyat. Saya setuju bahwa perlu regenerasi. Karena kalau tidak regenerasi, itu pasti terjadi degenerasi kepemimpinan. Tetapi, apa pun kita harus mengikuti proses, ya, bahwa kaum muda harus mempersiapkan diri dengan baik? Ya. Kalau boleh, prosesnya diakselerasi dengan kebijakan internal di partai. Dengan kebijakan nasional memberikan peluang yang lebih terbuka bagi orang-orang muda, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau dikarbit, tentu itu tidak banyak faedahnya bagi kaum muda sendiri, maupun bagi kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
282. NS : Mmm.
283. AU : Nah, karena itu, menurut saya, yang harus dilakukan adalah bagaimana kaum muda mempersiapkan diri dengan baik, ya, tanpa harus membangun dikotomi yang keras: ini muda, ini tua. Yang tua harus segera turun, yang muda sudah saatnya naik dan seterusnya itu. Jadi yang penting menurut saya adalah bagaimana menampilkan diri untuk dikenal, disukai, dipercaya, dan kemudian pada saatnya dipilih oleh rakyat. Itu menurut saya jalan yang jauh lebih baik untuk kepentingan semua.
284. NS : Boleh tepuk tangan. Bung Anas Urbaningrum.
285. (Audiens bertepuk tangan)
286. NS : Jadi sekarang tidak usah dikotomi tua muda, tapi siapa yang mau jadi presiden silakan deklarasi seperti, Bang Yos. Begitu Bang Yos, ya?
287. (beberapa audiens tertawa)
288. NS : Sudah sejak awal deklarasi. Kenapa Anda menjadi presiden, Bang Yos? Anda yakin bisa menyelesaikan masalah lebih baik dari calon presiden dari Hanura

⁸ Anas Urbaningrum

- mungkin, Pak Wiranto. Dari calon presiden Golkar mungkin, Pak Jusuf Kalla. Calon presiden PAN mungkin, Pak Amin Rais.
289. AR : Belum, belum, belum.
290. WR : Pake mungkin Pak. Mungkin.
291. NS : Mungkin. Pake mungkin. Bang Yos...
292. YS : A..., saya ngomentari tadi ya, bahwa itu pemikiran idealis itu kan baik. Gitu ya. Tapi kita kan harus berpikir yang realistis. Kita tidak usah membandingkan misalnya dengan negara-negara Amerika, Inggris, Tony Blair 47 tahun jadi perdana menteri, atau John F. Kennedy jadi presiden mungkin umur 45 tahun,
293. NS : Mmm
294. YS : gitu. Karena negara-negera itu negara yang sudah stabil, sistem sudah berjalan, SDM-nya berkualitas, demokrasi sudah lama berjalan. Jadi, siapa pun yang memimpin sebenarnya tidak begitu banyak masalah.
295. NS : Mmm.
296. YS : Karena itu, mereka pada cari masalah tempat lain, kan gitu? Gitu kan?
297. (Audiens tertawa)
298. YS : Nah, kalau kita tengok ke diri kita, ini negeri ini kan sangat *complicated* masalahnya.
299. NS : Oke.
300. YS : Di dalam satu era yang amat sulit sejarah reformasi digulirkan. Karena perilaku masyarakat kita juga sudah berubah.
301. NS : Oke.
302. YS : A..., tuntutan lebih berani, ngritik lebih berani.
303. NS : Mmm.
304. YS : Nah, itu tidak bisa pemimpin terus ucuk-ucuk datang.
305. NS : Oke.
306. YS : Gitu. Jadi, muda adalah pemikirannya yang segar. Belum tentu pemikirannya cemerlang atau segar, gitu.
307. NS : Oke.
308. YS : Tetapi orang tua juga bisa saja berpikiran modal. Dan
309. NS : Oke.
310. YS : pemimpin itu dilihat dari tiga aspek, ya.
311. NS : Baik.
312. YS : Intelektual, kepribadian, dan fisik, gitu.
313. NS : Oke.
314. YS : Fisik pun harus kuat. Kan gitu.
315. NS : Oke.
316. FR : Karena saya pikir di sini ada Priyo Budisantoso, ada Rahma Pratama,
317. YS : Yah, artinya kita tidak bisa melarang siapa pun karena itu hak politik seseorang.
318. FR : Hampir semuanya menurut saya, mereka-mereka ini kalau diberikan kesempatan, dan bapak-bapak kita dari generasi pertama, a..., gerakan reformasi ini mengundurkan diri
319. NS : Baik.
320. FR : termasuk Pak Sutiyoso, akan lebih mudah.
321. YS : Artinya kita tidak melarang, kan?
322. FR : Buat mereka untuk maju
323. YS : Ya silakan saja kan?
324. FR : sebagai pemimpin nasional.
325. NS : Oke. Oke.
326. FR : Begitu saja.
327. NS : Baik. Baik.
328. YS : Jadi, silakan saja. Kan, kalau
329. NS : Silakan saja maju,
330. YS : tiba-tiba cara berpikir melarang orang tua, itu namanya berpikir tidak dewasa kan?
331. NS : Mmm.
332. YS : Silakan saja. Anda yang terpilih menang,
333. NS : Oke.
334. (audiens bertepuk tangan)
335. YS : kita akan *support*, kan gitu
336. FR : Akan lebih dewasa lagi

337. NS : Silakan saja maju.
338. FR : Kalau yang tua mengundurkan diri, dan kemudian yang muda maju ke depan.
339. NS : Nanti, nanti rakyat yang menentukan. Silakan saja siapa yang maju asal betul-betul untuk rakyat bukan untuk yang lain. Baik-baik. Terima kasih. A..., kalau Bang Yos, sudah jauh-jauh hari berani bilang, "Saya calon presiden." Malam ini Pak Yusuf Kalla berani tidak bilang itu?
340. JK : Apa?
341. (Audiens tertawa)
342. NS : Saya calon presiden.
343. JK : Kan tiga bulan nanti pemilu baru. Sudah ngomong berkali-kali kok. Masa gak dengar.
344. NS : Jadi, Tapi mau, jadi tidak mau mengikuti jejak Pak Sutiyoso, "Saya calon presiden."
345. JK : Kan sudah wapres kan?
346. NS : (tertawa)
347. (Audiens tertawa)
348. NS : Tapi, (tertawa) belum presiden, Pak Yusuf. Sudah wapres, belum presiden.
349. JK : Sebelumnya presiden direktur. Lama sekali saya.
350. NS : (tertawa)
351. (Audiens tertawa)
352. NS : Pak Amin, berani bilang malam ini di *To Day's Dialog Special*, berani bilang, "Saya juga calon presiden.?"
353. AR : Saya menunggu sinyal dari langit.
354. NS : (tertawa)
355. (Audiens tertawa)
356. JK : Wangsit.
357. AR : Sampai sekarang nggak ada.
358. NS : Tidak ada.
359. AR : Belum ada. Ya.
360. NS : Pak Wiranto? Menunggu sinyal juga?
361. WR : Saya bukan. Saya lebih rasional lagi, ya, saya punya partai, sedang berkembang, belum verifikasi, dan lagian secara penalaran kita bahwa pemimpin tanpa back up politik yang kuat itu, ndak ada artinya apa-apa.
362. NS : Mmm.
363. WR : Trus kita juga masih
364. (Audiens bertepuk tangan)
365. WR : menunggu ke depan perkembangan partai saya.
366. NS : Oke. Berarti... Baik. Ini tahun baru, kita akan membuka jalan baru. Kita akan meretas jalan reformasi yang lebih lebar. Harapan ke depan, Pak Jusuf Kalla.
367. JK : Harapan kita selalu, ya, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan bekerja secara bersama-sama. Bersama kita bisa, begitu ya.
368. NS : Mmm. (tertawa)
369. (audiens tertawa)
370. JK : Dan tentunya juga kita a..., sangat yakin bahwa bangsa ini mempunyai kesempatan untuk maju dengan segala kemampuan, segala *under sources* yang ada.
371. NS : Mm.
372. JK : Selama kita, seperti tadi menjalankan negara dengan efisien, menjalankan demokrasi secara efisien, dan sebagainya, jangan seperti tadi saudara tadi berbicara demokrasi secara tidak demokratis kan begitu-gitu tidak cocok, begitu.
373. NS : (tertawa)
374. (Audiens tertawa)
375. JK : Bicara mau presiden, menyuruh Pak Wiranto mundur, itu kan tidak demokratis. Gimana kita bicara demokratis kalau cara berpikir kita tidak demokratis? Kan susah kita kalau begitu kan?
376. NS : A... (=Ya)
377. JK : Ya..., seperti itulah, hal-hal yang... harusnya kita konsistenlah cara-cara kita. Ya.
378. NS : Oke baik. Baik. Pak bersama kita bisa, apakah itu sinyal bersama SBY lagi?
379. JK : A...?
380. NS : Tadi Bapak bersama kita bisa itu, sinyalnya?
381. JK : Kita kan banyak ini. Kita banyak.
382. NS : (tertawa)

383. (Audiens tertawa)
384. NS : Saya pikir itu sinyal bahwa nanti akan duet lagi dengan Pak SBY.
385. JK : Kalau bersama kami bisa, itu lain.
386. NS : Boleh tepuk tangan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla. Terima kasih sudah hadir. Silakan, Pak Amin Rais.
387. AR : Ya, saya hanya prihatin Mba. Yang saya lihat itu sesuatu fenomena yang memprihatinkan sekali itu adalah proses asingisasi, ya. Aset nasional dan berbagai sektor ekonomi kita. Jadi, peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 itu kalau kita baca agak mengagetkan. Ya. Misalnya, kepemilikan asing itu diperkenankan sampai 99 persen untuk bank devisa, bank nondevisa, kemudian untuk kelistrikan, untuk apa, air dan listrik itu 99 persen.
388. NS : Mm.
389. AR : Bahkan pertanian, ya, itu betul-betul mengagetkan. Ya. Pertanian itu, setiap lahan di atas 25 hektar untuk palawija, jagung, padi, itu boleh asing 95 persen. Ya. Bank, saya kira Drajat lebih tahu, sudah 60 persen asing.
390. NS : Baik.
391. AR : Nah, kalau begini apakah kita masih sanggup mengatakan kita masih merdeka dan berdaulat? Karena itu saya minta, mumpung masih ada dua tahun kurang sedikit, (mengarahkan dan mendekatkan pandangan ke JK), tolong banting setir, ya! Kalau nggak, awas!
392. JK : (tertawa terbahak-bahak)
393. NS : (tertawa)
394. (Audiens tertawa)
395. NS : Itu ancaman ya, Pak?
396. AR : Ancaman ya (tertawa).
397. NS : Awas diapa?
398. JK : Awasnya tidak pilih. Tidak pilih.
399. AR : Betul, betul, betul.
400. NS : Saya pikir, awas dilengserkan ketika Anda melengserkan Gus Dur dulu.
401. JK : (masih tertawa)
402. NS : Pak Jusuf, silakan. Komentar singkat.
403. JK : Saya kira, begini. Ini kan dalam dunia globalisasi, ini kan modal itu ke mana-mana, gak bisa suatu kita kurung dunia ini kita dalam suatu tersendiri. Bahwa ada aturan-aturan itu a..., tertentu, ada juga negativisnya.
404. NS : Baik.
405. JK : Apa yang Bapak kemukakan pasti ada. Tapi ada juga yang tidak boleh. Ada negativisnya juga tidak boleh sehingga ini tidak boleh, ini tidak boleh, yang esensial itu tetap
406. NS : Oke.
407. JK : tidak boleh.
408. NS : Oke.
409. JK : Tetapi ada yang terbuka memang saya kata kan itu. Bahwa kita memang termasuk bahagian yang terbuka
410. NS : Baik.
411. JK : ya, pasti
412. AR : Cuma di Asia ini, alhamdulillah kita yang paling... ugal-ugalan.
413. NS : (tertawa)
414. (Audiens tertawa)
415. AR : Betul, Pak. Ya, Jadi, jadi harus dikoreksi, Pak. Ini untuk kita semua. Untuk kita semua.
416. JK : Kita sependapat itu.
417. NS : Oke. Pak Wiranto, silakan. Singkat saja.
418. WR : Ya, baiklah. Setelah mendengarkan semua pembicaraan kita seperti ini, ya, saya teringat kepada sahabat saya, almarhum Profesor Afan Gaffar, ya. Dia sudah membicarakan hal ini jauh sebelumnya, pada saat masih hidup. Dan untuk menyelesaikan masalah bangsa ini saya kira kita harus masuk kepada satu, tadi Nana tanyakan ya, demokrasi seperti apa kan? *The workable democracy*.
419. NS : Oke.
420. WR : Apa pun namanya demokrasi itu harus berjalan. Bisa bekerja untuk membangun stabilitas dan membawa bangsa ini masuk kepada suatu kesejahteraan.

421. NS : Mm.
422. WR : Dan itu hanya bisa kalau ada *back up* politik yang kuat. Dan itu butuh satu kebersamaan dari para elit politik. Elit politik kita yang saat ini barangkali, masih ya, masih berbeda pendapat sangat tajam,
423. NS : Baik.
424. WR : Saatnya berkumpul bersama-sama, bicarakan masa depan bangsa, dan itu hanya bisa kalau pakai hati nurani.
425. NS : Oke (tertawa)
426. (Audiens tertawa dan bertepuk tangan)
427. JK : Soal demokrasi kita selalu sependapat. Soal demokrasi, kita jabat tangan dulu, Pak.
428. NS : Soal demokrasi selalu sependapat.
429. (audiens bertepuk tangan)
430. WR : Iya, Pak
431. JK : Demokrasi dan kesejahteraan kita sependapat terus.
432. NS : Baik.
433. WR : Iya.
434. JK : Tetangga. Tetangga di rumah di sana.
435. NS : Tetangga (sambil tertawa)
436. (Audiens tertawa)
437. WR : Kantor saya memang dekat dengan beliau. Jadi, jangan khawatir.
438. NS : Oh, memang mendekati Golkar, ya, Pak, ya? Oke, baik. Belum kapok dengan Golkar ternyata, Pak Wiranto. Terima kasih tamu-tamu saya pada malam hari ini. Pak Jusuf Kalla terima kasih banyak, Pak Amin terima kasih, Pak Wiranto terima kasih.
439. WR : Baik. Terima kasih.
440. NS : Seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf tidak semuanya dapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tapi kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sangat kami hargai dan juga memberikan arti kepada pemirsa Metrotv bahwa para elit-elit politiknya mau duduk bersama dan mendengarkan bersama dan insyallah mencari solusi bersama demi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Saya Nazwa Shihab undur diri untuk satu tahun ini. Selamat malam, pemirsa dan sampai jumpa.
441. (audiens bertepuk tangan)

JB080111

Judul/Topik : --
 Tokoh utama : Amien Rais (AR)
 Nama Acara : Jalan Bincang
 Stasiun televisi : Jak TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 11 Januari 2008
 Kode Induk Data : JB080111,01--n

Sesi 1

(...) Dalam pembicaraan yang terpotong ini, AR menyinggung Mahatir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia.

1. AR¹: Belum lama ini Pak Mahatir (itu) berpidato, ya, di depan para tokoh NGO [en ji o] Asia Tenggara, beliau mengatakan, "*It was the lead President Sukarno from Indonesia, who reminded us the dangerous of the new imperialism and new colonialism they would return, a... they have returned, ya, to the international sin.* Artinya, yang saya nggak enak itu, justru Pak Mahatir, ya, bukan tokoh Indonesia yang
2. RP: Mensetir...ya
3. AR: mengingatkan bahwa dulu adalah Bung Karno yang mengingatkan bahwa neo-imperialisme dan neo-kolonialisme itu akan kembali itu. Dan memang sekarang sudah kembali Mas.
4. RP²: Makanya kalau kita perhatikan, barangkali tokoh-tokoh yang Pak Amin sebut itu, itu kalau zaman dulu itu *new emerging forces*, ya?
5. AR: Semacam itu. Cuma lebih canggih sekarang.
6. RP: Lebih canggih.
7. AR: Ya. Lebih menguasai masalah. Ya.
8. RP: Dan Bung Karno sudah menyebutkan itu awal-awal 60-an.
9. AR: Itulah. Ya. Itulah, itulah, ya.
10. RP: Dan kita tidak menggunakannya sama sekali.
11. AR: Ya, ya. Jadi, jadi yang saya terus terang ya, saya kritik ini kepada seluruh anak bangsa ya, mestinya teman-teman TNI Saptamarga, teman-teman Polri Tribrata, teman-teman politisi di Senayan, tapi juga a... tokoh intelektual dan lain-lain bahwa diingat kembali pesan *Founding Father* kita itu, ya. Karena memang kenyataannya sekarang ini kedaulatan ekonomi kita sudah kita gadaikan, Mas. Jadi, hampir separoh perbankan dikuasai
12. RP: ya...
13. AR: korporasi asing. Bank maksud saya.
14. RP: ya...
15. AR: Kemudian juga seluruh kontrak karya migas dan mineral kalau kita periksa kembali, itu untuk kepentingan gede-gede-an korporasi asing dan kerugian kita, habis-habisan juta. Ya. Kemudian juga lihatlah sekarang ini atas nama deregulasi, atas nama divestasi, atas nama globalisasi, dan liberalisasi, itu kita seperti...
16. RP: membuka diri.
17. AR: latah
18. RP: ya.
19. AR: Jadi, ya... apa Indosat dijual,
20. RP: mmm
21. AR: lima koma sekian triliun. Kemudian, gak lucu lagi, beberapa tahun ditawarkan lima belas triliun, dan Singapur ketawa dan (ga...) diberikan. Dan saya dengar PLN *is the matter*

¹ Amin Rais

² Riza Primadi

- of time, Garuda's matter of time, bahkan mungkin Pertamina is the matter of time, masalah waktu, akhirnya akan dijual.*
22. RP : Penting itu untuk tidak dikuasai oleh asing?
23. AR : Ya jelas. Sekarang ya, artinya kita ini...
24. RP : kalau misalkan gagasan...a...
25. AR : Ya.
26. RP : alasan ketika itu kan a... bahwa kepemilikan itu tidak semata-mata dalam bentuk a... saham, tapi ketika a... dimiliki asing sebagian sahamnya ternyata lebih bagus lagi, pajaknya juga masuk ke
27. AR : Ya,
28. RP : Indonesia juga...
29. AR : Ya, tetapi ya... Jadi begini, apa... yang yang kita lupakan,
30. RP : mmm
31. AR : atau pura-pura kita lupakan adalah bahwa korporasi asing itu, ideologinya itu, *profit before the people*, ya...
32. RP : mmm
33. AR : Kemudian, *twenty four ours around the clock*, 24 jam sehari semalam, mereka itu hanya *profit, profit, profit, profit, profit*, tidak pernah ada, misalnya, *the zakat social corporate responsibility*, ya. Apa...? A...
34. RP : Memberi kesejahteraan, *well friend*
35. AR : Ya... Jadi, gini aja. Kalau mau contoh yang telak, Enron perusahaan atau korporasi energi nomor delapan terbesar di Amerika, tahun 2001, itu di Amerika yang katanya serba *rule of law*, yang katanya serba transparansi, yang katanya kaidah-kaidah moral ditegakkan, sebuah Enron bisa melakukan skandal komplis ya...
36. RP : Ya.
37. AR : Dari *in sander training* sampe apa...*fraudulent accounting*
38. RP : mmm
39. AR : sampe brangfort, apa *bank fort*, ya, sampai segala macam, ya...
40. RP : mmm
41. AR : Nah, sekarang bayangkan, Mas, a...
42. RP : Amerika saja begitu...
43. AR : Enron dengan 20 ribu stafnya, dengan segala macam main mata dengan Anderson Accounting Firm itu ya...
44. RP : mm, mm,
45. AR : Kantor apa...
46. RP : Akuntan
47. AR : akuntansi Anderson itu, ya, itu bisa melakukan korupsi itu miliaran Dolar, gitu.
48. RP : Ya,
49. AR : Dan ternyata juga menyangkut petinggi-petinggi di Amerika.
50. RP : Ya.
51. AR : Nah, sekarang masalahnya, kalau di negaranya sendiri saja yang katanya serba *rule of law*, control media massa hebat saja mampu seperti itu, apalagi di negara kita?
52. RP : Mmm, yang sampai sekarang belum bisa...
53. AR : Ya...
54. RP : menegakkan *rule of law*-nya.
55. AR : Bahkan, Mas Primadi, saya punya tesis sederhana, ya. Kalau kita ingin melepaskan diri dari kutukan kemelaratan abadi, yang kita alami sekarang ini, cuma satu, yaitu kita kembali ke pemikiran *founding's father* kita, kita proteksi sumber daya alam kita, pertama-tama untuk bangsa sendiri, kedua baru kita apa... *share* dengan korporasi asing, mereka mungkin punya managerial noho,
56. RP : mmm
57. AR : mereka punya keahlian, mereka punya kapital atau uang, nggak apa-apa, ya. Tetapi, menomorsatukan kepentingan bangsa, itu saya kira sesuatu kewajiban absolut. Kalau nggak, kita seperti dikadalinlah istilah anak muda itu,
58. RP : mmm
59. AR : di...apa... Dibodohin, gitu.
60. RP : mmm. Sudah pernah...mmm...kritik-kritik... Pak Amin kan sering melakukan itu kan? Kritik, termasuk juga, *good luck*... apa *clash action* Cepu,

61. AR : Cepu, ya.
 62. RP : Freeport, kritik keras...
 63. AR : Yah.
 64. RP : tapi, tetap aja tuh?
 65. AR : Ya, itu.
 66. RP : (tertawa)
 67. AR : Karena itu, setiap kali saya, mmm, saya setiap kali membaca tulisan,
 68. RP : mmm
 69. AR : atau mendengar seminar, orang yang seide dengan saya, saya seperti mendapat teman.
 70. RP : mmm
 71. AR : Jadi itu mungkin, Mas Primadi, menurut saya memang ini perlu waktu. Ya. Untuk sosialisasi pikiran mendasar ini, itu perlu mungkin satu semes...satu tahun karena itu mudah-mudahan saya bisa membuat monograf,
 72. RP : mmm
 73. AR : Yah, buku tipis gitu, mengenai gagasan ini, nanti akan saya, dalam tanda petik saya jual ke kampus-kampus, ke media massa,
 74. RP : Supaya tersosialisasikan.
 75. AR : ke Lemhanas, yah, ke berbagai kelompok-kelompok penting karena saya yakin di situ, apa... letak, letak, letak kunci apa...
 76. RP : mmm
 77. AR : pembangunan nasional kita itu. Ya.
 78. RP : Kalau dibandingkan dengan 17 langkah yang Anda pernah a... telorkan pada 2003 itu,
 79. AR : Iya, ya, ya...
 80. RP : lalu apa bedanya yang ini, pemikiran yang ini?
 81. AR : ya, ini mmm makin mengerucut saya kira.
 82. RP : Mengerucut.
 83. AR : Makin mengerucut. Ya.
 84. RP : Waktu itu besar, trus yang ini, ini
 85. AR : Tujuh belas langkah itu *bowling down* kepada...
 86. RP : yang ini...
 87. AR : Ya.
 88. RP : Ini bukannya ini, a... nasionalisme yang sempit kalau orang mengatakan begitu?
 89. AR : Saya kira, nggak. Jadi begini, a... jadi ini globalisasi dalam perspektif yang lain, ya.
 90. RP : mmm. Globalisasi malah ini?
 91. AR : a... sa saya kira globalisasi dalam arti a... kita tidak eksklusif seperti Myanmar, atau negara yang menarik diri dari panggung...
 92. RP : Internasional
 93. AR : Internasional, ya, kita ikut, ya, kita ikut apa, arus itu cuma kita harus faham betul permainan apa yang perlu kita suguahkan untuk melindungi kepentingan kita sendiri. Jadi, maksud saya, seperti New Zeland itu pernah... itu negara yang paling ugal-ugalan, ya, menyambut dengan latah konsepnya Bu Margaret Techer dan
 94. RP : mmm
 95. AR : dan apa... Pak Reagan itu, yaitu [the no] *where is no alternative yours*, semua buka, dagangan bebas,
 96. RP : mmm
 97. AR : *startles judgement* dan lain-lain, akhirnya ekonomi New Zeland itu mentok, bahkan kemudian a... mau *collapses*, ya.
 98. RP : mmm
 99. AR : Tahun 99 mereka menyadari ganti perdana menteri, sekarang sudah pulih.
- (cap 9)**
 100. AR : Reformasi itu kan melakukan gebrakan.
 101. RP : mmm
 102. AR : Pimpinan bangsa, presiden dan wapres tidak dipilih oleh sekian ratus oleh dulu seribu anggota MPR, tapi mendapat *legitimacy*, mendapat mandat yang sangat kuat

103. RP : Karena pemilihan langsung
 104. AR : karena dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat yang kuat itu, sesungguhnya presiden dibantu wapres, itu bisa melakukan terobosan, terobosan yang...yang fundamental.
 105. RP : mmm
 106. AR : Jadi, ngga perlu ragu-ragu jangan maju-mundur, jadilah seorang pemimpin yang *risk taking* yang besar itu, *space* juga besar, tetapi nampaknya....
 107. RP : karena mandataris rakyat ya?
 108. AR : Iya, iya.
 109. RP : bukan mandataris MPR
 110. AR : Betul, betul. Ya. Cuma sepertinya, apa... tahun pertama tahun kedua tidak ada sesuatu yang baru. Ya. Malah ini meneruskan yang dulu-dulu saja sehingga kata Pak Rosihan Anwar itu saya setuju. Beliau mengatakan *the game is still the same only the player change*.
 111. RP : (tertawa)
 112. AR : Jadi, permainan KKN masih sama, gitu.
 113. RP : mmm
 114. AR : Permainan pat gul lipat alhamdulillah masih sama.
 115. RP : Tapi banyak orang sudah mulai takut, lho...Pak Amin untuk jadi pimpro.
 116. AR : Iya, kalau itu betul. Ya.
 117. RP : Artinya kan ada efek jeranya,
 118. AR : Iya, iya,
 119. RP : *The trend effect*-nya, ada.
 120. AR : Betul Mas. Betul. Itu saya setuju. Bukannya tanpa hasil ya.
 121. RP : mmm
 122. AR : Cuma jangan sampai hal-hal ini menutupi *the grand corruption*. Ya.
 123. RP : mmm
 124. AR : Jadi, saya takut,
 125. RP : Yang tadi *hazed by the sit* itu.
 126. AR : Iya, iya. Jadi, *state capture corruption* itu, itu yang dasar sekali ya. Artinya, misalnya gini, kalau kita buka ya Freeport itu, itu sudah lebih dari 2 ribu trillium, ya. Dia mengangkut khazanah atau milik bangsa kita ini ke luar gitu, sehingga saya setuju dengan Professor Habibrata dari Methodist Church Universtfy di Texas, beliau mengatakan bahwa korupsi yang paling dasyat itu adalah kebijakan atau kesalahan ekonomi yang diambil sebuah negara yang merontokkan kepentingan bangsa sendiri dan menguntungkan bangsa lain. Itu *exactly precisely* yang terjadi di negara kita. Jadi kesalahan kebijakan ekonomi, ya membuat kontrak karya pertambangan dan migas dan mineral secara sudah betul-betul apa...a... tanpa memperhitungkan kepentingan bangsa sendiri itu, itu namanya korupsi, korupsi yang sangat mendasar begitu.
 127. RP : mmm
 128. AR : Jadi, memang ini bukan tugas KPK. KPK kan hanya ngecek-ngecek aja ya.
 129. RP : mmm..
 130. AR : Jadi,
 131. RP : Oknum
 132. AR : ya, saya nggak tahu bagaimana nanti.
 133. RP : Anda gak tau?
 134. AR : Nggak, bagaimana caranya itu.
 135. RP : Ha, solusinya?
 136. AR : Ya, solusinya itu.
 137. RP : Apa, apa gimana ya?

* * *

Transkripsi berikut merupakan transkripsi ujaran penutur yang sama dengan penutur politik di atas.

BBM080904

Judul/Topik : --
 Tokoh utama : Amien Rais (AR)
 Nama Acara : Baru Bisa Mimpi
 Stasiun televisi : ANTV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 04 September 2008
 Kode Induk Data : BBM080904,00

Sesi A

1. MK : [...] tentang korupsi?
2. AR : Pendek sekali, pendek sekali. Saya punya teori yang *just plunge* untuk mengatasi korupsi ini, yaitu mulailah dari hulu bukan dari hilir. Sekarang ini korupsi sudah bertahun-tahun, sekarang pun ada KPK dan lain-lain, tapi yang diusut terus-menerus adalah yang hilir itu; Yang hulu itu tidak berani sama sekali. Jadi, kalau saya menjadi presiden, misalnya, didukung rakyat dan izin Allah, saya akan mulai justru dari puncak piramid bukan dari bawah yang terlalu lama itu.

Sesi akhir

3. MK : [...] kepada Bapak Amin Rais (sambil mengajak hadirin bertepuk tangan).
4. AR : Baik Saudara-Saudaraku semua. Jadi, tahun depan saya sudah 65 tahun. Memang kepala enam itu sudah cukup matang dan pengalamannya banyak, ya. Nah, saya merasa ada semacam tugas intelektual, tugas kewarganegaraan, tugas kemanusiaan, bahkan dari sudut pandang agama saya: tugas keagamaan, karena saya yakin bahwa saya punya sesuatu kemampuan ala kadarnya, tentu. Saya nggak boleh menilai terlalu tinggi, saya ada pengalaman ketika memimpin MPR itu seperti Indonesia in miniature. Di MPR itu ada ABRI, ada POLRI, ada sembilan partai waktu itu, ada utusan golongan daerah. Alhamdulillah, pimpinan saya waktu itu sangat lancer; tidak pernah ada ganjalan apa pun. Saya mengambil titik tengah, di mana titik tengah itu adalah titik merah-putih, titik Pancasila, titik Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Pengalaman ini, insyaallah, menjadi bekal saya, itu. Tapi, insyaallah, saya tidak akan menyorong-nyorongkan diri: pilihlah saya. Tapi nanti, pada saatnya, kalau memang dukungan dari rakyat, itu cukup signifikan, misalnya, dalam poling double digit, bukan di bawah sepuluh, tapi mulai belasan, dan lain-lain, insyaallah saya akan maju, dengan ikhlas, gitu, tidak untuk menumpuk kekayaan, saya sudah hidup a... lumayan berbahagia sekali, gitu. Saya tidak akan, pendek kata, apa, lepas daripada ideologi negara kita ini, dan insyaallah saudara-saudaraku, dengan dukungan sebagian besar rakyat, plus pertolongan dari langit, saya yakin sekali tidak ada gunung yang tidak dapat kita daki; tidak ada jurang yang tidak dapat kita lalui, ya. Jadi, saya kira, inilah insyaallah kekuatan kelemahan saya sebagai manusia, dan saya akan terus saja berjalan. Pokoknya selamatkan Indonesia.

KA080208

Judul/Topik : --
 Tokoh utama : Prabowo (PR)
 Nama acara : Kick Andy
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 08 Febuari 2008
 Kode Induk Data : KA080208, 01--n

1. AN¹: Baik. Dalam bukunya berjudul *Bersaksi di Tengah Badai*, Pak Wiranto pernah menuliskan bahwa dia pernah menegur keras Anda di Cendana karena Anda mengadu ke Pak Harto soal adanya upaya-upaya dari Pak Wiranto untuk membangkang. Tapi, saya tidak akan masuk ke wilayah itu lagi, tapi saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Wiranto akhir-akhir ini?
2. PR²: Akhir-akhir ini, aaa baik. Begitu ya. Jadi, aaa, setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian kita...saya selalu berusaha berfikir aaa jernih...dan aaa selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan saya ber...ber...merasa aaa walaupun ada aaa masalah ketidakcocokan, tadi saya katakan ya, aaa *chemistry* yang tidak cocok atau apa ya, itu saya kira wajar, lazim dalam setiap organisasi. Ya. Aaa dalam setiap kelompok manusia itu pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Ya sudahlah.
3. AN: Jadi, tidak ada dendam?
4. PR: Saya kira dendam itu, ndak ada, nda ada gunanya itu. Kalau saya ya merasa. Mungkin karena sudah umur 55 tahun sekarang. (tertawa)
5. AN: (tertawa)
6. PR: Saya berusaha itu. Saya merasa...yah, apa sih dalam arti pangkat dan jabatan, aaa menghabiskan energi terlalu banyak membicarakan tentang
7. AN: Masa lalu.
8. PR: dia begini, dia begitu. Ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah.
9. AN: Ini yang ngomong ketua HKTI.
10. PR: Iya.
11. AN: Tertawa.
12. PR: Benar. Iya kan? Rakyat kita susah.
13. AN: Ya.
14. PR: Cari pekerjaan susah. Guru-guru, tanya gajinya mereka gimana. Ya?
15. AN: Wajahnya aja sudah kelihatan susah.
16. (audiens tertawa)
17. PR: Ini, ini...kita yaa, saya anggap serius. Saya anggap serius. Bukan. Jadi, kalau saya pelajari, negara-negara yang ekonominya maju, itu membutuhkan waktu...yang lama, waktu aman dan sejuk yang lama.
18. AN: Untuk? ...membangun.
19. PR: Supaya ekonomi jalan. [...] tidak mungkin orang dagang, orang jualan kalau dia dirampok. Tidak mungkin orang berangkat ke pasar kalau di jalan dia akan di...di...bunuh atau tokonya dibakar.
20. AN: Betul. Mungkin dasar dari idealisme inilah yang membuat Anda mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun lalu. Nah, yang menarik adalah, dalam acara makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi di rumahnya beberapa waktu yang lalu, Pak Habibi mengatakan, "Pak Prabowo itu pernah datang ke Jerman menemui saya untuk meminta maaf atas peristiwa Mei 1998." Apa betul begitu?

¹ Andi F. Noya

² Prabowo

21. PR : (berpeluh) Sekali lagi, aaa dengan segala hormat, saya tidak datang untuk minta maaf, dan saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak merasa bersalah.
22. AN : Jadi, Anda mengunjungi dalam konteks apa?
23. PR : Dalam konteks *so one* kepada seorang yang dituakan.
24. AN : Nah, di dalam pembicaraan itu
25. PR : Jadi, itu lagi ya. Kadang ☺
26. AN : Di dalam pembicaraan itu Pak Habibie mengatakan Anda meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai presiden
27. PR : Saya...
28. AN : dan dia melarang, apa betul?
29. PR : O, Tidak. Saya mengatakan bahwa saya aaa dicalonkan dan akan maju dalam konvensi Golkar. Baru dalam tahap ikut dalam konvensi Golkar.
30. AN : Konvensi. Ya.
31. PR : Ya.
32. AN : Itu mungkin ,anunya, kronologisnya.
33. PR : Ya.
34. AN : Pak Habibie melarang karena dia menganggap belum waktunya, pencitraan Anda belum cukup bagus, dukungan belum cukup kuat. Karena itu dibilang, "Belum waktunya." Apa betul?
35. PR : Tidak spesifik seperti itu. Tapi memang saya tanggap bahwa beliau aaa tidak mendukung saya maju. Benar itu.
36. AN : Baik. (mengarahkan pandangan ke audiens) Ada pertanyaan?
37. RM³ : Assalamualaikum, wr.wb. saya Rima (RM) dari univesitas Al-Azhar Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibie, terlebih lagi tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak. Terima kasih.
38. AN : Silakan dijawab.
39. PR : Terima kasih. Saya tidak aaa saya tidak mau dendam. Ya.... Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya. Dan saya kira, semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan ya. Saya... ini...masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah. Karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan a be se de yang saya merasa tidak. Saya...seperti tadi juga saya di Hamburg tidak merasa minta maaf. Benar-benar ini bulan suci Ramadhan. Demi Allah saya tidak pernah minta maaf. Karena saya merasa tidak bersalah. Saya datang *so one*. Ya, jadi adik kita...saya tidak ada dendam sama sekali. Saya tidak pernah merasa, "Presiden macam apa Anda?" Orang-orang yang saya hormati. Ya. Beliau sering mengatakan, "Prabowo saya punya anak: Ilham dan Tarikh. Anda anak saya ketiga." Demikian, dekatnya saya sama beliau.
40. AN : Tapi, waktu itu Anda kan masih muda, 47 tahun. Dengan *power* yang luar biasa kan bisa khilaf? Masih muda.
41. (Audiens tertawa)
42. PR : Tidaklah. Masa kepada orang yang kita hormati kita akan bentak seperti itu, Bung Andi. Itu namanya kurang ajar, ya toh?
43. AN : (tertawa) Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa tadi?
44. DN⁴: (mengangkat tangan)
45. AN : Ya. Silakan.
46. DN : (Berdiri) Selamat malam. Saya Daniel Hamzah (DN), saya mau bertanya, Pak. Dengan terbitnya buku aaa *Detik-Detik yang Menentukan* ini, setelah itu apakah Pak Prabowo masih mempunyai ambisi untuk menjadi Presiden?
47. AN : Masih ingin menjadi Presiden?
48. DN : Ya.
49. PR : Tadi saya katakan ya, saya sudah berkecimpung, saya berusaha
50. AN : Masih muda lho. Ingat ini masih 55 tahun. Jangan lupa itu.
51. PR : Saya...saya merasa kok kurang pande ya.
52. AN : (tertawa)

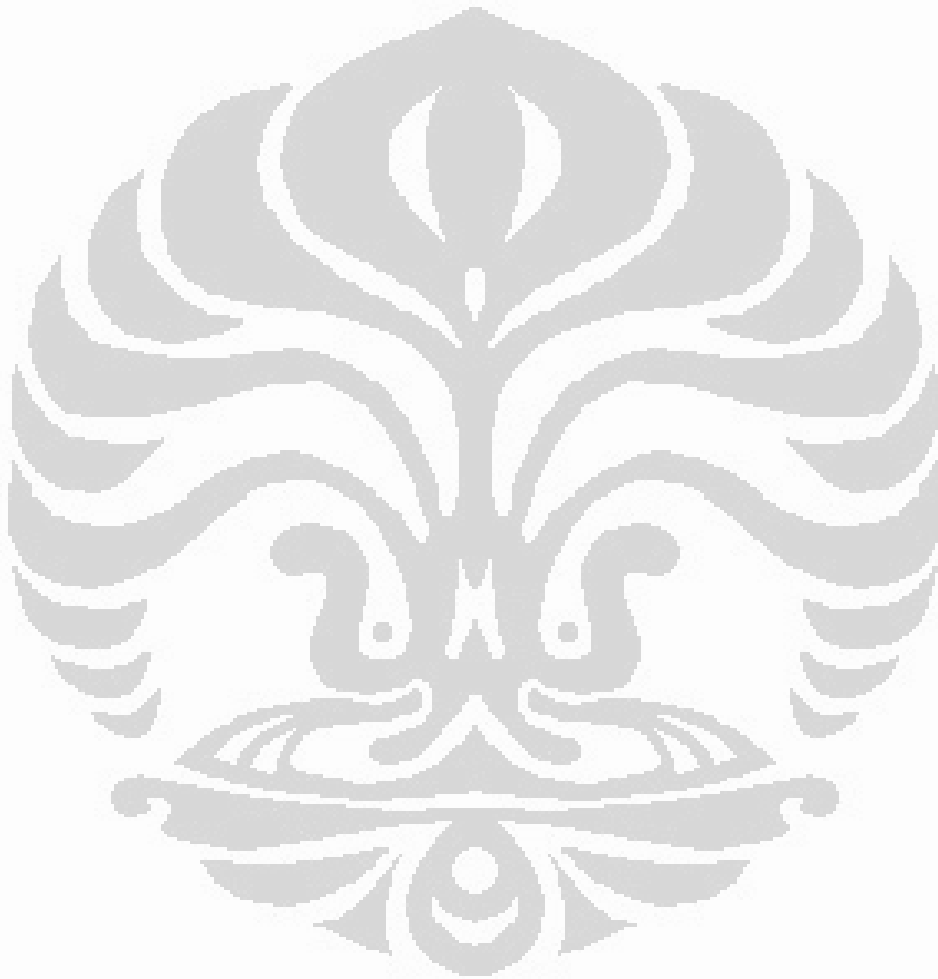
³ Rima

⁴ Daniel

53. PR : Yang naif saya. Jadi, bukan...(tertawa). Jadi saya kira banyak lain yang lebih pantas.
54. AN : Jadi, perlu saya tegaskan 2009 seorang Prabowo Subianto tidak akan mencalonkan diri lagi atau ikut dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia.
55. PR : aaa begini ya, saya dididik sebagai militer, ya. Jadi, pendidikan saya militer, latar belakang militer. Kita dididik untuk selalu objektif dan rasional, ya. Kita kan harus hitung. Istilahnya kita harus lihat potongan kita cocok nggak, ya? Kayaknya...
56. AN : Cocok. Ternyata cocok (tertawa)
57. PR : Kayaknya nggak pantas, gitu. (tertawa)
58. (semua tertawa)
59. PR : Ya, saya kira gitu. Ya jadi, dan nanti 2009 saya umurnya 58 tahun, 59. Saya kira harus ada pemimpin. Kalau SBY berhasil, saya kira SBY akan maju lagi. *In come back* selalu akan kuat dan sekarang di tangan beliaulah. Kalau dia berbuat banyak sekarang untuk aaa mengatasi krisis ekonomi, saya kira rakyat juga akan beri kesempatan beliau lanjut.
60. AN : Baik. Ada pertanyaan berikut lagi?
61. SR⁵: (mengajukan diri)
62. AN : Ya. Silakan.
63. SR : Nama saya Syahrul dari universitas Prostar Mustanur Agama. Aaaa, setelah Anda gagal dalam konvensi Golkar, partai Golkar yang lalu, sekarang Anda ketua umum HKTI. Menurut alibi, bahwa ...alibi ini...kecenderungan, bahwa dalam politik itu HKTI ini adalah sebagai kendaraan bahwa untuk menjadi presiden atau yang lain bisa menguasai keadaan, sehingga....
64. AN : Sehingga bahwa HKTI ini hanya sebagai kendaraan politik Andalalah. Kira-kira begitu.
65. SR : kendaraan politik. Apa betul atau sebagai politik belas kasihan aja? Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.
66. AN : (tertawa)
67. PR : Aaa, Iya. Memang banyak anggapan seperti itu ya. Bahwa di Indonesia ini kan selalu aaa...(sambil melihat AN)
68. AN : Curigaaa bawaanya.
69. PR : Slalu curiga gitu ya. (tertawa) Kalau saya ber...ber ber balik. Saya selalu.... Mungkin itu yang saya katakan, saya mungkin tidak cocok.
70. AN : Naif.
71. PR : Saya naif. Saya selalu ambil yang positifnya. Aaaa, jadi kita sepakat ya, di antara pemimpin-pemimpin HKTI sekarang debat saya bahwa ini adalah suatu aaa panggilan suci. Ini adalah kehormatan. Saya sebagai mantan prajurit saya masih merasa mengabdikan, masih menjalankan aaa pembelaan terhadap negara. Karena apa? Karena bagi saya, keyakinan saya dari dulu sekian puluh tahun aaa negara yang merdeka itu, tidak merdeka kalau tidak berdaulat dengan pangannya sendiri. Kalau kita tergantung sama negara lain, dalam soal pangan, berarti kita aaa tidak merdeka. Aaa, saya merasa, itu juga kenapa saya maju 2004 ya, saya merasa waktu itu aaa masalah ini masalah ekonomi kerakyatan kurang menjadi wacana tokoh-tokoh.
72. AN : Baik Pak Prabowo. Terima kasih banyak.
73. PR : Terima kasih.
74. AN : Tapi di ujung ini saya ingin kasih kesempatan Anda untuk...ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibie. Kira-kira, *ending*-nya macam apa yang Anda inginkan?
75. PR : Sebetulnya, ya, aaa budaya kita, ya, budaya yang apa, ya, budaya yang...mengutamakan kekeluargaan, musyawarah, ya. Aaa, saya menginginkan bahwa saya diterima beliau dan kita menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan baik. Dan saya kira setiap penulisan kan secara ilmiah bisa saja ada sesuatu yang tidak akurat, atau sesuatu yang.... Mungkin beliau merasa seperti itu, tapi tidak bisa...tidak bisa dibuktikan. Saya merasa tidak cocok. Jadi harus ada...harus ada...mengalah kalau menurut saya dari semua pihak. Saya berharap itu sebetulnya.
76. AN : Anda sayang nggak sama Pak Habibie?

⁵ Syahrul

77. PR : Saya, tetap hormat sama beliau.
78. AN : Sayang nggak?
79. (Audiens tertawa)
80. PR : ini...(tertawa) kadang-kadang bingung. Iya toh?
81. AN : Baik. Hormat itu mungkin tinggi sekali nilainya, ya.
82. PR : Ya.
83. AN : Dengan itu, terima kasih Pak Prabowo sudah tampil di acara Kick Andy...
84. PR : Ya, terima kasih.
85. AN : untuk menjawab beberapa hal yang memang perlu diluruskan dalam sejarah kita.
86. PR : Terima kasih.
87. AN : Dan terima kasih pada Anda semua yang ada di sini...



KA080215

Judul/Topik : Bersaksi di Tengah Badai¹
 Tokoh utama : Wiranto (WR)
 Nama Acara : Kick Andy
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 15 Februari 2008
 Kode Induk Data : KA080215, 01--n

Sesi 1

1. AN²: Ya. Yang menarik jug Pak Wiranto.
2. WR³: Ya.
3. AN : Soal inpres.
4. WR: O, ya.
5. AN : Inpres Nomor 16 tahun 98.
6. WR: Mmm.
7. AN : Ini kan semacam, orang menyebutnya semacam supersemar
8. WR: Ya.
9. AN : karena di situ kekuasaan sepenuhnya diberikan kepada Anda oleh Pak Harto. Dan banyak orang menyatakan kalau Anda menggunakan itu untuk tanda kutip mengambil alih kekuasaan,
10. WR: Ya.
11. AN : maka mungkin sekarang saya sedang berhadapan seorang presiden.
12. WR: Mmm, ya.
13. AN : Tapi, nyatanya Anda tidak mengambil alih kekuasaan itu.
14. WR: Ya.
15. AN : Apa yang ada dalam pikiran Anda waktu itu?
16. WR: A..., memang betul bahwa saya menerima suatu instruksi presiden nomor a... 16, ya, tahun 98 itu merupakan a... suatu penjabaran dari ketetapan MPR nomor 5 sembilan lapan juga, ya,
17. AN : Ya.
18. WR: Yang memberikan mandat begitu besar kepada saya. Ada tiga poin waktu itu, atau dua poin yang pentingnya saya.. saya berikan ya, bahwa saya berhak untuk menentukan kebijakan tingkat nasional. Dan yang kedua, para menteri dan pejabat pusat daerah harus membantu tugas-tugas saya.
19. AN : Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak bagaimana ucapan Pak Habibie dalam wawancara yang lalu.
20. WR: Ya.
21. (ucapan dan wawancara tersebut, Habibie menyimpulkan bahwa Wiranto seorang Jendral yang baik dan jujur. Namun tidak ditransliterasikan di sini.)
22. AN : Kita nggak usut apakah jenderal ini orang baik atau tidak.
23. (Audiens tertawa)
24. AN : Yang kita mau usut adalah
25. WR: Ya.
26. AN : kenapa Anda perlihatkan itu pada Pak Habibie waktu itu?
27. WR: Yang...
28. AN : Apa persoalannya?

¹ Diambil hanya rekaman 1 dan rekaman 4

² Andi F. Noya

³ Wiranto

29. WR : Memang harus begitu, ya. Saya menerima inpres itu kan tanggal 20 malam ya. Dua puluh malam. Nah, kemudian, a... saya jelas membaca inpres itu dan saya analisis, kemudian saya bawa ke markas besar ABRI di Jalan Merdeka Barat, saya bicara dengan staf, waktu itu yang hadir ada Pak Palurosi sebagai sebagai Kasum ABRI. Ada Pak SBY waktu itu pangkat masih letnan jenderal sebagai Kasospol ABRI begitu, saya tunjukkan dan saya sampaikan bahwa saya baru menerima inpres itu dari Pak Harto. Ya. Setelah mereka membaca bahkan Pak SBY kemudian menanyakan kepada saya, "Apakah Panglima akan mengambil alih kekuasaan?" saya katakan, "Tidak." Mari kita antarkan proses pergantian pemerintahan secara konstitusional. Tanggal 21 pagi, saya kan harus menunjukkan kepada calon presiden yang saat itu masih wakil presiden. Sebab kalau tidak, ya, nanti bisa terjadi *misunderstanding* atau katakanlah misinformasi yang nanti bisa membahayakan situasi saat itu. Dan waktu Pak Harto memberikan kepada saya, beliau mengatakan, "Ini saya berikan inpres. Ya. Digunakan boleh, tidak, ya tidak apa-apa."
30. AN : "Digunakan boleh, tidak, ya, tidak apa-apa."
31. WR : Iya..., ya.
32. AN : Itu kalimat persisnya seperti itu ya?
33. WR : Ya (mengangguk), ya, seingat saya kan, lapan tahun lalu, ya.
34. AN : Ya.
35. WR : Tapi gitulah kira-kira.
36. AN : Ya.
37. WR : Artinya, saya diberikan kebebasan untuk menggunakan dan tidak menggunakan. Memang itu tidak lazim Bung Andi di dalam kemiliteran. Kemiliteran itu kalau memberikan perintah selalu mengatakan, "Ini saya kasih perintah, laksanakan!" Ya, bawahan ngatakan, "Siap. Laksanakan." kan begitu?
38. AN : Ya. Kontroversi lain menyebutkan justru Anda ini sebenarnya pengecut.
39. WR : Ya.
40. AN : Jadi, kenapa pengecut?
41. WR : Ya.
42. AN : Karena sebenarnya Pak Harto memberikan mandat Anda untuk mengambil alih kekuasaan dan ujung-ujungnya agar Anda menjadi presiden.
43. WR : Oh, gitu ya?
44. AN : Itu dugaannya.
45. WR : Itu siapa yang dugaan?
46. (semua tertawa)
47. AN : Mengikuti jejak Pak Harto karena ada ... ada cerita tentang Supersemar.
48. WR : Ya.
49. AN : Dan Anda, Pak Harto memberikan jalan kepada Anda.
50. WR : Baik. Baik.
51. AN : Ternyata Wiranto ini
52. WR : Ya.
53. AN : Penakut.
54. WR : Ya.
55. AN : Gak berani.
56. WR : Ya. Nah, coba saya sekarang mencoba untuk menjelaskan secara lebih ditel ya. Pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil saat itu, ya. Kalau memang saya menggunakan surat itu, dalam arti menggunakan secara keras, ya. Saya umumkan darurat militer, saya ambil alih kekuasaan, seperti militer di Thailand, ya, kemudian saya bentuk pemerintahan militer sementara, ya, kemudian a... pemilu dipercepat untuk membangun demokrasi baru, begitu, maka yang terjadi: pertama, Bung Andi, pasti pemerintahan yang saya bentuk ini, ya, dicap sebagai kepanjangan dari pemerintahan orde baru, yang waktu itu, ya, berhadapan langsung dengan a... gerakan prodemokrasi, gerakan pembaharuan, gerakan reformasi. Artinya apa? Saya akan memperhadapkan tentara dengan rakyat. Siap gak menghadapi itu?
57. AN : Asal bukan saya aja.
58. (Semua tertawa)
59. WR : Iya, kan? Saya hanya ingin supaya tidak dicap pengecut. Tetapi, mengorbankan nyawa begitu banyak hanya sekadar, ya, memenuhi ambisi militer. Mengapa saya

katakan memenuhi ambisi militer? Sebab, ya, sebab. Sebelum kejadian Pak Harto memberikan surat perintah itu kepada saya, ada paling tidak dua *event*, ya, yang mengisyaratkan bahwa a... beliau juga tidak menghendaki tentara mempertahankan kekuasaan orde baru dengan senjata. Misalnya, pernyataan beliau di Kairo. Dia mengatakan bahwa, "Saya tidak akan a... mempertahankan kekuasaan saya dengan kekuatan senjata." Di Kairo.

60. AN : Ya.
61. WR : Ya. Pada saat beliau dialog dengan saya sebelum pemberian inpres itu, ya, di kediaman beliau, pada saat a... pimpinan DPR/MPR RI sudah menyatakan a... presiden mundur saja, ya. Kemudian, a... komite reformasi waktu akan dibentuk para tokoh-tokohnya tidak bersedia, ya, kemudian empat belas menteri tanda tangan untuk tidak siap kalau kabinet di-*reshuffle*,
62. AN : Ya.
63. WR : ya, saya melapor beliau bahwa, "Pak, secara politis dukungan kepada Presiden sudah tidak bisa lagi...diharapkan," Pada hal presiden itu ada karena dukungan politik, "tetapi ABRI," saya katakan begitu, "akan tetap a... mengamankan pemerintahan ini--yang masih secara legal mendapat mandat dari majelis tertinggi negara ini, MPR." Namun, saya katakan bahwa tentu akan ada konflik dan korban akan berjatuh.
64. AN : Kita *break* dulu, Pak Wiranto ya.
65. WR : Ya.

Sesi 2

Sesi ini diawali dengan profil Wiranto (tidak ditransliterasikan).

66. AN : Ya. Itu tadi profil seorang anak guru yang kemudian jadi Jenderal pada tingkat yang paling tinggi dalam komando Tentara Nasional Indonesia, ya.
67. WR : Ya.
68. AN : Dan orang semacam inilah yang kemudian dituduh mendalangi kerusuhan sembilan belas sembilan puluh delapan. Kira-kira begitu kontroversinya.
69. WR : Ya.
70. AN : Nah Pak Wiranto, dugaan kuat itu karena Anda pada hari-hari keadaan gawat di Jakarta, itu membawa sejumlah pimpinan tentara.
71. WR : Ya.
72. AN : Untuk ke Malang, untuk satu acara yang dianggap tidak penting sehingga..."Oh, benar ini: Wiranto yang merekayasa." Bagaimana ini?
73. WR : Ya, Bung Andi, pertama: acara itu penting. Ya. Serah terima PPRC
74. AN : Pasukan...
75. WR : Pasukan Pemuko Reaksi Cepat, itu penting sekali.
76. AN : Apa pentingnya dibandingkan situasi di Jakarta yang gawat?
77. WR : Ya. Nanti saya jelaskan bahwa karena pentingnya saya hadir ke sana. Kemudian, saya tidak membawa a... para perwira yang menangani masalah operasi. Tidak. Jakarta dan sekitarnya dipertanggungjawabkan secara operasional kepada a... Kapolda Metro dan Pangdam Jaya, dan mereka tidak saya bawa.
78. AN : Jadi, dibidang kosong itu? Tak benar itu ya.
79. WR : Nda. Nda bisa. Di Jakarta, itu ada Pangdam Jaya dan Kapolda Metro. Campur tangan saya tidak ada. Nah, campur tangan saya hanya saya lakukan lewat...namanya rapat luar biasa di Garnisud tanggal 14 malam. Setelah saya dari Malang,
80. AN : Ya.
81. WR : ngeliat situasi, rapat di sana saya tanya kepada Pangdam dan Kapolda Metro, "Apakah Anda masih sanggup untuk mengendalikan operasi di Jakarta? Kalau tidak, saya akan ambil alih."
82. AN : Anda ngomong ke siapa itu?
83. WR : Kepada Pak Syafrli waktu itu sebagai Pangdam,
84. AN : Sebagai pangdam.
85. WR : alamarhum

86. AN : Kapolda
87. WR : Mubaminata ya, sebagai Kapolda Metro. Beliau mengatakan, keduanya mengatakan, "Masih siap, Pak.", "Kebutuhanmu apa?", "Tambahkan pasukan." Malam itu juga saya datangkan pasukan dari Jawa Timur, kostrad maupun marinir untuk memperkuat Jakarta.
88. AN : Mmmm
89. WR : Itu keputusan berat, Bung Andi.
90. AN : Di sini, di dalam buku Anda, juga dikutip, dalam buku *Bersaksi di Tengah Badai*,
91. WR : Ya.
92. AN : disebutkan mahasiswa didukung penuh baik material maupun moral oleh kelas menengah dan elit.
93. WR : Ya.
94. AN : Namun mahasiswa tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan restu pasif dari pimpinan ABRI
95. WR : Ya.
96. AN : terutama Wiranto. Artinya ada andil Anda di situ.
97. WR : Itu tulisan dari seorang ahli, ya!
98. AN : Ya.
99. WR : Dia melihat keadaan keseluruhan mempelajari langkah-langkah saya. Saya tidak melakukan a... seperti yang dahulu kita lakukan, yakni ABRI masuk kampus. Kita duduki saja seluruh ABRI di wilayah Indonesia. Nah, tahun 70-an bisa dilakukan seperti itu. Tahun 90-an sudah beda masalahnya. Ya. Oleh karena itu, ya, saya hanya ingin mengatakan, "Oke, silakan," ya, proses perubahan lakukan saja, tapi konstitusional, gradual, dan konseptual, jangan keos.
100. AN : Ada nggak perasaan Pak Harto merasa Anda mengkhianati dia?
101. WR : Ya... sampai sekarang masih bergaul. Kalau mengkhianati kan gak ketemu lagi saya.
102. AN : (tertawa) Jadi hubungan masih baik ya.
103. WR : Ya.
104. AN : Ngomong-ngomong, boleh lihat nggak inpres nomor 16 yang diberikan kepada Anda, asli atau tidak?
105. WR : Ya kebetulan memang saya bawa tadi supaya Anda yakin bahwa itu ada.
106. AN : (tertawa)
107. WR : (Tertawa)
108. AN : Sejak Supersemar kan kita mulai curiga.
109. WR : Nah ini Bung Andi, silakan (bundelan diserahkan)
110. AN : Nah, ini Anda saksi mata hari ini untuk melihat ...a...a (menerima bundelan) inpres nomor 16 yang memberikan mandat
111. WR : Ya.
112. AN : kekuasaan penuh pada Pak Wiranto ya, Jenderal Wiranto waktu itu. Tapi, ngomong-ngomong ini Anda simpan di mana?
113. WR : Yaa, di rumah aja.
114. AN : Di rumah (tertawa) Oh, ya ini ya? Jadi, nanti kita kopi supaya kalau hilang atau dipalsukan kita bisa punya salinannya, kira-kira begitu ya?
115. WR : (tertawa)
116. AN : (tertawa)
117. (Audiens bertepuk tangan)
118. WR : Ini saya kira ya, ini bukan bukan milik saya, tapi milik sejarah.
119. AN : Milik bangsa ya?
120. WR : Milik bangsa, ya.
121. AN : Baik. Pak Wiranto ini akhirnya buku yang harus kita serahkan kepada yang hadir di sini.
122. (audiens bertepuk tangan)

* * *

AKIM080611

Judul/Topik : Survei Selebriti dalam Politik
 Tokoh utama : Deddi Mizwar (Artis)
 Nama Acara : Apa Kabar Indonesia Malam
 Stasiun televisi : TV One
 Tanggal, bulan, dan tahun : 11 Juni 2008
 Kode Induk Data : AKIM080611,01-n

Sesi 1

1. TT¹ : Assalamualaikum, Selamat malam Bang.
2. DM² : Wa'alaikumsalam wr.wb
3. TT : Biasa kita melihat iklannya ini bukan iklan politik, a..., iklan kebangkitan nasional bukan iklan politik, gitu ya? Bukan
4. DM : ya,
5. TT : akan terjun
6. DM : ya, nggak, nggak...
7. (tertawa)
8. MM : tapi dalam arti luas, gitu?
9. TT : Tapi kalau melihat saya malah
10. DM : Iya, mungkin iklan politik, tapi bukan mewakili... golongan atau partai tertentu, tapi justru malah kepada semua
11. TT : dan mewakili semua
12. DM : mewakili semua, untuk semua, dari semua.
13. (tertawa)
14. TT : Oke...; Sekarang saya akan dulu ke Pak Kuswar. Pak Kuswar, sebetulnya, apa sih pandangan masyarakat kalau mereka di suruh memilih dan tidak memilih selebriti.
15. KS³ : Oke, jadi pada dasarnya kalau hasil dari survei yang kami lakukan itu, sebetulnya, tanggapan masyarakat terhadap selebriti yang ikut mencalonkan itu, sebenarnya cukup positif. Jadi, kalau dilihat dari hasil itu 37 persen itu menyatakan akan memilih apabila ada selebriti yang mencalonkan dirinya. Nah, sedangkan yang tidak akan memilih itu sekitar hanya 33 persen.
16. TT : Jadi, kalau sekarang misalnya Bang Dedi maju, kemungkinan besar lebih banyak orang yang milih, begitu?
17. KS : a... betul
18. TT : Alasannya kenapa mereka mau memilih selebriti?
19. KS : a... begini. Jadi, mereka pun yang mengatakan bahwa mereka akan memilih a... figur selebriti itu juga bukan dengan semua selebriti yang akan tampil kemudian mereka akan pilih, tapi ada syaratnya.
20. TT : ooh..
21. KS : jadi,
22. TT : Iya, asal...
23. KS : ya betul, asal
24. TT : Asalnya, apa itu?
25. KS : Asalnya itu, mereka mengatakan bahwa si selebriti itu juga harus mempunyai kemampuan, ya, terutama dalam politik dan dia juga memiliki kualitas sebagai

¹ Tina Talisa

² Dedi Miswar

³ Kuswar

- pemimpin. Ya, jadi mereka juga melihat apakah selebriti ini menunjukkan hal-hal tersebut, baru mereka akan memilih
26. TT : Yang tidak mau, rata-rata kenapa, sih?
27. KS : Yang tidak mau, karena gini. Ada, ini persepsi masyarakat ya, Mba Tina, ya? Jadi, mereka itu menyatakan bahwa selebriti itu pertama, kayaknya politik itu bukan bidang mereka, gitu...atau jauh ya dari bidangnya, selebriti dengan politik. Kemudian juga ada persepsi bahwa a..., selebriti itu pintar akting, ataupun yaa mungkin kasarnya, agak jual tampang.
28. TT : Oh, jangan-jangan, pas kampanye sambil akting gitu, bang.
29. KS : a.....
30. TT : Jadi, orang satu lagi akting atau bukan
31. (tertawa kecil)
32. DM : Itu harus ganteng, harus cantik, ya saya gak kepilih pasti.
33. (tertawa)
34. MM: Itu relatif, Pak. (tertawa) Siapa bilang Bang Dedi gak ganteng
35. DM : Sudah tua, tua..!!
36. (tertawa)
37. TT : Sebentar Pak. Tapi kalau jago akting
38. DM : mmm?
39. TT : Jago-jago akting, jangan-jangan nanti orang tidak bisa membedakan Bang Dedi yang sedang akting atau (...) betul-betul menyuarakan hati dari suara rakyat.
40. DM : Atau mungkin banyak yang terpengaruh oleh tampilan seseorang, seperti barang kali, kalau saya misalkan yang kelihatan seperti arif, bijaksana, ya kan?
41. TT : mmm...
42. DM : walaupun kadang-kadang suka kacau juga kan?
43. (tertawa)
44. DM : dan tokoh-tokoh kacau selagi manusia kan gitu?
45. TT : ya
46. DM : atau tiba-tiba di belakang misalnya Nagabonar, bicara tentang kebangsaan, nasionalism,
47. TT : mmm
48. DM : Ya, kan? Kalau cenderung mungkin saya tadi sudah mau katakan bicara pada moral, bahwa masyarakat merindukan moralitas dari pemimpinnya, kemudian masyarakat merindukan tentang nasionalisme, komitmen kepada negerinya-pada rakyatnya saya kira cenderung baik melihat itu. Tapi kalau kita semata-mata tertipu dari tampilan tokoh-tokoh yang sering diperankan, saya kira juga harus pakai titik-titik.
49. TT : hmhhh...
50. DM : tentang kemampuan yang Mas Kusmar tadi katakan.
51. TT : Oke. Itu a... pilihan ada yang mau dan tidak. Dan ternyata pilihannya ya, setengah-setengahlah. Tidak terlalu beda banyak antara yang mau memilih dan tidak memilih selebriti. Dan berikutnya ini, Mas. Hasil temuannya, sebetulnya siapa sih yang mau memilih selebriti?
52. KS : a...
53. TT : Apakah misalnya, seperti Bang Dedy semua?
54. (tertawa)
55. KS : Sebetulnya, kalau kita lihat dari demografi, ya, dari pendidikan, kemudian dari usia itu ya, pada umumnya ya, jadi kalau kita lihat pembagian usia itu, *range* usianya antara 30 sampai 50 tahun, itu yang terbesar.
56. TT : Berarti rata-rata usia-usia
57. KS : Usia produktif.
58. TT : Oke
59. KS : kemudian
60. TT : saya belum tiga puluh soalnya.
61. KS : Oh, gitu...
62. (tertawa)
63. TT : Jadi saya bilang usia-usia se..
64. MM: tidak bisa memilih.

65. KS : waduh (tertawa)
 66. TT : tidak memilih
 67. KS : Tidak memilih.
 68. MM: Tapi sebetulnya fenomena...
 69. DM: Tidak memilih, cuma merindukan
 70. (tertawa)
 71. TT : Percaya dirinya penting ini buat jadi pemimpin ini.
 72. KS : a..., kalau mengenai fenomena mungkin ada hubungannya dengan ini ada yang tadi yang memilih
 73. TT : mmm
 74. KS : memilih selebriti syaratnya ada kemampuan ada kualitas *leadership*, tapi ia juga mengatakan bahwa mereka itu mengatakan bahwa selebriti juga mempunyai a... imej yang positif, ya,
 75. TT : mmm
 76. KS : karena mereka itu selebriti yang pertama, mereka itu sudah menjadi figur publik, ya, sudah dikenal oleh banyak orang. Kemudian, mereka menyatakan mereka adalah wajah-wajah yang segar. Segar di sini dikatakan bahwa ada kecenderungan, ini bukan dari hasil survei yang sekarang aja. Ada beberapa survei yang kami lakukan, beberap... apa akhir-akhir ini menyatakan bahwa ada kecenderungan masyarakat itu mulai jenuh dengan...
 77. TT : Jadi, memilih figur-figur baru saja.
 78. KS : Iya..
 79. MM: hampir frustrasi dengan aktor-aktor yang ada, ya?
 80. KS : Yaa.. dengan janji-janji, gitu.
 81. TT : Baik. Sekarang, tentu saya ingin...
 82. DM: Mencari aktor-aktor yang sesungguhnya.
 83. (tertawa)
 84. TT : Saya juga ingin tau sebetulnya juga pemirsa akan tau nanti, sebetulnya, Bang Dedy ini ada di posisi mana di antara selebriti dalam kepercayaan publik terhadap dirinya dalam politik. Nah sekarang saya akan bacakan, kabar sebetulnya. Tahan dulu informasinya Pak Kusmar. Kita akan melihat aksi unjuk rasa di Maluku utara (bukan bagian dari data)

Sesi 2

85. TT : Saya Tina Talisa kembali bersama Anda dalam "Apa Kabar Indonesia Malam". Sekarang Pak Kusmar, kalau ditanyakan kepada responden se-Jabodetabek dalam survei ini, siapakah selebriti yang paling diinginkan untuk terjun dalam dunia politik?
 86. KS : oke
 87. TT : Jawabannya adala...ah...(tertawa)
 88. KS : Ya. Jadi, hasil dari survei yang kami lakukan, untuk ketika kami menanyakan siapa sih yang...a... figur selebriti yang menjadi favorit mereka, nomor satu itu adalah Bang Dedi Miswar.
 89. TT : boleh tepuk tangan dong...! (bertepuk tangan dan tertawa)
 90. DM: Musti latihan nih. (intermeso)
 91. TT : Tanggapannya dong, Bang Dedy
 92. DM: Kenapa?
 93. TT : Sebagai orang yang paling dipilih oleh publik.
 94. DM: Setelah itu, setelah itu siapa lagi (melihat poling) ooh
 95. TT : Setelah Dedi Miswar,
 96. DM: oh, oh...
 97. TT : Dede Yusuf, ada Marisa Haque
 98. DM: a... Saya lihat dari, dari a... berbagai apa nama ya, lima atau enam nama tadi...
 99. TT : mmm...?
 100. DM: mereka adalah nama orang-orang, kebanyakan ya? Orang-orang yang sudah terjun ke dunia politik
 101. KS : ya.
 102. DM: atau sudah mengikuti pilkada,

103. TT : ya
104. DM : nah, saya nggak melakukan itu. Saya malah bertanya, “Kenapa masyarakat percaya dengan...melalui poling tadi? Seolah-olah memilih saya. Seolah-olah.
105. TT : Atau, jangan-jangan karena peran Nagabonar ya?
106. DM : Saya nggak ngerti. Mungkin persepsi tadi yang terbentuk dari karakter yang saya mainkan. Nah, tadi saya katakan lagi, kalau memang karena kerinduan kepada moralitas pemimpin dari masyarakat merindukan itu, kemudian kerinduan tentang bagaimana menyatukan secara utuh NKRI ini, saya kira itu cita-cita masyarakat yang paling baik.
107. TT : Wah, ini kayaknya udah orasinya capres cawapres ini
108. KS : (tertawa)
109. DM : Ya kan, Tapi ini hal yang positif
110. TT : Tapi sepertinya begini Bang Dedy
111. DM : Tapi kalau dia terjebak pada kegantengan saya, za...a... (tampak berguyon)
112. (semua tertawa)
113. TT : Bang Dedy. Tapi pertanyaan saya adalah sebetulnya Bang Dedy, mau atau tidak mau untuk terjun dan akhirnya maju dalam kancah politik?
114. DM : Ada dikatakan, kalau seseorang menginginkan sebuah/sesuatu jabatan, sebaiknya jangan pilih orang itu.
115. TT : Tapi pilihlah yang tidak mau.
116. DM : Nah, makanya calon pemimpin hadis, calon pemimpin itu harus bertanya dulu pada dirinya sendiri, kalau saya memang dicalonkan, lantas jadi saya harus maju, karena syahwat terhadap kekuasaan, atau karena memang ingin mengemban amanah dari rakyat yang menginginkan dia jadi pemimpin? Sebab, beberapa kalifah menangis setelah diangkat, “Kenapa saya harus jadi pemimpin? Ini sebuah amanah yang sangat besar.” Karena seluruh tanggung jawab ada dipundaknya dan itu dia akan dihisap. Dan dia akan diperiksa, dia akan mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Berat. Tapi kalau itu didorong karena sebuah keinginan yang murni karena sebuah pengabdian, jabatan sebagai sarana ibadah kepada Allah, melalui rakyatnya, saya kira itu luar biasa.
117. TT : Tapi Anda tertarik nggak sih?
118. KS : Kembali ke pertanyaanya...mau apa nggak?
119. TT : Ya, mau apa nggak, ini berbelit-belit, udah dipolling...
120. DM : Untuk tanya mau, saya harus bercuriga pada kemauan saya.
121. TT : Apa mau karena syahwat atau murni untuk rakyat?
122. DM : ada a... makanya ada istiqarah
123. TT : Oh, baik. Bagus lho sebetulnya Bang Dedi ini kalau buat masyarakat diinginkan untuk posisi apa, misalnya untuk bupatikah, calon wakil bupatikah, ternyata adalah untuk wakil presiden kan.
124. KS : Ya, kalau dari survei kami itu memang Bang Dedi dicalonkan untuk menjadi dipersepsikan cocok menjadi wakil presiden.
125. DM : Wah, saya keberatan.
126. KS : (tertawa)
127. TT : Maunya calon presiden.
128. DM : A..., (=yaa sambil berguyon)
129. (tertawa)
130. DM : Astagfirullah.
131. KS : Tapi pertanyaannya, apakah, adakah kekuatan politik yang pernah mendatangi, sudah ada, belum?
132. DM : Ya..., saya kira a... saat ini, karena saya tidak terjun di politik, yah, secara langsung, teman-teman saya orang politik banyak, ya kan? Kemudian, yang saya juga bertanya saya tidak terjun di politik, tapi masyarakat memilih, sementara sistem kita harus memiliki kendaraan politik, jangan-jangan ini juga semangat calon independen.
133. TT : mmm...mmm....
134. DM : Jangan-jangan ini juga semangat dari masyarakat terhadap calon-calon independen.
135. TT : Tapi masalahnya
136. DM : atas mungkin ketidakpercayaan pada kendaraan-kendaraan politik yang ada
137. TT : untuk pilpres belum bisa. Kalau pilkada udah boleh independen.

138. KS : (tertawa)
139. DM : a...
140. TT : Artinya gini, sekarang saya tanya, banyak junior Bang Dedi yang sudah pejabat begitu ya, di daerah. Ada komentarkah mengenai bagaimana kapabilitas mereka sebagai pejabat publik saat ini, yang berbeda dunia dengan selebriti di dunia amn seni.
141. DM : Buat saya adalah sekarang bagaimana sese... apa sekelompok masyarakat, sebagian masyarakat di daerah itu memilih dua orang itu tadi menjadi pemimpin. Persoalan adalah bagaimana cara kita membantu dia. Karena kita sudah komit menunjuk dia sebagai pemimpin. Bagaimana cara membantu agar program-programnya bisa berjalan [...] bukan mengkritisi dengan sinis
142. KS : Atau sekadar menunggu..
143. DM : Atau sekadar menunggu apa salahnya
144. TT : heehee. Oke baik.
145. DM : ini sebagian masyarakat. Jadi, pemimpin yang baik akan, akan bekerja dengan baik kalau juga masyarakatnya baik.
146. TT : Lagi-lagi ini seperti orasinya capres atau cawapres ini, kayaknya Bang Dedi ini
147. KS : (tertawa kecil)
148. DM : Jadi.., Jadi, itu kan? Waktu ditanya, kenapa, *why*, di zaman Anda kok masyarakat jadi amburadul begini, semua nggak karuan, lho. Dulu waktu saya jadi , waktu Nabi jadi kalifah menjadi pemimpin, rakyatnya seperti saya, patuh pada pimpinan. (tertawa, tapi tampak serius seperti khotbah)
149. TT : mmm...
150. MM: kembali kepada persoalannya,
151. TT : Terakhir
152. DM : gitu kan, ada dua kan?
153. TT : mmm, iya
154. DM : kita dan masyarakatnya
155. TT : Tapi, Mas Masyim
156. MM: Kembali ke pokok soalnya, kalau Anda menakar diri Anda sendiri, sebetulnya layak nggak sih?
157. DM : Saya kemarin mau ikut pemilihan wakil RT,
158. MM: mmm
159. DM : tapi nggak terpilih.
160. (tertawa)
161. TT : Oke, itu berarti...
162. DM : Karena apa? Masyarakat tetangga saya tau saya sibuk,
163. (tertawa)
164. DM : nggak bisa ngurus mereka
165. (Tertawa)
166. TT : tapi cocoknya cawapres kayaknya (tertawa). Terima kasih Bang Haji dan kita akan nantikan tahun depan, apakah Bang Haji Dedi ini akan tampil tiba-tiba sebagai wajah baru, yang penting ditawarkan kepada Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kusmar , Bang Haji Dedi sukses terus, dan Mas Masim terima kasih juga teman saya selama satu jam ini, dan esok kami akan kembali bersama Anda tentunya, saya Tina Talisa selamat malam, sampai jumpa.

* * *

TDD080701

Judul/Topik : Mencari Pemimpin Alternatif
 Tokoh utama : Sutiyoso atau Bang Yos (YS), Andi Mallarangeng (AM), Sutrisno Bachir (SB)
 Nama Acara : *To Day's Dialogue*
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 01 Juli 2008
 Kode Induk Data : TDD080701,01--n

Sesi 1

Bagian awal sesi ini sebagian tidak terekam karena lambatnya dukungan teknis.

1. MH¹: ...maupun Megawati. Kalau ada yang siap menantang Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk pilpres 2009, juga... masih juga nama-nama yang sudah a..., sering kita dengar. Di antaranya ada Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan juga Sutiyoso. Haruskah pilpres tahun 2009 diwarnai tokoh-tokoh lama? Tidak adakah tokoh alternatif pemimpin baru yang bisa menjadi calon presiden di tahun 2009? Inilah pemirsa yang kami angkat dalam *To Day's Dialogue* malam ini bersama saya Meutya Hafid (MH). Saat ini juga telah hadir kandidat presiden Sutiyoso. Selamat malam Bang Yos (YS),
2. YS²: Selamat malam.
3. MH: terima kasih sudah hadir.
4. YS: Ya (mengangguk)
5. MH: Juga ada direktur eksekutif LSI, Saiful Mujani (SM). Bung Saiful, terima kasih sudah hadir.
6. SM³: Halo Tia.
7. MH: Juru bicara kepresidenan, a..., sekaligus ketua DPP Partai Demokrat, Bung Andi Mallarangeng (AM). Terima kasih sudah hadir.
8. AM⁴: Malam.
9. MH: Selamat malam. Dan juga Anis Baswedan (AB), Rektor Paramadina. Bung Anis, terima kasih sudah hadir.
10. AB⁵: Selamat malam.
11. MH: Ya. Tentunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir (SB). Terima kasih juga sudah hadir, Mas Tris.
12. SB⁶: Hidup adalah perbuatan.
13. MH: (tertawa) Baik. Pemirsa sebelum kita mulai dialog ini, kita akan simak dulu jawaban dari Pak Amin Rais, Wiranto, dan Jusuf Kalla terkait dengan kesiapan mereka untuk menjadi calon presiden di tahun 2009 (ada pada transliterasi Meretas Jalan Reformasi dan tidak akan transliterasi lagi di sini). Juga kami tambahkan dengan pernyataan dari Ibu Megawati ketika mengatakan ia siap menjadi capres. Berikut petikannya.

Megawati:

¹ Meutya Hafid

² Bang Yos (Sutiyoso)

³ Saiful Mujani

⁴ Andi Mallarangeng

⁵ Anies Baswedan

⁶ Soetrisno Bachir

14. ... bismilaahir rahmanir rahim (tepek riuh para simpatisan) saya (diikuti teriakan histeris "Allahuakbar!!") Megawati Sukarno Putri bersedia dicalonkan (makin histeris) sebagai presiden dari (terpotong).
15. MH: Baik. Saya akan mengutip--Bang Yos saya ke Anda dulu--pernyataan Pak Wiranto, "Saya rasional saja: saya punya partai. Pemimpin tanpa dukungan partai politik atau a..., tanpa ya, dukungan politik, itu tidak mungkin. Begitu. Bagaimana Bang Yos, sudah ada kenderaan politik untuk 2009?"
16. YS : Ya. Jadi, saya memang strateginya beda dengan Pak Wiranto. Ya.
17. MH: Mmm.
18. YS : Mau nyapres, lalu bikin partai baru, nggedekan partai dulu, gitu ya?
19. MH: Mmm.
20. YS : Waktu saya juga tidak cukup, Mutia.
21. MH: Oke.
22. YS : Saya kan satu tahun lebih sedikit waktu 1 Oktober itu kan? Artinya, nggak cukup dua tahun. A..., kemungkinan saya membangun partai baru, sementara partai yang ada sudah banyak. Ya, saya realistiknya itu di situ.
23. MH: Tapi dari Oktober 2007 sampai sekarang sudah ada belum? Kemudian ada parpol
24. YS : Ya sudah karena apa yang
25. MH: atau kenderaan politik yang
26. YS : dilakukan
27. MH: Mmm.
28. YS : ada partai baru. Ada dua belas ya. Murni baru. Lalu partai lama
29. MH: Ini lolos perifikasi semuanya?
30. YS : A..., ndak! Lima yang lolos.
31. MH: Oke, lima lolos.
32. YS : Tapi yang tidak lolos, dia sepakat untuk bergabung. Kita pun masih nunggu perifikasi faktual nanti kan. Mungkin bisa satu, dua.
33. MH: Mmm.
34. YS : Tapi saya kan tidak membidani itu. Mereka lahir sendiri, gitu.
35. MH: Mmm.
36. YS : Nah, lalu partai-partai lama yang sudah ada kira-kira empatlah ya.
37. MH: Boleh disebut Bang Yos, partai-partainya, apa saja?
38. YS : Boleh. Kenapa? Boleh aja mereka lalu menyanggah lalu tidak jadi, nggak apa-apa bagi saya.
39. MH: Boleh disebut oleh Bang Yos.
40. YS : Partainya mantan, apa, a..., almarhum Pak Edi PKBI,
41. MH: Mmm.
42. YS : ya. Partainya Pak Ryas Rasid,
43. MH: Mmm.
44. YS : Partainya Mba Sukma,
45. MH: Mmm.
46. YS : Ya. Partainya Mas Yapto,
47. MH: Mmm.
48. YS : gitu. Partai Buruh, ya.
49. MH: Oke. Baik.
50. YS : Jadi kalau itu akhirnya itu terus dia bantah, "Oh, saya nggak jadi." Nggak apa-apa. Namanya juga politik ya,
51. MH: (tertawa)
52. YS : Nah, mengapa saya nggak itu saja
53. MH: Mmm.
54. YS : dan juga membangun kerja sama dengan partai yang sudah ada, misalnya, PAN kan gitu kan?
55. MH: Nanti kita tanyakan, "Mas Tris, mau nggak?"
56. YS : A...a (=ya)
57. MH: Sebelum ke Mas Tris, saya ingin tanyakan Bang Yos.
58. YS : Makanya, jadi cara berpikirnya memang beda, gitu. Karena saya sadar tidak mungkin saya

59. MH: Bang Yos, sudah sejak Oktober 2007 ya
60. YS : A..., ya...
61. MH: mencanangkan bahwa "Saya mau jadi presiden." Kemudian Bang Yos mulai ke daerah-daerah, lebih banyak ngalah di DKI Jakarta. Apakah a..., sejak Anda turun ke lapangan Anda melihat Anda punya kans yang kuat untuk melawan nama-nama besar ini? Ada SBY
62. YS : Ya, itu sebabnya saya
63. MH: ada JK,
64. YS : bersemangat gitu.
65. MH: ada Amin Rais.
66. YS : Itu bersemangat karena responsnya baik di lapangan.
67. MH: Mmm. Oke.
68. YS : Jadi, saya juga, Mutia, mengapa saya deklarasif? Saya juga ingin merubah tradisi. Sekarang kita sudah di alam demokrasi, mengapa kita malu-malu? Seorang pemimpin harus menggunakan bahasa terang, "Saya calon presiden,"
69. MH: Mmm.
70. YS : Supaya rakyat maksud saya cukup waktu untuk melihat seorang pemimpin itu;
71. MH: Oke.
72. YS : layak tidaknya.
73. MH: Jadi, kenapa harus malu-malu, begitu ya?
74. YS : Ya.
75. MH: Saya akan tanyakan ke Mas Tris nih. Saya dengan Mas Tris nih seperti sudah kenal lama karena saya setiap hari lihat Mas Tris di tivi, di iklan-iklan Mas Tris. Apakah hal ini –kalau tadi kata Bang Yos, "Jangan malu-malu kalau maju menjadi presiden."—apakah a..., kalau saya tanya, "Mas Tris ingin maju menjadi capres 2009; cawapres 2009?"
76. SB : Nggak. Saya sering ditanya seperti itu dan jawaban saya sama: saya...atau tunggu tanggal mainnya, ya.
- 77.
78. MH: Siapa tahu malam ini berubah nih. Tidak juga berubah?
79. SB : Ya, belum, belum berubah.
80. MH: (tertawa) a... (=Ya)
81. SB : Karena memang sekarang kita para pimpinan partai sedang melakukan rencana undang-undang
82. MH: Mmm.
83. SB : a..., undang-undang pilpres ini yang masih ya, tawar-menawar. Golkar, PDIP, menghendaki 30 persen, sedangkan partai-partai yang lain 15 persen ke bawah dan ini saya kira yang akan a..., perjalanan nanti pilpres ke depan itu tergantung banyak dari sini.
84. MH: Mmm.
85. SB : A..., jadi, a...,
86. MH: Jadi, Anda lihat dulu apakah PAN nanti akan a..., cukup kuat mengajukan calon presiden, begitu?
87. AB : Yaah. Di antaranya itu. Tapi
88. MH: Tapi kalau PAN cukup kuat, Pak, a..., Mas Tris menjadi calon Presiden dari PAN?
89. SB : Ya, jawabannya sama tetap
90. MH: (tertawa)
91. SB : tunggu tanggal mainnya, cuman
92. MH: Oh, tidak berubah ya? (tertawa)
93. SB : yang pertama dulu a..., melontarkan
94. MH: Mmm.
95. SB : adanya wacana a..., calon pemimpin alternatif
96. MH: Oke. Kalau saya
97. SB : dari saya maupun
98. MH: Mmm.
99. SB : dari PAN, termasuk nama Bang Yos, Pak Sultan, dan sebagainya.
100. MH: Mmm.

101. SB : Jadi menurut saya ada tiga...tiga cara untuk merekrut pemimpin nasional. Satu adalah para gubernur yang sudah berpengalaman, seperti Bang Yos dan kawan-kawan.
102. MH : Mmm.
103. SB : Yang kedua adalah a..., tokoh masyarakat yang mungkin tidak mempunyai kenderaan politik. Tapi,
104. MH : Jadi, harapan Bang Yos katakan tadi, ada kemungkinan dilihat oleh PAN, dilirik oleh PAN?
105. SB : Ya. Saya dulu mencontohkan Cak Nur. Cak Nur itu kan mau, mampu, pantas, tapi nggak punya kenderaan politik;
106. MH : Oke.
107. SB : sehingga ini harus kita buka a..., ruang itu. Yang ketiga,
108. MH : Kalau, mmm?
109. SB : ini yang sekarang a..., PAN juga memelopori katakanlah, ada generasi baru yang berani tampil. Jadi, mungkin iklan saya itu untuk memancing Andi Malarangeng, kemudian
110. MH : Anis Baswedan.
111. SB : Anis Baswedan, atau mungkin nanti Priyo Budi Santoso, dan lain-lain atau dari PDIP
112. MH : Oke.
113. SB : a..., bisa muncul sebagai keberanian.
114. MH : Tapi tadi Pak Amin, Pak Amin dalam kutipan wawancara kami sebelumnya mengatakan, "Saya menunggu wangsit," apakah ini artinya peluang untuk Pak Amin tertutup atau masih terbuka PAN untuk Pak Amin sebagai capres?
115. SB : Nggak kita semua terbuka. Jangankan untuk Pak Amin, untuk Bang Yos, Sri Sultan aja terbuka;
116. MH : Mmm.
117. SB : Yang bukan dari kader. A..., gitu.
118. MH : Baik. Kalau begitu Mas Tris. Ada beberapa penantang SBY yang siap tentunya menantang SBY di pilpres 2009. Seberapa besar kekuatan SBY saat ini di mata masyarakat? Kita akan saksikan sesaat lagi dalam *To Day's Dialogue*. Tetap bersama kami.

Sesi 2

119. MH : Anda kembali bersama kami dalam *To Day's Dialogue*. Pemirsa, ada beberapa penantang yang sudah mengatakan siap untuk a..., menjadi calon presiden juga di tahun 2009. Pertanyaannya adalah sekarang, Bung Saiful, saya ke Anda dulu, "Seberapa kuat posisi SBY saat ini? Kalau kita lihat survey apakah LSI kemudian mengadakan survey setelah a..., presiden tiga kali menaikkan harga BBM, begitu, apakah surveynya berubah dari yang kita lihat sebelum-belumnya?"
120. SM : Di sini kita melihat dari pengalaman pemilu a..., presiden langsung pertama a..., 2004, pada tahun 2003 a..., kita masih melihat Ibu Mega hampir tidak bisa disaingi oleh siapa pun waktu itu, a..., Bang Yos.
121. MH : Mmm.
122. SM : A..., hal yang sama juga a..., kita melihat pada a..., Pak SBY sekarang tahun 2008 ini, itu paralel dengan tahun dua ribu...
123. MH : tiga, Ibu Mega. Mmm.
124. SM : tiga dulu. A... (=Ya). Sekarang dalam posisi yang baik. Namun demikian, ada sesuatu yang menarik. Sekarang a..., dari a..., deteksi kita secara reguler hampir setiap tiga bulan, sentiment masyarakat pada SBY sekarang berada di titik yang paling rendah.
125. MH : Paling rendah selama?
126. SM : Selama empat tahun.
127. MH : Selama empat tahun.
128. SM : Selama empat tahun. Dan
129. MH : Mmm. Apakah kemudian ini juga a..., akibat kebijakan menaikkan BBM, apakah kelihatan, begitu grafiknya?

130. SM : Persis. Persis. Iya. Jadi, ada kebijakan yang kurang populer semacam itu direspons, itu rasional menurut saya.
131. MH : Mmm.
132. SM : Dan kita lihat nanti apakah setelah sentimen ini
133. MH : Mmm.
134. SM : berlalu, katakan begitu, karena efek daripada kebijakan itu ternyata tidak seburuk yang diperkirakan, kalau itu terjadi,
135. MH : Mmm.
136. SM : bisa jadi opini makin positif kembali
137. MH : Mmm.
138. SM : pada SBY.
139. MH : Oke.
140. SM : Dan itu artinya dia lulus dari ujian.
141. MH : Tapi, kita akan coba lihat. Saya akan ke Anda, Mas Anis, kalau kita bicara bahwa saat ini memang posisinya, kita juga punya survei yang dilakukan oleh Media Group, menunjukkan bahwa presiden Susilo Bambang Yudoyono, masih memang jauh a..., di atas sebut saja Ibu Mega, Pak Amin, dan calon-calon lainnya, begitu, atau nama-nama lainnya, apa yang menurut Mas Anis membuat posisi SBY masih begitu kuat walaupun memang kecenderungannya ada a..., kecenderungan menurun?
142. AB : Iya. Begini. Dalam survey-survey ini selama...sejak 2004 sampai sekarang punya korelasi yang sangat kuat dengan kondisi ekonomi.
143. MH : Mmm.
144. AB : Jadi, ketika kondisi ekonomi memburuk, kemudian presiden juga a..., mendapatkan a..., *reward*
145. MH : Mmm.
146. AB : dalam bentuk menarik dukungan. Nah, yang saya rasa menarik untuk dilihat lebih jauh adalah publik bukan tidak mungkin melihat kondisi perekonomian, apalagi BBM, itu tidak semata-mata problem domestik,
147. MH : Mmm.
148. AB : tapi juga problem internasional. Kedua, masyarakat Indonesia juga bukan pertama kalinya mengalami
149. MH : kenaikan
150. AB : tekanan ekonomi yang begitu besar seperti sekarang.
151. MH : Mmm.
152. AB : Jadi, ketika melihat kondisi seperti ini, masih ada sisa harapan. Apakah ini kembali naik seperti yang dikatakan selalu. Apakah ini bagian dari siklus yang nanti ini naik. Nah, ini nanti harus kita lihat seperti apa.
153. MH : Mmm.
154. AB : Tetapi, apabila muncul alternatif yang menarik, bukan tidak mungkin ini malah berbalik, gitu.
155. MH : Yang dua ini cukup menarik nggak? Mas Anis. (tertawa)
156. AB : Jadi. Ya, tentu saja menarik ini. Menarik.
157. MH : di antara beberapa nama lagi, tentunya ya?
158. AB : Ya. Tentu aja sangat menarik. Yang barangkali penting itu, bukan saja figurinya.
159. MH : A... (=Ya)
160. AB : Figur-figur bapak-bapak di sini sedang menarik adalah bagaimana ini menawarkan
161. MH : Oke.
162. AB : perubahan dibandingkan dengan *incumbent* sekarang selama ini Presiden SBY.
163. MH : Lega dong Bung Andi melihat bahwa survey ternyata Pak SBY masih paling tinggi. A..., dampak terhadap kenaikan BBM atau akibat kenaikan BBM juga tidak begitu buruk terhadap pemerintahan. Popularitasnya.
164. AM : Ya, memang kami menyadari. Kami juga mengikuti poling-poling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga poling, yang apa namanya, kredibel ya. Dan bahwa poling itu selalu ada naik dan turun. Alhamdulillah, sejauh ini poling Presiden SBY selalu...selalu tertinggi dan tidak juga cukup tinggi. Ada juga naik dan turun dan terutama kalau sehabis kenaikan harga BBM. Tahun 2005 juga akan ada penurunan dan kami juga perkirakan bahwa setelah ini juga pasti ada penurunan.

165. MH: Berarti posisi orang yang akan ditantang nih, Bang Yos, cukup kuat nih. Bagaimana strateginya, atau apakah Anda masih yakin setelah mendengar paparan tadi bahwa memang Bang Yos juga punya peluang yang besar, begitu, untuk menantang SBY ke depan.
166. YS: Kalau saya, ya, prinsip dasarnya itu bagaimana 2009 nanti, ya, mendapatkan pemimpin yang ada jaminannya ya. Bisa merubah keadaan itu, yang lebih baik tentunya, administrasi rakyatnya, lebih bermartabat
167. MH: Seperti kata Bung Anies tadi, apa yang ditawarkan seorang Sutiyoso, yang berbeda?
168. YS: Ya saya kan kebetulan ya, dipercaya menjadi gubernur ibukota negara 10 tahun, ya. Saya dipercaya teman-teman gubernur menjadi ketua asosiasi pemerintahan provinsi. Itu membekali gitu, membekali pengetahuan ya. Bukan saja di Jakarta, tetapi juga di bagian lain. Karena itu saya menawarkan diri. Nah, bahwasanya rakyat itu sudah cukup waktu menilai kita cocok, pilihlah saya. Tetapi kalau ternyata ada yang lebih baik, harus dapat yang paling baik dari kita.
169. MH: Mmm.
170. YS: Karena itu, wacana Mas Tris misal memberikan peluang membuka pintu seluas-luasnya, saya juga berharap semua partai seperti itu.
171. MH: Mmm.
172. YS: Gitu. Supaya yang nyalon itu banyak termasuk yang muda, gitu.
173. MH: Oke.
174. YS: Jadi, kita di alam demokrasi itu, yang fair saja. Jangan yang dikatakan, bung siapa tadi kan; kalau "Minggir saja Pak Sutiyoso, dan lain-lain sudah tua
175. MH: Fachrul Rahman. Mmm.
176. YS: kita mau maju?"
177. MH: Oke.
178. YS: Ya, itu bukan demokrasi namanya, kan?
179. MH: Saya ingin kembali menayangkan
180. YS: maju aja. Diberanikan yang muda-muda
181. MH: Mmm.
182. YS: Karena itu, media juga harus berperan mengorbitkan Bang siapa, dan lain-lain
183. MH: (tertawa)
184. YS: yang ada di legislatif, gubernur-gubernur yang muda yang potensial.
185. MH: Ya.
186. YS: Biarkan beramai-ramai, rakyat sendiri nanti rakyat sendiri yang menentukan.
187. MH: Tambah banyak lawan, Anda tidak masalah ya, Bang Yos?
188. YS: Oh, malah enak menang dari yang banyak.
189. MH: Oke. Kita lihat Mas Tris ada nih a..., 1,3 persen di sini. Masuk sepuluh besar. Kalau iklannya makin banyak, apakah ini bisa naik terus? Atau kecenderungannya sekarang yang dilakukan LSI apakah naik terus grafiknya?
190. SM: Iya, begini, a..., seperti a..., Bang Yos, kita yang tahu a..., di tingkat yang relatif mengikuti sehari-hari, mungkin tau kemampuan Bang Yos. Tapi masyarakat secara umum tidak tahu
191. MH: Mmm.
192. SM: siapa Bang Yos, track record-nya seperti apa dan kemampuannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau tidak beriklan, mau pake apa Anda untuk memperkenalkan Bang Yos? Untuk masyarakat yang pemilihnya yang lebih dari 150 juta.
193. MH: Bang Yos, dijawab dulu?
194. YS: Iya. Masalahnya iklan saya setuju sama beliau, duitnya nggak ada kan gitu kan?
195. MH: (tertawa) Masa sih Bang Yos?
196. YS: Tapi saya tambalnya adalah dengan kunjungan langsung.
197. MH: Oke.
198. YS: Ya. Mutia, saya ini kan kebetulan kan mimpin beberapa organisasi, yah. Olah raga di ketua PBSI, ORARI.
199. MH: Jadi, lewat organisasi-organisasi itu?
200. YS: Ya. Jadi saya melantik ke daerah-daerah itu
201. MH: Mmm.
202. YS: sekaligus saya sosialisasi sebagai capres. Saya tidak malu-malu untuk itu.
203. MH: Oke.

204. YS : Saya ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Nah, karena responsnya baik, saya mengenalkan diri saya siapa, saya gini, silakan menilai saya, gitu ya?
205. MH : A... (=Ya)
206. YS : Makanya saya tambah semangat ke, apa namanya, ke daerah-daerah, gitu.
207. MH : Oke.
208. YS : Untuk iklan-iklan itu tadi, ya kan? Jadi, dengan cara begitu. Mungkin nanti saatnya saya beriklan juga seperti beliau, saatnya kalau itu memang efektif.
209. MH : (tertawa)
210. AB : Sama ini, Mutia, kalau saya bisa menambahkan, barangkali kalau angka ini dimasukkan, mereka yang belum memilih mungkin nomor satu. Kalau angka lihat ini sekitar 30-an persen lebih
211. MH : Yang belum memilih?
212. AB : yang belum menentukan.
213. MH : Belum menentukan.
214. AB : Nah, belum menentukan pilihan itu adalah pemenang sebenarnya.
215. MH : Mmm.
216. AB : Orang yang belum ditentukan.
217. MH : (tertawa)
218. AB : Jadi, akan ke mana suara itu pergi? Jadi ketika ada yang turun, kemudian jangan langsung diasumsikan akan pindah ke urutan ke dua. Kemudian ketika sekarang ada sepuluh pilihan nama, itu berbeda sekali ketika tinggal lima. Berbeda sekali tinggal dua. Karena sirk...mereka berpindahnya itu, belum tentu urut, gitu. Nah, karena itu, apabila muncul a..., apa, satu ekspos yang serius dari calon yang meskipun angkanya rendah sekarang
219. MH : Mmm.
220. AB : tetapi *face recognition*, *name recognition* itu tinggi
221. MH : Mmm.
222. AB : bukan tidak mungkin
223. MH : *Face recognition* dan *name recognition* itu yang dilakukan Mas Tris ya,
224. AB : Ya itulah standard
225. MH : pasti Anda melakukan evaluasi tidak bahwa
226. SB : Tidak ada hubungannya antara ...
227. MH : Masa' sih?
228. SB : iklan saya dengan pilpres itu, nggak ada.
229. MH : (tertawa)
230. SB : A..., itu dalam rangka kebangkitan nasional, saya
231. MH : Tapi ketika kebangkitan nasional sudah lewat, ini sudah bulan Juli ikinnya masih ada terus.
232. SB : Ya, begini. A...,
233. AB : setahun
234. MH : (tertawa)
235. AB : bukan.
236. SB : Pengenalan diri saya itu bukan hanya, apa, dilihat untuk kepentingan masalah kekuasaan ya,
237. MH : Mmm
238. SB : Cuma saya melihat bahwa saya hid...lahir, hidup, dibesarkan, dan rezeki dari Indonesia.
239. MH : Mmm
240. SB : Jadi, saya ingin membuat sesuatu a..., apa yang bisa saya berikan
241. MH : Oke.
242. SB : kepada bangsa ini. Nah, dengan cara
243. MH : Bukan untuk merubah PAN yang dulu sangat lekat dengan Pak Amin ke sosok Mas Tris?
244. SB : A...,
245. MH : Tidak itu? Tidak untuk itu?
246. SB : Tidak. Betul, betul. PAN itu rumah besar. Pak Amin punya pendukung fanatik, mungkin saya pendukungnya banyak artis-artis misalnya, ya,
247. MH : (tertawa)

248. SB : itu kek supermarket aja di situ,
 249. MH : Oke.
 250. SB : ada semua. Jadi nggak ada hubungannya antara pilpres.
 251. MH : Oke, Mas Tris. Kalau Bung Andi, masuk tidak di dalam survey itu?
 252. SM : Kita juga punya tingkat keinginan masyarakat terhadap pemimpin, topik hari ini. Alternatif. Alternatif itu kalau didefinisikan secara lebih spesifik lebih mudah,
 253. MH : Mmm.
 254. SM : kita punya pertanyaan semacam itu. A..., seberapa menginginkan masyarakat di pemimpin, kalau dipimpin oleh...
 255. MH : Sosok yang lebih muda.
 256. SM : tokoh yang dari generasi yang lebih muda. Yang lebih muda yang dimaksud itu secara spesifik kita sebut, katakanlah berumur 50 tahun ke bawah.
 257. MH : Mmm.
 258. SM : Oke. Tujuh puluh lima persen (75%) mengatakan itu "Oke". Itu ide yang bagus. Tentang itu dan kita setuju. Nah, cuma ketika ditanya lebih lanjut, siapa tokoh-tokoh itu? Itu masih *flat*.
 259. MH : Oooke.
 260. SM : Gitu, ya. Orang seperti Bung Andi, masuk di dalamnya disebut tentu saja, dan yang lain-lain tentu saja. Jadi, Mas Tris termasuk. Jadi, a..., cukup terbuka sebenarnya, dan sekarang masih...masih sangat
 261. MH : Oke. Sudah terpikir nggak sih, Bung Andi kalau namanya juga sudah disebut-sebut sekarang ketua DPP. Katanya dicalonkan menjadi ketua umum Partai Demokrat.
 262. AM : (tertawa) Saya nggak tahu. Kalian kan poling-poling biasanya menggunakan, apa namanya, nama ini bagaimana, kalau nama ini bagaimana, nanya; pertanyaannya terbuka.
 263. MH : Tapi inspirasi menjadi seorang capres, sudah ada tidak?
 264. AM : Kalau sekarang jadi jubir dulu.
 265. MH : (tertawa) Baik.
 266. AM : Yang jelas begini. Bahwa dari perbincangan ini bahwa inilah demokrasi cantiknya.
 267. MH : Mmm.
 268. AM : Ada begitu banyak pilihan-pilihan dan semua orang boleh mengajukan dirinya. Yang jelas mana yang akan dipilih oleh rakyat itulah.
 269. YS : Makin banyak pilihan...
 270. AM : Di situ nanti kita lihat.
 271. MH : Kita akan lihat lagi tokoh-tokoh baru atau tokoh-tokoh alternatif a..., *versus* tokoh-tokoh lama, seperti apa, siapa yang lebih kuat, yang mana yang diinginkan oleh masyarakat? Sesaat lagi dalam *To Day's Dialogue*. Tetap bersama kami.

Sesi 3

272. MH : Kembali dalam *To Day's Dialogue*. Pemirsa, tokoh-tokoh baru versus tokoh-tokoh lama. Kita singgung juga karena namanya juga sudah a..., dimunculkan atau bermunculan di media, ya, belakangan ini: Prabowo. A..., kita mulai dengan Pak Prabowo dari Partai Gerakan Rakyat Indonesia, akan maju di capres 2009. sebelumnya sempat ikut konvensi Partai Golkar ya, a..., Bung Saiful atau Mas Anies, saya ke Anda. A..., Anda melihat a..., bukan peluang, tapi apakah sosok dari Prabowo ini juga sosok yang diinginkan oleh a..., Indonesia, atau dibutuhkan oleh Indonesia.
 273. AB : Ya. Sebenarnya kalau bicara nama, itu akan agak sulit ya, nantinya. Tapi, kira-kira begini. Yang dimunculkan adalah--ini seperti dikatakan tadi, masyarakat paling bawah petani, buruh ini menjadi *concern*. Lalu muncul nama Prabowo dan dikaitkan dengan
 274. MH : Petani.
 275. AB : petani. Ya. Dikaitkan gitu.
 276. SM : Susu sapi.
 277. AB : Kemudian susu dan sebagainya. Nah, jadi kelihatan bahwa a..., masyarakat itu menginginkan orang yang peduli

278. MH: Mmm.
279. AB : atas a..., kebutuhan keseharian mereka.
280. MH: Oke.
281. AB : Kemudian masalah orang yang tahu kira-kira apa solusinya, yang praktis masyarakat bisa paham. Kemudian, tentu ada unsur kemudaa, yang juga ditonjolkan.
282. MH: Mmm.
283. AB : Ya, di situ. Lalu, tampak ini punya visi untuk ke depan, dan
284. MH: Oke. Itu bukan yang diinginkan oleh Indonesia?
285. AB : punya pengalaman.
286. MH: Masyarakat Indonesia
287. AB : Ya. Maka itu. Jadi, ketika kita melihat ada individu yang menampilkan itu, maka itu bukan sendirian. Ada banyak yang sebenarnya masuk dalam kategori itu. Jadi, ketika tadi disebut mengapa Prabowo? Bukan tidak mungkin yang lain, misalnya, ada Mas Tris, ada Bang Sutiyoso,
288. MH: Mengusung hal yang sama begitu ya?
289. AB : yang kemudian bisa juga masuk situ.
290. MH: Kebutuhan pokok, muda
291. AB : Ya.
292. MH: Mmm, oke. Baik. Kalau saya mau tanya peluangnya, Prabowo, Bung Saiful punya ininya?
293. SM : Kalau
294. MH: Surveynya?
295. SM : Kalau bicara peluang sekarang masih terlalu dini, ya?
296. MH: Mmm.
297. SM : Dugaan saya di Januari 2009 nanti, itu akan keluar satu di antara sekian tokoh yang sekarang banyak dibicarakan.
298. MH: Oke. Kalau Sri Sultan, a..., Bung Saiful, bagaimana? Ini juga popularitasnya kita lihat melalui survey-survey yang merangkak naik terus.
299. SM : A..., naik terus itu artinya, tiap hari
300. MH: Ini menjadi salah satu calon kuat?
301. SM : berubah.
302. MH: Mmm.
303. SM : Tapi, yang kita lihat tidak secepat itu, gitu ya. Dia cukup menonjol dibanding yang lain-lain yang banyak tersebut. Lumayan angkanya. Tapi itu juga masih terlalu awal. Dan mungkin belum diuji juga, gitu ya.
304. MH: Mmm.
305. SM : Oleh masyarakat belum dikritisi, gitu lho. Oleh para pengamat, oleh para politisi-politisi yang lain, dan itu harus diuji.
306. MH: Mmm.
307. SM : Dan justru seperti Bang Yos tadi katakan, dan saya sangat setuju a..., lebih eksplisit dari awal sekarang, kasih kesempatan dari berbagai pihak
308. MH: Itu lebih baik bagi seorang capres.
309. SM : untuk men...dinilai, dinilai mau positif maupun negatif, gitu ya, dikasih kesempatan daripada...misalnya, terus terang aja sampai hari ini masih misterius buat saya kenapa tiba-tiba SBY waktu itu
310. MH: Mmm.
311. SM : melejit, gitu ya. Pada waktu itu, gitu. Berspekulasi karena ada rasa dizalimi atau apakah, itu kan spekulatif sifatnya. persisnya
312. MH: Apakah betul karena itu tidak ada persinya, tidak tau persisnya.
313. SM : Apakah betul karena itu atau apa saya belum tahu sesungguhnya.
314. SB : Saya boleh anu ya, berpendapat.
315. MH: Boleh, boleh.
316. SB : Negara kita kan bukan seperti di Amerika yang a..., masyarakatnya sudah
317. YS : Mapanlah atau stabil.
318. SB : mapan, *educated* a..., masyarakat kebanyakan. Jadi, siapa pun nanti yang terpilih, menurut saya bukan karena dia punya visi yang bagus, menurut saya itu karena fenomena atau ngetren,
319. MH: Jadi, lebih karena fenomena, trend?

320. SB : a..., (=ya) dan disukai, disukai oleh rakyat karena
321. MH : Disukainya karena apa? Bukan karena visi misinya?
322. SB : a..., bukan karena visi misinya, menurut saya seperti itu.
323. MH : Lebihnya?
324. SB : A..., misalnya, begini: Kalau SBY itu diberi lagi, pasti rakyat sudah tau, "Oh, SBY itu kita pilih lagi karena a..., ekonominya bagus, misalnya. Tentang ekonomi.
325. MH : Mmm.
326. SB : Tapi kalau orang lain yang dipilih saya yakin seyakini-yakinnya bukan karena visi, karena ingin yang memilih ini aja ada harapan baru kepada mungkin Bang Yos, atau Prabowo, atautah Wiranto, dan sebagainya.
327. MH : Tapi tadikan kata a..., Mas Tris visi misi juga tidak begitu didengarkan oleh masyarakat
328. SB : Justru itu
329. MH : lebih menjual sosok
330. SB : siapa pun nanti...
331. MH : jadi akhirnya orang terpancing untuk menjual sosok-sosok pribadi.
332. SB : Oke. Siapa pun yang terpilih, yang terpilih itu harus ada ya,
333. MH : Oke, oke,
334. SB : visi bersama
335. MH : itu pesan Anda untuk yang terpilih nanti.
336. SB : A... (=ya).
337. AM : Tapi ini juga harus kita lihat. Mari kita lihat. Kalau kita lihat pelajaran dari SBY, itu pemimpin itu tidak datang secara ujuk-ujuk kata orang Jawa.
338. MH : Tapi waktu itu katanya masih sangat rendah popularitasnya.
339. AM : Tapi saya agak berbeda di sini. Coba lihat, waktu sebelum SBY *running* untuk jadi presiden, sebelumnya dia pernah *running* menjadi wakil presiden di MPR waktu itu.
340. MH : Mmm.
341. AM : Di MPR. Bersaing pada waktu itu dengan Hamzah Haz.
342. MH : Ya.
343. AM : Dan waktu itu, kalau dipoling waktu itu, SBY waktu itu poling untuk jadi wakil presiden, itu paling tinggi selalu.
344. MH : Oke.
345. AM : Tetapi ketika di MPR, pemilihan di MPR, itu dia kalah waktu itu.
346. MH : Mmm.
347. AM : Jadi, waktu pemilihan wakil presiden pun polingnya sudah tinggi, dan ketika dia kalah karena pemilihan MPR, dia salah, SBY waktu itu salah perhitungan. Dipikrinya kalau polingnya tinggi di luar, maka ketika pemilihan di MPR dia akan terpilih jadi wakil presiden. Nah, baru ketika pemilihan langsung presiden, poling yang tinggi dari presiden, a..., SBY waktu itu, *manifest* ke dalam pemilihan presiden karena pemilihan presiden secara langsung. Jadi, sebenarnya dari sisi Presiden SBY itu waktu itu, sebenarnya polingnya sudah cukup tinggi
348. MH : Tidak ujuk-ujuk berarti Anda mencoba
349. AM : popularitasnya. Artinya nggak ujuk-ujuk.
350. MH : mengatakan bahwa kalau pun nanti ada tokoh-tokoh alternatif dia harus curi *start* dari sekarang kalau
351. AM : Dia harus membangun sebuah
352. MH : tidak akan terlambat.
353. AM : karier atau sebuah a..., mau menunjukkan kepada publik apa yang sudah diperbuat.
354. MH : Tidak, a..., jadi Anda tidak percaya
355. SM : Nyata, ya, ya, ya,
356. MH : dengan calon yang kemudian tiba-tiba muncul ada nama baru, kita tidak pernah dengar sebelumnya apa?
357. AM : Rasa kok sulit dalam masyarakat yang jumlahnya...begitu
358. MH : Ini termasuk nama baru yang ini tidak? Yang betul-betul baru begitu: Nama Soetrisno Bachir.
359. AM : Kalau Bang, Pak Sutrisno sudah lama kenal dengan masyarakat.
360. MH : (tertawa) Oke.
361. (Semua tertawa)

362. MH : Sebelum saya break, silakan a..., Anda.
363. AB : Ya. Jadi, betul. Saya setuju bahwa memang ada kredensial yang dibangun sebelum itu bisa maju.
364. MH : Mmm.
365. AB : Tapi yang menarik untuk dilihat adalah masuknya ke dalam arena
366. MH : Mmm.
367. AB : percalonan itu harus momentumnya tepat, gitu. Jadi, seperti SBY, misalnya, waktu kasus 2004. Itu kira-kira empat bulan sebelum pemilu a..., 2004. A..., tiga bulan kira-kira. Tiga bulan. Sehingga masih tidak terlalu lama. Coba kalau misalnya, ya, Pak SBY itu sudah populer Januari 2003, misalnya.
368. MH : Oke.
369. AB : Maka pada waktu setahun itu, praktis, Pak SBY berhadapan dengan *incumbent* yang punya apparatus begitu. Secara yang melihat konkret ini calon yang punya dukungan.
370. SB : Tapi, saya masih punya pendapat. Menurut saya ada peer baru buat kita semua untuk mempersiapkan siapa pun nanti yang terpilih, apakah Bang Yos atukah SBY lagi mestinya
371. MH : Atukah SBY (tertawa)
372. SB : bangsa kita itu a..., menujunya itu yang lebih jelas.
373. MH : Sesaat lagi kita akan coba melihat sejarah mencatat bahwa Sukarno dan Suharto, tentunya mantan presiden kita, a..., menjabat ketika masih di usia 40 tahun. Dan apakah kemudian dan mungkin nanti akan muncul calon presiden a..., umur 40 tahun atau yang lebih muda dari tokoh-tokoh lama? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di *To Day's Dialogue*.

Sesi 4

374. MH : Anda kembali bersama kami dalam *To Day's Dialogue*. Apakah memang usia yang muda a..., kalau memang kita ingat mantan Presiden Suharto, mantan Presiden Sukarno di usia 40 tahunan dan a..., *without no doubt* bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berhasil, terlepas dari segala kontroversinya ya. Bung Saiful, Anda melihat tidak sosok-sosok yang Anda lakukan survey di umur a..., 40 tahunan begitu, yang bisa menjadi *raising start*, menjelang 2009?
375. SM : Kalau ditanya terbuka kepada masyarakat, ya, tentu saja ada yang menyebut secara spontan ya. Tapi, masih tadi saya sebutkan masih sangat *flat*. A..., orang seperti Bung Andi, beberapa sekjen yang masih muda, termasuk Mas Tris, seperti Mas Pram misalnya,
376. MH : Ini Pak, mungkin kita bisa mengaca dengan a..., pilkada-pilkada yang menarik belakangan ini, kita lihat di Jawa Barat, misalnya, Bung Anies seperti kata Bang Yos tadi, a..., orang muda seperti Dede Yusuf, Ahmad Heriawan; terbalik Ahmad Heriawan ininya, gubernurnya, Dede Yusuf wakilnya, itu kan juga muda, dan akhirnya kemudian bisa mengalahkan mereka yang a..., dari partai besar dengan pengalaman jauh lebih luas daripada keduanya.
377. AB : Ya. Saya rasa kalau kita melihat sebuah kemenangan, itu bukan hanya melihat faktor siapa yang menang, tetapi kita juga harus melihat siapa yang kalah.
378. MH : Mmm.
379. AB : Apakah yang kalah ini, itu sebenarnya sama menariknya? Kalau sama menariknya, itu berarti yang muda ini pasti luar biasa, itu.
380. MH : Mmm.
381. AB : Tapi kalau yang dilawan bukan sesuatu yang *attractive*, maka kemungkinan menjadi alternatif itu, karena tidak ada yang *attractive*.
382. AM : Di Sumatera Utara yang menang yang tua dan bukan yang muda. Jadi kalau pilkada kita bisa lihat
383. MH : Sulit.
384. SM : Polanya tidak terlalu jelas.
385. MH : Dan apakah khawatir pola pilkada ini kita akan lihat di pilpres 2009? Sulit diprediksi, begitu Bung Saiful?
386. SM : Pertama adalah a..., kesempatan dulu, ya. Kesempatan untuk dinominasikan.
387. MH : Mmm.

388. SM : Muda maupun yang sudah lebih senior, atau yang lebih berpengalaman, kayak begitu. Saya melihat di sini bahwa kesempatan untuk dinominasikan itu pertamanya
389. MH : Yang paling penting.
390. SM : yang paling penting. Nah, satu. Kedua, juga a..., saya percaya bahwa di anak-anak bangsa ini banyak yang potensial kalau dilihat dari poten, apa namanya,
391. MH : Oke.
392. SM : dari kompetensi, tapi mereka punya *resource* yang terbatas, gitu ya.
393. MH : Oke.
394. SM : Seperti tadi saya kemukakan bahwa
395. MH : *Resource* yang terbatas.
396. SM : *Resource* yang terbatas. Maksud saya di antaranya *resource* politik, ya itu tadi partai politik.
397. MH : Oke.
398. SM : Kedua, *resource* juga dari a..., misalnya, a..., uang.
399. MH : Mmm.
400. SM : Misalnya itu juga sangat penting dalam pemilihan langsung.
401. MH : Mmm.
402. SM : Nah, jadi, banyak yang bagus
403. MH : Kita belum bisa seperti a..., Amerika begitu, ya, Bung Saiful? Memang Obama ketika itu a... *resource*-nya juga tidak banyak. Apakah faktor Obama akan sampai di Indonesia?
404. AB : Bukan. Ini yang membuat dia begini.
405. MH : dia lebih meng a..., apa, mencoba meraup suara melalui internet misalnya.
406. AB : Iya. Tapi kan begini. Seperti di Amerika itu sudah ada pilkada-pilkada yang berkali-kali. Ini kita pilkada baru ronde pertama ini semuanya mengalami. Pemilu nasional yang berulang-ulang yang demokratis.
407. MH : Mmm.
408. AB : Sehingga sudah ada *rekrutment* kolektif anak-anak muda di partai politik ataupun di posisi-posisi eksekutif. Nah, sehingga ketika kemudian 2004 kemarin muncul orang seperti Obama, dia dimungkinkan karena siklus politiknya itu sudah berjalan lama.
409. MH : Mmm.
410. AB : Kalau kita ini siklusnya itu baru a..., sik... *cycle* pertama.
411. MH : Mmm.
412. AB : Pilkada baru ronde pertama ini. Belum banyak pilkada dua kali. Jadi proses *rekrutment*...
413. MH : Memang
414. YS : Obama kan prosesnya itu.
415. AB : Ya. *Rekrutment* kita
416. YS : Ada dia senator yang terkenal
417. MH : Ya.
418. YS : Bolak-balik kan kita ngomong begitu. Bahwa tidak mungkin kita memunculkan pemimpin yang bahasanya Andi tadi, ujuk-ujuk tadi kan?
419. MH : Ujuk-ujuk. Mmm.
420. YS : Karena ini masalahnya sangat berat negeri ini. Gitu kan. Pemimpin itu kan harus *ada track record*-nya. Pernah jadi apa dia? Jaminan bahwa 2009 nanti, lima tahun dia kemudian bisa merubah keadaan yang lebih baik.
421. MH : Oke, oke.
422. YS : Nah, justru kita ini semua, ya, termasuk media harus memberikan pelajaran kepada masyarakat. Karena di Indonesia ini, yang banyak itu kan namanya *traditional voter* itu kan?
423. MH : Mmm.
424. YS : Jumlahnya banyak sekali. Petani. Dan tidak pernah ngerti ini orang berhasil apa tidak, orang ini jamin apa tidak, nggak ngerti.
425. AM : Dalam demokrasi yang tua boleh maju, yang setengah tua boleh maju, yang muda boleh maju. Laki-laki boleh maju, yang perempuan boleh maju. Kemudian rakyat
426. MH : Kita bicara peluangnya Bung Andi. Memang semuanya boleh, tapi peluangnya
427. AM : Sekarang, sekarang a...,

428. MH: sepertinya masih sangat sulit di Indonesia ya, untuk... untuk pemimpin muda.
429. AM: Ya, tergantung dari situasinya. Misalnya, kalau sekarang ini memang
430. MH: Situasi situasi saat ini?
431. AM: Kalau kita lihat, SBY ini kalau di antara generasinya, misalnya, Pak Amin Rais, Pak Wiranto, Pak... Bang Yos,
432. MH: Paling muda.
433. AM: Ibu Megawati, dia yang paling muda. Di antara antara generasinya.
434. MH: Jadi, muda itu seberapa? (tertawa)
435. AM: Ya, lima puluhan sekarang. Waktu terpilih dulu, lima puluh berapa itu
436. MH: Mmm.
437. AM: Lima puluh empat barangkali.
438. MH: Mmm. Oke.
439. AM: Jadi, kalau mau dikasih turun lagi misalnya, lebih muda lagi, itu tergantung dari mana dia punya, bisa mem-*back up* dia punya karier, mem-*back up* dia punya apa namanya, profile di kalangan masyarakat.
440. MH: Mmm.
441. AM: Kalau saya melihat begini justru: Kalau mau pemimpin muda tampil secara pasti, itu biar... SBY jadi presiden lagi satu kali
442. MH: Mmm.
443. AM: 2014 pastilah pemimpin muda generasi baru akan muncul.
444. MH: Mmm.
445. AM: Karena presiden kan dua kali masa jabatan kan sudah pasti. Tapi kalau yang lain
446. MH: Jadi, kalau ada pemimpin muda, Anda melihatnya tidak 2009, nanti 2014.
447. AM: Nampaknya masih susah 2009, tetapi
448. MH: Oke. Baik
449. AM: 2014
450. MH: bagaimana dengan a..., apa yang dikatakan presiden harus Jawa? Bisakah presiden non-Jawa atau calon presiden non-Jawa nanti a... menjadi atau memenangkan pertarungan calon presiden tahun 2009? Bagaimana militer versus sipil? Apakah militer masih menjual? Kita akan lihat sesaat lagi dalam *To Day's Dialogue*. Tetap bersama kami.

Sesi 5

451. MH: Anda kembali dalam *To Day's Dialogue*. Pemirsa, seperti apa kriteria pemimpin atau capres 2009 untuk Indonesia. Mas Tris, apakah a..., PAN misalnya, melihat Anda sebagai ketua umum melihat bahwa pertimbangan etnis juga merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan kriteria capres 2009?
452. SB : Nggak, nggak. Sama sekali nggak.
453. MH: Jadi, tidak harus orang Jawa?
454. SB : Nggak, nggak harus.
455. MH: Tidak harus dari Pekalongan?
456. (tertawa)
457. SB : Cuma saya nggak setuju dengan pandangan Saudara Andi bahwa, ini sebenarnya curi *start*. Jadi biarkan SBY memimpin lagi, 2014 baru generasi muda. Saya bilang nggak ada jaminan—dia walaupun tadi dia menjamin, “Pasti itu” nggak ada. Karena memang nggak ada undang-undangnya.
458. MH: Mmm.
459. SB : Siapa pun nanti 2009, yang muda yang tua, senior atau junior, boleh maju asal sesuai dengan undang-undang 40 tahun ke atas. Demikian juga 2014. Jadi nanti kalau SBY sudah..., karena nanti kan ada undang-undang itu, nggak boleh nanti Pak Sutiyoso mau maju lagi, bisa saja.
460. AM: Oh, bisa. Saya setuju.
461. SB : Nggak ada kepastian.
462. MH: Oke.
463. AM: Cuma peluangnya lebih besar kan kalau mau.
464. MH: 2014
465. YS : A..., mendikotomikan itu tadi sipil militer, Jawa non-Jawa,

466. MH : Saya belum tanya, langsung. Dengar sipil militer Bang Yos langsung jawab.
467. YS : Menurut saya, saya tidak setuju itu. Memang setuju saya dengan beliau.
468. MH : Mmm.
469. YS : Jadi itu jangan diangkat. Tetapi kita kenali dulu: *negeri kita itu masalah berat*.
470. MH : Mmm.
471. YS : Ya, eranya juga tidak menguntungkan. Apa, reformasi aja sudah digulirkan. Itu telah merubah perilaku masyarakat kita.
472. MH : Oke.
473. YS : Kalau dulu, Bung karno memimpin, kan bukan pemilihan. Dia muda itu karena beliau apa, orator yang hebat. Dia motivator ... didaulat jadi
474. MH : Bukan karena mudanya.
475. YS : presiden.
476. MH : Mmm.
477. YS : Pak Harto juga nggak dipilih 46 tahun. Dikasih Supersemar aja, jadi presiden kan?
478. MH : Oke.
479. YS : Dan pada saat itu kan *powerfull*, gitu.
480. MH : Ya.
481. YS : Mempimpin dengan wewenang dan kekuatan yang penuh dan di tangan dia.
482. MH : Oke.
483. YS : Nah, sekarang beda, itu. Di dalam alam demokrasi ini rakyat lebih berani memint...a..., menuntut hak-haknya, bahkan kadang-kadang mengabaikan kewajibannya.
484. MH : Ya.
485. YS : Artinya, zamannya berbeda sehingga pemikiran pemimpinnya juga beda.
486. MH : Oke. Tapi kenapa tidak boleh kita membedakan sipil militer. Kan ini yang selalu dibahas, a... pemimpin sipil dan militer dalam pilkada, misalnya Bang Yos.
487. YS : Mmm. Karena bisa aja...a... militer kan...kita ingin apa, coba. Militer tegas.
488. MH : Mmm.
489. YS : Ada juga militer nggak tegas, itu.
490. MH : Mmm.
491. YS : Tapi sipil yang lebih tegas daripada militer ada, gitu.
492. MH : Oke. Oke. Tapi dalam pilkada kan kita lihat dari beberapa daerah selalu ada
493. YS : Cuma, hanya tentara begini ya.
494. MH : atau ada satu partai yang menunjuk
495. YS : A..., Mutia, tentara itu kalau nyari yang muda
496. MH : calon dari militer.
497. YS : tidak bisa ketemu karena prosesnya panjang.
498. MH : Mmm.
499. YS : Itu setiap tangga harus dilewati.
500. MH : Mmm.
501. YS : Saya letnan dua sampai saya jadi letnan jenderal, itu, waduh, 29 tahun saya baru jadi itu, anu.
502. MH : Oke.
503. YS : Kalau orang sipil kan dari partai langsung jadi menteri.
504. MH : Oke.
505. YS : Gitu. Itu di atas, di atas KASAD itu.
506. MH : Mmm.
507. SM : Ya, justru itu. Makanya dalam konteks demokrasi secara umum, memang itu bukan panggung untuk orang berkarier lewat jalan militer. Memang dasarnya di situ Pak Yos. Jadi bahwa kemudian setelah Anda pensiun, Anda tidak dilarang untuk bersaing dengan politisi-politisi sipil, itu benar. Nah, oleh karena itu, kemudian di sini kalau ada tokoh militer yang sangat menonjol, seperti sekarang calon Republik di Amerika sudah sangat senior sekali, itu konsekuensi dari itu. Tapi ...res dari sistem demokrasi itu memang dasarnya adalah sipil. Bukan pada karier militer yang sedang aktif semacam itu.
508. MH : Oke.
509. SM : Tapi bukan berarti menutup terhadap yang sudah pensiun.
510. MH : Tapi masyarakat ketika memilih itu mempertimbangkan hal-hal seperti itu?

511. SM : Satu hal juga yang saya tidak setuju mungkin dengan Bang Yos bahwa harus ada *track record* yang bagus, gitu. Kalau bicara tentang *track record*, gitu ya, kita juga menjadi pesimis dengan masa depan Indonesia. Siapa orang-orang yang udah senior itu yang *track record*-nya hebat betul? Gitu.
512. MH : Mmm.
513. SM : Oleh karena itu, saya setuju dengan Mas Tris tadi bilang, "Masyarakat sebenarnya memilih untuk menumbuhkan harapan baru." Spekulatif sifatnya mungkin, gitu, dalam beberapa hal, dan itu ada benarnya. Dan demokrasi memang begitu, harus berani untuk mencoba. Nah, oleh karena itu,
514. MH : Mencoba yang tidak ... yang belum mereka pilih sebelumnya (tertawa)
515. SM : belum teruji
516. MH : (tertawa)
517. YS : Dan kalau kita salah, bisa nyesal lima tahun, masalahnya itu kan. Justru rakyat kita beri tahu
518. MH : Oke.
519. YS : pemimpin di negeri ini harus seperti ini kira-kira. Paling tidak menjaminlah. Menjaminnya dari apa?
520. MH : Seperti apa, seperti apa kita memilih
521. YS : Karena perjalanannya bisa kita... kita *record*, kan.
522. MH : Kita harus memilih seperti apa, sebelum ke Mas Anis?
523. SM : Sekarang, sekarang dimungkinkan. Sekarang dimungkinkan dengan—kalau dulu kan orang sangat susah untuk dikenal,
524. MH : Oke.
525. SM : gitu ya. Harus lewat jaringan partai dan seterusnya. Sekarang tidak perlu. Mutia punya tivi, gitu. Tiap malam bisa keluar. Keluar dengan visinya, dengan argumennya, dan seterusnya untuk meyakinkan dan untuk mensosialisasikan visi dan misinya, dan itu sangat mungkin sekarang
526. MH : Oke.
527. SM : untuk terbuka untuk memunculkan pemimpin-pemimpin alternatif.
528. SB : Makanya, saya menyampaikan kan, ada yang karena *track record*, seperti Bang Yos dan kawan-kawan, kemudian ada tokoh masyarakat, kemudian ada generasi baru. Nah, biarkan nanti ada muncul itu dari elemen-elemen itu. Ada yang generasi muda, ada yang generasi baru, ada yang *track record*, nanti rakyat milih seperti apa? Tapi yang penting, a..., rakyat harus dididik bahwa yang dipilih itu, yang dicari itu adalah pemimpin yang biasa berdebat seperti ini ya. Jangan pemimpin yang dimitiskan, yang gak pernah bersentuhan dengan publik, gitu lho.
529. AB : (tertawa)
530. SB : Model seperti Andi, Bang Yos, kita-kita ini. Rakyat jangan...
531. MH : Presiden siap berdebat tidak ya? Kita jarang nih bisa...
532. AM : Siap sekali.
533. MH : bisa melihat presiden berdebat di televisi.
534. AM : Kalau Anda lihat selama ini, Presiden SBY jadi presiden setiap kali siap dengan konferensi pers, dan ditanya oleh wartawan, dan...
535. MH : Konferensi pers kan bukan debat, Bung Andi.
536. AM : oh, yang ditanya wartawan itu pertanyaannya tajam-tajam semua. Dan kalau memang ada debat, kenapa tidak? Pada waktunya tentu saja.
537. SB : Saya terus terang agak apresiated dengan Pak Jusuf Kalla, misalnya. Kan dia dengan gampang sekali hadir di mana-mana untuk bisa menjelaskan; dan bisa berdebat.
538. MH : Ya. Presiden tidak selemuasa itu, Bung Andi?
539. AM : Oh, pada waktunya tentu saja akan ada waktu untuk berdebat. Tapi kalau presiden kan tugasnya bukan untuk berdebat.
540. MH : (tertawa)
541. AM : Tugasnya adalah untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan.
542. MH : Oke.
543. AM : Setelah itu pada waktunya, pada waktu kampanye nanti, ada forum-forum untuk debat,
544. MH : Mmm.
545. AM : pasti Presiden SBY akan datang.

546. MH: Baik. Mas Anis, apa kriteria sekaligus menutup ini masalahnya.
547. AB: Ya, kalau kita berada dalam situasi seperti ini, pemimpin yang memberikan harapan. Bangsa ini butuh harapan. Kita menuju kemajuan. Karena itu, ke depan harus melihat pemimpin yang seperti ini. Yang kedua, punya *track record* boleh-boleh saja, tapi itu bisa dalam posisi eksekusi gitu. ... di depan yang bisa membuat bangsa itu merasa maju ke depan. Karena itu saya melihat, kalau ada figur baru, figur muda, yang mungkin angka-angka di situ masih rendah,
548. MH: Ya,
549. AB: tetapi bisa tampil, memberikan alternatif, ini bisa menjadi tantangan serius untuk SBY.
550. AM: (ingin berkomentar, tetapi kurang jelas)
551. AB: Saya terus kan sebentar. Bisa menjadi tantangan bisa menjadi tantangan serius untuk Presiden SBY. Kenapa? Karena figur-figur baru ini, yang mungkin angkanya masih pada rendah-rendah itu,
552. MH: Mmm.
553. AB: akan memberikan *hope* ke depan. Nah, bahwa di dalam eksekusinya dia harus merekrut orang-orang yang punya pengalaman,
554. SB: Seperti (tidak jelas),
555. AB: iya, tentu iya. Tetapi itu bisa dilakukan. Pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno dan lain-lain itu, harus ditopang. Karena kalau tidak ada topangan itu, siapa pun yang menjadi pemimpin ini tidak bisa jalan.
556. MH: Oke. Baik.
557. AM: Tapi sejarah juga mencatat bagaimana, begitu banyak yang menawarkan harapan-harapan dan harapan itu harapan palsu juga. Karena itu juga rakyat harus lebih kritis melihat tawaran-tawaran harapan tersebut.
558. MH: (tertawa)
559. AM: Pilih yang pasti-pasti aja, kira-kira begitu.
560. MH: (tertawa) Baik. Oke, baik. Tapi, mungkin memang saat ini, kita sebagai *election channel* Metro TV mencoba mengungkap atau mengangkat topik-topik seperti ini untuk melihat calon-calon alternatif, a..., mungkin saat ini mungkin masih terlalu dini ya, Bung Saiful kalau tadi Anda katakan mungkin masyarakat belum langsung menunjuk ke nama,
561. SM: Ya.
562. MH: Tapi nanti secara berkala akan terus kita hadirkan, mudah-mudahan ada nanti nama-nama yang lebih jelas, yang bisa kita kemudian diskusikan. Demikian *To Day's Dialogue* untuk malam ini, pemirsa. Silakan saran dan kritik Anda kirimkan ke todaydialogue@metrotvnews.com. Saya Meutya Hafid mengucapkan terima kasih sekali lagi; tentunya untuk semua narasumber, Bang Yos terima kasih, Bang Saiful terima kasih, Bang Andi Mallarangeng terima kasih, Mas Anies terima kasih, dan Mas Tris juga terima kasih.
563. SB: Hidup adalah perbuatan
564. MH: (tertawa) Baik.

TDD080708

Judul/Topik : Banyak Parpol Banyak Problem
 Tokoh utama : Wiranto (WR), Priyo Budi Santoso (PB)
 Nama Acara : *To Day's Dialogue*
 Stasiun televisi : Metro TV
 Tanggal, bulan, dan tahun : 08 Juli 2008
 Kode Induk Data : TDD080708,01--n

Sesi 1

Sesi ini sebagian tidak terekam karena keterbatasan dukungan teknis. Akan tetapi dalam rekaman masih tampak tayangan persentase grafik perihal lembaga yang bisa menyuarakan keinginan rakyat.

1. NS¹ : hanya media massa dan ormas. Partai hanya 11 persen. Jadi kemudian kalau Bapak-Bapak di sini mau berbangga hati mengatakan, "Kami menyuarakan aspirasi Anda"
2. WR² : Partai itu partai lama.
3. NS : Partai lama.
4. MQ³ : (tertawa)
5. WR : Iya. Partai baru...(tidak terlalu jelas)
6. NS : Tapi, lagi-lagi kita tadi sepakat tidak ada yang la...a..., tidak ada yang lain kok antara partai baru dengan parpol lama. Lembaga yang bisa menyuarakan keinginan rakyat media massa. Jadi, orang lebih percaya Metro TV daripada Hanura, lho.
7. WR : Oh ya.
8. NS : Orang lebih percaya mungkin a..., media lain daripada Partai Golkar. Jadi tidak bisa lagi berlindung di balik retorika, "Kami menyuarakan..."
9. PB⁴ : Lain itu Nana. A..., Nazwa. Lain sekali membandingkan bukan *apple to apple* gitu. Sebuah negeri tanpa partai politik, bahaya karena yang akan muncul adalah kepemimpinan otoriter baru. Dia makhluk yang akan menggunakan institusi militer untuk kepentingan perpolitikan dia. Oleh karena itu dengan segala kekurangan terhadap partai politik saya menyerukan termasuk ngajak Anda Nana untuk bersama-sama memperbaiki citra ini.
10. NS : Mm.
11. PB : Anda saya undang untuk jadi pengurus Golkar kalau mau sekarang.
12. NS : Waduh, (tertawa)
13. MQ : (tertawa)
14. NS : sudah banyak tawaran, tapi belum tertarik. Mas Qodary, poinnya bukan itu sebetulnya.
15. MQ : Betul.
16. NS : Poinnya adalah a..., bahwa a..., parpol selama ini dinilai tidak berhasil kon menyuarakan
17. MQ : Betul.
18. NS : aspirasi bahwa kemudian orang melihat lembaga-lembaga lain yang lebih berhasil.
19. WR : Ada suatu hal Nazwa yang membuat seperti itu ya. Mengapa? Karena..., memang betul bahwa berpolitik itu merupakan suatu upaya untuk merebut kekuasaan, tapi tidak berhenti di sana harusnya di situ hanya sebagai satu tahapan untuk sasaran terakhir mensejahterakan masyarakat.

¹ Nazwa Shihab

² Wiranto

³ M. Qodar

⁴ Priyo Budi Santoso

20. NS : Mm.
21. WR : Nah, problemnya sekarang tatkala partai politik mendapatkan kekuasaan, rata-rata berhenti di sana. Berhenti di sana mempertahankan kekuasaan itu mengelolanya, dan mendapatkan keuntungan kekuasaan untuk kekuasaan.
22. NS : Oke.
23. WR : Ini ni, ini masalah ini.
24. NS : Oke.
25. WR : Tapi kalau sudah menggunakan hati nurani,
26. NS : Waduh, lagi-lagi kampanye terus ini (tertawa). Pak Wiranto hati nurani.
27. (semua tertawa kecuali WR)
28. WR : Bukan begitu, Kan tadi ditanya tadi perbedaannya?
29. NS : Oke. Oke.
30. WR : Kalau menggunakan hati nurani maka dia akan selalu ingat
31. PB : Berapa kali beliau ngomong hati nurani terus dari tadi (teratawa)
32. NS : Oke.
33. WR : selalu ingat diingat bahwa bukan itu tujuan.
34. NS : Ini lagi pengenalan.
35. WR : Iya.
36. NS : Ini lagi fungsi pengenalan. Oke. Silakan Mas Qodary. Kembali ke pertanyaan saya.
37. MQ : Ya, saya kira memang tidak membantah ya, tidak ada yang membantah bahwa partai politik itu sesuatu yang esensial dalam sistem demokrasi. Harus. Persoalannya kan partai politik yang seperti apa?
38. NS : Mm.
39. MQ : Nah, partai politik yang kita milik sekarang ini memang kelihatannya belum memenuhi harapan daripada publik. Makanya, ketika misalnya, Indobarometer survey, gitu—apakah Anda puas atau tidak puas dengan kinerja partai? Mayoritas mengatakan, “Tidak puas.”
40. NS : Mm.
41. MQ : Percaya atau tidak percaya, mayoritas mengatakan tidak percaya. Dan ketika tadi ditandingkan dengan lembaga lain, ya, itu kelihatan bahwa memang posisi partai politik yang nota bene salah satu tugas intinya adalah untuk mewakili masyarakat, kan Mas Priyo kalau ceramah kepada kader-kader Golkar, ya, itu selalu mengatakan, “Salah satu tugas dan fungsi partai adalah agregasi kepentingan masyarakat,
42. PB : Ya.
43. MQ : tapi justru a..., fungsi dan tugas itu yang dirasakan amat sangat kurang, gitu.
44. NS : Mm.
45. MQ : Nah, memang tidak ada a..., apa namanya, jaminan. Kita tidak bisa pastikan bahwa partai baru nanti akan sama. Tapi kan dari sejarah yang sudah berulang tahun sembilan-sembilan, dua ribu empat, partai-partai baru itu, Pak, itu memang kelihatannya ketika dia sudah naik itu nggak ada bedanya dengan yang lama-lama, yang sudah-sudah, begitu lho.
46. NS : Mm.
47. MQ : Garansi apa yang bisa diberikan dari sekarang kira-kira bayangan dari Hanura itu dia akan bisa beda dengan, katakanlah misalnya dengan partai Golkar?
48. NS : Apalagi kan sebetulnya pemain-pemain lama juga, Pak? Pak Wiranto kan pemain lama.
49. MQ : Itu Pak. Itu yang membuat jadi sulit publik untuk percaya.
50. NS : Pak Fuad Bawazir pemain lama, Jafar Beliber pemain lama. Jadi, orang-orang yang kita sudah tahu *track record*-nya
51. MQ : Betul.
52. NS : tapi hanya berbungkus yang baru. Kalau kemudian sekarang akan mengatakan berbeda, orang lhoh dulu nggak beda kok; sama aja. Nanti akan saya kas,
53. MQ : Iya. Itu yang membuat publik sulit untuk mendapatkan keyakinan.
54. NS : Kita akan kasih kesempatan untuk Hanura setelah peristiwa berikut.
55. WR : Iya.
56. NS : Tetaplah bersama kami. Masih ada juga waktu untuk Anda berinteraksi di 58300022 sekali lagi, 58300022, sesaat lagi setelah peristiwa berikut.

Sesi 2

57. NS : Terima kasih Anda terus di *To Day's Dialogue*. Malam ini topiknya, banyak parpol banyak problem. Saya bersama dengan ketua partai Hanura, Wiranto, ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santo, dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodar. A..., silakan tadi ditanggapi dulu, Pak Wiranto.
58. WR : Iya.
59. NS : Apa garansinya bahwa ada yang baru karena toh
60. WR : tokoh-tokohnya
61. NS : stok lama juga.
62. WR : Memang benar bahwa partai Hanura diisi oleh tokoh-tokoh lama ya. Dari berbagai partai bahkan
63. PB : Iya.
64. WR : dan juga tokoh-tokoh yang barangkali yang *track record* yang lalu juga tidak begitu menggembirakan, tapi kami tahu bahwa
65. MQ : Siapa itu, Pak *track record*-nya tidak menggembirakan atau di...
66. WR : ya barangkali termasuk saya kan? Gak apa-apa. Tapi kami mencoba untuk mendesain satu wadah baru, di mana mereka bisa lebih leluasa, ya, lebih damai, lebih bersemangat, dan lebih bisa membangun suatu kebersamaan untuk satu tujuan. Dan itu di partai Hanura.
67. NS : Oke
68. WR : Kami bisa mengubah dari berbagai perilaku itu, berbagai idiologi yang mereka miliki menjadi satu idiologi baru yang berkiblat kepada, "Ayo, kita dengarkan suara rakyat!"; Hati nurani rakyat.
69. NS : Bisa ya, Pak dirubah kalau tokoh-tokoh parpol begitu bisa dengan begitu mudah dicuci otaknya dengan idiologi,
70. WR : Oh, bisa, bisa.
71. NS : begitu, sudah sekian lama berkecimpung dengan praktek
72. WR : Ikut ikutlah aktivitas sekali di partai Hanura Anda percaya bahwa itu bisa.
73. NS : Oke.
74. (semua tertawa)
75. NS : Oke. Kita mau fokus sekarang tidak hanya ke partai Hanura. Kita mau fokus ke lebih lebar. Yang jelas akan ada 34 partai
76. MQ : Iya, iya.
77. PB : Iya.
78. WR : Pas.
79. NS : yang bertarung. Ini bagaimana dampaknya terhadap sistem a..., ketatanegaraan kita, Mas Pri?
80. PB : Itulah. Sebenarnya sejak awal Golkar itu menawarkan sebuah solusi terhadap kebuntuan ini semua, agar ke depannya itu jumlah partai semakin sederhana; semakin, taruhlah yang bertanding nanti lima, tujuh, dan sudah ideal. Kami sesungguhnya dengan baik hati, dengan niat tulus menginginkan itu ketika pembicaraan mengenai undang-undang politik, tapi apalah jurkam kami dikritik: Golkar ingin menjadi hakim, PDIP, partai-partai lain juga dikritik mengenai ini; demokrasi ini.
81. MQ : Tapi kan Golkar partai besar, Mas. Seharusnya menggalang kekuatan dengan PDIP dan partai-partai yang lain.
82. PB : Sebenarnya, andaikan kala itu,
83. MQ : Dan fraksi terbesar lho Anda lho.
84. PB : Andaikan kala itu kami tidak dituntut terlalu kejam kami akan ambil oper itu, kita ketok palu saja agar partai-partai itu semakin sederhana ke depan.
85. WR : Harusnya begitu.
86. PB : Harusnya ke sana.
87. NS : Jangan-jangan,
88. WR : Harus ke situ
89. MQ : Menaikkan harga BBM sampean tega, masa cuma menerapkan partai sedikit nggak mampu.
90. NS : Karena itu,

91. PB : Golkar tidak dalam memprakarsai kenaikan harga BBM
92. MQ : (tertawa)
93. NS : Oke.
94. PB : tapi kami memahami, kan gitu.
95. NS : Oke. Kunci. Oh jangan-jangan kemudian kecurigaan orang memang Golkar senang nih banyak partai. Jadi kan suara-suara ini jadi terpecah. Sementara suara Golkar sendiri masih tetap akan ada setidaknya-tidaknya yaah, berapa persenlah begitu.
96. PB : Ya...aah, kami...
97. NS : Suara-suara kand yang lain akan terpecah-pecah, jadinya menang. Jadi ini strategi Golkar juga sebetulnya.
98. PB : Oke. Kami ambil hikmahnya saja kalau gitu. Kalau gini sudah terjadi gini, mau apa? Toh Golkar punya modal besar: 25 juta. Dari massa kita yang kalau dalam kondisi darurat pun masih, insyallah akan bersama-sama Golkar karena *flat form* kami jelas, gitu.
99. WR : Tapi andil saya, andil saya cukup besar juga, andil saya itu.
100. NS : Di golkar, ya? Jadi seharusnya utang budi ke Pak Wiranto.
101. WR : Iya.
102. (semua tertawa)
103. NS : Baik. Kembali ke topik tadi. Jadi, dampaknya apa? Konsekuensinya apa terhadap a...
104. MQ : Banyak, ya,
105. NS : terhadap sistem pemerintahan kita, Mas Quodar?
106. MQ : Pertama dari sistem pemerintahan kita yang sementara ini kalau diubah atau diamandemen, itukan sistem presidensialisme. Nah, dengan presiden yang dipilih secara langsung lalu kemudian dengan ...jumlah partai politik yang begitu banyak dan katakanlah nanti ter...a..., dukungan suara itu akan terfragmentasi, maka sedikit banyak memang siapa pun yang akan terpilih, katakanlah misalnya Pak Wiranto, itu akan sedikit banyak akan sulit untuk melakukan ak...a..., apa, konsolidasi politik dan eksekusi kebijakan.
107. NS : Mm.
108. MQ : Maksud saya gini ilustrasi. Kalau Pak Wiranto punya perusahaan. Isinya itu tiga pemegang sahamnya, besar-besar semua, tentu lebih mudah mengelolanya dibanding pemegang saham itu lima belas. Pecah-pecah semua. Jangan kan mau rapat, Pak. A..., jangankan mau ngambil keputusan, rapat aja belum tentu kuorum, begitu. Itu satu.
109. NS : Mmm
110. MQ : Yang kedua. Banyaknya partai di kita ini, ini asumsi saya, Pak,
111. WR : Iya.
112. MQ : mudah-mudahan saya salah,
113. WR : Iya
114. MQ : itu tidak dibarengi dengan banyaknya tawaran pemikiran dan variasi program kerja.
115. WR : Ya.
116. MQ : Kenapa saya katakan begitu, karena saya sudah pernah lihat itu: daftar atau buku prog a..., buku resmi yang berisi program partai-partai pemilu tahun 2004.
117. WR : Mmm
118. NS : Mmm
119. MQ : Sulit saya membedakan antara satu partai dengan partai yang lain.
120. NS : Itu, itu kenapa ya, Mas? Itu apa karena mereka kurang kreatif, kurang cerdas untuk melihat peluang yang lain, atau memang pada dasarnya tidak bis, banyak yang bisa ditawarkan, Pak?
121. MQ : Satu itu. Yang kedua memang kita khawatir. Memang sebetulnya, partai politik tadi memang tujuannya bukan untuk memperbaiki keadaan. Kalau memang memperbaiki keadaan, dia kan harus *go to details*, gitu ya. Dia harus bisa cukup detail bicara strategi. Jadi, memang akhirnya kesan-kesan bahwa partai sebagai kendaraan politik itu, ya muncul antara lain dari antara realitas semacam ini. Nah, kita juga punya data, punya survey. Waktu itu kita surveynya 24 partai, Pak. Apakah bisa membedakan satu partai dengan partai yang lain? Mulai dari nama, lambang, sampai kemudian ke program. Mayoritas masyarakat mengatakan tidak bisa membedakan. Jadi kalau masyarakat bingung, kualitas pilihan nanti akan jelek. Bahkan lebih buruk lagi kalau

ternyata masyarakat bingung, nggak bisa milih, akhirnya justru golput, yang di...Bapak hindari itu. "Ah, daripada nggak nggerti, salah pilih, ya udahlah, nggak usah milih aja," gitu. Jadi,

122. NS : Mm
123. MQ: tadi saya kira ada benarnya ketika di depan itu judulnya "Banyak Partai, Banyak Problem" itu bisa menimbulkan persoalan.
124. WR: Ada jalan keluarnya,
125. NS : Gitu ya?
126. WR: sebenarnya. Saya setuju itu. Itu gambaran umum begitu, ya.
127. MQ: Iya.
128. WR: Tapi ada satu jalan keluarnya, yakni bahwa setiap partai politik seharusnya memahami problem-problem nasional dan sudah juga, a..., mencari solusi-solusi yang terbaik.
129. MQ: Mmm.
130. WR: Kemudian menjadikan itu program partai.
131. MQ: Mm.
132. WR: Nah, catatannya adalah siapa pun pemimpin yang muncul dari partai itu, dia harus instrument dari konsep. Jangan kebalik (seperti) sekarang. Tatkala dia jadi pemimpin, konsep dia buang, dia bikin konsep baru untuk mengamankan posisinya.
133. NS : Oke.
134. WR: Ini kesalahan yang sangat-sangat fatal
135. NS : Oh, pemerintahan sekarang seperti itu? SBY seperti itu, Pak Wiranto?
136. WR: Rata-rata seperti itu.
137. (MQ dan PB tertawa)
138. NS : Termasuk SBY dan JK, bosnya Mas Priyo?
139. WR: Tanya beliaulah.
140. PB : Nggaklah.
141. (semua tertawa kecuali WR)
142. PB : Kalau jle... Golkar kan punya pengalaman bertahun-tahun; bersama-sama dalam kondisi gelombang pasang naik bangsa ini. Artinya apa? Pilih aja yang jelas yang sudah mempunyai
143. WR: Iya
144. PB : pengalaman batin dalam hal itu.
145. WR: Dicek aja, dicek.
146. WR: Antara konsep dan realita, dicek aja. Apakah ada per... kesamaan? Pasti perbedaannya ada.
147. NS : Oke. Faktanya sekarang sudah ada 34 parpol dan a..., a..., resikonya seperti itu tadi akan sulit sekali membentuk pemerintahan yang kuat, berarti, ya, lagi-lagi koalisi-koalisi yang semi-permanen
148. PB : Bettuuul
149. NS : koalisi-koalisi dalam tanda kutip "banci" yang ada sekarang, dibilangnya koalisi,
150. PB : Itulah yang...saya
151. NS : tapi hak angket juga misalnya, yang sontoloyo-sontoloyo, Mas Priyo.
152. MQ: (tertawa)
153. PB : yang saya khawatirkan ke depan, gitu. Nanti, kalau tidak ada yang mayoritas, kemudian pemerintahan sudah dibentuk dengan susah payah dengan koalisi ini. Yang terjadi apa? Presiden yang terpilih tidak bisa bekerja, tanpa dukungan parlemen, dalam kondisi tata aturan perundangan dan Undang-Undang Dasar 45 yang seperti yang sekarang anjel?? amendemen ini. Mau nggak mau presiden harus bekerja sama dengan parlemen; dengan DPR; dengan segala kekuarungannya. Karena itu dugaan saya dengan adanya ini, mau nggak mau ke depan, saya usulkan: presiden yang terpilih itu adalah mereka yang didorong, didukung, disokong oleh partai-partai pemenang pemilu: satu, dua, tiga, empat, atau apa. Atau yang lain-lain kemudian dengan posisi oposisi tidak apa-apa. Itu baru ideal bahwa bangsa kita ini akan kita bisa arahkan untuk kesejahteraan rakyat sebenarnya.
154. NS : Mmm.
155. PB : Kalau sekarang, mau di sini,
156. NS : Jadi, bibir berat di syarat presidennya. Itu salah satu cara

157. MQ : Oh, jangan!
158. PB : Oh, jangan!
159. NS : begitu?
160. PB : Jangan. Menurut saya, tidak itu, tidak menyelesaikan masalah. Katakanlah misalnya, syaratnya 30 persen, ya. A..., kalau 30 persen...kalaupun misalnya presiden terpilih itu dukungannya 30 persen, yang 70 persen nggak sama-sama dia. Di Indonesia ini koalisi yang sesungguhnya itu bukan pada saat pencalonan, tapi saat membentuk pemerintahan.
161. NS : Mm.
162. MQ : Gitu lho. Karena apa? Kalau di...ada kejadian-kejadian, kepala daerah, misalnya, di salah satu daerah, didukung semua partai politik, tapi begitu dia terpilih mau mengetok APBD justru yang menolak yang menghambat ketoknya palu itu adalah partai-partai yang mendukung dia; yang malah nyuruh ketok palu adalah partai yang justru tidak mencalonkan dia, begitu.
163. NS : Mm. mm.
164. MQ : Nah, yang penting saya kira begini: Ke depan itu, siapa pun presiden terpilih kalau dia membentuk koalisi tidak perlu semua partai dirangkul; tidak bisa terlalu besar. Cukup, yaa, 50 persen plus satulah.
165. NS : Mm.
166. MQ : Ya, jadi, kalau caranya seperti itu, jumlah partai yang dikumpulkan tidak terlalu banyak. Maka kemudian jatah menteri dari masing-masing partai itu cukup besar.
167. NS : Oke.
168. MQ : Nah, kalau sekarang ini semua partai dapat kebagian, tapi kecil-kecil kalaupun harus kehilangan menteri akhirnya,
169. NS : Mm.
170. MQ : ya sudah, cuek saja apalagi sudah menjelang akhir, begitu.
171. NS : Gitu ya? Akhirnya bilanganya, "Saya wakafkan atau sudah dihibahkan."
172. MQ : Iyaa.
173. PB : (tertawa)
174. NS : Ini bukan lagi persoalan.
175. WR : Itu ada.
176. NS : Itu salah satu problem dari a..., banyaknya partai baru. Itu baru satu itu.
177. WR : Ada jalan keluarnya, Mas.
178. MQ : Mmm.
179. NS : Tapi lagi-lagi saya harus *break* dulu untuk
180. WR : Oh, ya.
181. NS : menanti jalan keluar dari Pak Wiranto
182. WR : Iya.
183. NS : setelah pariwisata berikut. Sudah banyak sekali penelpon yang mengantri untuk bergabung bersama kami. Saya akan jawab telepon Anda sesaat lagi setelah pariwisata berikut ini.

Sesi 3

184. NS : ... Anda terus bersama kami di *To Day's Dialogue*. Dan saya akan menyapa penelpon pertama, ada Pak Idris di Bogor. Selamat malam Pak Idris.
185. ID⁵ : Halo, selamat malam.
186. NS : Silakan langsung. Singkat saja ya, Pak, ya. Banyak soalnya yang mengantri.
187. ID : Kepada Pak Wiranto, saya hanya akan mengatakan begini
188. WR : Iya, Pak Idris.
189. ID : A..., saya hanya akan mengatakan bahwa kalau Pak Wiranto itu kan orang lama, ya, di Golkar, dan besar juga dari Golkar.
190. NS : Mm.

⁵ Idris

191. ID : dan saya berkeyakinan Pak Wiranto ada iri sakit hati untuk mencibirkan dirinya sebagai pahlawan. Yang kami butuhkan dari Pak Wiranto ketika memang merasa diri itu pernah merasa besar di Golkar, tolong Anda sampaikan kepada masyarakat, apa sih kesalahan Golkar sekaligus Anda sebutkan, Itu tuh orang-orang yang tergabung dengan kami yang terdiri dari beberapa partai dan tokoh-tokoh partai yang telah berbuat kesalahan, dan tolong semuanya untuk diyakini sebuah kesalahan. Toh dalam kenyataannya dan seluruh partai yang saya lihat tidak (kurang jelas) dari partai-partai sebelumnya.
192. NS : Oke.
193. ID : Artinya gini: ada pembertitahuan yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat.
194. NS : Baik.
195. ID : Itu aja, Pak Wiranto.
196. NS : Baik. Jadi, Anda minta Pak Wiranto untuk menunjukkan apa kesalahan, gitu ya? Kesalahan partai yang dulu sempat membesarkan seorang Wiranto.
197. ID : Iyalah. Tentunya saya mohon maaf Pak Wiranto, sampean mantan orang yang besar di angkatan sampaikanlah ke hadapan publik bahwa juga pernah berbuat semacam ini rekan-rekan kami juga dari partai Hanura, ... yang ada di Hanura itu
198. NS : Oke.
199. ID : berbuat salah. Ceritakan kepada masyarakat. Jangan menjadi pahlawan di siang harilah, tolong.
200. NS : Terima kasih Pak Idris di Bogor. Kita ke Sulawesi Utara dengan Pak Marentek. Selamat malam, Pak Marentek. (ada *feed back*). Sebelumnya boleh volume televisinya dikecilkan supaya tidak *feed back*?
201. MR⁶: Iya. Iya, ya. Selamat malam ya. Ya selamat malam. Ya terima kasih Metro TV. A..., pertanyaan saya seperti tema ini. Memang banyak parpol; partai ya banyak masalah; banyak problem.
202. NS : Mm.
203. MR : (ada yang tidak jelas) seperti pertanyaan bapak yang dari Bogor tadi. Seharusnya Bapak lebih konsentrasi di Golkar. Kalau trus kalah karena Pak Yusuf Kalla waktu itu, ya tetap bertahan di situ karena (tidak jelas) jadi problem juga, gitu lho.
204. NS : Mm.
205. MR : seharusnya, seorang pemimpin yang cerdas, kepribadian yang integritasnya kuat kalau bergabung dengan Golkar lagi pasti saya yakin bahwa punya potensi untuk maju.
206. NS : Begitu ya. Jangan-jangan Pak Marentek kader Golkar, nih.
207. (ada yang tertawa)
208. MR : Nggak. Saya bukan kader Golkar. Saya kader PDIP sebenarnya.
209. NS : Oh. Kader PDIP ya?
210. (semua tertawa)
211. MR : Kalau Pak Wiranto tidak memaksimalkan a..., apa itu, seperti Pak Budi katakan tadi,
212. NS : Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Marentek. Nonton Metro TV trus ya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Wiranto.
213. WR : Iya, Begini. A..., yang pertama saya yang di Bogor tadi. Saya punya saran bahwa nantinya siapa pun yang menjadi presiden-wakil presiden, ataupun para menteri, harus melepaskan atribut kepartaian, jangan menjadi pengurus partai. Sebab itu, pengurusan ganda yang membuat rakyat menjadi kehilangan kepercayaan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua. Partai politik itu bukan lembaga peradilan, bukan lembaga untuk pengakuan dosa. Bukan. Tetapi menjadi lembaga kejuangan. Oleh karena itu, bentuk dari pengakuan sebuah kesalahan adalah bagaimana kemudian melakukan suatu langkah-langkah politik yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Itu menurut saya seperti itu. Nah, yang terakhir tadi, Pak... Saya tidak bisa masuk atau duduk manis dalam suatu kendaraan yang saya sendiri sudah tidak cocok di dalamnya.
214. NS : Tidak cocok karena kalah, Pak.
215. WR : Bukan.
216. NS : Tidak cocok karena apa?

⁶ Marentek

217. WR : Bukan. Bukan karena kalah. Karena saya masih mempunyai suatu obsesi bahwa harus ada perubahan di negeri ini. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa seorang yang malu dan takut untuk berbuat dia tidak akan mengalami perubahan.
218. NS : Mmm.
219. WR : Lalu, kemudian,
220. NS : Apa yang membuat Anda yakin akan bisa berbuat lebih banyak di Hanura partai yang baru saja terbentuk, yang baru saja lolos dibandingkan Golkar yang sudah puluhan tahun.
221. WR : Nyatanya, kami baru satu tahun kami sudah mempunyai suatu infrastruktur yang lengkap seperti ini. Artinya,
222. NS : Dan belum teruji Pak,.
223. WR : artinya,
224. NS : dengan segala hormat. Sudah lolos, belum
225. WR : artinya, tawaran,
226. NS : teru...
227. WR : baru satu tahun. Tawaran kami dari publik mendapat respons yang bagus. Bahwa ada harapan baru di... katakanlah seperti yang hati mereka itu ada harapan baru dengan partai Hanura.
228. PB : A...,
229. NS : Oke.
230. PB : Saya lihat, Pak Wiranto ini, Bapak lupa satu hal
231. WR : Ya.
232. PB : bahwa di Golkar sekarang dengan *new paradigm* dengan paradigma baru, kita telah menempatkan kami-kami dari generasi muda ini dalam posisi-posisi penting di partai. Bukan orang-orang yang tua semua. Kami-kami yang muda, berprestasi, punya kemampuan, punya bakat dan seterusnya, cocok ...
233. NS : Jangan-jangan justru itu Pak Wiranto tidak mau karena kalau orang tua tidak dapat tempat lagi di partai.
234. MQ : (tertawa)
235. PB : Oh, bukan begitu, Na. Belum tentu. Kami sudah tentu sesuatu hari bersaing dengan Bapak. Sesuatu hari.
236. (rekaman terpotong karena keterbatasan kemampuan teknis)
237. PB : Karena saya juga belajar banyak hal, merekam banyak hal
238. WR : Iya.
239. PB : Tapi oleh karena itu, sesungguhnya, ya, meskipun saya hormat terhadap langkah Pak Wiranto bikin partai baru, menurut saya terlalu berisiko taruhannya, bukan saya kalau Partai Hanura suaranya ternyata kecil, apa, bajunya itu terlalu kecil untuk Bapak,
240. WR : Nggak apa-apalah.
241. PB : itu, kami...
242. WR : bukan perjuangan pribadi saya. Saya sudah menempatkan diri saya sudah bukan apa-apa dengan perjuangan mengubah nasib negeri ini. Saya bagian suatu perubahan. Kalau saya diam di sana saja, saya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa?
243. NS : Kalau mau berbuat banyak harus berkuasa dulu, Pak Wiranto. Kalau mau berbuat banyak.
244. WR : Bukan. Mempunyai suatu peran di dalam suatu perubahan itu.
245. NS : Dengan cara
246. WR : Di Golkar saya di sana hanya anggota kehormatan, calon presiden yang menunggu kabar baik bahwa saatnya bertarung kembali. Dan itu kan menunggu satu hal
247. PB : Nggak.
248. WR : tidak ada satu *action*.
249. PB : Mudah-mudahan bukan karena itu, Pak. Karena di Golkar kan bertebaran tokoh, ya. Yang paling diunggulkan Pak Jusuf Kalla, ada Pak Sultan, ada Surya Paloh, ada Agung Laksono, ada Pak Prabowo, ada sekian yang muda-muda kalau boleh pada asumsi kami pada saat konvensi...
250. NS : Oke.
251. PB : Apakah karena itu, Pak. Takut bersaing di internal kemudian itu. Kenapa kemudian bikin... Tapi meskipun demikian saya akan menaruh hormat.

252. NS : Oke. Tetapi yang jelas fenomena Hanura itu fenomena bahwa ada orang yang kemudian kalah, dan kemudian membuat partai baru, itu kan tidak terjadi di Hanura saja. Kita lihat dari banyak konflik-konflik partai yang orang-orangnya, fungsionarisnya ketika kemudian dihadapkan dengan suatu misalnya, pergeseran kepemimpinan, mereka bukannya malah justru memperkuat partai, atau rekonsiliasi, malah justru membuka partai baru; membuat partai baru.
253. WR : Memang. Tapi jangan memvonisnya dong, kalau saya...bukan karena kalah. Nah, Rasulullah saja tatkala dia mensiarkan ini kebenaran wahyu Allah di Mekkah nggak berkembang dia. Dia tidak patah hati dan tidak kemudian nongkrong di situ. Tidak. Dia hijrah kok. Dan dia berhasil kok.
254. NS : Hijrah ya? Untuk menyebarkan wahyu (tertawa) Anda juga mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, Pak. Berat sekali Pak Wiranto.
255. WR : Bukan wahyunya. Tapi artinya seseorang tidak bisa menunggu tatkala dia terjun dan bisa tuntas.
256. NS : Mm.
257. WR : Dia butuh lahan lain untuk bisa berkembang. Jangan hanya karena kalah. Bukan.
258. NS : Oke.
259. WR : Tapi orientasi perjuangan.
260. NS : Oke. Sayang sekali harus *break*. Saya akan kembali ke Anda untuk meminta jawaban yang tadi. Setelah pariwisata, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di *To Day's Dialogue*.

Sesi 4

261. NS : Terima kasih Anda terus di *To Day's Dialogue*. Saya akan sapa penelepon saya yang terakhir malam ini. Ada Pak Herman di Tangerang. Selamat malam Pak Herman.
262. HM⁷ : Selamat malam.
263. NS : Silakan. Singkat saja, Pak.
264. HM : Iya. Oke. Maaf Bapak-Bapak. Selama ini, yang sekarang kita lihat itu banyak parpol yang mengatasnamakan demokrasi yang artinya kembali ke rakyat. Cuma yang kita lihat pada kenyataannya parpol itu hanya "demo kreasi", gitu.
265. NS : Demo kreasi.
266. (semua tersenyum)
267. HM : Artinya kayak demo kreasi. Demo itu kan kayak demo masak, demo apa gitu.
268. NS : A... (=iya)
269. HM : Jadi, partai politik sekarang itu hanya demo kreasi artinya cuma memamerkan kreasi baru, gitu. Dan realnya kita kurang begitu melihat, gitu.
270. NS : Oke. Jadi
271. HM : Mudah-mudahan partai politik yang sekarang itu nggak demo kreasi dan sungguh-sungguh memperjuangkan demokrasi.
272. NS : Baik. Pak Herman, Pak Herman Anda mau coblos partai lama atau partai baru nanti a..., April?
273. HM : Untuk saat ini...
274. NS : Sudah tahu belum?
275. HM : Udah, udah tahu.
276. NS : Atau mau goput jangan-jangan.
277. HM : Cuma kalau kita melihat partai politik yang hanya cuma demo kreasi aja, ya mungkin lebih memilih golput, kayaknya.
278. NS : Milih golput, ya. Oke. Atau jangan-jangan seperti acara Metro TV: Demo Cracy bukan demokrasi. Silakan. Saya mau ke Mas Priyo dulu.
279. WR : Ya, silakan.
280. PB : Saya berterima kasih atas segala masukan dari masyarakat semacam itu. Tapi siapa tau ini waktu masih ada mereka berubah pikiran karena kami, apa, Golkar sangat simpatik terhadap masyarakat memperhatikan, tujuan kami
281. NS : Apalagi mau pemilu ya, simpatik sekali kan?
282. PB : Iya. Tujuan kami adalah anu kesejahteraan, *flat form* kami adalah karya nyata untuk masyarakat. Dengan segala hormat kami dikritik, tapi kami yang bernaung di Golkar

⁷ Herman

- adalah orang-orang baik. Orang-orang yang menginginkan menaungi semua golongan.
283. NS : Oke. Baik. Maaf saya harus potong.
284. (semua tertawa)
285. NS : karena Anda sudah mulai kampanye padahal belum masuk waktu kampanye. Silakan Pak Wiranto.
286. WR : Iya.
287. NS : Banyak orang yang kemudian, itu seperti tadi contohnya Pak Herman tidak melihat bahwa parpol akan menawarkan sesuatu yang baru kok.
288. WR : Itu memang realitas ya, di publik ya. Jadi apa pun kata mereka partai politik tetap harus tumbuh sebagai instrument dari demokrasi. Dan tatkala dia mati, demokrasi mati. Nah, itu problem kita sekarang.
289. NS : Mmm.
290. WR : Nah, bagaimana supaya partai-partai politik ini mewarnai demokrasi dengan suatu paradigma yang kemudian membangun kepercayaan kepada publik.
291. NS : Oke.
292. WR : Saya sudah punya terapi memang. Saya mau ngomong lagi..., hati nurani lagi kan?
293. NS : Oke. Nanti kampanye lagi. Baik.
294. WR : Iya. Tapi itulah salah satu solusinya.
295. NS : Mmm.
296. WR : Kemudian paradigma baru dimunculkan sehingga ada kepercayaan kembali dari masyarakat.
297. NS : Oke. Tapi memang susahnya untuk merubah kepercayaan tidak hanya sekadar berkata
298. WR : Iya. Makanya kita berusaha.
299. NS : atau beriklan atau mengatakan hal-hal yang macam-macam. Baik.
300. WR : Membangun partai baru tadi ya.
301. NS : Ancaman golput ini seberapa mengkhawatirkan, Mas Qodary? Kalau kita lihat misalnya contoh pilkada-pilkada yang ada, itu kan makin lama, makin banyak orang
302. MQ : Ya, memang sangat mengkhawatirkan, ya kalau kita lihat pemilu tahun sembilan-sembilan, dua ribu empat, itu *trend*-nya terus menurun, lalu kemudian ada pilkada lebih turun lagi, lalu begitu banyak kasus sekarang ini, ya, walaupun alasan golput itu bukan hanya masalah politis ya, bukan hanya ketidakpuasan kepada partai, ketidakpuasan kepada pemimpin,
303. NS : Administrasi juga ada ya?
304. MQ : tapi ada masalah teknis. Tapi, ya, kita khawatir bahwa memang *trend* pemilu legislatif tahun 2009 itu akan turun a..., di bawah yang sudah-sudah.
305. NS : Mmm. Dan itu akan mengurangi legitimasi
306. MQ : Mengurangi legitimasi siapa pun yang akan terpilih. A..., cuma begini kalaupun bicara secara umum ya, tadinya saya kan berharap bahwa ya, elit politik akan dengan kesadaran sendiri, mau menahan diri, tidak terlalu kemudian sering mendirikan partai, membuat partai. Tapi kenyataannya agak sulit. Akhirnya mungkin yang lebih realistis, Pak Wiranto,
307. WR : Ya.
308. MQ : Mas Priyo Budi Santoso, adalah kita menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, dan kemudian terbangun mekanisme *reward and punishment*
309. NS : Mmm.
310. MQ : yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kalau partainya memang jelek ya dia berkuasa akan ditendang. Atau kalau misalnya dia tidak berkuasa, tidak sempat berkuasa. Nah, akhirnya memang partai yang bisa bertahan dalam jangka waktu lama dan bisa betul-betul memperbaiki keadaan adalah partai yang betul-betul amanah kepada masyarakat. Nah, memang ini masalahnya mungkin prosesnya hanya a..., membutuhkan beberapa kali pemilu, tapi kalau elit politik yang gak sadar-sadar juga akhirnya berhadapan dengan proses semacam itu.
311. NS : Oke. Jadi harus menunggu waktu.
312. MQ : Iya.
313. NS : A..., Pak Wiranto, kalau a..., saya tau ini baru, lagi senang-senang nih,

314. WR: Iya
315. NS : karena baru lolos perifikasi cuma realistsnya, kalau dapatnya kecil, Pak. Apa nih target selanjutnya? *Plan, plan* berikutnya, *plan* B-nya apa untuk Hanura.
316. WR: Yah. Hanura kan begini.
317. PB : Kembali ke Golkar?
318. (tertawa)
319. WR: Hanura kan begini.
320. NS : Kembali ke induk, gitu ya?
321. WR: Saya membangun partai yang tidak hanya berhenti di 2009.
322. PB : Oh, ya.
323. WR: Paling tidak ya, ada satu partai dengan paradigma baru yang saya percaya bisa membangun kembali kepercayaan publik karena dia mengedepankan hati nurani. Kalau 2009 misalnya, kami belum berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, masih ada 2014, masih ada 2019.
324. NS : Mmm.
325. WR: Nggak apa-apa.
326. NS : Jadinya, jangka panjang ya Pak?
327. WR: Paling tidak saya pernah berbuat di negeri ini
328. NS : Jangka panjang.
329. WR: Membangun satu paradigma bahwa partai politik tidak seharusnya menghalalkan semua cara . Partai politik
330. PB : Pada tahun...
331. WR: tetap melakukan sesuatu dengan kebenaran dan keikhlasan.
332. NS : Uangnya masih cukup nggak itu Pak, kalau sampai 2014
333. MQ: (tertawa)
334. PB : Pak, kalau pada
335. NS : tambah mahal lho. Silakan Mas Pri.
336. PB : Kalau...
337. WR: Anda uang terus sih. Itu kesalahan fatal. Buat partai selalu basisnya uang.
338. NS : Tapi itu faktanya Pak. Itu itu realistis.
339. PB : Ya, ya. Kalau pada tahun itu, Pak, itu sudah masa kami Pak memimpin negeri ini.
340. MQ: (tertawa)
341. PB : Izinkanlah dan iklaskanlah generasi kami pada saat ini.
342. WR: Kita lihat aja Pak. Kita lihat.
343. NS : Gitu, ya? (tertawa) oke yang jelas memang, semuanya rakyat nanti yang akan menentukan,
344. WR: Iya.
345. NS : a..., pada bulan April, dari 34 parpol mana yang akan betul-betul dianggap rakyat mampu membawa aspirasi. Dan untuk itu, kita akan menunggu. Besok akan mengambil itu ya Pak, ya?
346. WR: Lotre, ya.
347. NS : Mengambil lotre, nomor undian baru setelah itu, langsung deh kampanye: Pilih nomor tertentu. Sembilan bulan waktu kampanyenya.
348. PB : Sembilan bulan.
349. WR: Sembilan bulan, ya.
350. NS : Baik. Selamat berjuang untuk Hanura, selamat berjuang untuk Golkar, selamat berjuang juga untuk semua parpol-parpol yang ada. Terima kasih banyak. Kita tunggu analisa kritis dari Anda.
351. WR: Makasih.
352. MQ: Baik.
353. NS : Pak Qodary.
354. MQ: Insyallah.
355. NS : Dan besok akan ada ini katanya ya? Apa...
356. MQ: Inyallah konfrensi pers mengenai apa, posisi partai
357. NS : Oke.
358. MQ: pada saat start kampanye sembilan bulan.
359. NS : Oke. Kita akan lihat.
360. MQ: Siapa yang di depan, siapa nomor urutnya, siapa yang di belakang.

361. NS : Bocoran dong. Hanura di belakang, di depan?
362. MQ : A..., lumayan ya, artinya pada posisi...yah kira-kira yang digambarkan beliauah tadi.
363. NS : Oke.
364. MQ : Kira-kira begitulah. Ya...h (tertawa)
365. NS : Kalau Golkar?
366. MQ : Golkar, masih pada posisi yang bagus, tapi kecenderungannya *agak* menurun.
367. NS : menurun ya?
368. MQ : Ha, ha, ha (=Ya)
369. NS : Baik. Mas Priyo mukanya langsung berubah
370. (semua tertawa)
371. WR : Kalau gak ada Mas Priyo, *agak*-nya hilang
372. (semua tertawa)
373. NS : Oke. Terima kasih sudah jadi tamu saya malam ini. Mudah-mudahan ketemu lagi. Insyallah tahun depan ketemu lagi.
374. (masih tertawa)
375. NS : Pemirsa demikianlah *To Day's Dialogue* malam ini. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan saran dan kritik ke e-mail todaydialogue@metrotvnews.com sekali lagi todaydialogue@metrotvnews.com. Saya Nazwa Shihab undur diri lagi, insyallah bertemu awal tahun depan. Selamat malam dan sampai jumpa.

AKIM080814

Judul/Topik : Bursa Pemimpin Nasional: Rizal Ramli
Deklarasikan Diri sebagai Pemimpin Perubahan
Tokoh utama : Rizal Ramli (RR)
Nama Acara : Apa Kabar Indonesia Malam
Stasiun televisi : TV One
Tanggal, bulan, dan tahun : 14 Agustus 2008
Kode Induk Data : AKIM080814,01--n

Sesi 1

1. TT¹ : *Apa Kabar Indonesia Malam* kembali bersama Anda. Saya Tina Talisa (TT).
Pemirsa kabar mengenai pemilu, ini datang dari Magelang, Jawa Tengah, karena di sana ada ribuan calon anggota legislatif yang harus memeriksa kejiwaannya sebagai syarat yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum, dan tempatnya adalah untuk Jawa Tengah di Rumah Sakit Jiwa Suroyo, Magelang; sehingga mereka berbondong-bondong hadir ke sana untuk memeriksakan kejiwaannya bahwa memang layak, memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.
(Catatan: Berita ini selanjutnya tidak akan ditranskripsikan di data ini karena tidak terkait dengan topik tayang bincang untuk tokoh Rizal Ramli.)
2. TT : Tamu kita pada malam hari ini a..., untuk segmen ini ada Pak Rizal Ramli. Selamat malam Pak Rizal Ramli.
3. RR² : Selamat malam, Tina.
4. TT : Ini kawannya adalah Bung Fadhil Hasan (FH). Selamat malam Bung Fadhil.
5. FH : Selamat malam.
6. TT : Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan buku yang diluncurkan gitu soal lokomotif perubahan. Bapak itu memang sudah mempersiapkan diri jadi capres, ya Pak, ya?
7. RR : A..., kami sebetulnya, mempersiapkan diri untuk memimpin perubahan, karena negara kita ini sudah betul-betul tertinggal dan banyak sekali dari bangsa kita yang belum hidup layak. Harus ada perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik.
8. TT : Tapi, apakah Bapak tidak melihat ada hal yang positif dari pemerintahan saat ini? Sehingga merasa ada perubahan yang luar biasa begitu, Pak?
9. RR : Ada. Saya kira ada. Tapi tentu itu bagiannya Andi Mallarangeng-lah buat bicara begitu (tertawa), sama Dino Jalal, ya. Tapi menurut hemat kami, perubahan Indonesia perlu perubahan ke arah yang lebih baik.
10. TT : Kalau berbicara perubahan, bukankah dulu pada saat pemerintahan sekarang pun Pak SBY, menjadi capres, mengusung perubahan juga. Lalu, kali ini perubahan apa yang Bapak tawarkan untuk Indonesia, untuk masyarakat, dan bangsa kita?
11. RR : A..., Tina, a..., kita sudah 63 tahun merdeka, a..., reformasi sudah 10 tahun, tapi hanya sebagian kecil dari bangsa kita, yang telah menikmati arti dari kemerdekaan. Mayoritas lebih dari 80 persen hidup saja susah. Nah, kami ingin agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan.
12. TT : Caranya, Pak?
13. RR : Caranya, tinggalkan jalan lama, di dalam bidang ekonomi yang 40 tahun dianut sejak orba sampai saat sekarang ini dan ternyata gagal membawa kesejahteraan untuk mayoritas bangsa ini.
14. TT : Apa tawaran jalan baru dari Bapak?

¹ Tina Talisa

² Rizal Ramli

15. RR : Jalan baru itu adalah jalan antineokolonialisme. Yaitu jalan yang kita tidak mau diatur, dicengkram oleh kekuatan asing yang menentukan strategi apa yang harus kita anut di dalam bidang ekonomi dan tidak mengutamakan kepentingan nasional.
16. TT : Mungkin...
17. RR : Saya bikin contoh.
18. TT : Oke. Gimana contohnya, Pak?
19. RR : Saya berikan contoh. Indonesia ini kaya sekali sumber daya alamnya.
20. TT : Kita tau itu, Pak.
21. RR : Tetapi faktanya industri kita tidak bisa cari gas, PLN tidak ada gas, bahkan rakyat disuruh dari tadinya, apa namanya ini, pake minyak tanah, pindah ke gas, gasnya nggak ada. Kenapa? Karena ada undang-undang migas yang mengatakan salah satu pasalnya Indonesia hanya boleh menggunakan maksimum 25 persen dari gas yang dihasilkan.
22. TT : Oke itu adalah undang-undang.
23. RR : Ini adalah bentuk daripada neokolonialisme.
24. TT : Ya. Itu adalah undang-undang. Kalau undang-undang itu kan DPR yang buat, Pak, dan pemerintah. Tapi, kalau Bapak tidak jadi pemerintah; nggak jadi anggota DPR, gimana mau merubahnya, Pak?
25. RR : Ya, saya kira tidak cukup hanya sekadar DPR dan jadi pemerintah, ya, karena kalau tidak ada visi, visi yang lebih berdaulat untuk Indonesia, maka walaupun kita kaya sekali, tetapi rakyat kita tidak dapat menikmatinya.
26. TT : Mungkin nggak, Bang Fadhil kita betul-betul lepas dari tangan asing, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan negara asing dalam ekonomi kita?
27. FH³ : Saya kira persoalannya itu bukan masalah lepas atau tidak lepas. Sebab persoalannya itu adalah ketergantungan yang selama ini dihadapi, dialami oleh bangsa Indonesia ini dari kepentingan-kepentingan asing, gitu. Kalau keterkaitan, link ke GIS perekonomian dunia itu saya kira sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Tapi bagaimana menciptakan saling ketergantungan. Selama ini yang terjadi adalah ketergantungan kita terhadap mereka,
28. TT : Tapi mungkinkah mimpinya Pak Rizal Ramli itu terwujud, begitu?
29. FH : bukan saling ketergantungan. Ya?
30. TT : Mimpi Pak Rizal Ramli terwujud?
31. FH : Saya kira begini. Kalau kita lihat, saya kira sekarang ini memang ada satu keinginan yang kuat, ya, dan pesan yang jelas, ya, dari masyarakat kebanyakan yang menginginkan adanya satu perubahan, ya. Karena perubahan yang pernah dijanjikan itu ternyata tidak terjadi, tidak teralami oleh kita semua, gitu kan? Terutama oleh masyarakat yang menengah ke bawah ini, gitu kan? Nah, pesan ini, ya, aspirasi ini yang sangat kuat di a..., dalam masyarakat ini, itu kan kemudian a..., perlu disalurkan, kan gitu kan? Nah, saya kira kita memerlukan, kita perlu mendorong, ya; mendesak agar perubahan ini terjadi, gitu. Nah,
32. TT : Kenapa yang mendesaknya kepada yang berkuasa sekarang begitu?
33. FH : Ya kita mendesak dalam pengertian kepada yang sekarang juga berkuasa, dan juga kepada, apa namanya, komponen bangsa ini secara keseluruhan.
34. TT : Gini nih, pilihannya. Kalau pilihannya adalah meneruskan yang sudah dilakukan oleh yang berkuasa sekarang atau ada orang baru, Bung Fadhil pilih mana?
35. FH : Saya kira sekarang ini, ya, ada tren, gitu ya, ada kecenderungan orang itu memilih yang baru. Coba aja lihat pilkada-pilkada yang sekarang terjadi. Pak Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf di Jawa Barat. Itu merupakan figur baru yang sama sekali belum dikenal, ya, melawan figur-figur lama yang sudah terkenal, ya, dikenal secara nasional, mereka kalah. Kemudian juga di, apa namanya ini, di Sulawesi Selatan juga demikian, kemudian di beberapa tempat yang lain. Pilkada pula menunjukkan bahwa memang saya kira arus perubahan ini sesuatu yang sangat real sekarang ini.
36. TT : Oke, Bang Fadhil kita lanjutkan, Pak Rizal Ramli kita lanjutkan, karena memang ujung-ujungnya kita jadi berpikir Pak Rizal Ramli ini akan menambah daftar

³ Fadhil Hasan (pengamat ekonomi)

panjang bursa orang-orang yang bernafsu menjadi presiden atau penguasa. Sesaat lagi dalam *Apa Kabar Indonesia Malam*.

Sesi 2

37. TT : *Apa Kabar Indonesia Malam* kembali bersama Anda. Pak Rizal, Anda ketawa-ketawa melihat Bang One tadi, begitu ya?
38. RR : (tertawa) Iya, karena Tina, ini lucu sekali karena yang dijual itu hanya simbol-simbol, yang dijual hanya baliho, karena sebetulnya rakyat Indonesia perlu isi. Apa sih perubahan yang ingin dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana caranya.
39. TT : Jadi Anda menyindir calon-calon pemimpin lain, begitu, yang berusaha menempel baliho besar-besar?
40. RR : Yah, saya pikir bukan itu. Tetapi bahwa proses penyadaran itu penting.
41. TT : Caranya gimana, Pak? Bukankah itu akan membantu dengan memasang baliho, menawarkan harapan yang baik bagi, masyarakat begitu.
42. RR : Itu hanya pemik-pemik, simbol-simbol.
43. TT : Jadi, apa yang akan Bapak lakukan dong?
44. RR : Kami sudah lakukan,
45. TT : Ingin jadi lokomotif perubahan, tapi apa konkretnya, begitu, Pak?
46. RR : Kami,
47. TT : Kalau rakyat pun nggak tau apa yang akan Bapak lakukan?
48. RR : Kami sejak lima bulan yang lalu, misalnya bertemu dengan ribuan petani di Lombok, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan mahasiswa dan kalangan akademik dan kalangan bisnis. Kemudian kami masuk di daerah Tapak Kuda, bicara juga dengan ribuan petani, pengusaha, berbagai lapisan masyarakat.
49. TT : Kalau bicara aja sih, semua orang bisa gitu, Pak. Tapi hasil akhirnya apa ya kira-kira?
50. RR : Ya. Oleh karena itu, penting untuk melihat *track record* seseorang. Karena kalau orang hanya janji-janji, jejak rekamnya nggak jelas, itu rakyat pasti akan dikecewakan.
51. TT : Oke. Sekaran supaya rakyat nggak dikecewakan, musti ada hasilnya.
52. RR : Mesti ada,
53. TT : Musti ada hasil, dari hasil mereka bicara. Tapi, apa yang bisa mereka dapatkan, yang Bapak janjikan kepada mereka kalau Bapak juga nggak jadi penguasa, begitu. Tujuannya katanya bukan jadi penguasa.
54. RR : Saya kira begini. Kita lihat jejak rekam seseorang: apakah dalam karier hidupnya itu dia betul-betul berjuang untuk memperbaiki, melakukan perubahan. Saya berikan contoh. Saya pernah waktu saya jadi menko menghasilkan uang untuk negara 4,2 triliun rupiah, tanpa menjual satu lembar pun saham Telkom dan Indosat. Cara terobosan. Bagaimana PLN yang modalnya negatif: minus 9 triliun kita ubah, kita benahi modalnya naik menjadi 119 triliun, tanpa menyuntikkan satu rupiah pun.
55. TT : Oke. Tapi kalau Bung Fadhil, ini. Prestasinya luar biasa banyak. Cukupkah itu begitu?
56. FH : Mmm. Saya kira gini, ya.
57. TT : Hanya, hanya, hanya pengalaman pada saat menjadi menko?
58. FH : Jadi, kalau kita lihat *track record*, a..., kompetensi, pengalaman Mas Rizal, saya, tidak ada satu orang pun yang meragukan dan mempertanyakan itu.
59. TT : Tetapi,
60. FH : Masalahnya sekarang ini kan, perubahan itu memang memerlukan satu a..., kelembagaan, gitu kan. Dan di kita ini yang efektif untuk perubahan itu, kalau kita misalnya memang menjadi *policy makers*, kan gitu. Yang tertinggi, gitu. Nah, di sini saya kira pentingnya, saya kira, dalam sistem dan atau mekanisme rekrutmen kepemimpinan nasional itu, itu harus diciptakan sebuah mekanisme yang terbuka. Kita tau, ya, bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden, itu kan harus melalui jalur partai, ya kan. Nah, sementara kalau kita tidak di partainya itu sendiri; dikuasai oleh *oligarchy*, beberapa elit partainya saja tidak memungkinkan orang lain luar itu masuk, gitu. Jadi saya kira yang setelah misalnya, ada proses penyadaran, gerakan

- penyadaran, itu harus ada satu mekanisme, ya, di mana terbuka, ya, a... calon-calon atau kandidat-kandidat yang menginginkan perubahan itu masuk ke dalam,
61. TT : Catatan bagi saya adalah dari Bapak Fadhil tadi, adalah tidak mungkin melakukan perubahan kalau tidak menjadi *policy maker*. Sehingga Bapak juga percuma, gitu Pak, teriak-teriak perubahan ntar kalau nggak *policy maker*, Pak.
62. RR : Saya kira belum tentu. Kami pernah ada kasus-kasus, misalnya kami kampanye dengan teman-teman untuk menghentikan program IMF, dan pemerintah, dan MPR setuju, akhirnya menghentikan program IMF.
63. TT : Termasuk Bapak turun ke jalan, gitu, menentang kenaikan harga BBM lalu ada kawan Bapak tertangkap, begitu, oleh polisi? (tersenyum)
64. RR : Nda.
65. FH : (tertawa)
66. RR : Hasil yang paling besar hak angket akhirnya disetujui di DPR dan dengan hak angket ini akan terbuka nanti berbagai kebengsekkan, berbagai mafia, yang merugikan rakyat kita.
67. TT : Tapi, jangan-jangan pada saat membuka kebengsekkan mafia ada nama Bapak di dalamnya, gitu, pada saat Bapak masuk pemerintahan sebagai menko perekonomian?
68. RR : Ya, saya kira orang yang mengenal saya, jelas *track record*-nya apa, ya, reputasi kami, a..., kalau itu sih kami nggak perlu khawatir.
69. TT : Oke (tertawa). Kita lanjutkan nanti, ya, Pak, ya.
70. RR : Ya, tetapi...
71. TT : Mengenai apa sih konkretnya, begitu, buat masyarakat; bentuk yang akan Bapak tawarkan perubahan? Jadi *policy maker*, nggak mau, gabung ke parpol kayaknya juga belum ada, lalu gimana caranya, ya? Sesaat lagi dalam *Apa Kabar Indonesia Malam*.

Sesi 3

72. TT : Tina Talisa kembali bersama Anda dalam *Apa Kabar Indonesia Malam*. Pak Rizal Ramli ini. Sebetulnya Anda, ada buku ini nih: Lokomotif a..., Perubahan, begitu. Langkah strategis dan terobosan kebijakan 2000 hingga 2001. Apakah, jangan-jangan sebenarnya ini hanya bentuk kekecewaan Anda karena didepak dari komisaris utama Semen Gersik?
73. RR : A..., itu terlalu kecil, Tina ya. Karena a..., selama dua tahun kami memimpin Semen Gersik, belum pernah keuntungannya, kinerjanya sebaik ini. Mengalahkan dua kompetitor asing, tingkat keuntungannya tinggi sekali, dirating oleh MUDI ratingnya dua tingkat di atas Republik Indonesia. Jadi, memang satu *achievement* yang lumayan bagus.
74. TT : Tapi kan bukan kerja Bapak seorang dong, Pak.
75. RR : Itu kerja tim memang, tetapi mungkin pemerintah khawatir dengan pendapat-pendapat kami yang kritis, khawatir dengan, a..., sikap kami, a..., terhadap establishment akhirnya dipecah, a..., tetapi buat kami terlalu kecil itu. Karena yang lebih penting, Indonesia, a..., harus berubah supaya rakyat dan bangsanya bisa lebih baik.
76. TT : Caranya Pak. Kalau tadi kan disampaikan, kata Bung Fadhil
77. RR : Caranya,
78. TT : nggak bisa kalau nggak jadi *policy maker*. Sekarang capres masih dari parpol. Kira-kira partai mana yang lirik Bapak?
79. RR : Tina, caranya sederhana. Sekarang itu rakyat sudah betul-betul nggak suka dengan empat L: lu lagi-lu lagi.
80. (TT dan FH tertawa)
81. RR : Ya. Dan ternyata betulkan? Di tujuh provinsi tokoh-tokoh yang tidak dikenal yang namanya disebut last minute mengalahkan Gubernur yang sedang berkuasa, mengalahkan jenderal.
82. TT : Tapi SBY sama Megawati masih dua tertinggi popularitasnya lho, Pak. Jangan salah.

83. RR : Itu kan saat ini, ya kan? Menurut saya itu suatu hal yang dinamis, rating bisa berubah.
84. TT : Jadi, benar kan juga saya, sebetulnya kalau Bapak itu
85. RR : Yang paling penting,
86. TT : ingin jadi capres, begitu kan?
87. RR : Yang paling itu proses penyadaran dulu. Karena kalau rakyat sadar, dia akan menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik.
88. TT : Jadi, konkretnya apa sih, Pak? Bapak bilang secara garis besar, "Pokoknya antineokolonialisme." Janji, janji konkretnya apa buat rakyat?
89. RR : A..., saya tidak perlu
90. TT : BBM harganya turun, misalnya, atau apa sehingga kalau gini kan ngawang-ngawang begitu, Pak.
91. RR : Saya tidak perlu memberikan janji, karena yang telah ternyata yang banyak memberikan janji malah ngibulin rakyat melulu, ya. Yang penting lihat *track record* seseorang karena itu bisa jadi alat predictor untuk memperkirakan kalau misalnya, yang bersangkutan, ya kan, jadi sesuatu apa atau apa. *Track record* seseorang,
92. TT : Tapi ujung-ujungnya pengen jadi sesuatu juga kan, Pak?
93. RR : Ya. Memimpin perubahan. Itu yang paling penting.
94. TT : Oke. Ini Bung Fadhil lagi ini. A..., tidak ada janji konkret, begitu, dari a..., Bang Rizal Ramli, hanya minta lihat *track record*-nya. Tapi apakah itu juga bisa dilahap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Cara seperti...
95. FH : Ya mungkin belum saatnya sekarang Mas Rizal memberikan sesuatu yang lebih konkret. Tapi yang lebih penting buat saya itu adalah a..., dalam sistem kepartaian kita itu, partai-partai itu harus memiliki sesuatu mekanisme *recruitment*, ya. Baik untuk menteri, baik untuk...terutama untuk yang ??*alecrik official*: presiden, itu yang lebih terbuka, ya, sehingga potensi-potensi yang di luar partai yang selama ini banyak seperti Mas Rizal itu bisa terakomodasi. Kalau sekarang ini berjalan, ya, seperti ini, a..., mekanismenya, maka orang-orang seperti Mas Rizal, nggak mungkin masuk ke dalam mekanisme itu.
96. TT : Tapi wajar dong kalau parpol mengutamakan kader internal, begitu.
97. FH : Tapi kalau misalnya ada konvensilah, ada, di Amerika itu namanya, *play miry*, gitu ya, masing-masing calon internal partai itu bersaing, ya, sehingga bisa ditentukan siapa yang mewakili partai tersebut dalam sebuah pemilihan yang demokratis. Itu lebih baik. Gitu. Jadi, saya kira kita harus mendorong ya, partai untuk memiliki mekanisme seperti ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh Golkar di tahun 2004 yang lalu.
98. TT : Meskipun sekarang udah nggak lagi gitu ya? Nggak ada konvensi.
99. FH : Meskipun sekarang nggak lagi.
100. TT : (tertawa) Terima kasih Bung Fadhil. Pertanyaan terakhir saya buat Pak Rizal Ramli. Kapankah Bapak akan mendeklarasikan diri secara eksplisit bahwa Bapak itu sebenarnya "mau apa", begitu. Capreskah?
101. RR : Saya kira begini ya Tina. Enam bulan terakhir kami bicara langsung dengan rakyat di *grass root* a..., petani dan macam-macam, mereka jelas kok. Begitu kami menjelaskan, "Oh, ini dia perubahan yang kita inginkan.", "Oh, ini dia jalan bagaimana menyelesaikan masalah di dalam pertanian." Jadi, a..., jangan terperangkap dengan kenderaan politik. Itu tugasnya partai politiklah. Tugas kami adalah menjelaskan, memberikan, proses penyadaran, bahwa ada jalan untuk membuat Indonesia ini menjadi negara besar.
102. TT : Meskipun Bapak begitu diincar polisi saat ini, begitu?
103. RR : Kalau itu kami nggak pernah khawatir, ya. Karena tadi juga buku ini di *launching* tadi pagi jam 10, kami terima panggilan dari polisi untuk diperiksa, ya.
104. TT : Bapak mangkir?
105. RR : Saya nggak mangkir. Tapi malah mengirimkan undangan kepada kepala Baleskrim, a..., Jenderal Polisi Bambang Hendarso, dan Direktur Pemeriksaan Reserse Satu, Bachtiar Tambunan untuk sekalian hadir di acara kami, ya.
106. TT : Jadi, diperiksanya pada saat *launching*, gitu Pak?
107. RR : Ya. Memang beliau mengirimkan reserse dan saya kira reserse setelah mendengarkan itu, saya cukup yakin mereka juga ingin perubahan.

108. FH : (tertawa)

109. TT : Oke (tertawa). Tapi menurut saya, polisi tidak akan berpikir untuk tidak melanjutkan pemeriksaan kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak Rizal Ramli. Terima kasih banyak Bang Fadhil Hasan, tetapi juga ini barangkali akan jadi-- buat saya, buat pemirsa juga--akan berpikir semakin banyak orang yang menawarkan perubahan. Kita tinggal lihat, siapa yang benar-benar akan mewujudkan perubahan itu. Ini merupakan akhir perbincangan kita di *Apa Kabar Indonesia Malam*, hari ini. Esok saya akan kembali bersama Anda. Saya Tina Talisa, Selamat malam.

